

# INVENTARISASI SUMBER SEJARAH MASA ORDE BARU SAMPAI REFORMASI (TAHUN 1966 - 1998)

Direktorat  
Budayaan

37

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

00177.3

NIPK 58

**INVENTARISASI SUMBER SEJARAH  
MASA ORDE BARU SAMPAI REFORMASI  
(TAHUN 1966 - 1998)**

33

959 8057

SUH

i

Tim Peneliti

Suhatno

Drs. H. Ramli Nawawi

Yustina Hastrini N.S.S

Drs. Suwamo

Kiriman

Pimpro P2KD DIY th 2004

2-8-2004

Milih Asdep Tradisi

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA  
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2003



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah DIY dapat menerbitkan buku *Inventarisasi Sumber Sejarah Masa Orde Baru - Reformasi (1966-1998)*. Buku tersebut ditulis oleh Suhatno, BA, dkk, Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Inventarisasi Sumber Sejarah mempunyai sumbangan besar dalam meluruskan penulisan sejarah. Sumber sejarah, terutama peristiwa lokal dengan menekankan sumber lisan maupun tertulis dari para tokoh sudah selayaknya mendapat perhatian serius. Karena untuk menjaga kemurnian sumber-sumber tersebut dari pembelokan, sehingga generasi penerus akan mendapatkan hal-hal yang benar dan faktual.

Berkaitan hal tersebut, buku inventarisasi sumber sejarah ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga dapat mengetahui perjalanan sejarah suatu bangsa di masa lampau.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.



Pemimpin Proyek

Dra. Sumintarsih, M. Hum.  
NIP 131126661

## SAMBUTAN KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diiringi rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa saya menyambut baik diterbitkannya buku *Inventarisasi Sumber Sejarah Masa Orde Baru - Reformasi (1966-1998)*. Buku tersebut ditulis oleh Suhatno, BA., dkk, Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Sejarah adalah kisah masa lampau sekaligus sebagai gambaran yang tersusun berdasarkan peristiwa. Namun demikian kita sadari sepenuhnya bahwa kisah yang disusun itu adalah upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh penyusun kisah yang sesuai dengan *persepsi, apresiasi dan interpretasi*. Sehubungan dengan itu upaya untuk merekam dan mendokumentasi peristiwa sejarah masa lalu dengan mendengarkan langsung dari sumber pelaku sangat penting dan perlu dilakukan. Oleh sebab itu inventarisasi yang telah dilakukan ini sebagai langkah konkret pemerintah untuk menghimpun sumber-sumber sejarah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah DIY beserta tim peneliti, kami ucapkan terima kasih atas prakarsa dan jerih payahnya, sehingga hasil inventarisasi ini dapat terbit dan selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala

*Taryati*  
Dra. Taryati  
NIP 130676861

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                         | iii     |
| SAMBUTAN .....                                                                                               | v       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                             | vii     |
| BAB I   Pendahuluan .....                                                                                    | 1       |
| <br>BAB II   Inventarisasi Sumber Tertulis Dari Masa Orde Baru<br>Sampai Reformasi (Tahun 1966 - 1998) ..... | <br>5   |
| A. Buku .....                                                                                                | 5       |
| B. Artikel .....                                                                                             | 70      |
| <br>BAB III   Inventarisasi Sumber Lisan Dari Masa Orde Baru<br>Sampai Reformasi (Tahun 1966 - 1998) .....   | <br>115 |
| <br>BAB IV   Penutup .....                                                                                   | 233     |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                     | 235     |
| <br>DAFTAR INFORMAN .....                                                                                    | 241     |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam metodologi sejarah dikenal adanya sumber sejarah yang utama yaitu sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan berupa rekaman suara dari suatu peristiwa, rekaman suara dari para pelaku atau saksi suatu peristiwa sejarah, pidato-pidato dan sebagainya. Sedangkan sumber tertulis antara lain berupa arsip, dokumen, catatan-catatan harian, majalah, surat kabar, buku-buku yang berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah dan sebagainya.<sup>1</sup>

Upaya penggalan sumber lisan pernah dilakukan oleh para sejarawan Indonesia pada tahun 1970-an yang dikelola oleh Arsip Nasional Indonesia (ANRI). Hasil dari penggalan sumber lisan yang berupa suara narasumber, para saksi sejarah dalam pita tape recorder yang dilakukan oleh pewawancara dan ditranskrip sebagai kelengkapannya merupakan hal yang penting sebagai penyedia sumber lisan. Semua ini dapat memperkaya penulisan sejarah secara substantif yang akan sangat berguna dalam penelitian dan pendokumentasian.<sup>2</sup>

Penggalan sumber lisan dengan melakukan wawancara serta merekam suara para pejuang pelaku atau saksi sejarah dalam program ini mengacu pada inventarisasi sumber sejarah yang menekankan pada kenangan dan pengalaman para tokoh pejuang dalam perjuangannya pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai Reformasi tahun 1998 yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini kiranya akan sangat bermanfaat bagi pembangunan substansi penulisan sejarah kontemporer Indonesia yang belum terjangkau sampai saat ini. Sebenarnya banyak materi dari para pelaku sejarah tidak disebutkan dalam dokumen atau sumber-sumber tertulis. Hal ini disebabkan karena dokumen sejarah hanya mengutarakan sebagian kecil dari sejarah perjuangannya. Masih banyak sisi-sisi lain yang ada dibalik perjuangannya yang belum terungkap. Sehubungan dengan itu melalui inventarisasi sumber sejarah akan banyak manfaat yang diperoleh karena dengan demikian akan banyak didapat keterangan baru baik sebagai *sosiofact* maupun *mentifact* yang diungkapkan oleh para pelaku sejarah.<sup>3</sup>

1 Materi Kursus Kesejarahan Tahun 2001 di Jakarta tentang Sumber Sejarah (tidak diterbitkan).

2 Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM dan PT. Tiara Wacana, 1994), hal.22

3 Patrick Gardiner, *The Nature of Historical Explanations*, (Oxford: Clarendon, 1961), hal.10-30.

Sedangkan untuk mendapatkan sumber tertulis kita berusaha mendapatkan dari para pelaku dan saksi sejarah yang mungkin masih ada pada pribadi masing-masing. Kecuali itu masih dimungkinkan adanya buku-buku, surat kabar, majalah yang terbit saat itu, dokumen-dokumen, brosur dan pamflet, corat-coret sketsa gambar, foto-foto ataupun puisi-puisi yang dibuat oleh para pelaku yang mana hal itu juga merupakan salah satu sumber sejarah primer yang bisa melengkapi tulisan-tulisan yang telah ada.

## **B. Masalah**

Inventarisasi sumber sejarah dapat dikatakan mempunyai sumbangan besar dalam mengembangkan penulisan sejarah terutama dalam mengkaji sejarah kontemporer Indonesia periode 1966 – 1998 (Periode Orde Baru sampai Reformasi). Dalam inventarisasi sumber sejarah ini menekankan pada perjuangan (sosial politik, ekonomi, budaya) masyarakat pada periode itu di DIY.

Di dalam melakukan inventarisasi sumber sejarah ini, sejarawan harus kritis dalam menggali sumber lisan melalui wawancara dengan pelaku sejarah sehingga nuansa materi dan keterangan yang diungkapkan para pelaku sejarah dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya sebagai sumber sejarah.<sup>4</sup> Oleh karena itu perlu ditanyakan bagaimana kenangan-kenangan baik suka maupun duka dari para pelaku tersebut selama keikutsertaannya dalam perjuangan. Juga pengalaman-pengalaman para pejuang yang masih banyak belum terungkap. Kecuali itu perlu ditanyakan pula adakah masih menyimpan dokumen pribadi atau buku-buku yang bisa menjadi fakta baru serta mendukung fakta yang telah ada. Melalui program inventarisasi sumber sejarah ini dapat mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut.

## **C. Tujuan**

1. Mengungkap peristiwa lokal dengan menekankan penggalian sumber lisan melalui perekaman dan wawancara maupun sumber tertulis untuk memberi sumbangan bagi penulisan sejarah, *history of written*. Dengan demikian inventarisasi sumber sejarah ini akan bermanfaat bagi penulisan sejarah perjuangan periode 1966 – 1998 (Orde Baru – Reformasi).
2. Mendokumentasikan dalam bentuk rekaman kaset dan foto serta arsip

<sup>4</sup> Willa K. Baum, *Oral History for The Local Historical Study*, (Nashville, Tennessee: American Association for State and Local History, 1977), hal.3-15

yang selanjutnya dapat memberi kontribusi peristiwa lokal dalam rangka melengkapi penulisan sejarah nasional.

#### **D. Metode**

Di dalam melakukan inventarisasi sumber sejarah ini menggunakan metode sejarah dengan teknik wawancara. Sejarawan menyeleksi narasumber sebagai *eyewitness* yang akan diwawancarai dengan menggunakan tape recorder untuk merekamnya. Kemudian hasil wawancara dalam kaset akan ditranskrip sehingga akan didapat selain dokumentasi berupa rekaman suara juga dilengkapi dengan transkripsinya. Ini semua bisa menjadi sumber lisan bagi pengguna.

Kecuali itu juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan sumber arsip berupa dokumen, surat kabar, majalah yang terbit saat itu, catatan harian para pelaku dan saksi sejarah, corat-corek sketsa gambar, foto-foto maupun puisi dan lirik lagu yang dibuat oleh para pelaku maupun buku-buku yang memuat kejadian saat itu.

Selanjutnya akan dilakukan kritik sumber baik ekstern maupun intern. Setelah itu akan dilaksanakan pengolahan data dan pendokumentasian sesuai dengan kriteria mana yang sumber lisan, mana yang sumber tertulis. Dengan demikian akan memudahkan bagi siapa saja yang akan menggunakan sumber tersebut.

#### **E. Ruang Lingkup**

Di dalam melakukan inventarisasi sumber sejarah ini akan dibatasi ruang lingkupnya. Ruang lingkup waktunya yaitu 1966 – 1998. Tahun 1966 merupakan tahun bangkitnya Orde Baru dan tahun 1998 merupakan tahun dimana Reformasi dimulai. Adapun ruang lingkup wilayah meliputi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan ruang lingkup materi meliputi bagaimana proses perjuangan sosial politik, ekonomi, budaya, masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II**

### **INVENTARISASI SUMBER TERTULIS DARI MASA ORDE BARU SAMPAI REFORMASI (TAHUN 1966 - 1998)**

Sejarah adalah peristiwa masa lampau sekaligus kisah yang tersusun berdasarkan peristiwa. Namun disadari sepenuhnya bahwa kisah yang disusun itu adalah upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh penyusun kisah yang sesuai dengan persepsi, apresiasi dan interpretasinya. Ketiga hal itulah yang antara lain menyebabkan kita sering memperoleh sajian kisah yang berbeda dari masa lampau dalam kurun waktu yang sama. Peristiwa masa lampau yang masih meninggalkan jejak atau penunjuk bagi kita boleh dikatakan sangat sedikit dan tidak merupakan suatu kesinambungan yang jelas, tersebar di berbagai tempat dan tidak pernah lengkap.

Sehubungan dengan itu upaya inventarisasi sumber sejarah yang berupa sumber tertulis perlu dilakukan. Kegiatan inventarisasi sumber sejarah ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan kajian mengenai sumber tertulis di daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi berbagai peristiwa sejarah kontemporer yaitu masa Orde Baru sampai Reformasi. Dengan demikian inventarisasi sumber sejarah yang berupa sumber tertulis akan bermanfaat bagi penulisan sejarah perjuangan periode Orde Baru sampai Reformasi (Tahun 1966 - 1998).

Di bawah ini buku-buku atau artikel yang memuat keterangan mengenai masa Orde Baru sampai Reformasi.

#### **A. BUKU**

- |               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Judul Buku | : Kebangkitan Orde Baru Di Yogyakarta                                  |
| Penulis       | : Drs. Darto Harnoko, Drs. Markhaban Fakkiah,<br>Drs. Adaby Darban, SU |
| Penerbit      | : Yayasan Tunas Bangsa                                                 |
| Kota Terbit   | : Yogyakarta                                                           |
| Tahun Terbit  | : 1996                                                                 |
| Cetakan       | : I                                                                    |

#### **A. Materi Yang Diambil:**

Bab II Latar Belakang Kebangkitan Orde Baru Di  
Yogyakarta.

Pada bab II ini berisi tentang kondisi sosial, ekonomi dan politik di

Yogyakarta sebelum meletus G30S/PKI. Kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada tahun 1957-1965 merupakan perpaduan antara kehidupan sosial ekonomi dan politik sisa-sisa dari Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Parlementer terkenal dengan sistem multipartai yang ternyata mengakibatkan pertentangan politik dan ideologi yang semakin meningkat.

Dalam pemilihan DPR tahun 1955, PKI muncul sebagai partai tunggal terbesar mengalahkan PNI dan Gerinda. Dari seluruh perwakilan DPR propinsi, kota dan kabupaten di seluruh DIY, PKI menduduki tempat pertama dengan 64 kursi, kedua PNI dengan 37 suara, ketiga Masyumi dengan 29 kursi dan Gerinda dengan 26 kursi. Munculnya partai-partai politik di Yogyakarta mempunyai pengaruh terhadap kesatuan masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Sejak bulan Desember 1958 seluruhnya ada 411 organisasi yang ada di Yogyakarta. Organisasi ini terdiri dari 21 partai politik, 37 organisasi pemuda, 18 organisasi wanita, 102 serikat buruh dan serikat pekerja dari 56 organisasi yang bergerak dalam kebatinan.

Perkembangan sosial politik pada tahun 1965 di Yogyakarta menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat. Akibat peristiwa G30S/PKI menjadikan kewaspadaan dan kesiap siagaan rakyat dan seluruh keamanan baik di pusat maupun di daerah. Siswosumarto selaku pimpinan DPR Gotong Royong Yogyakarta menyerukan kepada rakyat untuk menciptakan keamanan di DIY, memperkokoh persatuan nasional, menjelaskan supaya jangan menaruh balas dendam kepada segenap kekuatan revolusioner. Ia juga menyerukan agar pemerintah DIY menekan harga barang kebutuhan pokok.

Pada tahun 1957 keadaan ekonomi di Yogyakarta banyak mengalami kekurangan beras. Kemudian pada tahun 1958-1959 pemerintah banyak memberi perhatian dalam bidang perekonomian, keuangan serta pertanian. Pada tahun 1960 di Yogyakarta dibentuk Komando Operasi Gerakan Makmur. Adapun tujuannya untuk meningkatkan dan memperbaiki produksi bahan makanan guna melengkapi kebutuhan rakyat sesuai program pemerintah mengenai sandang pangan. Di bidang perindustrian di Yogyakarta menunjukkan suatu peningkatan pada tahun 1961-1965.

Pada bab II ini juga membicarakan "pengaruh ketidakstabilan harga terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Yogyakarta". Pada tahun 1956-1965 produksi beras yang dihasilkan oleh petani di Yogyakarta tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Hal ini disebabkan adanya serangan hama tikus, musim kemarau panjang, jumlah penduduk yang meningkat tidak disertai peningkatan jumlah produksi serta pengaruh partai politik seperti PKI, BTI yang melarang membunuh tikus. Ketidakstabilan harga beras mempunyai

pengaruh yang cukup besar terhadap penduduk Yogyakarta. Kekurangan beras menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan bagi penduduk terutama rakyat kecil dan petani yang tidak mempunyai tanah. Pada tahun 1956-1965 untuk mendapatkan beras sangat sulit, maka pemerintah DIY mendesak pemerintah pusat meminjamkan uang untuk mengadakan persediaan beras dan mengadakan stabilitas harga beras. Kecuali itu pemerintah DIY juga mendirikan koperasi di desa-desa dan kampung-kampung. Bagi rakyat kecil di Yogyakarta dengan adanya kenaikan harga beras semakin menambah beban hidup yang berat. Mereka harus antri untuk memperoleh beras dengan harga murah (Hal.1 - 36).

Bab IV berjudul Memperjuangkan Tritura. Pada bab ini berisi tentang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pelajar, mahasiswa menuntut dibubarkannya PKI. Pada tanggal 10 Januari 1966 para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI mengadakan demonstrasi. Ini merupakan demonstrasi yang pertama kali. Demonstrasi menuntut tiga hal yaitu: 1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya; 2) Rombak Kabinet Dwikora dan 3) Turunkan harga. Ketiga tuntutan ini dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Perjuangan mahasiswa yang mendapat dukungan rakyat segera diikuti oleh para pelajar, pemuda. Para pelajar, pemuda ikut turun ke jalan berdemonstrasi setelah organisasi pemuda, pelajar membentuk Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) pada tanggal 9 Februari 1966. Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno membentuk Kabinet Gestapu dengan menteri-menteri yang berindikasi PKI. Aksi mahasiswa dan pemuda, pelajar terus berlangsung dengan model baru yaitu berupa aksi kempes ban kendaraan agar lalu lintas macet. Tujuannya agar upacara pelantikan Kabinet Dwikora yang disempumakan dapat digagalkan. Demonstrasi aksi kempes ban ini terjadi pada tanggal 24 Februari 1966. Melihat hangatnya situasi saat pelantikan kabinet, petugas keamanan di sekitar istana melepaskan tembakan ke arah demonstran. Korban mulai berjatuhan yaitu Arif Rahman Hakim, Zubaidah, Zainal Zakse.

Pada tanggal 25 Februari 1966 Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan bernomor Kogam 041/66 yang menyatakan KAMI dibubarkan. Keputusan ini ditentang oleh semua kekuatan yang anti PKI. Bahkan KAMI Yogyakarta dalam pernyataannya tanggal 26 Februari 1966 memprotes keras dan tidak menyetujui pembubaran KAMI. Pada tanggal 7 - 10 Maret 1966 seluruh potensi mahasiswa, pemuda dan pelajar turun ke jalan berdemonstrasi. Para demonstran berusaha keras untuk menolak kedatangan Menteri PDK Drs. Sumarjo yang PKI datang ke Yogyakarta. Demonstrasi tanggal 10 Maret 1966 mempunyai sasaran yang dituju pertama kali adalah Gedung Balaikota di jalan KHA. Dahlan guna menemui Walikota Purwokusumo.



Demonstrasi dan aksi KAMI/KAPPI semakin meningkat setelah merasa ditandingi Barisan Sukarno. Pada tanggal 10 Maret 1966 massa berkumpul di halaman Masjid Besar Kauman. Menurut rencana para demonstran akan bergerak menuju Kepatihan melalui pintu gerbang Masjid Besar. Aparat keamanan sudah berjaga-jaga dan membuat penjagaan pagar betis di sekitar Alun-alun. Ketika diketahui massa akan bergerak, terdengar letusan senjata api dengan maksud untuk mencegah massa jangan sampai bergerak. Ternyata diluar dengan aparat keamanan, massa bergerak menjebol lewat pintu selatan menuju jalan jagang Kauman. Dalam waktu sekejap, jagang Kauman menjadi lautan manusia. Tembakan-tembakan senjata api mulai terdengar dari berbagai penjuru. Suara tembakan sama sekali tidak menggetarkan para demonstran. Akhirnya kedua belah pihak tidak bisa mengendalikan diri. Tiga orang demonstran luka parah. Dua orang diantaranya tidak dapat ditolong dan akhirnya gugur yaitu Aris Munandar pelajar SMP Muhammadiyah I dan Margono pelajar SPG Muhammadiyah I. Sedangkan yang berhasil diselamatkan adalah Sidik Basuki pelajar PGA. Pada tanggal 11 Maret 1966 setelah pemeriksaan jenazah selesai, dilaksanakan upacara pemakaman. Margono dimakamkan di Godean di tempat pemakaman keluarga, sedangkan Aris Munandar dimakamkan di Karangjajen Yogyakarta berdekatan dengan makam KHA. Dahlan.

Para demonstran terus melakukan demonstrasi, sesuai rencana mereka menuju Balai kota terus ke Kepatihan. Akan tetapi baru sampai di perempatan Kantor Pos tepatnya di depan Japendi, massa dipaksa berhenti oleh petugas keamanan. Sore harinya datanglah ke tengah massa seorang pejuang bernama Prof. K.H. Kahar Mudzakir. Ia datang untuk memimpin doa bagi keselamatan demonstran serta doa untuk dua pahlawan Ampera yang gugur hari itu. Selesai memimpin doa, Prof. KH. Kahar Mudzakir berpidato untuk menambah semangat anggota KAMI/KAPPI.

Sampai saat senja hari dan maghrib tiba, petugas keamanan tetap melarang massa meninggalkan tempat. Padahal massa sudah tidak berkeinginan lagi menuju Kepatihan. Massa hanya ingin lewat jalan Trikora menuju Masjid Besar tetapi petugas melarang. Akhirnya para demonstran mendesak terus dan petugas keamanan tidak mampu lagi menahannya sehingga massa demonstran dapat lewat jalan Trikora menuju Masjid Besar. Dalam perjalanan ini massa menyanyikan lagu "Gugur Bunga" dan "Padamu Negeri" guna menghormati kedua pahlawan Ampera yang gugur. Massa dapat masuk ke halaman Masjid Besar. Selanjutnya massa tidak langsung bubar tetapi tetap berkumpul atau duduk-duduk membahas peristiwa yang terjadi siang harinya.

Pada tanggal 11 Maret 1966 itu di Jakarta berlangsung Sidang Paripurna

Kabinet. Pada saat sidang berlangsung ajudan presiden menyampaikan nota bahwa sekitar istana sudah dikepung pasukan tidak dikenal identitasnya. Presiden dengan diikuti oleh Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri Chairul Saleh meninggalkan sidang menuju ke Bogor. Sidang kabinet akhirnya tidak menentu. Melihat situasi pimpinan nasional dalam keadaan krisis, maka Majen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M. Yusuf menuju Bogor guna menemui Presiden Sukarno. Ketiga pati tersebut menyampaikan kepada Presiden Sukarno mengenai kesanggupan Jenderal Suharto untuk mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan oleh Presiden. Dari peristiwa itu lahirlah Surat Perintah Sebelas Maret kepada Letjen Suharto dari Presiden Sukarno. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) berisi pemberian wewenang kepada Letjen Suharto untuk atas nama presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin, mengatasi keamanan dan kestabilan jalannya revolusi serta keselamatan pribadi dan wibawa Presiden Sukarno.

Segera setelah menerima Supersemar, Letjen Suharto mengambil tindakan. Tindakan pertama kali yang dilakukan adalah membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya di seluruh Indonesia yang dinyatakan dalam Surat Keputusan tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya itu disambut dengan sambutan luar biasa oleh rakyat yang anti PKI. Masyarakat Yogyakarta menyambut pembubaran PKI dengan mengungkapkan rasa syukur dan gembira dalam bentuk apel dan pawai syukur. Kegiatan apel dan pawai dilakukan pada tanggal 14 Maret 1966 (Hal.21 - 99).

Bab V berjudul Menegakkan Orde Baru Di Yogyakarta. Pada bab ini berisi bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan tonggak Orde Baru karena didalamnya mengandung perintah untuk pengamanan nasional dan menjaga serta menyelamatkan lembaga kepresidenan. Namun sebagian dari para pembantu Presiden Sukarno ada yang tidak senang terhadap adanya Surat Perintah Sebelas Maret. Mereka berusaha menghambat tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Letjen Suharto bahkan ada yang mengkonter kebijakan itu baik di pusat maupun di tingkat daerah.

Pemegang Surat Perintah Sebelas Maret 1966, Letjen Suharto berupaya mengamankan Indonesia dan membangun tatanan baru yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Adapun golongan yang berusaha untuk membuat gerakan tandingan yang mempertahankan status quo, menginginkan Indonesia tetap berlaku seperti situasi semula yaitu keadaan seperti jaman sebelum meletusnya G30S/PKI. Golongan yang berusaha masih mempertahankan status quo ini disebut Orde Lama. Barisan Orde Lama yang dimotori oleh anggota PNI Ali Surahman beserta ormas-ormasnya seperti GPM,

GMNI dan GSNI menggunakan nama “Aku Pendukung Sukarno” atau disingkat APS. Barisan Orde Lama ini berusaha menghalangi perkembangan Orde Baru. Gerakan untuk menghalangi perjuangan Orde Baru itu juga dilakukan oleh sisa-sisa komunis. Golongan nasionalis dalam PNI yang mendukung perjuangan Orde Baru kemudian memisahkan diri dari PNI Ali Surahman kemudian mendirikan kepengurusan bersih dari Orde Lama, dipimpin oleh Osa Usep sehingga PNI pendukung Orde Baru disebut PNI Osa Usep.

Di Yogyakarta benturan antara pendukung Orde Baru yaitu KAMI/KAPPI beserta kesatuan aksi lainnya dengan barisan pendukung Orde Lama yang menyebut dirinya Aku Pendukung Sukarno tidak dapat dihindari. Pada tanggal 4 April 1966 terjadi perang batu di Alun-alun Utara antara anggota KAMI dengan GMNI dan GPM Ali Surahman.

Setelah diketahui bahwa para pendukung Orde Lama terang-terangan ingin menggagalkan pembangunan Orde Baru, maka KAMI dan KAPPI beserta kesatuan aksi lainnya seperti KAWI, KAGI, KASI dan sebagainya menentukan sikap untuk menghadapinya secara tegas. Pada tanggal 12 April 1966 diadakan aksi demonstrasi KAMI di kampus Universitas Gadjah Mada. Mereka menuntut agar diadakan pembersihan terhadap dosen, karyawan dan mahasiswa yang terlibat PKI, Orde Lama. Kecuali itu demonstrasi menuntut agar Dewan Mahasiswa dan Resimen Mahakarta dibubarkan. Hal ini disebabkan didalamnya sebagai sarang aktivitas Orde Lama yang didominasi oleh CGMI dan GMNI Ali Surahman. Tuntutan para demonstran tersebut dikabulkan oleh Rektor. Para demonstran kecuali demonstrasi di kampus UGM juga di kampus IKIP Yogyakarta. Tuntutan mereka juga sama dan dikabulkan oleh pimpinan IKIP.

Pada tanggal 27 April 1966 di Alun-alun Utara diadakan rapat umum yang dipelopori oleh KAMI dan KAPPI. Rapat umum ini menuntut:

- 1) Tetap mempertahankan dan mendukung Supersemar.
- 2) Menteri Dalam Negeri agar merekal Gubernur Jateng Muchtar dan Walikota Yogyakarta Sudarisman Purwokusumo.
- 3) Agar Peperda Jateng/DIY segera membekukan PNI Ali Surahman karena menghambat jalannya Orde Baru.
- 4) Agar pembunuhan terhadap Mukri segera ditangkap.

Dalam rangka menyusun gerakan pengembangan Orde Baru di Yogyakarta maka diperlukan adanya bentuk kelaskaran dari aktifis kesatuan aksi sebagai pusat koordinasi setiap gerakan. Maka didirikan kelaskaran yang diberi nama Pahlawan Ampere Yogyakarta yaitu Lasykar Ampere Aris-Margono sebagai komandan lasykar Pada Mulya Lubis. Markas Lasykar Ampere Aris-Margono di bekas kantor IPPI Pekapalan Alun-alun Utara Yogyakarta.

Pada tanggal 20 Juni sampai 6 Juli 1966 MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke IV. Adapun keputusan Sidang Umum MPRS IV antara lain:

- 1) Pimpinan/Ketua MPRS terpilih Jenderal AH Nasution.
- 2) Mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret 1966 karena merupakan suatu upaya khusus untuk mengatasi ancaman terhadap negara dan keutuhan negara.
- 3) Mengukuhkan dengan ketetapan MPRS terhadap tindakan-tindakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pengemban Supersemar antara lain tentang pembubaran PKI beserta onderbownya dan pelarangan Marxisme-Leninisme sebagai ajaran terlarang di seluruh Indonesia.
- 4) Menugaskan kepada Letjen Suharto untuk membentuk kabinet Ampera selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 1966.

KAMI/KAPPI dan seluruh kesatuan aksi serta Lasykar Ampera Aris-Margono menyambut gembira keputusan sidang umum MPRS IV. Sejak berakhinya sidang umum MPRS IV 6 Juli 1966 terjadi dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia yaitu antara Presiden Sukarno dan Letjen Suharto pemegang amanat SU MPRS membentuk Kabinet Ampera. Kecuali itu Presiden Sukarno dituntut untuk mempertanggungjawabkan adanya peristiwa G30S/PKI.

Pada tanggal 22 Februari 1967 pukul 19.30 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaannya pada Jenderal Suharto. Kemudian diikuti adanya Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967 yang inti keputusannya mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Sukarno, selanjutnya pengangkatan Jenderal Suharto sebagai pejabat presiden. Dengan demikian keadaan dualisme kepemimpinan nasional berakhir.

Perjuangan KAMI/KAPI dan Lasykar Ampera Aris-Margono serta kesatuan aksi lainnya di Yogyakarta selanjutnya adalah melakukan aksi sosial dan mendorong pada anggotanya untuk "*back to campus*" dan "*back to school*" (Hal.101 - 112).

## **B. Komentar**

Buku yang berjudul "Kebangkitan Orde Baru Di Yogyakarta" ini berisi tentang kebangkitan Orde Baru di Yogyakarta secara lengkap dan kronologis dan merupakan sumber informasi mengenai Orde Baru di Yogyakarta. Buku ini baik untuk dibaca oleh generasi muda sehingga mereka tahu bagaimana perjuangan para pemuda, mahasiswa pada masa itu dalam rangka menegakkan Pancasila dan UUD 1945 yang akan diganti dengan ideologi komunis oleh PKI. Buku ini dilengkapi dengan foto-foto kebangkitan Orde Baru pada saat itu sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Di samping itu para informan yang digunakan untuk menyusun buku ini adalah orang-orang yang betul-betul mengalami dan

melakukan peristiwa kebangkitan Orde Baru di Yogyakarta sehingga keterangan yang diberikan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penulis dalam menguraikan peristiwa demi peristiwa sangat runtut. Hanya sayangnya penulis dalam menguraikan bab II yaitu "Latar Belakang Kebangkitan Orde Baru Di Yogyakarta" kurun waktunya terlalu jauh. Penulis mulai membahas sejak tahun 1955. Kecuali itu buku ini banyak salah cetak dan bahasanya kurang lancar ditambah kalimatnya panjang-panjang. Ini sangat mempengaruhi pembaca untuk mengetahui isinya.

2. Judul Buku : Sejarah Kota Yogyakarta  
Penulis : Djoko Soekirman, dkk  
Editor : -  
Penerbit : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : 1986  
Cetakan : I

#### **A. Materi Yang Diambil**

*Bab IV Kota Yogyakarta Periode 1959-1969 dengan sub judul Perjuangan Orde Baru.*

Bangkitnya Angkatan 66 di Yogyakarta diawali dengan adanya demonstrasi-demonstrasi pelajar dan mahasiswa. Demonstrasi-demonstrasi ini mendapat halangan dari kekuatan Orde Lama sehingga menyebabkan terjadinya bentrokan antara kekuatan Orde Baru melawan Orde Lama. Inti tujuan gerakan yang dilancarkan kekuatan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demonstrasi-demonstrasi itu membawa korban gugurnya dua orang pelajar demonstran yaitu Aris Munandar dan Margono. Untuk mempersatukan kekuatan semua potensi Orde Baru dan lebih mempertinggi kekuatan perlawanan terhadap Orde Lama, maka dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) konsulat Yogyakarta pada tanggal 17 Nopember 1965. KAMI ini dipelopori oleh para mahasiswa ekstra universitas seperti PMII, PMKRI, Mahasiswa Pancasila, HMI, IMM dan sebagainya. Sejalan dengan itu dibentuklah sebuah organisasi kelaskaran yaitu Laskar Aris-Margono di bawah pimpinan Pada Mulia Lubis dari IKIP Yogyakarta.

Mulai awal kebangkitan Angkatan 66 di Yogyakarta dilaksanakan gerakan pembersihan di lembaga pemerintah, lembaga pendidikan maupun terhadap pendukung PKI serta Orde Lama. Kemudian dilaksanakan pemecatan terhadap

pendukung PKI dan Orde Lama. Kecuali itu juga diadakan pemecatan terhadap anggota-anggota DPR yang terlibat G30S/PKI. Front nasional yang merupakan lembaga penggalang massa juga dibekukan. Hal ini disebabkan lembaga ini lebih didominasi oleh kekuatan PKI/Orde Lama. Di lembaga pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi dilakukan pula skrining terhadap mahasiswa pendukung PKI/Orde Lama.

Demikianlah akhirnya situasi menjadi baik kembali setelah kekuatan Orde Baru dapat menguasai keadaan. Akan tetapi ketika itu terdapat pula kegiatan partai politik yang berusaha menanamkan pengaruhnya di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada.

Menginjak tahun 1969 merupakan titik awal dilaksanakannya Pembangunan Lima Tahun tahap pertama (Pelita I). Pelita I dimulai tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974 (Hal. 43-45).

*Bab V Kota Yogyakarta Periode Pembangunan (1969-1979) dengan sub judul Perkembangan Pemerintah Kotamadya Yogyakarta.*

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 tahun 1965 maka kotapraja Yogyakarta yang merupakan daerah yang berhak mengatur daerahnya sendiri dan rumah tangganya sendiri diberi nama Kotamadya Yogyakarta. Pada tahun 1973 di Kotamadya Yogyakarta terdapat perubahan struktur birokrasi pemerintahan. Perubahan struktur birokrasi pemerintahan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 1973. Untuk menyesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri itu, maka Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No.174/KD/1973 yang ditandatangani oleh Walikota Sudjono. AJ tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kotamadya Yogyakarta. Menurut Surat Keputusan No.174/KD/1973 sekretariat daerah terdiri enam bagian yaitu:

- a) Sub Direktorat yang merupakan staf umum, terdiri atas sub direktorat pemerintahan, ketertiban umum, pembangunan, keuangan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- b) Bagian-bagian yang merupakan staf pelayanan terdiri bagian umum, bagian personalia, bagian hukum dan bagian DPRD.
- c) Kelompok Pembantu Pribadi Walikota Kepala Daerah terdiri sekretaris pribadi, urusan dalam dan ajudan.
- d) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- e) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- f) Bendahara.

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Masing-masing Sub

Direktorat dan bagian dipimpin oleh seorang kepala. Kelompok pembantu pribadi walikota dipimpin oleh sekretaris pribadi.

Daerah Kotamadya Yogyakarta dibagi menjadi beberapa bagian daerah pemerintahan tingkat terendah yang pada mulanya dinamai kemantren pamong praja yang jumlahnya ada 14 buah. Pada tanggal 31 Mei 1974 Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 97/KD/1974 tentang Pengetrapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1973. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut bahwa kedudukan Kemantren Pamong Praja dipersamakan dengan Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Mantri Pamong Praja sebagai kepalanya menjadi Kepala Wilayah Kecamatan atau Camat. Di bawah Kemantren Pamong Praja yang kemudian menjadi Kecamatan terdapat kampung-kampung. Kampung-kampung ini mempunyai organisasi yang diberi nama Rukun Kampung (RK), didalamnya terdapat beberapa Rukun Tetangga (RT).

Pada tahun 1979 terbit Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini kemudian juga diterapkan di Kotamadya Yogyakarta. Pemerintahan Desa atau Kalurahan merupakan bagian administratif dibawah kecamatan dan merupakan aparatur pemerintah paling bawah. Di Kotamadya Yogyakarta, Pemerintahan Kelurahan kedudukannya antara Kecamatan dan Rukun Kampung. Sampai akhir tahun 1979 pembentukan Pemerintahan Kelurahan baru mencapai tahap persiapan dan baru dapat direalisasi secara resmi pada tahun 1981 (Hal. 71-74).

## **B. Komentor**

Buku yang berjudul "Sejarah Kota Yogyakarta" mengungkap permasalahan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya dan kota pariwisata. Meskipun demikian aspek-aspek lain yang mempengaruhi dan mendukung perkembangan sejarah kota Yogyakarta tidak diabaikan seperti pengkhianatan G30S/PKI di Yogyakarta, perjuangan Orde Baru, perkembangan Pemerintah Kotamadya Yogyakarta.

Penulisan "Sejarah Kota Yogyakarta" ini mengambil lingkup temporal mulai tahun 1945 sampai dengan 1979. Hal ini disebabkan untuk melihat dinamika perkembangan kota Yogyakarta sejak awal kemerdekaan sampai dengan jaman pembangunan. Adapun lingkup spasial di wilayah Kotamadya Yogyakarta.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang baik, mudah dipahami isinya. Kecuali itu buku ini sangat baik untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui keadaan kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan memuat masalah-masalah pendidikan, kebudayaan, pariwisata, politik dan sebagainya. Buku



Sejarah Kota Yogyakarta ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

3. Judul Buku : Sejarah Tentang Pengaruh Pelita Di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan DIY  
Penulis : Moeljono, BA dkk  
Penyunting : Sutrisno Kutoyo  
Penerbit : Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : 1983  
Cetakan : I

### **A. Materi Yang Diambil**

*Bab III Pelaksanaan Pelita Di Daerah Istimewa Yogyakarta Di Bidang Pemerintahan.*

Pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 memberikan pengaruh pada pemerintahan desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan banyak pamong desa dan anggota DPRKGR di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlibat. Keadaan yang demikian ini membawa akibat tidak berfungsinya pemerintahan desa dengan baik. Untuk mengatasi keadaan itu maka Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan keputusan-keputusan antara lain:

- a. Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 216/1965 tanggal 27 Desember 1965 tentang Pedoman Tindakan Lanjutan dari rapat instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 1083 dan 1084/VII/Rhs/1965.
- b. Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 19/1966 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dan Anggota DPRKGR akibat pelaksanaan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 1084/Rhs/VII/1965, Jo Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 216/1965.
- c. Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 3/Instr/1966 tentang Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan termasuk Lurah Desa.
- d. Peraturan Daerah DIY Nomor 2/1969 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara (*schorsing*) dan Pemberhentian Lurah/Kepala Desa, Kepala Bagian, Kepala Dukuh dan pembantu-pembantu Kepala Bagian.
- e. Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 211/1969 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 2/1969.

Meskipun Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tetapi Pemerintah DIY sampai tahun 1982 (saat buku ini ditulis) tetap melaksanakan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 1969. Menurut peraturan ini ditetapkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan rumah tangga desa adalah lurah/kepala desa dan dibantu oleh pamong kelurahan/desa (Hal. 109-124).

Pembangunan Lima Tahun (Pelita) telah dimulai sejak tahun 1969 yaitu atas dasar Kepres No.319/1969 yang menetapkan tentang Repelita I (1969-1973). Pada tahun 1983 ini sudah memasuki Repelita yang ke III (1979/1980 sampai dengan 1983/1984). Pada Repelita I dan II prioritas diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengelola bahan untuk menjadi barang baku dan barang jadi dalam rangka menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia.

Adanya kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah melalui Repelita pertama, kedua dan ketiga ternyata membawa pengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan desa khususnya desa-desa di Propinsi DIY. Pengaruh tersebut adalah pada tahun 1981/1982 di Propinsi DIY tidak terdapat apa yang dinamakan desa swadaya. Desa-desa yang ada paling rendah berada pada tingkatan desa swakarya dan yang sudah mencapai tingkat desa swasembada banyak jumlahnya. Ini menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan yang baik dalam pembangunan desa.

Di bidang kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat desa non pemerintah dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pelita membawa kemajuan dan perkembangan yang baik. Mereka ini peranannya dalam pembangunan makin bertambah serta partisipasinya makin meningkat. Sedang hasil Pelita di bidang organisasi baik organisasi formal maupun organisasi sosial politik menunjukkan kemajuan. Sebagai bukti adanya Lembaga Sosial Desa (LSD) yang dibentuk tahun 1971 yang kemudian diganti menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tahun 1980. Kecuali itu hasil Pelita di bidang organisasi politik juga menunjukkan hasil yang baik.

Adanya peristiwa G30S/PKI maka pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dibubarkan. Selanjutnya pemerintah melakukan pembinaan terhadap partai-partai politik. Ada sembilan partai politik dan satu golongan karya. Sembilan partai politik itu adalah Partai Katolik, PSII, Partai NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti dan IPKI. Kemudian dalam Pemilu

4 Mei 1982 hanya terdapat dua partai politik dan satu golongan karya (Hal. 147-156).

*Bab IV Pengaruh Pelita Di Daerah Di Bidang Pemerintahan Desa.*

### **- Mengenai Pengaruh Pelita Terhadap Struktur Pemerintahan.**

Sebelum Pelita dilaksanakan, di desa-desa atau kalurahan-kalurahan di seluruh Propinsi DIY terdapat struktur pemerintahan sebagai berikut: Di tempat yang paling tinggi adalah lurah. Di bawah lurah terdapat kepala-kepala bagian yaitu kepala bagian sosial atau *kami tuwa*, kepala bagian umum atau *carik*, kepala bagian kemakmuran atau *ulu-ulu*, kepala bagian agama atau *kaum* dan kepala bagian keamanan atau *jaga baya*. Mereka itu disebut pamong kalurahan. Di bawah mereka terdapat para pembantu pamong yang tugasnya memang membantu para pejabat tadi. Diantara para pembantu pamong itu ada yang namanya kepala dukuh.

Setelah Pelita dilaksanakan badan eksekutif di desa-desa tetap berjalan, akan tetapi badan legislatifnya khususnya DPRKGR mengalami perubahan dan akhirnya pada tahun 1971 bubar. Sebagai gantinya adalah Lembaga Sosial Desa (LSD) yang kemudian pada tahun 1980 ditingkatkan peranannya dan diganti namanya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LSD/LKMD yang susunan pengurusnya terdiri dari unsur pamong desa dan unsur tokoh masyarakat itu benar-benar merupakan wadah partisipasi rakyat untuk merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan (Hal. 161-173).

### **- Pengaruh Pelita Terhadap Cara Pemilihan Dan Peranan Aparat Pemerintahan Desa.**

Pada tahun 1946 di Daerah Istimewa Yogyakarta keluar Maklumat No.15/1946 yang mengatur cara pemilihan aparat pemerintahan desa. Pada tahun 1966 maklumat tersebut diganti dengan Keputusan Kepala Daerah DIY No.19/1966. Perbedaan pokok diantara cara pemilihan menurut Maklumat No.15/1946 dan cara pemilihan menurut Keputusan Kepala Daerah No.19/1966 adalah dalam cara pemilihan yang pertama pemilihnya adalah kepala keluarga sedang menurut cara yang kedua pemilihnya adalah DPRKGR.

Pada tahun 1969 keluar Peraturan Daerah (PD) No.2/1969 yang menentukan bahwa para pemilih dalam pemilihan aparat pemerintahan desa pada prinsipnya adalah semua penduduk yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Kecuali itu berbeda dengan peraturan sebelumnya, menurut PD No.2/1969 ini yang dapat dipilih menjadi aparat pemerintahan desa tidak hanya pria tetapi juga wanita, dan pemilihan tidak dilakukan di rapat pemilihan tetapi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun peranan yang dimainkan oleh aparat pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat ganda yaitu sebagai pengasuh (pamong), pembimbing, pemberi semangat, pemberi teladan, koordinator dan sebagainya.

### **- Pengaruh Pelita Terhadap Kedudukan Dan Peranan Masyarakat Non Pemerintah.**

Sebelum Pelita dilaksanakan, para pemimpin masyarakat non pemerintah baik kedudukan maupun peranannya di dalam masyarakat pedesaan di seluruh DIY belum menonjol pengaruhnya. Para pemimpin masyarakat non pemerintah itu antara lain kyai, ulama, guru, pegawai negeri dan orang yang mempunyai kecakapan dalam bidang tertentu seperti dalam bidang pertanian, teknik, peternakan, hukum dan sebagainya. Mereka dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok orang-orang yang "terpandang" dan patut "dihormati" meskipun mereka belum menunjukkan peranan dan partisipasinya yang positif bagi masyarakat. Pada kegiatan-kegiatan tertentu baik kegiatan resmi maupun kegiatan tidak resmi mereka biasanya tampil sebagai pemimpin. Misalnya pada waktu ada kerja bakti membuat jembatan, tokoh yang mempunyai kemahiran dalam bidang teknik tampil sebagai pemimpin. Apabila ada orang yang mengadakan peralatan, tokoh yang ahli dalam bidang adat yang tampil.

Akan tetapi pada waktu itu banyak diantara para tokoh tersebut yang berkedudukan sebagai pemimpin atau anggota partai. Oleh karena itu sesuai dengan situasi pada waktu itu dimana partai-partai bertentangan antara yang satu dengan yang lain, tokoh-tokoh tersebut juga tidak dapat bersatu dan bekerja sama membangun desa yang dimiliki bersama.

Sesudah Pelita dilaksanakan dan sesudah fungsi DPRKGR sebagai tempat dialog antara pemerintah dengan rakyat kalurahan (desa) digantikan oleh LSD/LKMD, maka para pemimpin masyarakat non formal di desa-desa dengan wadah LSD/LKMD bersatu padu membangun desa mereka (Hal. 185-186).

### **- Pengaruh Pelita Terhadap Keadaan Organisasi Politik Dan Non Politik.**

Pada waktu menjelang pemilihan umum pada tahun 1971 di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sepuluh organisasi kekuatan sosial politik yaitu PNI, NU, Partai Katolik, Parmusi, Parkindo, PSII, IPKI, Perti, Murba dan Golkar. Kemudian pada tahun 1975 keluar Undang Undang No.3/1975 mengenai Partai Politik dan Golongan Karya. Adanya Undang Undang No.3/1975 tersebut maka di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) disamping Golongan Karya. Hasil Pelita bidang politik yang berwujud penyederhanaan jumlah partai itu ternyata sangat baik pengaruhnya terhadap keadaan di desa-desa. Rakyat menjadi bersatu padu dan bergairah melaksanakan pembangunan (Hal. 189-192).

## B. Komentor

Buku yang berjudul "Sejarah Tentang Pengaruh Pelita Di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan DIY" ini berisi tentang keadaan masyarakat di desa-desa Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dilaksanakan Pelita maupun sesudah dilaksanakan Pelita. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Hanya saja isi Bab III Pelaksanaan Pelita Di Daerah Di Bidang Pemerintahan Desa diulang lagi pada Bab IV Pengaruh Pelita Di Daerah Di Bidang Pemerintahan Desa. Meskipun demikian buku ini bisa dijadikan sumber informasi pada masa Orde Baru sehingga generasi muda yang tidak mengalami masa itu bisa memperoleh gambaran pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Orde Baru pada masa itu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Judul Buku : Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Penulis : KRT. Harsadiningrat, BA, dkk  
Penerbit : Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 1995  
Cetakan : I

## A. Materi Yang Diambil

### *Bab IX Tata Pemerintahan Pada Masa Orde Baru Sejak Tahun 1966*

Pemberontakan G30S/PKI di Yogyakarta membawa korban dua orang perwira TNI/AD yaitu Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono. Bangkitlah gerakan mahasiswa dan pemuda untuk menumpas G30S/PKI. Demonstrasi besar-besaran diadakan tetapi mendapat hambatan karena timbul bentrokan antara kekuatan Orde Baru melawan Orde Lama dalam rangka menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Maka dengan tegas para demonstran melawan setiap penyelewengan. Dalam bentrokan antara kekuatan Orde Baru dengan Orde Lama itu ada korban dua orang gugur yaitu Aris Munandar dan Margono.

Kemudian untuk lebih mempersatukan kekuatan Orde Baru seperti halnya yang terjadi di Jakarta, di Yogyakarta juga dibentuk KAMI konsulat Yogyakarta. Pembentukan KAMI ini dilakukan pada tanggal 17 November 1965 yang dipelopori oleh organisasi-organisasi HMI, PMII, PMKRI, Mahasiswa Pancasila, IMM dan sebagainya. Sejalan dengan itu dibentuklah organisasi kelaskaran yaitu Laskar Aris-Margono, di bawah pimpinan Pada Mulia Lubis. Gerakan dan kesatuan aksi itu dikenal dengan "Angkatan 66".

Adanya kesatuan aksi sebagai kebangkitan Angkatan 66 itu, usaha

pembersihan dan penumpasan G30S/PKI terus dilakukan. Diadakan pula pembersihan terhadap pendukung PKI di berbagai lembaga pendidikan, DPRD yang terlibat G30S/PKI. Front Nasional dibekukan karena menjadi sarang kekuatan PKI. Akhirnya situasi menjadi baik dan terkendali sesudah dilakukan pembersihan di berbagai lembaga. Situasi pemerintah tahap demi tahap mulai normal kembali.

Dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret yang kemudian diikuti serangkaian tindakan pembubaran PKI beserta semua organisasi bawahnya telah mengakhiri masa Orde Lama dan dimulai tahap baru yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan juga ditata kembali. Sejak pemerintahan Orde Baru tahun 1966 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti halnya propinsi-propinsi lainnya di Indonesia mengalami dua periode berlakunya undang-undang tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Daerah" yaitu periode 1966-1974 berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan antara tahun 1974 sampai menjelang reformasi berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 pembagian wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul. Kecuali itu juga dibentuk Kotapraja/Kecamatan Daerah Tingkat III. Prakteknya Kotapraja atau Kecamatan Daerah Tingkat III ini di DIY belum pernah dilaksanakan. Sebelumnya kecamatan ini bernama *kapanewon* yang dikepalai oleh seorang panewu pamong praja. Kemudian istilah *kapanewon* dan *panewu* diganti dengan istilah asisten wilayah. Selanjutnya berdasarkan keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 72/1968 diganti lagi dengan istilah kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat.

Perlu diketahui menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 bahwa Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian (BPH). Masa jabatan BPH ini sama dengan jabatan Kepala Daerah. Kemudian DPRD terdiri pimpinan dan anggota. Pimpinan DPRD terdiri seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua. Untuk membantu pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas diangkat sekretaris DPRD.

Badan Pemerintah Harian Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir berakhir pada tahun 1972. Hal ini disebabkan di dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat pada waktu itu tidak diadakan lagi jabatan Badan Pemerintah Harian.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah juga

dibantu oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas pemerintahan daerah. Kemudian ada dinas-dinas yang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai staf teknis dari kepala daerah dan sebagai badan pelaksana teknis. Dengan adanya dinas-dinas ini berarti akan membantu memper lancar mekanisme pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan pada masyarakat dan juga dengan fungsi pembantunya. Sekretaris daerah dalam hal ini ditunjuk untuk mengkoordinasikan kepala dinas, jawatan dan direktur atas nama kepala daerah (Hal. 393-402).

Sejak tanggal 23 Juli 1974 berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 untuk mengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ini dinyatakan berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Desember 1974. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 wilayah propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kotapraja. Oleh karena itu sebutan Propinsi Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul. Kemudian dalam perkembangannya di kotamadya dan kabupaten dalam wilayah Propinsi DIY dibagi menjadi wilayah pembantu walikotamadya dan pembantu bupati (Tuti).

Sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 di samping perencanaan kewenangan pemerintahan melalui sistem dekonsentrasi vertikal yaitu pemencaran pelaksanaan kewenangan oleh para menteri dan pimpinan lembaga non departemen kepada pejabat-pejabat dalam lingkungannya yang ditugaskan bekerja di daerah-daerah. Oleh karena itu kepada rakyat di daerah juga diberikan kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan dengan sistem dekonsentrasi.

Pengikutsertaan rakyat untuk ikut bertanggung jawab di dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya DPRD yang melaksanakan fungsi legislatif dan pengawasan. Dengan demikian dalam tata penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan jiwa pasal 18 UUD 1945 dianut lima sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu sistem dekonsentrasi, sistem desentralisasi (otonomi), sistem tugas pembantuan (*medebewind*), sistem *vrijbestuur* dan sistem pertolongan kepada pusat.

Untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ini kepala daerah tidak lagi dibantu oleh Badan



Pemerintah Harian. Adapun unsur staf dan pelaksana yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah adalah sekretaris daerah dan dinas-dinas. Sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan bersama dinas-dinas menjadi penting artinya.

Untuk membantu pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibentuk sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris DPRD. Perlu diketahui bahwa di tingkat propinsi ada lembaga baru yaitu Badan Pertimbangan Daerah. Anggota Badan Pertimbangan Daerah adalah pimpinan DPRD dan unsur-unsur fraksi yang belum terwakili dalam pimpinan DPRD. Kecuali itu juga ada jabatan baru yaitu asisten sekretaris wilayah/ daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum. Masing-masing asisten ini membawahi biro-biro yang ada pada bidangnya (Hal. 407-419).

## **B. Komentar**

Buku "Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" dapat memperkaya khazanah kepustakaan kita dan dapat dijadikan suatu dokumen untuk diwariskan kepada generasi muda. Buku ini sangat baik untuk dibaca oleh siapa saja terutama para aparat penyelenggara pemerintahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta penyelenggara pemerintahan Indonesia pada umumnya. Dengan membaca buku ini pembaca dapat memahami sejarah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku ini mempunyai arti yang penting mengingat penyelenggaraan suatu pemerintahan berjalan terus menerus. Penyelenggara pemerintahan semakin lama semakin meningkat dan berkembang. Dengan menyajikan peristiwa-peristiwa penting mengenai penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak jaman penjajahan sampai dengan masa Orde Baru akan menyegarkan ingatan kita dan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang tepat dalam merencanakan penyelenggaraan pemerintahan berikutnya.

Dari rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam buku ini, pembaca akan mengetahui bahwa untuk tegaknya penyelenggaraan pemerintahan memerlukan usaha dan kerja keras serta pengorbanan yang tidak kecil. Di samping itu tidak sedikit rintangan dan hambatan yang harus dihadapi.

5. Judul Buku : Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi  
Pemerintahan Yogyakarta 1942 - 1974  
Penulis : DR. P.J. Suwarno, SH  
Penerbit : Penerbit Kanisius  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 1994  
Cetakan : I

### **A. Materi Yang Diambil**

Bab VI Integrasi Yogyakarta Dengan Republik Indonesia (1950 - 1974)

Pada bab ini antara lain membahas "Pemantapan Integrasi Birokrasi Pemerintahan DIY dengan Republik Indonesia (1965-1974)". Gagalnya Gerakan Mulyono 1 Oktober 1965 di Yogyakarta merupakan awal kehancuran partai politik khususnya PKI tetapi membuka kemungkinan meningkatnya kegiatan ABRI di dalam birokrasi pemerintahan yang memacu proses integrasi birokrasi pemerintahan Daerah - Pusat.

Sesudah peristiwa 1 Oktober 1965 di Korem 072 itu birokrasi pemerintahan berjalan terus tetapi situasi politik menjadi panas terutama di kalangan mahasiswa. Mereka yang anti PKI mengutuk G30S/PKI di Jakarta dan Gerakan 1 Oktober di Yogyakarta dan menuntut pembubaran PKI. Pada tanggal 17 Oktober mereka membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Progresif Revolusioner (KAMPROGREV). Sesudah terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1965, maka KAMPROGREV atas dorongan mahasiswa yang anti PKI seperti PMII, PMKRI, HMI, IMM, MAPANCAS membentuk KAMI Konsulat Yogyakarta untuk membantu ABRI menumpas PKI.

KAMI Konsulat Yogyakarta mengikuti gerakan KAMI Pusat yang makin lama makin agresif. Tindakannya ditujukan kepada PKI dan simpatisannya bahkan PNI yang lamban dalam mengutuk Gerakan Dewan Revolusi seperti halnya Presiden Sukarno dijadikan sasaran aksinya. Pada tanggal 27 April 1966 KAMI menuntut Walikota Yogyakarta diretool karena diduga mempertahankan PNI Ali Surachman dan tidak segera mengutuk Dewan Revolusi yang mengadakan pemberontakan dan gagal. Tuntutan itu diterima oleh Walikota Yogyakarta yang kemudian diganti oleh Letkol Sujono Anton Yudhotejoprawiro (Sujono AY) mantan Dandim 073 Bantul.

Kemudian KAMI melanjutkan aksinya dengan menuntut pembersihan DPRDGR DIY dan RRI dari sisa-sisa PKI serta simpatisannya dan pembekuan PNI. Tuntutan yang pertama dikabulkan. Ketua DPRDGR Siswosumarto, tokoh PNI mengundurkan diri, demikian juga kepala RRI secara resmi mengundurkan

diri. Kemudian KAMI diberi waktu untuk siaran di RRI dengan nama acara Ruang Gelora Ampara. Kecuali itu Kepala Daerah juga menjanjikan akan mengadakan penyegaran DPRDGR DIY. Pemerintah termasuk Korem 072 juga melaksanakan pembersihan dengan menghentikan pegawai dan pejabat yang tersangkut PKI. DPRDGR DIY juga mengadakan pembersihan. Anggota DPRDGR yang berasal dari Fraksi PKI telah menghilang, mereka ditangkap oleh *tim screening* atau melarikan diri sehingga jumlah anggota DPRDGR di DIY dan Daerah-daerah Tingkat II berkurang. Anggota DPRDGR DIY yang semula berjumlah 45 orang tinggal 28 orang. Daerah Tingkat II Kulonprogo yang semula berjumlah 32 orang tinggal 20 orang.

Untuk mengisi kursi yang kosong itu ternyata tidak begitu mudah sebab kelompok masyarakat yang aktif dalam menumpas "Gerakan 30 September" merasa mempunyai hak memperoleh kursi DPRDGR sesudah PKI dibubarkan. KAMI mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengadakan penyegaran DPRDGR berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Baru dalam Melaksanakan UU Nomor 18/1965. Desakan ini dilakukan dengan mengirim delegasi pada tanggal 13 Juli 1966 dan kemudian diulang lagi pada tanggal 17 Oktober 1966 ke Panca Tunggal. Kunjungan delegasi ini dibalas oleh para pimpinan daerah antara lain Sri Paku Alam, Prawoto, Letkol Leo Ngali dan Sutarjo dengan kunjungannya ke markas KAMI di gedung Dwi Sata Warsa.

Setelah terjadi desak mendesak, tawar menawar dan musyawarah secara intensif antara organisasi-organisasi masyarakat dan pimpinan daerah akhirnya dapat diadakan penyegaran DPRDGR DIY yang sudah minus PKI dengan mengangkat 47 anggota baru dengan rincian sebagai berikut: Golongan politik meliputi tujuh partai politik dengan 23 anggota dan Golongan Karya yang meliputi 18 kelompok organisasi dengan 27 anggota. Susunan pimpinan sebagai berikut: Ketua Letkol Muharyo (ABRI), Wakil Ketua I H. Surawan (PNI), Wakil Ketua II H. Moh. Jamhari (NU), Wakil Ketua III Gerson Harsono (Parkindo).

Dengan adanya penyegaran DPRDGR DIY itu kedudukan pemerintah daerah terhadap DPRDGR makin kuat. PNI yang mendapat kursi paling banyak mendapat tuduhan disusupi PKI sehingga praktis kedudukan dan pengaruhnya lemah. Harapan untuk menghidupkan kembali Masyumi tidak terpenuhi dan dengan masuknya Muhammadiyah ke dalam Golongan Karya juga menghambat perjuangan untuk menghidupkan kembali Masyumi.

Kecuali birokrasi pemerintah bertambah kuat, ABRI yang mendapat pukulan langsung dari Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Mayor Mulyono juga mendapat pengaruh lebih besar dalam DPRDGR dan birokrasi pemerintahan,

sebab merekalah yang menangani pembersihan DPRDGR dan birokrasi pemerintahan dari unsur-unsur PKI dan organisasi mantelnya. Pengaruh itu dimanfaatkan ABRI untuk memasuki lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan birokrasi lebih dalam lagi. Untuk itu komandan-komandan Kodim mengadakan reorganisasi Golongan Karya yang terdiri atas bermacam-macam kelompok itu menjadi suatu kekuatan politik yang padu dalam suatu bentuk sekretariat bersama. Di dalam pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya Cabang Sleman dilakukan di aula Kodim 0732 pada tanggal 15 Oktober 1966. Sebagai Ketua Umum adalah Mayor Samin BH. Di Kotamadya Yogyakarta pembentukan Sekber Golkar dilakukan pada tanggal 24 Januari 1967 di aula Kodim 0734. Sebagai Ketua Mayor Moch. Toha; Wakil Ketua I AKP Suharsono (AKRI); Wakilketua II, III dan IV Golongan Sarjana, Muhammadiyah dan Mahasiswa yang ketiganya akan ditetapkan kemudian. Sekretaris I Kapten Sukadi; Bendahara I orang dari Bank.

Satu tahun kemudian Sekber Golkar Gunungkidul dibentuk. Susunan pengurusnya sebagai berikut: Ketua Umum Kapten Suyitno; Ketua Bidang Politik Kapten Suharjo; Ketua Bidang Ekonomi R. Suryosupriyo yang dibantu oleh Projomandoyo; Ketua Bidang Penerangan/Pembinaan AKP. Bajuri; Ketua Bidang Organisasi Mr. A. Dachlan; Sekretaris I Andang Sukarno; Sekretaris II Sastrosugito dan Bendahara Herman Sutanto. Anggota-anggotanya terdiri atas ormas, korp karyawan dari dinas-dinas kantor yang berafikasi pada Pancasila dan ABRI dari segala kesatuan. Jumlah seluruhnya 33 ormas dan kokar. Kemudian dikelompokkan menjadi enam Kelompok Induk Organisasi (Kino).

Dengan demikian boleh dikatakan bahwa integrasi pemerintahan DIY dengan pemerintah pusat semakin kuat baik lewat birokrasi pemerintahan maupun lewat birokrasi Sekber Golkar. Dengan berperannya ABRI sebagai pendiri dalam Sekber Golkar, integrasi daerah-pusat semakin kokoh lagi sebab ABRI mempunyai organisasi yang rapi dari pusat sampai ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia dengan disiplin yang kuat. Komposisi DPRDGR seperti di atas bertahan sampai pemilihan umum 3 Juli 1971 (Hal. 340-346).

#### *Birokrasi Pemerintahan DIY Bersih Dari Tokoh Partai Politik*

Kelima Kepala Daerah Tingkat II di DIY sampai tahun 1969 adalah anggota koprs pamong praja. Kotapraja Yogyakarta satu-satunya daerah yang dikepalai oleh seorang anggota ABRI yaitu Kolonel Sujono AY. Anggota pamong praja yang menjabat kepala daerah itu sebenarnya birokrat Kasultanan Yogyakarta yang dulu dibina oleh Sultan Hamengku Buwono IX dalam menghadapi desakan golongan politik sejak tahun 1945.

Formasi kepegawaian tahun 1969 tidak banyak berbeda dengan formasi

kepegawaian tahun 1961. Di DIY unsur pimpinan terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur pembantu terdiri atas Badan Pengurus Harian (BPH) dan Sekda yang membawahi dan mengkoordinasikan:

- 1) Sembilan kantor yaitu sekretariat pemerintah daerah; sekretariat DPRD DIY; pengawas keuangan; perundang-undangan dan tata hukum; biro perusahaan; unsur pegawai; kehewanian; sensus di direktorat pembangunan masyarakat desa.
- 2) Tujuh dinas yaitu keuangan; pertanian dan perikanan darat; kesehatan; agraria; sosial; tenaga kerja; pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Tiga biro yaitu otonomi dan sentralisasi; statistik dan politik.
- 4) Lima kantor dinas yaitu pekerjaan umum; lalu lintas dan angkutan; perekonomian; perindustrian; kehutanan.
- 5) Satu komando yaitu kesatuan pagar kerja.

Dinas-dinas itu mempunyai kepanjangan hampir di semua daerah swatantra tingkat II kecuali Dinas Keuangan tidak terdapat di Kulonprogo dan Gunungkidul; Dinas Agraria tidak terdapat di Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul dan Dinas Tenaga Kerja tidak terdapat di Kotamadya Yogyakarta dan Gunungkidul. Kantor dinas yang mempunyai kepanjangan di setiap daerah swatantra tingkat II hanya Kantor Dinas PU dan Kantor Dinas Perekonomian, sedangkan Kantor Dinas Perindustrian hanya terdapat di Bantul dan Kantor Dinas Kehutanan hanya terdapat di Kulonprogo. Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan tidak terdapat kepanjangannya. Demikianlah keadaan DIY sesudah peristiwa Gerakan Mulyono 1 Oktober 1965 (Hal. 350-353).

Menguatnya integrasi birokrasi pemerintahan DIY dengan pusat itu seiring dengan bergabungnya Sultan Hamengku Buwono IX ke pemerintah pusat. Sultan yang tampil sebagai tokoh politik nasional non partai sejak tahun 1971 secara resmi Sultan Hamengku Buwono IX menjadi salah satu dari anggota Dewan Pembina Golkar Pusat. Dengan tindakan itu seolah-olah Sultan memberi isyarat kepada birokrat Yogyakarta pada khususnya dan rakyat Yogyakarta pada umumnya kemana haluan harus diarahkan. Situasi yang demikian itu dipacu oleh Permendagri No.12/1969 yang memberi pedoman tata cara pemurnian wakil-wakil Golongan Karya dalam DPRDGR Tingkat I dan Tingkat II. Dalam Permendagri No.12/1969 itu ditegaskan bahwa DPRDGR Tingkat I dan II terdiri atas golongan politik dan golongan karya. Jumlah wakil kedua golongan itu harus sama, kalau jumlahnya ganjil maka wakil golongan karya harus lebih banyak. Wakil-wakil golongan karya yang berafikasi dengan partai politik akan diberhentikan oleh Menteri Dalam negeri bagi DPRDGR Tingkat I dan oleh

Gubernur bagi DPRDGR Tingkat II. Adapun usul pemberhentian anggota DPRDGR yang dinyatakan berafikasi dan usul penggantinya disampaikan oleh Gubernur untuk Daerah Tingkat I dan oleh Bupati untuk Daerah Tingkat II. Penunjukkan calon-calon wakil golongan karya dilakukan oleh Sekber Golkar setempat.

Dengan dilaksanakannya Permendagri No.12/1969 itu bukan saja kekuasaan legislatif bergeser ke Sekber Golkar tetapi Gubernur dan Bupati juga mulai dapat mengontrol badan legislatif apalagi kalau diingat Gubernur dan Bupati akhirnya menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar di daerah masing-masing. Dalam keadaan yang demikian ini maka para birokrat DIY cenderung masuk Golkar. Pada tanggal 22 Juni 1971 (dua minggu sebelum Pemilu) Wakil kepala Daerah DIY mengeluarkan pernyataan "Pernyataan Kesetiaan Tunggal" (monoloyalitas).

Dalam memasuki arena pemilihan umum Sekber Golkar yang dimotori oleh Kodim merupakan pendatang baru yang kekuatannya didukung ABRI, birokrasi pemerintahan dan pamong desa yang sudah menyatakan monoloyalitas lewat Wakil Kepala Daerah DIY. Kecuali memiliki posisi yang menggantungkan dalam perkembangan politik dan birokrasi pemerintahan menjelang Pemilu, Golkar dan ABRI masih ditunjang oleh UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Hasil pemilu tahun 1971 di DIY sebagai berikut: Fraksi Karya Pembangunan mendapat 22 kursi (2 kursi hasil pengangkatan); Fraksi Demokrasi Pembangunan mendapat 5 kursi; Fraksi Persatuan Pembangunan mendapat 7 kursi dan Fraksi ABRI diberi 6 kursi. Di Gunungkidul Fraksi Karya Pembangunan mendapat 27 kursi (2 kursi hasil pengangkatan); Fraksi Demokrasi Pembangunan mendapat 3 kursi; Fraksi Persatuan Pembangunan mendapat 4 kursi dan Fraksi ABRI diberi 6 kursi. Di Sleman Fraksi Karya Pembangunan mendapat 22 kursi; Fraksi Demokrasi Pembangunan mendapat 4 kursi; Fraksi Persatuan Pembangunan mendapat 8 kursi dan Fraksi ABRI mendapat 5 kursi. Di Kotamadya Yogyakarta Fraksi Karya Pembangunan mendapat 14 kursi; Fraksi Demokrasi Pembangunan mendapat 8 kursi; Fraksi Persatuan Pembangunan mendapat 5 kursi dan Fraksi ABRI mendapat 4 kursi.

Setelah pemilu 1971 keterikatan birokrasi pemerintahan DIY dengan pusat diperkuat lagi dengan dilantiknya Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) DIY pada tanggal 2 Juni 1972. Dengan terbentuknya KORPRI di Yogyakarta, keterikatan birokrat kepada pusat dibina dan diawasi lewat Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/ Walikota/Kotamadya Kepala Daerah. Setiap anggota KORPRI tidak dibenarkan membawa aspirasi atau menjadi anggota organisasi yang menjalankan kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang

bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan asas, tujuan dan sifat KORPRI.

Proses integrasi birokrasi pemerintahan DIY dan pemerintah pusat berjalan terus dan kemudian mendapat legalisasi dengan keluarnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang memberi dasar hukum asas dekonsentrasi di samping asas desentralisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di DIY faktor integratif yang berupa semangat nasionalisme, pembinaan kebangsaan yang sering dilakukan di DIY, bantuan keuangan dari pusat dan masuknya ABRI ke lembaga-lembaga pemerintah semakin terdesak sejak meletusnya Gerakan Mulyono 1 Oktober, jauh lebih kuat dari pada faktor-faktor sentrifugal yang berupa adat istiadat dan *vested interest* berjalan dengan pesat dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi pemerintahan dalam pemerintahan daerah. Kemudian bersama-sama asas desentralisasi dilegalisasi dengan UU No.5/1974 (Hal.354-371).

## B. Komentar

Dr. P.J. Suwarno, SH adalah dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 21 Juli 1993. Sebagai sejarawan ia sering menulis artikel kesejarahan baik itu di Harian Bemas, Kedaulatan Rakyat maupun Kompas. Kecuali itu beliau juga sering memberi ceramah tentang kesejarahan. Buku ini sangat baik untuk dibaca bagi generasi muda maupun siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana pemerintahan Yogyakarta tahun 1942 - 1974. Bahasa yang dipergunakan sangat baik sesuai dengan kaidah bahasa yang benar sehingga pembaca mudah memahaminya. Buku yang berjudul "Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 - 1974, Sebuah Tinjauan Historis" merupakan sumber informasi mengenai pemerintahan di Yogyakarta pada masa Orde Baru.

6. Judul Buku : Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia Di Yogyakarta Sebuah Lintasan Sejarah  
Penulis : Drs. H. Tashadi dkk  
Penerbit : Panitia Gabungan Peringatan HUT Ke 50 Kemerdekaan RI, Bhakti Pertiwi, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 1995  
Cetakan : I



## **A. Materi Yang Diambil**

Bab VI Yogyakarta Pada Masa Orde Baru

- *Lahirnya Orde Baru Di Yogyakarta*

Orde Baru adalah suatu orde yang merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Jadi Orde Baru merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa sebelumnya.

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukarno tiba-tiba meninggalkan sebuah sidang kabinet yang sedang berlangsung di Jakarta. Dalam perkembangan kemudian, Presiden Sukarno bersama beberapa anggota kabinetnya terlibat pembicaraan dengan Majen Basuki Rachmad, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Mahmud yang telah bertemu dengan Letjen Suharto sebelum pergi ke Bogor. Setelah memahami persoalannya maka pada tanggal 11 Maret 1966 itu juga Presiden Sukarno memberikan surat perintah kepada Letjen Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan. Surat perintah Presiden Sukarno kepada Letjen Suharto itu dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar).

Kemudian Pada tanggal 12 Maret 1966 Letjen Suharto selaku pengemban Supersemar segera membubarkan dan menyatakan terlarang PKI dan omas-omasnya. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966 Letjen Suharto melakukan pembersihan pada Kabinet Dwikora sehingga Kabinet Dwikora disempurnakan. Sementara itu rakyat masih terus bergolak dan kepemimpinan nasional Orde Lama masih tetap diragukan (Hal. 184-187).

Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan tonggak Orde Baru karena didalamnya mengandung perintah untuk pengamanan nasional dan menjaga serta menyelamatkan lembaga kepresidenan. Namun sebagian dari para pembantu presiden ada yang tidak senang terhadap adanya Super semar. Mereka berusaha menghambat tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Letjen Suharto bahkan ada yang mengkaunter kebijaksanaan itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mereka mempertahankan *status quo* menginginkan Indonesia tetap berlaku seperti keadaan sebelum meletusnya G30S/PKI. Golongan yang berusaha mempertahankan *status quo* ini disebut Orde Lama. Usaha pembersihan ini berhasil.

Di Yogyakarta benturan antara pendukung Orde Baru yaitu KAMI/KAPPI beserta kesatuan aksi lainnya dengan barisan pendukung Orde Lama yang menyebut dirinya Aku Pendukung Sukarno tidak dapat dihindari. Benturan fisik sering terjadi ketika pendukung Orde Lama berusaha menentang aksi-aksi KAMI/

KAPPI dalam usaha memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Pangdam VII Diponegoro Majen Suryosumpeno prihatin akan terjadinya perpecahan di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa. Kemudian dibentuk organisasi Persatuan Nasional Mahasiswa Indonesia (PNMI) yang anggotanya seluruh organisasi mahasiswa. Pembentukan PNMI ini dilaksanakan pada tanggal 21-23 Maret 1966 di Semarang. Pada saat berdirinya sudah terjadi konflik pendapat mengenai landasan piagam pembentukannya. Kubu KAMI mengusulkan dasar Pancasila sedangkan kubu GMNI Ali-Surahman mengusulkan dasar Lima Azimat Revolusi. Kecuali itu pihak KAMI mengusulkan dimasukkan dukungan terhadap Supersemar, namun pihak GMNI Ali-Surahman menolaknya. Meskipun akhirnya PNMI berhasil dibentuk namun pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikan konflik.

Pada tanggal 4 April 1966 diadakan pelantikan PNMI se Jawa Tengah di Alun-alun Utara Yogyakarta oleh Pangdam VII Diponegoro. Selesai pelantikan terjadi benturan fisik dengan aksi lempar batu. Ormas-ormas anggota KAMI yang ada di tengah Alun-alun Utara Yogyakarta dikepung dan dilempari batu oleh GMNI dibantu pasukan "Pengawal Hitam-hitam. Berbarat Merah". Sejak perang batu di Alun-alun Utara Yogyakarta itu lalu berkembang menjadi bentrokan fisik yang menjurus ke arah teror. Akibatnya terjadi situasi resah di kota Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 5 April 1966 pukul 04.00 pagi kantor IMM di jalan Tanjung 55 Yogyakarta diserbu oleh gerombolan berseragam hitam-hitam. Serbuan ini mengakibatkan kantor IMM rusak berat.

Setelah diketahui bahwa para pendukung Orde Lama terang-terangan menentang pembangunan Orde Baru maka KAMI/ KAPPI beserta kesatuan aksi lainnya seperti KAWI, KAGI, KASI dan sebagainya menentukan sikap untuk menghadapinya secara tegas. Oleh sebab itu setelah PKI dan organisasi *onderbownya* dibubarkan dan retooling Kabinet Dwikora telah selesai dilakukan maka KAMI dan KAPPI Yogyakarta mempelopori aksi pembersihan terhadap sisa-sisa PKI dan pendukung Orde Lama.

Sasaran aksi pertama adalah pembersihan di lingkungan kampus. Kampus UGM dan IKIP sebagai sasaran aksi pembersihan. Pada tanggal 12 April 1966 diadakan aksi demonstrasi KAMI di Kampus UGM. Para demonstran menuntut agar diadakan pembersihan terhadap dosen, karyawan dan mahasiswa yang terlibat PKI, Orde Lama dan yang plintat-plintut. Kecuali itu para demonstran juga menuntut agar Dewan Mahasiswa dan Resimen Mahakarta dibubarkan.

Tuntutan KAMI diterima oleh Rektor UGM. Kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya pembersihan dosen, karyawan dan mahasiswa yang terlibat G30S/PKI dan Orde Lama. Pada tanggal 13 April 1966 Rektor UGM

membubarkan Dewan Mahasiswa UGM. Demikian juga gelombang aksi pembersihan yang dilakukan oleh KAMI dan KAPPI di Kampus IKIP Negeri Yogyakarta. Rektor IKIP Yogyakarta menerima tuntutan KAMI dan KAPPI untuk membersihkan dosen, karyawan, mahasiswa yang terlibat G30S/PKI dan Orde Lama. Bahkan Rektor IKIP dengan tegas membekukan GMNI Ali-Surahman. Keberhasilan tuntutan KAMI dan KAPPI membersihkan kampus UGM dan IKIP Yogyakarta serta berhasil dibekukannya Dema dan Kodema sebagai sarang bekas GMI dan GMNI Ali-Surahman, maka kelompok pendukung Orde Lama itu mengadakan reaksi. Pada tanggal 14 April 1966 Dema dan Kodema yang telah dibekukan dimotori GMNI Ali-Surahman mengadakan demonstrasi menentang keputusan rektor dan menentang tuntutan KAMI dan KAPPI.

Pada tanggal 27 April 1966 di Alun-alun Utara diadakan rapat umum. Pada rapat umum yang dipelopori KAMI dan KAPPI mengeluarkan tuntutan yaitu:

1. Tetap mempertahankan dan mendukung Supersemar.
2. Menteri Dalam Negeri agar meretol Gubernur Jawa Tengah Muchtar dan Walikota Yogyakarta Sudarisman Purwokusumo.
3. Agar Peperda Jawa Tengah/DIY segera membekukan PNI Ali-Surahman karena menghambat jalannya Orde Baru.
4. Agar pembunuhan terhadap Mukti segera ditangkap.

Setiap gerakan kesatuan aksi Orde Baru selalu mendapat reaksi dari pendukung Orde Lama. Akhirnya Pangdam VII Diponegoro memerintahkan menutup kampus Perguruan Tinggi mulai tanggal 26 April 1966, para mahasiswa yang berasal dari luar Jawa diminta pulang ke daerahnya. Keputusan ini sangat merugikan Orde Baru. Setelah diadakan pembicaraan antara KAMI dan Pangdam akhirnya keputusan itu dicabut pada tanggal 4 Mei 1966.

Dalam rangka menyusun gerakan pengembangan Orde baru di Yogyakarta, maka diperlukan adanya bentuk kelaskaran dari aktivis kesatuan aksi sebagai pusat koordinasi setiap gerakan. Untuk itu perlu didirikan kelaskaran yang diberi nama Laskar Ampera Aris-Margono. Sebagai komandan laskar yaitu Pada Mulya Lubis dan bermarkas di bekas kantor IPPI Perkapalan Alun-alun Utara Yogyakarta.

Keputusan Sidang Umum MPRS IV tanggal 20 Juni sampai dengan 6 Juli 1966 di Jakarta menambah kekuatan yuridis bagi tegaknya Orde Baru. KAMI/KAPPI beserta seluruh kesatuan aksi dan Laskar Ampera Aris-Margono menyambut gembira keputusan Sidang Umum MPRS IV itu. Gerakan pembersihan diteruskan di lingkungan DPRDGR DIY dan pemerintahan Propinsi DIY yang di dalamnya masih bercokol sisa-sisa PKI dan pendukung Orde Lama.

Pada tanggal 28 Oktober 1966 KAMI, KAPPI beserta kesatuan aksi lainnya serta Laskar Ampara Aris-Margono mengadakan peringatan Sumpah Pemuda. Seluruh organisasi termasuk GMNI dan GPM serta GSNI diundang untuk ikut upacara di Alun-alun Utara Yogyakarta. Namun pihak GMNI, GSNI dan GPM tidak mau hadir dengan alasan akan menyelenggarakan sendiri. Pada tanggal 29 Oktober 1966 GMNI, GSNI dan GPM dengan seragam hitam-hitam mengadakan unjuk kekuatan yang menunjukkan tidak senang dengan Orde Baru. Pihak KAMI, KAPPI dapat mencegah anggotanya tidak terpancing bentrokan fisik.

Sejak berakhirnya Sidang Umum MPRS IV 6 Juli 1966 terjadi dualisme kepemimpinan nasional yaitu antara Presiden Sukarno dan Letjan Suharto pemegang amanat Sidang Umum MPRS membentuk Kabinet Ampara. Kecuali itu Presiden Sukarno dituntut untuk mempertanggungjawabkan adanya peristiwa G30S/PKI. Hal ini disebabkan pidatonya di Sidang Umum MPRS IV (Nawaksara) tidak mengungkapkan kudeta itu. Pimpinan MPRS meminta Sukarno untuk melengkapi pidatonya dengan pertanggungjawaban tersebut.

Pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Suharto. Kemudian diikuti Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 - 12 Maret 1967. Sidang Istimewa MPRS antara lain menetapkan mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Sukarno selanjutnya pengangkatan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden. Dengan demikian keadaan dualisme kepemimpinan nasional berakhir. Ketetapan Sidang istimewa MPRS itu melegakan pendukung Orde Baru baik di Jakarta maupun di daerah-daerah termasuk Yogyakarta. Namun para pendukung Orde Baru di Yogyakarta masih menghadapi aksi teror dari pendukung Orde Lama meskipun sifatnya tidak terbuka (Hal. 192 - 204).

Sejak tahun 1969 pemerintah telah melaksanakan lima kali Pelita dan sekarang (1995) sedang berlangsung pelaksanaan Pelita yang keenam memasuki Jangka panjang Kedua. Kebijakan Umum Pembangunan daerah Istimewa Yogyakarta pada Repelita V telah dirumuskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yaitu mengembangkan potensi khas daerah, baik berupa potensi alam, ekonomi, sosial budaya maupun rokhaniah serta mental spiritual agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal untuk lebih memperkuat dan memantapkan keberadaan Propinsi DIY sehingga dapat memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan nasional.

Dengan keterbatasan sumber daya alam yang tersedia maka jumlah penduduk harus terus menerus dikurangi melalui imigrasi dan KB serta mengurangi ketergantungan penghidupan masyarakat pada sektor pertanian, dialihkan ke

sektor jasa, industri rakyat dan perdagangan. Namun demikian sampai dengan Pelita V pendapatan perkapita penduduk DIY masih berada di bawah rata-rata angka nasional, akibat serta keterbatasan itu. Satu hal yang sangat menarik perhatian adalah kenyataan bahwa kematian bayi di DIY sejak akhir Pelita IV telah berhasil ditekan hanya 27 tiap 1.000 kelahiran bayi sehat. Angka itu terus menerus turun dalam masa Pelita V. Sementara itu usia harapan hidup terus meningkat mencapai rata-rata 70 tahun. Ternyata angka kematian bayi adalah yang terendah di seluruh Indonesia sedangkan angka usia harapan hidup adalah yang tertinggi di Indonesia.

Meskipun angka pendapatan perkapita penduduk DIY masih rendah tetapi angka pertumbuhan penduduk dapat ditekan lebih rendah lagi sehingga peningkatan kesejahteraan itu terasa. Lagi pula dengan perilaku penduduk yang suka berhemat serta hidup sederhana, tabu membelanjakan uangnya secara tepat maka peningkatan kesejahteraan itu terasa sangat mantap dan merata di semua lapisan masyarakat (Hal. 206 - 211).

## **B. Komentar**

Buku yang berjudul "Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia Di Yogyakarta Sebuah Lintasan Sejarah" berisi mengenai perjalanan bangsa Indonesia sejak tahun 1945-1995. Momentum peringatan 17 Agustus 1945 dan lahirnya Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 mempunyai makna bagi bangsa Indonesia.

Mengenai sistematika penulisan buku ini sudah sangat bagus disusun secara kronologis. Hanya saja buku ini ditulis dengan bahasa yang kurang komunikatif, banyak kalimat yang diulang sehingga membuat pembaca menjadi bosan. Meskipun demikian buku ini sangat baik dijadikan bacaan bagi siapa saja terutama generasi muda. Bagi generasi muda dengan membaca buku "Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia Di Yogyakarta Sebuah Lintasan Sejarah" ini akan tahu bagaimana para pendahulu mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang dirasakan sekarang ini. Buku ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan di Indonesia khususnya Yogyakarta. Kecuali itu juga bisa dijadikan sumber informasi pada masa Orde Baru

7. Judul Buku : Imajinasi Penguasa dan Identitas Postkolonial: Siasat Politik (Kethoprak) Massa Rakyat  
Penulis : Budi Susanto, S.J.  
Penerbit : Kanisius  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 2000  
Cetakan : I

### **A. Materi Yang Diambil**

Bab 7. Tontonan Nasib Politik Tuntunan Dagelan Mataram Baru

Pada tahun 1993 di Yogyakarta muncul sebuah grup kethoprak bernama Dagelan Mataram Baru (DMB). Pendiri DMB adalah Bondan Nusantara. DMB bertujuan untuk menunjukkan *realitas wacana politik rakyat*. Pentas DMB semakin populer semenjak tahun 1996, PDI Megawati diinjak-injak oleh rezim Orde Baru. Pemberangusan ini mengakibatkan Golkar sebagai mesin politik rezim Suharto mampu menang mutlak dalam Pemilu tahun 1997. Pentas DMB merupakan kritikan terhadap Orde Baru dan Suharto.

Kota dan masyarakat Yogyakarta menjadi salah satu pusat perlawanan dan demonstrasi menentang rezim Orde Baru, khususnya Presiden Suharto. Kota Yogyakarta yang mempunyai banyak perguruan tinggi dan mahasiswanya menjadi unsur penting pembentuk sikap kritis massa rakyat, termasuk kesenian pertunjukan rakyat kethoprak.

Mendahului kota-kota besar lainnya di Indonesia, pada tanggal 11 Maret 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Demonstrasi ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT Supersemar. Dalam demonstrasi ini, mahasiswa membakar patung Suharto. Langsung maupun tidak langsung sesungguhnya sudah ada hubungan erat antara mahasiswa dengan DMB atau kethoprak pada umumnya. Bondan Nusantara sebagai pimpinan dan sutradara utama DMB sering membantu beberapa pentas kethoprak mahasiswa. DMB adalah kebangkitan baru dari tradisi Dagelan Mataram dengan almarhum Basiyo sebagai pelopornya. Dengan keandalannya berbahasa plesetan, Basiyo dan komunitasnya dikenal sebagai orang-orang yang tidak takut bersuara vokal terhadap pemerintah dan penguasa. Perbedaan pokok antara kelompok Basiyo dengan DMB yaitu bahwa satu lakon Dagelan Mataram dari Basiyo dapat dipentaskan berulang-ulang selama beberapa hari. Sementara DMB, satu lakon hanya satu atau dua pentas saja.

Kethoprak plesetan gaya DMB berbeda dengan kethoprak biasa karena cerita DMB tidak lagi bertema keseharian tetapi soal sosial, politik dan ekonomi

sebagai bahan humor. Kethoprak DMB selalu mementaskan lakon-lakon yang berkaitan dengan sepak terjang penguasa Orde Baru khususnya Soeharto.

Pementasan DMB di Purnabudaya, Yogyakarta dari akhir bulan Juni 1997 sampai dengan akhir tahun 1999 antara lain:

- tanggal 25 Juni 1997, lakon *Gendul Gelas Peyek* (Botol, Gelas dan Keripik)
- tanggal 2 - 3 Agustus 1997, *Kudu Manthuk Ora Kena Gedheg* (Harus Mengangguk Jangan Menggeleng)
- tanggal 8 Nopember 1997, *Obah Mamah Nyikut Nggrawut* (Bergerak Mengunyah, Menyikut Mencakar)
- tanggal 21 - 22 Juni 1999, *Sripah* (Dukacita Kematian)
- tanggal 15 Agustus 1999, *Huru Hara* (Huru-hara)
- tanggal 2 - 3 Oktober 1999, *Celeng Dhegleng* (Babi Hutan Sinting)

Enam pentas DMB berkait erat dengan sepak terjang keluarga Cendana dan para kroninya di Indonesia. Lakon di atas dipentaskan sesudah beberapa peristiwa politik nasional yaitu pemilu yang hanya diikuti oleh dua partai dan Golkar; pidato pertanggungjawaban presiden di depan DPR; pencalonan Suharto oleh Golkar untuk menjadi presiden kembali; rencana pengadilan bekas Presiden Suharto oleh Jaksa Agung yang justru diduga terlibat korupsi; pertarungan elit politik di Jakarta menjelang Sidang Umum MPR-DPR; dan menantikan presiden baru RI yang bukan dari kroni Suharto.

Sama-sama membicarakan perilaku para penguasa dari masa lalu, dibanding dengan kethoprak yang biasa, kekhususan DMB adalah memperbincangkan hari esoknya kemarin kehidupan kalangan penguasa khususnya bekas Presiden Suharto dengan keluarga dan para kroninya. Kekhususan DMB yang lain yaitu para pemain tampil apa adanya tanpa memakai polesan bedak atau topeng wajah. Mereka tetap memakai nama masing-masing sebagai nama peran pentas mereka. Para penonton dengan segera cukup mudah menangkap tokoh atau peran siapa, dari keluarga dan kaki tangan Suharto yang sedang ditampilkan di atas panggung. Bantuan kemiripan dari bentuk dan warna kostum, kebiasaan dan bahasa tubuh serta bunyi suara tertentu sangat memudahkan para penonton untuk menangkap siapa-siapa saja sebenarnya yang sedang dimainkan di atas panggung DMB (Hal. 139 - 152).

## **B. Komentar**

Buku ini menjelaskan bagaimana seni pertunjukan massa rakyat kethoprak potensial sebagai sarana dominasi politik media komunikasi massa. Disamping itu kethoprak menjadi media kritik masyarakat dan penguasa. Seni



pertunjukan kethoprak merupakan sarana siasat melawan penguasa tanpa kekerasan. Dagelan Mataram Baru adalah sebuah seni pertunjukan counter culture ketika massa rakyat menjadi ragu terhadap perilaku para penguasa mereka.

Buku ini merupakan hasil pengamatan terhadap pertunjukan kethoprak itu sendiri dengan mengadakan wawancara dengan para penontonnya. Penelitian ini tidak banyak melakukan wawancara pribadi pemain atau beberapa grup kethoprak. Terlepas dari semua itu, tulisan ini bisa menjadi sumber informasi bagi para pembaca bahwa kethoprak bisa menjadi sarana yang cukup penting sebagai penyadaran politik masyarakat.

8.    Judul Buku   :   Dinamika Sosial, Ekonomi dan Politik Yogyakarta  
                              Periode 1957 - 1966  
      Penulis       :   Tashadi, dkk  
      Penerbit     :   Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional  
      Kota Terbit  :   Jakarta  
      Tahun Terbit :   1997/1998

### **A. Materi Yang Diambil**

Bab II Dinamika Sosial, Ekonomi Dan Politik Di Yogyakarta

A. Dinamika politik tentang gerakan protes di Yogyakarta dan sikap anti protes dan konflik di Yogyakarta

Ketidakstabilan politik akibat peristiwa G30S/PKI/65, inflasi, devaluasi rupiah menjadi rupiah baru dengan kurs Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00 uang baru serta kenaikan harga-harga yang membumbung tinggi termasuk harga beras mendorong pelajar dan mahasiswa untuk melakukan aksi atau protes yang didukung oleh kenyataan dari kesulitan hidup pada periode tersebut. Terjadinya percepatan inflasi pada masa itu karena tidak adanya keseimbangan antara peredaran uang dan barang. Meningkatnya inflasi dapat diawali dengan kenaikan harga-harga yang bersifat kumulatif. Kenaikan harga yang mulanya terjadi setiap bulan kemudian meningkat menjadi setiap minggu dan bahkan setiap hari. Suatu persoalan yang menyulitkan terletak pada kenaikan harga yang terus menerus termasuk harga beras yang tidak diimbangi dengan perubahan dalam tingkat upah atau gaji. Situasi yang demikian menyulitkan rakyat kecil dan petani yang tidak bertanah.

Keadaan ekonomi yang buruk dipolitisir PKI yang selalu mengadakan protes, misalnya terhadap harga-harga yang membumbung tinggi. PKI mengatakan yang menyebabkan kenaikan harga adalah tindakan kelompok yang

mereka namakan kapitalis birokrat. Tuntutan PKI bukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat melainkan untuk membakar sentimen dan meningkatkan militansi rakyat.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, PKI mengadakan demonstrasi mendukung Dewan Revolusi yang dimulai dari lapangan Secodiningrat, sebelah timur Kantor Pos Besar menuju Korem 072 di Jalan Jenderal Sudirman. Dewan Revolusi dengan dukungan PKI berhasil menguasai lembaga vital seperti RRI Nusantara II, kantor telekomunikasi, kantor pos dan sebagainya.

Dewan Revolusi yang berhasil menguasai berbagai lembaga vital mendapat ultimatum dari pemerintah pusat agar sampai tanggal 3 Oktober 1965, Mayor Mulyono sebagai ketua dewan menyerahkan Yogyakarta kepada pemerintah yang sah. Mayor Mulyono meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 1965.

Di kalangan pemuda Islam Yogyakarta, sejak tanggal 1 Oktober 1965 telah terbentuk suatu organisasi yang dinamakan Generasi Muda Islam (Gemuis). Gemuis merupakan gerakan anti komunis. Mereka menuntut agar PKI segera dibubarkan. Pada tanggal 4 Oktober 1965 Gemuis mengadakan demonstrasi masal. Gelombang protes terus berlanjut. Aksi protes Gemuis yang dimulai dari Masjid Besar Yogyakarta jumlahnya besar.

Pada tanggal 20 Oktober 1965 merupakan langkah awal terbentuknya kekuatan sosial baru yang anti komunis. Gemuis memprakarsai diadakan rapat. Rapat tersebut diikuti oleh organisasi massa kecuali PNI dan Parkindo. Kolonel Widodo selaku caretaker Danpom 072 menyatakan bahwa PKI dan ormas-ormasnya dilarang mengadakan kegiatan di wilayah tersebut. Keseluruhan organisasi yang mengadakan rapat menyatakan diri sebagai Front Pancasila. Front Pancasila merupakan poros kegiatan sosial politik Orde Baru yang berbeda dengan Front Nasional yang dipandang produk Orde Lama.

Kalangan Mahasiswa front Pancasila membentuk wadah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menuntut dibubarkannya PKI dan ormas-ormasnya. KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) ikut ambil bagian dalam kegiatan KAMI. Pada tanggal 7 sampai 10 Maret 1966 mengadakan demonstrasi. Gerakan protes pelajar dan mahasiswa memakan korban jiwa yaitu Margono dan Aris Munandar.

Sampai menjelang akhir bulan Maret 1967, Yogyakarta masih terjadi konflik. Konflik baru berakhir setelah adanya Sidang Umum Istimewa MPRS. Keputusan yang penting adalah ketetapan XXXIV tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno dan mengangkat Jenderal Suharto sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu (Hal. 45 - 123).

## **B. Komentor**

Permasalahan ekonomi merupakan hal yang selalu menjadi pemicu adanya kegelisahan masyarakat. Apalagi dengan banyaknya partai-partai politik secara tidak langsung ikut serta mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat. Buku ini membahas mengenai betapa pentingnya kestabilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Buku ini bisa dijadikan sumber informasi mengenai keadaan sosial, ekonomi dan politik masa Orde Lama sampai menjelang Orde Baru. Bagi pembaca bisa membandingkan bagaimana situasi masa peralihan Orde Lama menjadi Orde Baru dengan peralihan dari Orde Baru menjadi Reformasi. Namun yang pasti dari buku ini tergambar bagaimana peranan mahasiswa dan pelajar untuk tanggap dan peduli terhadap situasi masyarakat di sekitarnya.

9.    Judul Buku    :    Membedah Politik Orde Baru  
     Penulis       :    Riswandha Imawan  
     Penerbit       :    Pustaka Pelajar  
     Kota Terbit    :    Yogyakarta  
     Tahun Terbit   :    1997  
     Cetakan       :    1

## **A. Mater Yang Diambil:**

Sesuai dengan judulnya buku ini membahas tentang berbagai persoalan dan fenomena yang terjadi pada panggung politik masa Orde Baru di Indonesia. Berbagai persoalan tersebut seperti problematik pemilu, problematik wakil rakyat, problematika demokrasi, sekitar dinamika Parpor, soal kepemimpinan dan manusia Indonesia dibahas dengan gamblang dan penuh analisis. Sebagai contoh bab I tentang Problematika Pemilu. Dalam bab ini dikemukakan bahwa pemilu diyakini sebagai sarana yang paling demokratis untuk memilih elit politik, oleh karena itu kegiatan pemilu selalu mengikut sertakan mayoritas penduduk yang berhak memilih. Pemilu sering dimitoskan sebagai pesta para demokrasi, sehingga pelaksanaannya sering didahului dengan pawai kampanye. Pawai kampanye ini dianggap sebagai sarana paling efektif untuk memperkenalkan suatu partai dan memenangkannya kelak dalam pemilu. Memang diakui bahwa dampak dari kampanye model reli-relihan bisa memacetkan lalu lintas, menambah kecelakaan, dan pemborosan dalam menggunakan BBM, sehingga mendagri Rudini dalam Pemilu 1992 melarang kampanye model reli-relihan. Larangan mendagri tersebut sebenarnya kurang tepat. Hal ini disebabkan pemilu itu sendiri juga berfungsi sebagai sarana pelepasan uneg-uneg, sebagai saluran sebelum persoalan-persoalan

sosial dan politik muncul kepermukaan dalam bentuk konflik.

Pada bagian lain Riswanda juga mengemukakan bahwa kebanyakan orang Indonesia memandang demokrasi sebagai satu tujuan, pada hal sebenarnya demokrasi bagi bangsa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebagai alat, demokrasi terutama digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Oleh karena itu demokrasi selamanya menghendaki rakyat terlibat langsung dalam pemilihan wakil-wakilnya. Terlibat langsung artinya rakyat mengetahui betul kualitas dan popularitas dari calon yang hendak dipilih. Dalam kenyataannya sejak pemilu 1971 tidak demikian, tampaknya faktor popularitas si tokoh sengaja lebih ditonjolkan sehingga muncul *vote getter* yaitu tokoh yang dimasukkan dalam daftar calon tetapi sesungguhnya mereka tidak akan duduk di lembaga legislatif. Munculnya *Vote getter* yang tujuannya untuk merangkul massa sebanyak mungkin, sebenarnya jelas-jelas membohongi rakyat sendiri, dan ini tidak demokratis. Perlu diketahui bahwa kampanye pemilu, yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin, tidak sekedar melibatkan rakyat dalam berfikir, tetapi keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seorang untuk menentukan pilihannya.

Tentang fenomena kampanye 1992 Riswanda menilai tetap "reme", isu-isu besar muncul kepermukaan. Di bidang ekonomi, isu kesenjangan keleluasaan berusaha dan pemerataan, menjadi menu utama retorika jurkam ke tiga OPP. Di bidang sosial, isu tentang pengembangan kehidupan beragama mendapat porsi utama. Tidak ada satupun OPP yang tidak menampilkan alim ulama sebagai jurkamnya. Di bidang politik, menyeruak isu pembatasan jabatan presiden dan penciptaan kehidupan demokrasi yang lebih emansipatif dan responsif. Dari segi pelaksanaannya pemilu tahun ini tidak ada yang luar biasa, berjalan seperti pemilu tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang hebat adalah meningkatnya "kualitas menakut-nakuti" masa melalui arena kampanye.

Tentang fenomena kampanye 1992 ini menurut Riswanda ada beberapa pelajaran yang sangat berharga antara lain:

- Pawai kendaraan bermotor cara yang paling digandrungi orang terutama anak muda. Muncul anggapan masyarakat bahwa Pemilu hanya kegiatan seremonial, hanya pesta, hanya hura-hura, yang tidak bertujuan untuk merubah sesuatu. Karena ide Pemilu merupakan "pesta pora" maka kampanye sendiri dipandang sebagai "kamaval" lima tahunan. Disamping itu massa yang berkumpul lebih tertarik untuk melihat goyang pinggul penyanyi dangdut ketimbang mendengarkan pidato jurkam. Karena keadaan seperti itu, maka kampanye kali ini dipandang kurang efektif.

- Ketika keluar SK Gubernur DIY no. 042/1992 yang berusaha melindungi kepentingan umum, mendadak mendapat reaksi yang cukup keras sehingga terjadi “peristiwa Yogya”. Sebetulnya kejadian itu hanya proses biasa, sebab anak muda tidak puas dengan pelarangan kampanye memakai sepeda motor. Namun sikap aparat birokrasi agak gegabah, menuduh anak muda itu Golput maka reaksi yang muncul justru menjadi besar”. Di Jateng muncul “Peristiwa Semarang”. Di sini anak muda (dalam hal ini simpatisan PDI) tidak sekedar kampanye disamping lima, tapi masuk ke pusat perbelanjaan dan berkampanye di sana, anak-anak muda tersebut berbuat nekad seperti itu karena beberapa hal. Dari segi pribadi anak, mereka sedang dalam taraf pencarian jati diri, karenanya ingin selalu mengeksperikan kehadirannya dengan cara apa pun dan di mana pun. Dari segi lingkungan, isu bebas politik yang dihadapi, tidak mendapatkan jawaban atau jalan pemecahan yang sesuai (Hal. 3 - 38).

## **B. Komentar**

Seperti telah disebutkan di atas bahwa buku ini membahas beberapa segmen tentang Orde Baru dengan jelas, sehingga patut untuk dibaca baik bagi politikus, para birokrat pemerintahan, generasi muda terutama para mahasiswa, pelajar ataupun masyarakat umum. Buku yang ditulis seorang pakar dan pengamat politik ini juga sangat baik kalau dijadikan bahan acuan kalau kita mau meneliti tentang Orde Baru di DIY.

10. Judul Buku : Perkembangan Pemerintah Lokal  
Penulis : R. Joeniarto S.H.  
Penerbit : Alumni  
Kota Tertib : Bandung  
Tahun Terbit : 1979  
Cetakan : 1

## **A. Materi yang diambil:**

Bab VIII yang berisi tentang Perkembangan Pemerintah Lokal di Jawa Tengah dan DIY Periode Tahun 1965 - 1974.

Pada bab VIII ini diantaranya dijelaskan tentang dikeluarkannya Undang-Undang No 18 Tahun 1965 serta beberapa pokok pikiran yang terkandung didalamnya. Di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa wilayah negara dibagi menjadi tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tiap tingkat daerah diberi istilah khusus untuk menyebutnya, seperti: a. Propinsi dan/atau “Kota Raya” menyebut daerah dan/atau kota yang berhak

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tingkat I.

b. "Kabupaten" dan/atau Kota Madya untuk menyebut daerah dan/atau kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tingkat II.

c. "Kecamatan" dan/atau "Kota Praja" untuk menyebut daerah dan/atau kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tingkat III.

Disamping itu Undang-Undang no 18 Tahun 1965 tersebut juga berisi tentang Alat-alat Perlengkapan Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang ini alat perlengkapan Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain kedua alat tersebut ada pula Wakil Kepala Daerah, Badan Pemerintah Harian dan Sekretariat Daerah.

Pada halaman 170 disebutkan tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 18 Tahun 1965 di Daerah Jawa Tengah dan DIY. Disebutkan sebulan setelah undang-undang itu berlaku terjadilah pemberontakan G 30S/PKI yang membawa akibat yang luas sekali, termasuk di bidang pemerintahan lokal. Kebijakan pemerintah dalam hal ini menteri Dalam Negeri, dalam rangka penyempurnaan aparatur Pemerintah Daerah berjalan dengan cepat dan berkali-kali disesuaikan dengan situasi perkembangan pandangan politik, yaitu dengan mengeluarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Februari 1966. No. 3 Tahun 1966 tentang Penyempurnaan Pemerintah Daerah.

2. Instruksi Menteri Dalam negeri tertanggal 3 Juli 1966 no. 13 Tahun 1966 tentang pokok-pokok kebijaksanaan baru dalam melaksanakan Undang-Undang no 18 Tahun 1965.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Oktober 1969 no 145 Tahun 1965 tentang struktur organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah.

Pada bab VIII dari buku yang berjudul Perkembangan Pemerintah Lokal ini disamping membahas tentang dasar-dasar dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah masa Orde Baru di daerah Jawa Tengah dan DIY juga membicarakan tentang Tap-Tap MPR Partai Politik dan Pemilihan Umum (Hal. 153 - 179).

## **B. Komentar**

Buku yang berisi tulisan untuk memperoleh gelar doktor di bidang hukum ini merupakan karya terakhir almarhum R. Joeniarta, seorang dosen pada UGM Yogyakarta. Walaupun tulisan ini belum sempat dipromosikan tetapi isinya sangat padat sekali. Buku ini cocok dibaca terutama para mahasiswa, disamping itu buku ini juga dapat dijadikan sumber kalau mau meneliti masalah pemerintahan Orde Baru di DIY atau sejarah politik DIY pada masa Orde Baru.

11. Judul Buku : Demokrasi dan Pembangunan Daerah  
Penulis : Z.A. Maulani  
Penerbit : Pustaka Pelajar dan CRDS  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Tertib : 2000  
Cetakan : 1

#### **A. Materi yang Diambil:**

Bagian kedelapan, Kerusakan Sosial Legitimasi Politik Orde Baru.

Pada bagian ini dijelaskan bahwa kerusakan sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru tidak dengan serta merta, akan tetapi ada beberapa sebab yaitu:

- adanya ketimpangan sosial ekonomi yang luas di dalam masyarakat.
- adanya ketidakadilan di dalam masyarakat
- adanya bagian atau kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan secara adil di bidang politik, ekonomi, maupun sosial-kultural.

Proses kerusakan sosial itu sendiri semula hanya berupa keluhan mengenai satu-dua kebijaksanaan, tetapi kalau keluhan itu tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, atau tidak mendapatkan jalan keluar, maka keluhan itu mudah berkembang ke taraf keresahan sosial. Meningkatnya skala ketidakpuasan sampai ke taraf keresahan diindikasikan oleh munculnya berbagai pernyataan kepermukaan yang wujudnya tidak lagi sekedar menyuarkan ketidakpuasan, sudah meningkat menjadi kecaman dan pencelaan terbuka terhadap apa saja. Pada masyarakat tertutup ketidakpuasan direfleksikan oleh berkembangnya desas desus, kelucuan-kelucuan politik, sampai kepada surat kaleng dan selebaran atau buletin gelap. Keresahan yang meningkat ditandai dengan adanya unjuk rasa yang kian lama memperlihatkan wajah yang kian beringas.

Disamping membahas akar permasalahan tentang terjadinya kerusakan sosial di beberapa daerah di Indonesia, pada bagian kedelapan buku ini juga menjelaskan tentang dampak kerusakan terhadap legitimasi Orde Baru. Disini dijelaskan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia itu tidak membawa muatan berupa tuntutan untuk menurunkan pemerintah "Orde Baru". Hal itu berbeda dengan demonstrasi tahun 1966 dengan Trituranya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi selama ini bermuansa sebagai protes terhadap kebijakan lokal.

Kerusakan-kerusakan yang terjadi bersifat lokal, tapi kerusakan itu dengan



cepat di atasi dan berhasil diisolasi oleh pemerintah memang ada indikasi tentang upaya untuk memperluas lokasi kerusuhan, seperti usaha dari gerakan solidaritas peristiwa 23 April 1966 Ujung Pandang di Surabaya, dan Yogyakarta atau seruan solidaritas kepada etnik Madura untuk menghabisi mahasiswa yang berasal dari etnik Kalimantan di Jawa Timur. Kedua seruan yang pada dasarnya ingin memperluas kerusuhan yang ada di daerah itu tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat seperti yang diharapkan para pemrakarsa. Kerusuhan-kerusuhan yang ada ternyata tidak sampai meningkat menjadi suatu jaringan nasional, masa pelaku tidak memikul tujuan-tujuan politik yang berlingkup nasional, dan tiadanya pimpinan atau koordinator yang diakui secara nasional.

Dengan demikian, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dampaknya tidak akan mampu memberikan dampak secara nasional, karena coraknya yang lokal dan terisolasi satu dengan yang lain, sasaran-sasaran protesnya terbatas, tidak sistemik, dan terutama sekali tidak terlibatnya dua kekuatan politik utama Indonesia, yaitu umat Islam dan TNI.

Dalam bagian delapan dari buku Demokrasi dan Pembangunan Daerah ini juga membahas secara gamblang bagaimana Golkar pada masa orba selalu menang dalam setiap pemilu (Hal. 101 -112).

## **B. Komentar**

Buku yang ditulis Z.A. Maulani dengan pengantar Sayidiman Suryoprojo ini saya kira cocok dibaca oleh para pengambil kebijakan, guru dan mahasiswa, buku ini dapat juga dijadikan referensi kalau kita mau menulis tentang sejarah politik di Yogyakarta masa Orde Baru.

12. Judul Buku : 60 Tahun Tamansiswa  
Penulis : Moesman Wirjosentono  
Penerbit : Tamansiswa  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun : 1982  
Cetakan : 1

## **A. Materi yang diambil:**

Bab yang diambil tentang Sejarah Perjuangan Tamansiswa Sejak Kemerdekaan (1952-1982). Disebutkan: Tamansiswa sebagai lembaga swasta yang di zaman kolonial selalu mendapat rintangan dan hambatan dari pihak pemerintah jajahan, maka setelah kemerdekaan selalu memelopori dalam memperjuangkan kedudukan perguruan swasta. Sebagai hasil perjuangannya

adalah pengakuan resmi dari pemerintah tentang kedudukan perguruan swasta berdasarkan hukum. Hal tersebut dinyatakan dalam UU No.4/1950 jo No.12/1950 No.12/1954 dan juga TAP MPR No.IV/MPR/1978 atau GBHN tahun 1978. Adapun tujuan tertinggi Tamansiswa adalah terwujudnya masyarakat yang tertib, damai, dan tata-tentrem. Untuk mewujudkan pendidikan nasional, Tamansiswa menyusun suatu program kerja yang dijabarkan menjadi program kegiatan sehingga dapat dilaksanakan secara operasional. Dengan pelaksanaan pendidikan nasional tersebut, berarti ikut sertanya Tamansiswa dalam perjuangan rakyat yang sedang membangun bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.

Pada bab ini juga dikemukakan berbagai kegiatan yang telah dilakukan Tamansiswa, penghargaan yang diterima, serta pasang surut yang dialami sejak kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Pada halaman 280 dan 281 disebutkan bagaimana Tamansiswa pada masa Orde Baru. Disini juga dijelaskan bahwa Orde Baru pada hakekatnya adalah orde yang bertekad untuk melaksanakan kehidupan dan tatanan hidup menegara dan membangun atas dasar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan demikian maka Orde Baru melaksanakan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru bertekad mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Orde Baru bertekad menegakkan kehidupan bernegara dan kemasyarakatan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum, Orde Baru adalah orde-konstitusional dan orde-pembangunan. Sebagai lembaga perguruan swasta, ternyata Tamansiswa dapat berperan lebih aktif dan lebih leluasa dalam melaksanakan pembangunan menurut konstitusi. Kehadiran Tamansiswa dalam era pembangunan merupakan mitra Orde Baru (Hal. 248 - 301).

## **B. Komentar**

Buku yang sebagian besar berisi tentang konsep-konsep dan sejarah tentang Tamansiswa ini sangat baik dibaca oleh para guru, mahasiswa dan siswa. Buku ini dapat juga dijadikan acuan kalau mau menulis tentang Orde Baru di Yogyakarta.

13. Judul Buku : Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Penulis : Poliman, dkk  
Penerbit : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : 1976/1977  
Cetakan : 1

#### **A. Materi yang Diambil:**

Pada Bab VIII ini terdapat sub yang membahas tentang kehidupan Pendidikan dan Seni Budaya. Dijelaskan bahwa sejak sebelum Perang Dunia II di daerah Yogyakarta telah terdapat tempat pendidikan, baik itu yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang berazaskan kebangsaan maupun agama. Tamansiswa adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lembaga ini disamping bertujuan mencerdaskan Pendidikan bangsa juga ingin menumbuhkan perasaan nasionalis pada anak-anak didiknya. Selain di lembaga ini ikut aktif pula orang-orang Islam terutama dari Muhammadiyah dan orang-orang Kristen, baik yang Katholik maupun Protestan. Semua lembaga pendidikan itu mendirikan sekolah-sekolah baik sekolah rakyat (dasar) maupun tingkat menengah.

Setelah pengakuan kedaulatan dan masa Orde Baru, pendidikan di Yogyakarta mengalami perkembangan. Lembaga pendidikan Kristen, yaitu Badan Oesaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia (BOPKRI) telah menambah kegiatan-kegiatannya dengan mendirikan sekolah-sekolah baru dari taman kanak-kanan sampai SLTA. Lembaga pendidikan orang-orang Katholik juga demikian. Sehingga ada sekolah-sekolah Katholik SMA (putra) De Brito. Di lain pihak golongan Islam terutama Muhammadiyah juga mempunyai sekolah-sekolah yang cukup banyak jumlahnya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Sejalan dengan usaha pemerintah melakukan perbaikan di bidang pendidikan dasar/menengah, di Yogyakarta telah didirikan Sekolah Pembangunan baik SMA Pembangunan maupun STM Pembangunan. Sekolah-sekolah pembangunan yang ada di Yogyakarta itu merupakan yang pertama kali didirikan oleh pemerintah. Dewasa ini sekolah pembangunan tersebut telah berjalan dengan baik dan telah mengeluarkan lulusan-lulusannya. Pada masa Orde Baru, dunia pendidikan di Yogyakarta mengalami banyak perkembangan, bukan saja ditingkat pendidikan dasar dan menengah tetapi juga pada pendidikan tinggi, hal tersebut terbukti dengan dibangunnya sarana dan prasarana pendidikan. Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas tertua di Indonesia pada saat ini juga mengalami perkembangan baik bidang sarana dan prasarannya. Jumlah

fakultasnyapun juga mengalami penambahan. Disamping UGM, perguruan tinggi yang lainpun juga mengalami perkembangan seperti IKIP Negeri, IAIN, UII, IKIP Sanata Dharma, Universitas Yanabadra, Atma Jaya dan sebagainya, sehingga tidak kurang dari 35 buah (Hal. 281 - 324).

## **B. Komentor**

Buku ini saya kira dapat dijadikan bahan kajian, terutama kalau kita mau meneliti tentang sejarah pendidikan masa Orde Baru di Yogyakarta.

14. Judul Buku : Dampak Sosial Budaya Akibat Penyempitan Lahan Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta  
Penulis : Dra. Naniek Kasniyah, M.A., dkk  
Penerbit : Proyek P3NB Depdikbud  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : 1993  
Cetakan : Pertama

## **A. Materi yang Diambil:**

Indonesia memulai usaha pembangunan sejak diterapkannya Repelita I. Sampai pada Repelita IV sebagai akibat dari adanya perluasan kota, pembuatan jalan, kantor, pabrik, perumahan dan sarana usaha-usaha lainnya telah mulai tampak dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Memasuki Repelita V pemerintah berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sektor pertanian. Hal ini mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian.

Namun demikian kesadaran untuk mengangkat sektor pertanian ini justru kemudian menemukan fakta telah terjadinya penyempitan lahan pertanian secara umum di Indonesia. Khusus di Propinsi DI Yogyakarta dari data perkembangan pembangunan selama 5 tahun yakni dari tahun 1979-1984 telah terjadi penyempitan lahan pertanian dari 261.146 Ha merosot menjadi 260.108 Ha atau sekitar 0,39%. Dilihat dari angka tersebut memang tidak begitu besar, namun untuk daerah-daerah tertentu prosentasi merosotnya cukup besar khususnya di daerah sekitar perkotaan, tetapi di daerah-daerah yang kurang berlangsung pembangunan fisiknya malah terjadi perluasan lahannya. Dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya di Yogyakarta, tiga daerah lahan pertaniannya terjadi penyempitan dan dua daerah malah bertambah akibat adanya pengeringan rawa atau pembukaan hutan untuk pertanian.

Berikut data penyempitan lahan pertanian di DI Yogyakarta dari data

tahun 1979 hingga 1984; (1) Kabupaten Sleman dari 53.652 Ha menjadi 49.694 Ha atau menyempit 7,38%, (2) Kodya Yogyakarta dari 2.047 Ha menjadi 1.960 Ha atau menyempit 4,25%, (3) Kabupaten Bantul dari 42.583 Ha menjadi 1.960 Ha atau menyempit 0,69%. Sedang 2 kabupaten lainnya yakni (4) Kabupaten Gunungkidul malah bertambah dari 113.967 Ha menjadi 116.278 Ha atau bertambah 2,03% dan (5) Kabupaten Kulonprogo dari 49.220 Ha menjadi 49.887 Ha atau bertambah 1,36%.

Dari Kabupaten Sleman yang merupakan kabupaten terbesar angka penyempitan lahannya tersebut, angka terbesar penyempitan lahan pertaniannya selama tahun 1974 sampai dengan 1984 terdapat di Kecamatan Mlati, yakni dari 2852 Ha menjadi 2198 Ha atau menyempit sekitar 22,93%. Penyempitan lahan pertanian dalam kecamatan ini terdapat di semua kelurahan yang ada yakni; a) Kelurahan Sinduadi dari 1038,6 Ha menjadi 601,5 Ha atau menyempit 42,09%, b) Kelurahan Sendangadi dari 545,1 Ha menjadi 390,1 Ha atau menyempit 28,44%, c) Kelurahan Sumberadi dari 522,1 Ha menjadi 433,3 Ha atau menyempit 17,00%, d) Kelurahan Tlogoadi dari 372,9 Ha menjadi 343,1 Ha atau menyempit 7,99%.

Dikemukakan bahwa dari masyarakat pemilik lahan di desa-desa di atas banyak yang dalam perkembangan 5 tahun tersebut telah kehilangan sama sekali lahannya. Memang ada berbagai sebab yang menyebabkan terjadinya penyempitan tersebut seperti akibat pemekaran kota, pelebaran jalan, pembangunan rumah tinggal, rumah usaha, gedung instansi dan pabrik-pabrik. Melonjaknya harga tanah menggiurkan para petani di desa untuk menjualnya kepada para pembeli dari kota yang kemudian memanfaatkan tanahnya tidak untuk usaha pertanian.

Bagi keluarga-keluarga yang tanah pertaniannya menyempit atau telah kehilangan sama sekali tanah pertaniannya membuat yang bersangkutan umumnya beralih pekerjaan. Hanya sedikit diantara mereka yang masih bisa hidup dengan menjadi buruh tani mengerjakan milik orang lain di desanya. Sebagian besar dampak kehilangan tanah pertanian tersebut adalah terjadinya urbanisasi. Ada yang memang hanya mencari kerja di kota sebagai buruh dan masih tinggal di desanya. Tetapi tidak sedikit pula yang menjadi buruh di kota sekaligus memboyong keluarganya hidup di kota dengan segala kekurangannya.

Secara umum dampak dari terjadinya penyempitan lahan pertanian tersebut meliputi masalah-masalah antara lain: (1) terjadinya mobilitas fisik warga masyarakat seperti adanya urbanisasi dan mobilitas sirkuler, (2) perubahan struktur rumah tangga seperti pengurangan status dan peranan anggotanya, proses sosialisasi anak dan kestabilan rumah tangga, (3) perubahan sumber mata

pencapaian seperti melakukan kerja sampingan yang pernah dilakukannya dan pekerjaan lainnya yang baru baginya seperti tambal ban, montir, buruh perusahaan dan lainnya, (4) dampak di bidang solidaritas masyarakat seperti menipisnya budaya gotong royong, semakin ketatnya persaingan, mudah timbul konflik serta kriminalitas, (5) pengaruh dalam kegiatan upacara adat dan seni seperti upacara daur hidup, upacara siklus pertanian, upacara hari besar Islam, upacara bersih desa, semua masih berlangsung sesuai kemampuan dan kesempatan (Hal. 120-167).

## **B. Komentar**

Adanya kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan program Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai tahun 1966 dan berlangsung selama beberapa Pelita telah banyak merubah wajah tanah air Indonesia. Transportasi semakin maju dengan dibangunnya jalan-jalan. Adanya pabrik-pabrik, rumah-rumah usaha, memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Demikian pula adanya berbagai bangunan fisik menunjukkan telah berlangsungnya pembangunan di negeri ini. Tetapi disamping kemajuan tersebut terdapat pula dampak negatifnya. Berlangsungnya pembangunan fisik berupa bangunan-bangunan tersebut, berakibat terjadinya penyempitan tanah-tanah pertanian yang merupakan mata pencaharian hidup sebagian besar bangsa Indonesia. Terjadinya penyempitan lahan pertanian yang mereka kerjakan atau habisnya tanah pertanian yang dimiliki, telah menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan mereka. Dampak yang banyak negatifnya tersebut tidak bisa dihindari, sebagai resiko adanya kebijakan dalam pembangunan di masa itu.

15. Judul Buku : Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap  
Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Penulis : Drs. Gatut Murniatmo, dkk  
Penerbit : Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-  
Nilai Budaya  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 1993  
Cetakan : Pertama

## **A. Materi yang Diambil:**

Bab V Pariwisata dan Pengaruhnya  
Tentang Dampak Pariwisata Terhadap Perilaku Masyarakat

Dalam Tap MPR No.II/MPR/1998: GBHN dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan perlu ditingkatkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta memperkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Sementara itu pemerintah dalam mengembangkan pariwisata tetap akan memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Pernyataan pemerintah ini ditegaskan dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1990.

Dikembangkannya dunia pariwisata ini ternyata membawa dampak meningkatnya kunjungan para wisatawan di Indonesia. Sejak permulaan tahun 1987, kunjungan wisata di Indonesia menunjukkan jumlah yang meningkat sebanyak sekitar 1.060.000 orang bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama Pelita V jumlah wisatawan yang berkunjung di Indonesia diharapkan sebanyak 2,5 - 3,5 juta orang. Untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan antara 250.000 - 350.000 orang setiap tahunnya. Tentunya dengan adanya Tahun Kunjungan Wisata (*Visit Indonesia Year*) 1991, kunjungan wisata di Indonesia akan lebih meningkat pula terutama di daerah-daerah tujuan wisata seperti Bali, Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sekitar obyek wisata itu merupakan konsekuensi dari dampak pembangunan atau pengembangan pariwisata. Secara konseptual perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan akibat munculnya karena proses akulturasi antara kebudayaan masyarakat sekitar obyek wisata dengan kebudayaan luar yang dibawa para wisatawan yang berkunjung. Dalam proses inilah terjadi saling mempengaruhi antara kebudayaan masyarakat sekitar obyek wisata dengan kebudayaan wisatawan. Di dalam proses pengaruh mempengaruhi antara dua macam kebudayaan yang berbeda itu tampak suatu gejala yang menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar obyek wisata dalam perilakunya dapat menggunakan sistem penilaian yang berbeda menurut lingkungan sosialnya.

Perkembangan pariwisata yang menimbulkan akulturasi dengan dampak terjadinya perubahan nilai-nilai budaya akan berpengaruh pula pada perubahan perilaku individu-individu warga masyarakat. Terutama masyarakat sekitar obyek wisata yang sering dan mengalami kontak langsung dengan para wisatawan. Di Yogyakarta yakni di sekitar Prawirotaman yang mendapat pengaruh perkembangan pariwisata tersebut, terdapat adanya alih profesi para pengusaha batik dan tenun ke usaha penginapan atau guest house untuk para wisatawan serta semakin bertumbuhnya restoran, art shop, biro-biro perjalanan dan money changer. Demikian pula di kawasan pantai Parangtritis yang kemudian banyak bermunculan tempat-tempat penginapan, hotel-hotel dalam rangka mendukung



perkembangan obyek wisata yang semakin ramai pengunjung.

Sementara itu sebagai dampak karena berlangsungnya kontak secara terus menerus antara penduduk setempat dengan para wisatawan, akan terjadi pula perubahan pada sikap nilai, tingkah laku atau perilaku masyarakat di sekitarnya. Ada dampak positif seperti timbulnya dorongan untuk bekerja keras guna memperbaiki standart hidupnya. Namun dampak negatifnya seperti munculnya sikap kecemburuan sosial yang dibangkitkan oleh pola hidup dan kemewahan para wisatawan di tengah-tengah kemiskinan penduduk lokal. Hal ini dapat merangsang timbulnya tindak kejahatan.

Bergesernya norma-norma karena pengaruh perkembangan pariwisata juga akan merubah individu yang memiliki norma. Dengan kata lain bergesernya norma-norma itu akan berakibat pada perubahan sikap dan perilaku pendukung suatu bangsa.

Pengaruh terhadap perilaku itu dapat dilihat misalnya pada peristiwa kemasyarakatan. Terutama perilaku dan sikap para pengusaha guest house yang juga sebagai warga masyarakat Prawirotaman. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu antara lain pelayanan, gotong royong kerja bakti dan lain sebagainya. Terhadap peristiwa-peristiwa sosial seperti itu, para pengusaha guest house tidak memperhatikan atau bersikap masa bodoh. Demikian juga apa yang terjadi di tetangga sekitar sudah tidak memperdulikan.

Dampak lain adalah adanya perilaku masyarakat yang menirukan perilaku para wisatawan terutama di kalangan generasi muda yang kebanyakan putus sekolah. Mereka yang sebagian menjadi pemandu para wisatawan tersebut umumnya terpengaruh oleh perilaku para wisatawan. Mereka ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para wisatawan. Sikap acuh dan masa bodoh terhadap norma-norma asli masyarakat merupakan petunjuk adanya dampak seolah-olah norma-norma asli tergeser. Di samping itu sikap individualisme tampak lebih menonjol seperti yang tampak dalam kehidupan masyarakat lokasi di mana banyak bermukim para wisatawan seperti di daerah Prawirotaman Yogyakarta (Hal. 78 - 129).

## **B. Komentor**

Dampak berkembangnya kepariwisataan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Tap MPR No.II/MPR/1988, ada yang sifatnya positif seperti terdapatnya terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sehubungan dengan munculnya sarana-sarana yang berkaitan dengan kepentingan para wisatawan tersebut. Di Yogyakarta, khususnya di daerah-daerah di mana banyak wisatawan tinggal, muncul hotel-hotel, restoran-restoran dan sarana-sarana lainnya. Di

samping itu timbul pula rangsangan bagi masyarakat untuk menciptakan berbagai barang, cendera mata, penganan-penganan khas yang menarik bagi para wisatawan. Semua itu tentu berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Namun tidak bisa dimungkiri di samping dampak positif tersebut ada pula dampak negatifnya. Dampak yang tidak menguntungkan ini umumnya berkaitan dengan perilaku para wisatawan yang banyak ditiru oleh masyarakat yang banyak berhubungan dengan para wisatawan tersebut. Sementara perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di masyarakat bangsa Indonesia umumnya. Hal ini tampak adanya pergeseran norma-norma yang terdapat di daerah-daerah di mana banyak para wisatawan tinggal. Di daerah-daerah tersebut umumnya sifat-sifat kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, tolong menolong kemudian menipis bahkan hilang dan berganti dengan sikap individualisme, acuh dan masa bodoh.

Kepariwisata perlu dikembangkan tetapi usaha mencegah dampak negatif yang merugikan kepribadian bangsa juga perlu.

16. Judul Buku : Yogyakarta Tempo Doeloe, Sepanjang Catatan  
Pariwisata  
Penulis : Arwan Tuti Artha  
Penerbit : BIGRAF Publishing  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 2000  
Cetakan : Pertama (percetakan: PT Bayu Indra Grafika)

#### **A. Materi yang Diambil:**

Perihal kampanye Pemilu di Era Reformasi (Pemilu tanggal 7 Juni 1999) di Yogyakarta. Bahwa kampanye menghadapi Pemilu tahun 1999 tersebut berkesan menakutkan, sementara ada partai politik yang mencuri start dimulainya kampanye. Mereka seakan mendapatkan kebebasan berada di jalan raya, dengan meraung-raungkan klakson sambil membawa panji-panji partai. Suhu politik juga naik menjelang pelaksanaan pemilu.

Digambarkan pula tentang kampanye pada masa Orde Baru, selama 6 kali pemilu yang meskipun hanya diikuti 3 organisasi sosial politik (PPP, Golkar, PDI), namun suasananya begitu mencekam. Dalam kampanye tersebut apabila mereka bertemu dengan massa partai lain, mereka saling unjuk kekuatan, saling unjuk kebesaran bahkan adu fisik untuk membuktikan siapa yang paling dahsyat. Para pendukung partai politik tersebut seakan berani mati dalam membela

partainya. Meskipun kemudian dicoba dengan model kampanye “dialogis” namun kampanye yang masih dengan pengarahannya massa di jalan dan di tempat kampanye, masih belum menghilangkan suasana mencekam. Sebab suara raung sepeda motor itu masih menggetarkan dada.

Tampaknya dalam kampanye menjelang Pemilu 1999, pola-pola kampanye Orde Baru masih kita jumpai. Tampaknya tetap menimbulkan rasa ketakutan karena begitu riuh rendahnya dan hingar bingamnya bunyi knalpot kendaraan peserta pawai kampanye di jalan-jalan yang dilalui.

Kegiatan kampanye partai-partai politik di Indonesia baik pada masa Orde Baru dan juga masa Reformasi menjelang Pemilu 1999 yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan tersebut di Yogyakarta tampaknya punya nilai-nilai lain. Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing dari manca negara, maka kegiatan kampanye yang mencekam tersebut bahkan menjadi tontonan yang menarik bagi mereka. Karena itu model kampanye yang bagi sementara orang dengan raungan sepeda motor dan gontok-gontokan yang mencekam manakala bertemu dengan kelompok lain yang sama-sama berkampanye malah menjadi event menarik yang mereka tonton, mereka rekam dan potret. Perlukah event-event kampanye yang berlangsung setiap menjelang Pemilu ini dikemas menjadi aset wisata, khususnya di daerah Yogyakarta sebagai kota wisata (Hal. 141 - 145).

## **B. Komentar**

Kebiasaan kampanye yang berlangsung setiap menjelang Pemilu di Indonesia ini, seyogyanya semakin dewasa. Maka yang perlu dipertontonkan oleh para pelaku kampanye Pemilu kepada masyarakat lebih-lebih kepada bangsa lain adalah perilaku terhormat dan beradab. Adalah tidak bijaksana manakala bangsa ini dikenal dan menarik bagi bangsa lain karena perilakunya yang menggambarkan masih rendah peradabannya.

17. Judul Buku : Peristiwa Yogya 1992. Siasat Politik Massa Rakyat Kota  
Pengarang : Budi Susanto, SJ  
Penerbit : Kanisius dan Pusat Studi Realino  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 1993

#### **A. Materi yang Diambil:**

Buku yang berjudul “Peristiwa Yogya 1992”, mempunyai dua bagian yang masing-masing dibagi dalam beberapa bab. Secara ringkas isi yang terkandung dalam buku ini adalah suatu lukisan kisah-kisah dari peristiwa Pemilu tahun 1992 di Yogyakarta. Bagian pertama dari buku ini diawali dengan uraian mengenai bagaimana dan mengapa proses kampanye Pemilu yang sebenarnya sudah berkali-kali berlangsung, tanpa diduga akhirnya melahirkan anarkisme dan pemogokan politis rakyat, dengan contoh kasus ‘peristiwa Yogya’. Fenomena penting dari ‘Peristiwa Yogya’ yakni anarkisme dan pemogokan dilihat oleh penulisnya mempunyai karakteristik dari siasat kebudayaan ‘politis’ yang melibatkan warga masyarakat Yogyakarta. Aksi-aksi kerakyatan tersebut dilakukan dalam suasana konteks praktik kehidupan sehari-hari. Aksi dan siasat yang muncul dalam kampanye Pemilu sebagian besar merupakan “domestikasi” dari rakyat terhadap politik pembangunan yang terus-menerus direkayasa oleh Golkar. Kekhususan politik rakyat dalam peristiwa Yogya 1992 tampaknya menjadi reaksi penting atas menjamurnya slogan pembangunan. Sebagaimana daerah lain, Yogyakarta juga mempunyai slogan pembangunan yang berbunyi “Yogyakarta Berhati Nyaman”. Tidak ada yang menyangsikan lagi bahwa meneruskan pembangunan adalah tema yang mendominasi kampanye Pemilu pihak Golkar, termasuk Golkar wilayah Yogya dan DIY.

Buku ini juga memberi ruang pada ABRI, yakni tentang peranan dan tempatnya dalam rangka mengayomi keberlangsungan rekayasa politik dan kebudayaan. Selama ini, ABRI memperoleh citra sebagai ‘pengayom’ masyarakat, selain itu juga sebagai ‘hakim’ (dalam konteks Pemilu) bilamana ada kecurangan atau pelanggaran dalam kampanye. “Pengayom” dan ‘hakim’ tersebut menjadi sorotan juga dalam buku ini. Perbincangan politik rakyat dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi muatan dalam buku ini. Masalah yang juga diangkat dalam buku ini adalah tentang konsep demokrasi dalam konteks masyarakat Jawa modern, Yogyakarta.

Bagian kedua dari monografi berisi kumpulan kliping koran yang dilengkapi pula dengan kepala berita. Kliping koran yang dimuat dalam monografi

selain penting karena sesuai dengan konteks penulisan juga merupakan dukungan faktual dari kenyataan sejarah pada masa tertentu. Surat kabar seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk merekayasa sebuah sistem informasi melalui berbagai macam citra dan gambaran yang berguna untuk menenteramkan apa yang mereka pandang sebagai sesuatu yang potensial untuk menyalahi ketertiban umum dalam hidup sehari-hari.

Pesta Demokrasi 1992 di Yogyakarta sebagaimana dilukiskan dalam buku ini menunjukkan kerapuhan sebuah rekayasa politik. Produk rekaan demi politik kebudayaan yang dikemas rapi dan ilmiah, seakan-akan mampu membuat hadir konsep atau nilai bermakna demokratis. Kasus istimewa dalam "Peristiwa Yogya 1992" menunjukkan luapan hati dan akal sehat dari massa rakyat yang merasa tidak cocok bilamana unsur-unsur demokrasi sejati ternyata mangkir dari kehidupan sosio-budaya mereka (rakyat) (Hal. 1 - 106).

## **B. Komentar**

Buku ini banyak memberi pemahaman baru tentang makna demokrasi yang datang dari massa rakyat, khususnya massa rakyat Yogyakarta. Demokrasi mempunyai makna yang sesungguhnya sangat lentur ketika harus diterjemahkan isinya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu buku ini akan sangat membantu bagi para perekayasa politik kebudayaan mempunyai pemahaman baru tentang kebudayaan politik dari pihak massa rakyat. Lembaga perwakilan, dana, dan senjata saja, adalah rapuh dan tidak cukup untuk menguasai kehidupan sosio budaya massa rakyat. Rakyat akan mudah menjadi anarkhis dengan aneka siasat kebudayaan politis bilamana dasar dan hak kekuasaan mereka terus menerus dibungkam dan dimandulkan. Di samping itu buku ini juga sangat membantu bagi para peneliti ataupun pemerhati masalah-masalah politik, khususnya tentang dinamika demokrasi di Yogyakarta, karena buku ini dilengkapi dengan sumber-sumber yang berasal dari peristiwa sezamannya, yakni kliping dari surat kabar.

18. Judul Buku : 75 Tahun Gereja St. Antonius Kotabaru: Perjalanan Menjadi Gereja Bagi Semua
- Penulis : Panitia Peringatan
- Penerbit : Panitia Peringatan 75 Tahun Gereja St. Antonius Kotabaru
- Kota Terbit : Yogyakarta
- Tahun Terbit : 2001

### **A. Materi yang Diambil:**

Buku ini pada dasarnya berisi sejarah gereja dari awal berdirinya sampai usia gereja mencapai 75 tahun. Dengan demikian gereja St. Antonius Kotabaru, telah melewati beberapa kali pergantian zaman, yakni zaman kolonial, zaman pendudukan Jepang, dan masa pemerintahan Republik Indonesia. Namun begitu, periodisasi perkembangan gereja yang dipaparkan dalam buku ini, berbeda dengan periodisasi yang tersebut di atas. Secara singkat materi yang ada dalam buku ini dikelompokkan dalam tiga fase sesuai dengan perkembangan gereja.

Fase pertama (1926 - 1966). Pada awalnya gereja St. Antonius Kotabaru merupakan kapel untuk para frater SJ yang sedang belajar tahap awal dari rangkaian pendidikan calon imam SJ. Karena pengaruh misi yang semakin kuat, maka kapel mulai dibuka untuk umat, khususnya orang Jawa. Diskriminasi dalam gereja tampak antara umat dari suku Jawa dengan golongan Eropa.

Awalnya bahasa yang dipakai untuk misa memakai bahasa Latin, sedangkan Imam sebagai pemimpin misa membelakangi umat. Tempat imam berkotbah di mimbar yang terletak pada tiang pertama sebelah utara.

Fase kedua (1966 - 1989). Pada periode ini ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gereja St. Antonius, sebagai langkah penyesuaian dengan Konsili Vatikan II. Perubahan tersebut antara lain, imam tidak lagi membelakangi umat sewaktu memimpin misa, selain itu bahasa daerah pun mulai diperkenalkan untuk acara ekaristi. Umat mulai dilibatkan dalam kegiatan kegerejaan. Perbedaan ras di gereja dalam menghadap Tuhan mulai dihilangkan. Dalam periode ini para imam tidak lagi menggunakan jubah sebagai pakaian wajib, mereka mulai menggunakan celana panjang dan hem.

Fase ketiga (1989 - ) Gereja St. Antonius dan umat di komunitasnya mulai menyadari pentingnya ekaristi yang dapat membawa kebersamaan umat, sehingga mulai dicoba penyusunan dan pengolahan teks yang sesuai dengan tuntutan zaman. Proses ini banyak menimbulkan tanggapan, baik dalam maupun dari luar paroki. Gereja St. Antonius Kotabaru mulai membuka diri untuk semua umat yang datang, komunitas baru di dalam gereja pun tumbuh

semakin beragam tanpa ada pembatas suku, agama, ras maupun teritorial (Hal.1 - 36).

## **B. Komentar**

Buku ini tidak hanya memuat tentang perkembangan gereja dari sebuah gereja yang 'hanya' melayani umat yang terbatas sampai akhirnya menjadi sebuah gereja yang terbuka untuk semua kalangan. Di dalamnya tercakup juga perubahan yang berkaitan dengan tata cara ritual yang ada di dalam gereja beserta konflik yang menyertainya. Walaupun ditulis sangat singkat, namun informasi yang ada bisa dipakai untuk rujukan awal tentang sejarah gereja di Yogyakarta. Lebih jauh lagi buku ini juga bisa dipakai sebagai langkah awal untuk menelusuri perkembangan kehidupan keagamaan di kota Yogyakarta. Sampai saat ini tulisan yang membahas tentang kehidupan ke-agamaan di Yogyakarta masih relatif sedikit. Di samping itu, keberadaan gereja setidaknya secara arsitektural mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan gereja lainnya .

19. Judul Buku : Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi, Visi Sosial, Ekonomi dan Budaya Legislatif - Eksekutif DIY  
Penulis : Totok Daryanto  
Penyunting : Boedi Dewantoro  
Penerbit : Philosophy Press  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 2001  
Cetakan : I

## **A. Materi Yang Diambil:**

Bab II Substansi Otonomi Daerah dengan sub judul Reformasi dan Otonomi Tanpa Desintegrasi.

Orde Baru yang melakukan koreksi terhadap Orde Lama ternyata mengulang kesalahan-kesalahan yang sama dengan zaman yang sarat dengan hujatan tersebut. Di masa Orde Baru selama 32 tahun, pemerataan sebenarnya sudah dicerai sejak awal hingga akhir. Pemerataan hanyalah *lip service* yang berulang kali terbukti seperti api dalam sekam yang mudah meletup dalam bentuk kerusuhan sosial.

Pada masa era reformasi juga ada gejala yang mengulang kesalahan yang sama dengan rezim Orde Baru. Pemerintahan transisi Habibie yang dicap sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Orde Baru tidak mempunyai legitimasi



karena gagal menyelesaikan krisis. Namun demikian Habibie berhasil menanamkan fondasi tatanan pemerintahan yang demokratis dengan membuka kran kebebasan dan produk perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, rakyat mengharapkan pemerintah mampu mengatasi krisis ekonomi dan memberantas KKN, menegakkan supremasi hukum, menerapkan kebijakan perbaikan ekonomi. Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter sejak 1998 sampai sekarang masih menghimpit Indonesia. Dalam mengatasi krisis ekonomi telah disepakati memilih reformasi. Reformasi adalah suatu perbaikan secara gradual, konkret, simultan dan dipercepat agar tidak ketinggalan momentum. Untuk itu kita harus berani melakukan koreksi terhadap jalannya reformasi.

Di tingkat pusat pemerintah sedang terjebak dalam konsolidasi kekuasaan yang berpola aneh. Penggunaan hak interpelasi dan angket DPR diharapkan dapat menjadi koreksi yang menuju ke arah perbaikan reformasi. Para elite politik seharusnya sadar bahwa apa yang dilakukan hanyalah sebuah koreksi, tidak perlu sampai Sidang Istimewa MPR. Untuk itu masing-masing pihak pemerintah dan DPR/MPR harus dapat mengembangkan kearifan, memposisikan diri dalam koridor reformasi berdasarkan komitmen untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Di tingkat daerah yang terjadi diskontinew arah reformasi. Media massa melaporkan bagaimana hak-hak demokrasi yang demikian mahal diperjuangkan dikotori oleh isu-isu *money politic* dalam pemilihan kepala daerah. Perilaku elite politik di daerah juga diwarnai oleh hal-hal yang sangat melukai hati rakyat pemberi mandat. Ciri reformasi adalah demokratisasi, keterbukaan dan restrukturisasi kelembagaan. Pada tatanan ini sebenarnya sudah berjalan relatif baik bahkan agak berlebihan atau sering disebut *euphoria*. Adapun yang masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan adalah perubahan-perubahan dalam *mental set* dan *mind set* dari para pelakunya.

Oleh karena itu solusinya adalah melakukan pendidikan politik secara benar. Partai-partai politik harus merencanakan dan melaksanakan kaderisasi, training fungsional dan penanaman nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Apa yang terjadi diantara kader partai ketika berada dalam lingkungan tugas fungsional seringkali mencerminkan keadaan ketegangan budaya. Mereka kelihatan tidak disiapkan menghadapi realitas yang keras dan menggoda apalagi jika ditambah dengan kualitas diri yang tidak *capable*.

Demikian pula di lingkungan masyarakat umum pendidikan politik juga harus terus menerus diberikan. Adapun yang menjadi pelaksana pendidikan

adalah LSM, mahasiswa pencetus reformasi, ulama, tokoh masyarakat serta komponen bangsa lainnya. Ruang publik harus semakin diberi tempat dalam proses pengambilan keputusan.

Mereka yang biasanya tidak berdaya dan menjadi kelompok yang ditinggalkan dalam kebijakan publik atau sering disebut mayoritas diam (*silent majority*) perlu disadarkan akan hak-hak mereka dan dibangkitkan agar ikut ambil peranan dalam penyusunan kebijakan publik. Jika tujuan akhir reformasi adalah memberikan kemakmuran kepada sebanyak-banyak anggota masyarakat, maka ketersediaan dalam jumlah besar warga masyarakat yang sadar akan hak-haknya ini menjadi mutlak diperlukan. Para wakil rakyat yang bertugas mengontrol pemerintah pun akan mendapat kontrol terus menerus dari masyarakat. Inilah hakekat dari pencerahan reformasi.

Reformasi juga dapat diartikan keinginan untuk mengubah keadaan yang buruk di masa Orde Baru menjadi keadaan yang baik. Pada konteks sifat pemerintahan sentralistik Orde Baru ada keinginan untuk mengubah bentuk pemerintahan yang adil dengan memberikan porsi kekuasaan yang besar kepada daerah. Tuntutan kemerdekaan beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Kalimantan Timur, Riau sebenarnya sangat terkait dengan ketidakanggapan pemerintah pusat pada rasa keadilan yang berkembang di daerah. Bagaimana rasa keadilan masyarakat lokal tidak terganggu jika misalnya seperti Riau yang menyumbang APBN hingga hampir 30% (sekitar Rp 50 triliun) hanya mendapatkan bagian kurang dari 2%. Akibatnya daerah tersebut termasuk dalam kategori daerah miskin dengan fasilitas infrastruktur yang buruk.

Keinginan untuk mengubah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik diwujudkan melalui UU No.22/1999 yang memberikan otonomi luas pada daerah-daerah. Sementara untuk memperbaiki pembagian hasil tambang dan minyak bumi bagi daerah penghasil dibuatlah UU dan PP nya masih banyak kritik ketidakpuasan. Namun yang sudah mendesak adalah segera dimulainya pelaksanaan otonomi itu sendiri dan segera diperbaikinya porsi pembagian kekayaan alamnya. Dalam pelaksanaan reformasi aspek akselerasi yang terkait dengan momentum perlu diperhatikan. Kekecewaan yang tertunda akan menimbulkan desintegrasi khususnya daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi pemerintah pusat tentu tidak dapat terburu-buru apalagi menjanjikan yang tidak realistis dalam menerapkan reformasi dan otonomi.

Reformasi total memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Reformasi politik harus mampu meletakkan supremasi hukum sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Perbaikan ekonomi yang berkeadilan harus segera dapat diwujudkan atau

paling tidak ada tanda-tanda ke arah kemajuan.

3) Secara sungguh-sungguh mempersiapkan perubahan *mental set* dan *mind set* bangsa agar siap memasuki era reformasi. (Hal: 109 - 119).

## **B. Komentar**

Buku yang berjudul Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi, Visi Sosial, Ekonomi dan Budaya, Legislatif Eksekutif DIY ini terdiri dari beberapa judul. Jadi buku ini merupakan bunga rampai. Salah satu judul dalam buku ini adalah Reformasi dan Otonomi Tanpa Desintegrasi yang ditulis oleh Totok Daryanto dan disunting Boedi Dewantoro. Penulis maupun penyunting adalah anggota DPRD Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecuali itu juga tokoh-tokoh reformasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengenai isi tulisan ini sangat bagus dan baik untuk menjadi bahan bacaan bagi pengamat politik maupun orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Buku ini sangat penting bagi upaya perluasan mengenai otonomi daerah maupun siapa saja yang ingin mendalami pemerintahan otonomi daerah. Hanya saja bahasanya sulit untuk dimengerti. Untuk mengetahui isi buku ini harus dibaca berulang-ulang.

20. Judul Buku : Jatuhnya Soeharto  
Penulis : Ikrar Nusa Bhakti  
Editor : Geoff Forester dan R.J. May  
Penerbit : Aliansi Jumalis Independen (AJI)  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : 1999  
Cetakan : I

## **A. Materi Yang Diambil**

*Kecenderungan Gerakan Mahasiswa 1998.*

Gerakan mahasiswa 1998 mempunyai sejumlah persamaan dan perbedaan dengan gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya. Gerakan mahasiswa yang berhasil menumbangkan rejim hanya terjadi pada tahun 1966 karena didukung rakyat, dan yang terpenting didukung militer. Gerakan mahasiswa 1966 berperan dalam melahirkan pemerintahan Orde Baru. Para pendukung gerakan mahasiswa 1966 dikenal sebagai Angkatan 66. Angkatan mahasiswa 1974, 1978 dan 1998 meniru angkatan 1966 tetapi tidak pernah berhasil membujuk ABRI terutama Angkatan Darat agar mendukung aksi-aksi mereka.

Gerakan mahasiswa yogyakarta dimulai bulan Pebruari 1998 di kampus

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahap awal ini mahasiswa memulainya dengan melakukan jajak pendapat di kampus tentang apakah MPR harus mencalonkan kembali Suharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya atau tidak. Hasilnya lebih dari 90% peserta mahasiswa menolak pencalonan kembali Suharto.

Rupanya banyak alasan yang melatarbelakangi penolakan mereka. Pertama, Suharto telah berkuasa lebih dari 30 tahun, maka inilah saat yang tepat bagi terjadinya suksesi politik di Indonesia. Isu suksesi politik ini bahkan dilontarkan para dosen UGM terutama Dr. Amien Rais; Kedua, selama Orde Baru berkuasa kesenjangan sosial ekonomi antara yang kaya dan miskin sangat lebar; Ketiga, fenomena korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan monopoli terus meningkat; Keempat, Suharto yang selama 1960 - 1970-an menjadi pahlawan dan figur yang baik untuk stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi mulai berubah menjadi beban dan faktor negatif untuk stabilitas politik dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu mahasiswa mulai mencoba melontarkan isu-isu suksesi dan reformasi di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Jejak pendapat itu dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Namun Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 tidak menindaklanjuti tuntutan mahasiswa secara positif. Akibatnya mahasiswa menyuarakan aspirasinya lebih keras lagi pada bulan April 1998 setelah Sidang Umum MPR.

Pada bulan Maret 1998 sebelum dan sesudah Sidang Umum MPR, demonstrasi mahasiswa tidak hanya berlangsung di kota-kota di Jawa melainkan juga diluar Jawa seperti Medan, Lampung, Denpasar, Ujung Pandang dan sebagainya. Pada tahap awal mahasiswa menuntut penurunan harga bahan pokok yang melangit sejak Juli 1997. Pada tahap kedua, mahasiswa menuntut MPR tidak mencalonkan kembali Suharto untuk ketujuh kalinya. Pada tahap ketiga sesudah MPR memilih Suharto dan Habibie sebagai presiden dan wakil presiden, mahasiswa dengan dukungan kelompok-kelompok kritis lain menuntut reformasi politik, ekonomi secara menyeluruh.

Meskipun Suharto berulang-ulang menyerukan agar mahasiswa kembali kuliah dan memperingatkan akan menindak mereka yang melakukan aksi yang dinilai pemerintah telah mengganggu ketertiban umum dengan tindakan represif, sejak akhir April 1998 seruan itu hanya dianggap angin lalu. Mahasiswa memilih sikap pantang mundur atas kemajuan yang telah dicapai. Mereka tidak merasa takut lagi meskipun banyak diantara mereka telah tewas ditembak aparat keamanan baik di Medan, Yogyakarta dan Jakarta. Jatuhnya korban jiwa di pihak mahasiswa tidak membuat gerakan mahasiswa berhenti atau reda. Ia justru meningkatkan sekaligus mengefektifkan aktivitas mahasiswa dengan

tuntutan Turunkan harga atau juga Turunkan Harto dan Keluarga. Perjuangan mahasiswa semakin mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat seperti buruh, dosen, guru besar, dokter, perawat bahkan tukang becak. Dengan kata lain kelompok kritis berkembang dari kekuatan moral ke *people power*.

Masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang mendesak turunnya Suharto sebagai prakondisi untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi dan kelompok yang menginginkan dilanggengkannya *status quo*. Sejumlah faksi dalam militer, DPR dan pemerintah berpandangan bahwa reformasi politik harus dijalankan secara gradual dan suksesi harus dilaksanakan secara konstitusional. Meskipun mahasiswa dan kaum intelektual selalu mengajukan pertanyaan apakah sudah cukup bukti bahwa suksesi dapat dilakukan secara damai dan konstitusional, banyak diantaranya ingin mempergunakan *people power* untuk tujuan itu (Hal. 145-148).

## **B. Komentar**

Buku yang berjudul "Jatuhnya Soeharto" merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul "The Fall of Soeharto" dan sebagai editornya adalah Geoff Forrester dan R.J. May. Buku ini terdiri dari kumpulan tulisan yang ditulis oleh para akademisi Indonesia maupun luar negeri. Para penulis tersebut antara lain George Junus Aditjondro dari Departemen Sosiologi dan Antropologi *University of Newcastle Australia*; Ed Aspinall mengajar bahasa dan politik Indonesia di Departemen bahasa Cina dan Bahasa Indonesia *University of New South Wales*; Ikrar Nusa Bhakti adalah peneliti di Pusat Kajian Politik dan Regional LIPI; Harold Crouch adalah pengajar di Departemen Perubahan Sosial dan Politik *Research School of Asian and Pasific Studies di Australian National University* dan sebagainya.

Buku ini berisi tentang keadaan sosial, ekonomi, politik, militer di Indonesia menjelang dan saat Presiden Suharto jatuh. Meskipun buku ini terdiri dari kumpulan tulisan-tulisan tetapi bahasanya baik dan mudah dimengerti. Buku ini baik untuk menjadi bacaan bagi siapa saja. Dengan terbitnya buku ini akan menambah dunia pustaka di Indonesia dan bisa menjadi sumber informasi tentang reformasi yang terjadi di Indonesia.

21. Judul Buku : Budaya Jawa dan Mundunya Presiden Suharto  
Penulis : Hiro Tugiman  
Penerbit : Hiro Tugiman  
Kota Terbit : Bandung  
Tahun Terbit : 1998  
Cetakan : I

## **A. Materi Yang Diambil**

### *Bab IV Bangsaku Bersendu*

#### **- Di Yogyakarta Massa Mengamuk**

Di sepanjang jalan Gejayan, jalan Mrican dan jalan Adisucipto ratusan batu berukuran gede, puluhan pot bunga, besi rongsokan, tiang lampu atau gardu telepon umum bertaburan di jalanan. Abu bekas ban mobil yang dibakar menghitam di jalan. Belum lagi kayu pepohonan yang melintang di jalan. Lampu setopan di depan kampus IKIP Yogyakarta menggelayut dan remuk.

Benda-benda tersebut di atas merupakan saksi kerusakan Selasa petang sampai Jum'at tanggal 5 sampai 8 Mei 1998. Amuk massa dan mahasiswa berawal di pelataran Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dengan payung Solidaritas Mahasiswa Sanata Dharma (Somasi) menggelar mimbar bebas. Yel politik terdengar keras meminta agar Presiden Suharto, harga barang dan BBM diturunkan. Menjelang siang, massa makin berjubel. Halaman kampus Universitas Sanata Dharma tidak memuat lagi. Orasi mahasiswa makin panas. Sedangkan pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) Polres Sleman mengamati dari kejauhan. Seorang pembicara mengajak mahasiswa *long march* ke kantor DPR di jalan Malioboro. Ternyata ajakan tersebut disetujui oleh massa.

Di jalan Gejayan, pasukan Dalmas menghadang, akan tetapi massa terus maju. Pasukan Dalmas terpaksa mundur. Kapolres Sleman, Letkol Bambang Purwoko Harsono meminta mahasiswa kembali ke kampus. Ajakan itu disambut sumpah serapah. Somasi meminta Kapolres Sleman mengawal mereka ke DPRD. Untuk itu Kapolres Sleman mendatangkan Kolonel Subagio, Ketua DPRD I Yogyakarta dan Letkol Sriyono H.P dari Fraksi ABRI. Ketika mahasiswa meminta jaminan *long march* ke DPRD, Subagio setuju tetapi hanya diwakili beberapa mahasiswa. Tiba-tiba Letkol Sriyono disandera dan didaulat memegang spanduk berisi ceriaan terhadap Presiden Suharto. Pada pukul 17.20 Somasi membubarkan aksi. Akan tetapi aksi membakar ban dan kertas mulai merebak. Meskipun pasukan Brimob mendesak, massa tak takut. Ketika matahari terbenam penyerbuan dilakukan. Korban luka-luka pun jatuh di kedua belah pihak.

Akibat penyerangan yang diwarnai tembakan gas air mata suasana

agak reda. Polisi dan tentara menarik diri dari jalan Gejayan ke jalan Adisucipto pada pukul 20.40. Warga pun bergabung ke keramaian itu sehingga  $\pm$  15.000 an orang tumpah ke jalan Gejayan. Massa merusak gardu PLN, merusak lampu lalu lintas dan telepon umum. Pada saat itu terjadi lempar batu ke arah polisi dan tentara. Pada pukul 23.30 puluhan truk pasukan tentara datang dan mulai menghalau massa. Massa kocar-kacir dan pengejaran dilakukan sampai kampus dan kost mahasiswa di kawasan itu. Kerusuhan menular pula ke sepanjang jalan Adisucipto. Dini hari ribuan massa membakar ban di tengah jalan. Tiga unit boks telepon yang mengelola 2.400 sambungan telepon di Yogyakarta Timur dibakar. Aksi massa baru selesai menjelang subuh.

Pada tanggal 7 dan 8 Mei 1998 (hari Kamis dan Jum'at) aksi massa berlanjut bahkan Moses Gatotkaca meninggal karena dipukul sekelompok orang yang teridentifikasi sebagai aparat keamanan. Ia meninggal dalam ambulan setelah ditemukan tergeletak di pojok utara Hotel Radison sekitar pukul 21.37 Jum'at 8 Mei 1998. Kerusuhan tiga hari terakhir itu juga merusak Gedung Yamaha Motor, Gedung Kentucky Fried Chicken dan Gedung Bank BHS.

Menurut Fidelia Ratri, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Sanata Dharma aksi Somasi itu diketahui Rektor Universitas Sanata Dharma, Pastor Sastraprateja dan sudah bubar menjelang mahgrib. Akan tetapi ketika mahasiswa masuk kampus dan pulang, massa lainnya bertambah banyak. Artinya kegiatan itu bukan dikoordinasikan Universitas Sanata Dharma. Kapolda DIY, Kolonel Bani Siswono pun menilai aksi itu sudah ditanggapi. Dalam analisis dan fakta polisi, ada kelompok yang sengaja mengacau kampus. Setelah Universitas Gadjah Mada menutup diri, mereka mencari universitas lain.

Polisi sudah bertemu Rektor dan Senat Mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Soalnya Universitas Sanata Dharma pun tidak menghendaki kejadian itu. Universitas Sanata Dharma dipakai sebagai subyek untuk membenturkan ABRI dengan mahasiswa. Danrem 072/Pamungkas Yogyakarta Kolonel Joko Santosa mengatakan bahwa penembakan, *sweeping* ke kampus dan kost mahasiswa juga diluar perintah. Kalaupun ada hanya pengembangan saja. Menurut Kolonel Joko Santosa bisa saja ada orang lain "mengail di air keruh" (Hal. 113-117).

#### **- People Power Ala Yogya**

Kemudian pada tanggal 20 Mei 1998 bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional sekitar satu juta orang berkumpul di Alun alun Utara Keraton Yogyakarta. Pengerahan massa atau *people power* ini merupakan yang terbesar dalam gerakan reformasi di Yogyakarta. Semua orang berkumpul mempunyai satu tujuan melakukan *tapa pepe* untuk mendengar pernyataan



Sultan Hamengku Buwono X.

Aksi *tapa pepe* yang sekaligus merayakan Hari Kebangkitan Nasional merupakan terobosan, dikoordinasi aktivis kampus. Mereka membuat sebelas titik keberangkatan yang tersebar di sekeliling kota Yogyakarta. Setiap titik mempunyai koordinator lapangan yang akan mengatur pergerakan mahasiswa dan masyarakat ke Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta. Massa mulai mengalir ke titik-titik pemberangkatan sejak pukul 07.00. Ada koordinator lapangan yang membuat acara lebih dahulu di titik-titik pemberangkatan sebelum berangkat. Ada juga yang langsung bergerak ke Alun-alun. Mahasiswa yang berkumpul di titik pemberangkatan UGM mengikuti dulu upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di depan rektorat. Upacara ini diikuti ± 40.000 sivitas akademika UGM.

Acara yang dihadiri Sri Sultan Hamengku Buwono X ini diwarnai pelepasan balon dengan poster bertuliskan “Mendesak Presiden Suharto Turun”. Akademika sivitas UGM dalam pernyataannya yang dibacakan Prof.Dr. Kunto Wibisono (Ketua Kagama) mendesak Suharto untuk turun dari jabatannya. Usai upacara seluruh sivitas akademika UGM langsung bergerak ke selatan menuju Alun-alun Utara. Mereka bergabung dengan massa dari titik-titik pemberangkatan lainnya. Sekitar pukul 10.00 lautan manusia mulai terbentuk di ruas-ruas jalan. Semua menuju ke Alun-alun Utara. Hampir semua golongan masyarakat terwakili mulai pegawai negeri, mahasiswa, pelajar, pedagang sampai tukang becak.

Barisan massa yang panjangnya berkilometer itu bemyanyi sambil meneriakkan yel-yel turunkan Suharto, adakan sidang istimewa dan sebagainya. Di sepanjang perjalanan para pemilik toko menyediakan makanan dan minuman yang boleh diambil oleh siapa saja. Masyarakat yang tidak ikut dalam barisan berdiri di pinggir jalan untuk memberi semangat. Di tengah terik matahari, massa tetap bertahan duduk di Alun-alun Utara atau di tengah jalan sambil mendengarkan orasi aktivis mahasiswa dari berbagai kampus.

Sekitar pukul 13.00 Sri Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas didampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam VIII dan Rektor UGM Ichlasul Amal keluar dari Siti Hinggil. Bagi masyarakat Yogyakarta figur Sri Sultan Hamengku Buwono X memang sangat karismatik. Massa yang telah menunggu sejak pagi langsung histeris, berteriak-teriak “hidup Sultan, hidup Sultan”. Saat Sri Sultan Hamengku Buwono X berdiri di mimbar suasana hiruk pikuk langsung berubah menjadi hening dan sunyi.

Kemudian Sultan mengangkat tangannya yang terkepal, massa pun langsung menyambut dengan teriakan “hidup reformasi”. Sri Sultan dalam pidatonya menyatakan bahwa banyak penguasa yang salah memaknakan simbol-simbol budaya Jawa. Sedihnya penggunaan istilah itu sering bertolak belakang

dengan yang diajarkan oleh para leluhur.

Usai pidato, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima pernyataan aksi dari wakil mahasiswa Yogyakarta dan keluarga Moses Gatotkaca. Dilanjutkan dengan pembacaan maklumat bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPA A Paku Alam VIII. Maklumat yang berisi empat butir pernyataan itu antara lain mengajak masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung gerakan reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak kepada rakyat. Kecuali itu Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPA A Paku Alam VIII mengajak ABRI untuk melindungi rakyat serta menjadikan gerakan reformasi sebagai wujud kemanunggalan ABRI dan rakyat. Kedua beliau itu juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk keselamatan bangsa dan negara. Sebelum meninggalkan panggung Sri Sultan Hamengku Buwono X masih sempat memberikan pesan agar masyarakat Yogyakarta tidak membuat kerusuhan. Yogyakarta bukan kota kerusuhan dan juga bukan kota penjarahan.

Himbauan Sri Sultan Hamengku Buwono X itu dipatuhi masyarakat sehingga sampai acara berakhir, di Yogyakarta tidak ada insiden yang terjadi. Karisma Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPA A Paku Alam VIII menjadi sangat penting. Sikap Keraton Yogyakarta yang membela kepentingan rakyat bukanlah hal yang baru. Raja sebelumnya yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikenal sangat membela rakyat (Hal. 134 - 140).

## **B. Komentar**

Buku yang berjudul “Budaya Jawa dan Mundurnya Presiden Suharto” sangat bagus untuk dibaca oleh siapa saja terutama generasi muda. Buku ini menyajikan pengertian budaya yang bersifat umum, etika Jawa, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di tanah air pada bulan Mei 1998 dan ditutup dengan beberapa simbol budaya yang merupakan ajaran orang Jawa.

Oleh sebab itu buku ini akan menambah khasanah pustaka kita dan merupakan sumber informasi masa reformasi bagi kita semua terutama generasi muda. Diharapkan buku ini dapat meyakinkan kita semua bahwa sistem budaya Indonesia itu indah, cantik dan luhur. Tinggal bagaimana kita memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti.

22. Judul Buku : Dari Revolusi Ke Reformasi, 50 Tahun Universitas Gadjah Mada  
Penulis : Djoko Suryo, dkk  
Editor : Bambang Purwanto, Djoko Suryo, Soegijanto Padmo  
Penerbit : Universitas Gadjah Mada  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 1999  
Cetakan : I

#### **A. Materi Yang Diambil:**

Meretas Kendala Menghadapi Tantangan, dengan sub judul Universitas Gadjah Mada dan Reformasi.

Sejak periode Pembangunan Lima Tahun I tahun 1969 hingga 1990-an, Orde Baru dengan segala kelemahan dan kelebihan telah meraih beberapa prestasi seperti tercapainya swasembada pangan, pengembangan industri berteknologi tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi. Namun dibalik prestasi itu reaksi dan tuntutan rakyat atas ketidakadilan pembangunan merebak dimana-mana. Reaksi-reaksi yang muncul dari masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa, petani, golongan ketua adat, cendekiawan maupun tokoh agama sebenarnya telah muncul sejak tahun 1970-an. Akan tetapi pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang cenderung anarkis dan otoriter untuk sementara berhasil meredam tuntutan-tuntutan itu. Penangkapan, penahanan, penculikan bahkan pembunuhan misterius telah ditempuh oleh pemerintah Orde Baru untuk membungkam reaksi masyarakat itu. Organisasi-organisasi politik, LSM bahkan badan legislatif telah dikebiri sehingga kontrol politik terhadap kekuasaan pemerintah sangat lemah.

Menjelang Pemilu tahun 1997 tanda-tanda akan dipilihnya kembali Jenderal Purnawirawan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang keenam mulai mengemuka sejak munculnya kembali tradisi kebulatan tekad. Pada saat itulah harapan-harapan masyarakat tentang perubahan akan kembali terganjal. Oleh karena itu muncullah ide yang sangat berani dari Dr. Amien Rais, seorang dosen senior dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada yang mengusulkan adanya pembatasan jabatan presiden. Dipilihnya kembali Jenderal Purnawirawan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk yang keenam kalinya pada tahun 1997 menunjukkan bahwa badan legislatif tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Praktik pemerintahan yang korup dan melemahnya nilai tukar rupiah, naiknya harga barang pokok dan pemutusan

hubungan kerja yang meluas telah menjadi momentum bagi masyarakat untuk melontarkan berbagai macam tuntutan yang telah terakumulasi sejak lama.

Sejak bulan Maret 1998 mahasiswa Universitas Gadjah Mada memelopori reformasi total dengan serangkaian gerakan protes atau demonstrasi yang semula berskala kecil dan sporadis semakin lama semakin meluas. Meluasnya dukungan terhadap aspirasi rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa tidak lepas dari dukungan moral seluruh elemen kampus, baik dosen, pimpinan universitas maupun pimpinan Kagama. Prof. Lukman Sutrisno mendesak rektor agar segera menyikapi perkembangan politik di tingkat nasional yang sedang terjadi. Para pimpinan universitas termasuk Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ichlasul Amal dan juga Ketua Kagama, Prof. Kuntowibisono menyambut baik ajakan itu dan secara terang-terangan memberi dukungan terhadap gerakan mahasiswa.

Pada tanggal 3 dan 4 April 1998 terjadi bentrokan antara mahasiswa yang berdemonstrasi dengan aparat keamanan yang menimbulkan korban di pihak mahasiswa. Sekitar 26 mahasiswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dalam bentrokan itu dilakukan pula serangkaian penangkapan terhadap para peserta aksi. Tercatat 200 mahasiswa dibawa ke Markas Kepolisian Daerah untuk diperiksa. Dalam penangkapan ini tampak bahwa aparat keamanan sangat kelewat karena beberapa mahasiswa yang ditangkap ke Mapolda justru mereka yang tidak sedang berdemonstrasi, tetapi sedang membaca di Perpustakaan Unit V atau sedang berada di tepi jalan menunggu bus untuk pulang. Sikap reformis dan bertanggung jawab rektor tampak dari pembelaannya terhadap kegiatan demonstrasi mahasiswa yang dianggapnya sah-sah saja selama masih berada di lingkungan kampus. Bersama-sama dengan Pembantu Rektor III, Prof. Ichlasul Amal berhasil membebaskan 39 mahasiswa yang ditahan di Mapolda. Rektor juga mengecam keras tindakan aparat keamanan yang telah bersikap *overacting* dan memasuki lingkungan kampus.

Sikap para pimpinan Universitas Gadjah Mada ini telah mendorong semakin luasnya gerakan mahasiswa di luar Universitas Gadjah Mada. Kemudian diikuti pula gerakan rakyat baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lain di Indonesia. Menjelang tanggal 20 Mei 1998, Universitas Gadjah Mada menjadi tempat berkumpulnya para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta bahkan juga dari Surakarta dan Purwokerto. Hampir setiap hari mereka berkumpul di Boulevard Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan pikiran dan tuntutan mereka bagi reformasi total dengan berbagai cara, baik dengan orasi, membangun tenda-tenda keprihatinan sampai dengan puasa dan mogok makan.

Para aparat kepolisian memberi ultimatum bagi para mahasiswa yang

sedang melakukan demonstrasi menentang penculikan aktivis mahasiswa agar segera mengosongkan Jalan Gejayan sebelum matahari terbenam. Akan tetapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh massa. Akhirnya bentrokan pun tidak bisa dihindari. Massa yang berlarian masuk ke kampung-kampung dikejar oleh aparat keamanan. Mereka yang tertangkap diseret, dipukuli atau ditendang. Dalam peristiwa ini seorang pemuda bernama Moses Gatutkaca meninggal.

Di samping aksi-aksi demonstrasi, Universitas Gadjah Mada juga menempuh langkah kongkrit untuk merumuskan konsep reformasi secara jelas di berbagai bidang baik politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Dengan SK No.1560/701.P /KL/98 tertanggal 7 Mei 1998, Rektor Universitas Gadjah Mada menerbitkan SK tentang pembentukan tim perumus konsep reformasi di bidang politik, hukum, sekonomi dan sosial budaya. Tim ini beranggotakan 15 orang.

Pada tanggal 19 Mei 1998 (yang betul 20 Mei 1998) Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa dinamika perkembangan krisis nasional sudah mengancam persatuan dan kesatuan nasional sebagai akibat akumulasi kemarahan massa terhadap praktik-praktik kehidupan ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencegah situasi berkembang menjadi tragedi nasional, maka seluruh civitas akademika dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada menyatakan empat butir pernyataan. Pertama, mendesak agar Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan tuntutan rakyat. Kedua, menuntut Presiden Suharto untuk mempertanggungjawabkan politik adu domba terhadap para pendukung gerakan reformasi. Ketiga, mendesak segera dibentuk Presidium Pimpinan Nasional yang terdiri tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang diterima rakyat. Keempat, menyerukan kepada para mahasiswa dan seluruh elemen bangsa lainnya untuk bekerja sama mewujudkan reformasi total sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Pada tanggal 20 Mei 1998 (yang betul 21 Mei 1998) Presiden Suharto mengundurkan diri kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang diikuti dengan pembentukan kabinet baru. Berkaitan dengan pembentukan kabinet baru itu, Universitas Gadjah Mada kembali memberikan seruan dan peringatan bahwa kabinet baru yang dibentuk tanggal 22 Mei 1998 itu tidak akan mampu memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Untuk mencegah perpecahan di kalangan para pendukung reformasi maka civitas akademika Universitas Gadjah Mada kembali mengeluarkan seruan agar seluruh kekuatan reformasi agar tetap bersatu menjaga stamina dalam mencapai tujuan reformasi total di bidang politik, hukum dan ekonomi (Hal.123 - 127).

## **B. Komentar**

Buku yang berjudul “Dari Revolusi Ke Reformasi, 50 Tahun Universitas Gadjah Mada” berisi tentang sejarah perkembangan Universitas Gadjah Mada sejak berdiri sampai masa reformasi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang baik, artinya menurut tata bahasa yang benar dan mudah dipahami. Kecuali itu buku tersebut dilengkapi dengan foto-foto. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada perlu untuk membaca buku ini. Terbitnya buku “Dari Revolusi Ke Reformis, 50 Tahun Universitas Gadjah Mada” akan menambah khasanah pustaka di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya.

## **B. ARTIKEL**

1. Judul Artikel : KAMI Jogjakarta: Bubarkan Dewan Mahasiswa UGM; Pernyataan KAMI Jogjakarta  
Dimuat Dalam : Mertjusuar  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Rebo, 13 April 1966  
Halaman : 1 dan 3

### **A. Materi yang Diambil:**

Selasa tanggal 12 April 1966 telah berkumpul kurang lebih 3000 mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), menyampaikan pernyataan antara lain: menuntut agar Demas/Kodenma/MenMahakarta dihentikan kegiatan-kegiatannya serta dibentuk kembali Demas/Kodenma/ MenMahakarta yang representatif. Kedudukan dekan/ dosen/pegawai di lingkungan UGM yang berindikasi/mewarisi aspirasi mental ideologi PKI supaya ditinjau kembali. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Syaiful Mudjab wakil dari KAMI diterima Supoyo, M.Sc, Pembantu Rektor UGM.

Di kantor Dewan Mahasiswa UGM yang terletak di Pagelaran Yogyakarta, semenjak beberapa hari terlihat corat-corek sebagai pelampiasan rasa ketidakpuasan mahasiswa terhadap dewan tersebut. Coretan-Coretan tersebut berbunyi: Bubarkan Dewan Plin Plan, Bubarkan Pewaris Gestapu, Demas Gama Bubar. Papan nama Sekretariat Dewan Mahasiswa UGM juga dicorat-corek.

Beberapa waktu lalu, organisasi-organisasi mahasiswa progresif revolusioner di Yogyakarta telah menyatakan tidak mengakui Dewan Mahasiswa UGM. Ketidakpuasan itu terletak pada fakta-fakta bahwa Demas Gestapu seperti Sudiyono di jaman awalnya Gestapu dengan menyebarkan fitnah-fitnah terhadap organisasi mahasiswa lawannya. Selanjutnya semenjak dulu, Demas dikuasai oleh GMNI dan dalam melaksanakan tugasnya telah banyak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Pernyataan KAMI Yogyakarta dikeluarkan tanggal 12 April 1966, ditandatangani oleh Ketua Basjiruddin dan sekretarisnya Moh. Thamrin:

- Pembentukan Dewan Mahasiswa UGM dilaksanakan pada saat menggeloranya prolog Gestapu PKI dan dilakukan oleh arsitek-arsitek pembunuhan Pahlawan Revolusi Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiyono, yaitu Mayor Dainury dan Letnan Sumardi.

- Dewan Mahasiswa UGM dan Resimen Mahakarta telah didominasi dan disalahgunakan oleh Ali Surahman dari GMNI.



## B. Komentor

Berakhimya penumpasan G30S/PKI berakibat segala sesuatu yang ada hubungannya dengan PKI harus dimusnahkan. Keadaan seperti ini terjadi di kalangan perguruan tinggi. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi harus dibersihkan dari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan PKI.

Tulisan ini bisa dipakai sebagai sumber informasi mengenai situasi perguruan tinggi setelah berakhirnya G30S/PKI. Yogyakarta pada masa itu sudah diwarnai dengan berbagai bentuk protes baik berupa coret-coretan maupun orasi. Mahasiswa menjadi pemrakarsa setiap adanya gerakan protes terhadap penguasa.

- |    |               |   |                                 |
|----|---------------|---|---------------------------------|
| 2. | Judul Artikel | : | Benteng Vredenburg Makin Cantik |
|    | Penulis       | : | -                               |
|    | Dimuat Dalam  | : | Suara Merdeka                   |
|    | Kota Terbit   | : | Semarang                        |
|    | Tahun Terbit  | : | Minggu, Januari 1987            |

## A. Materi yang Diambil:

Gagasan untuk memanfaatkan bekas peninggalan benteng *Vredenburg* menjadi sebuah pusat informasi dan pengembangan budaya nusantara dikukuhkan pada tanggal 9 Agustus 1980 di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Waktu itu Piagam Perjanjian ditanda tangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pihak pertama dan DR. Daoed Joesoef Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai pihak kedua.

Berdasarkan petunjuk dan pengarahannya almarhum Prof. DR. Noegroho Notoso (ketika menjabat Mendikbud) pada tanggal 5 Nopember 1984 bahwa pemugaran bekas Benteng *Vredenburg* bertujuan tidak melestarikan simbol keperkasaan dan kejayaan kolonial Belanda. Akan tetapi bekas benteng itu dipugar dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi fungsi baru yang dapat memberikan informasi dan inspirasi perjuangan nasional bagi generasi-generasi mendatang.

Selanjutnya secara lebih nyata almarhum Prof. DR. Noegroho Notoso memberikan arahan pemanfaatan bekas benteng *Vredenburg* ini untuk Museum Perjuangan Nasional yang khas dan tidak ada duanya di Indonesia. Sesuai Piagam Perjanjian tersebut dan surat Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 359/HB/IV/85 tanggal 16 April 1985 antara lain disebutkan perubahan-perubahan di dalam diizinkan sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan gagasan tersebut diadakan semacam penelitian/visualisasi data sejarah dalam bentuk diorama yang pengerjaan dan penelitiannya

dipercayakan kepada Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Dengan cara memvisualisasikan data sejarah ke dalam bentuk diorama, masyarakat dapat melihat dan meresapi peristiwa sejarah melalui adegan-adegan yang digambarkan secara miniatur dengan penampilan suasana sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dengan melihat peristiwa yang digambarkan secara tiga dimensi tersebut masyarakat akan terasa lebih tergugah dan lebih dapat cepat menghayati kejadian-kejadian yang digambarkan.

Para pengunjung nantinya akan dapat menyaksikan bagaimana kemerdekaan ini dapat diperoleh yaitu sejak perjuangan kemerdekaan yang telah dirintis oleh Pangeran Diponegoro hingga kemerdekaan yang dicapai tanggal 17 Agustus 1945.

Perlu juga diingat bahwa benteng yang dikenal dengan nama *Vredeburg* ini dulu dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I tahun 1756 tidak lama setelah menempati istana Yogyakarta dan selesai pada tahun 1787. Kemudian diberi nama *Rustenburg* yang berarti benteng untuk mengaso atau istirahat. Kemudian diusulkan Belanda untuk disempumakan guna menjamin keamanan pemerintahan Sultan. Setelah selesai kemudian diberi nama *Vredeburg* yang berarti perdamaian. Pada masa penjajahan Belanda benteng ini ditempati pasukan sebanyak 500 orang. Waktu itu di dalam benteng ada bangunan untuk asrama pasukan, rumah-rumah perwira, rumah sakit, gudang dan rumah residen.

Pada waktu penjajahan Jepang (1942-1945) benteng ini digunakan sebagai markas tentara Jepang dan tempat tahanan perang. Sedangkan pada masa revolusi fisik (1945-1949) yakni pada masa Agresi Militer II kembali dikuasai Belanda. Baru setelah tahun 1949 diambil oleh RI dan digunakan untuk instansi militer RI sebagai markas dan pemukiman. Status benteng ini adalah milik Sri Sultan Hamengku Buwono. Batas-batasnya di utara Jalan Pabringan, di selatan Jalan Panembahan Senopati, di timur Jalan Sriwedari dan di barat Jalan A. Yani.

## **B. Komentar**

Dengan ditetapkannya Benteng Vredeburg sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya oleh Pemerintah RI c.g. Depdikbud pada tanggal 9 Agustus 1980, maka untuk menghapus kesan seolah-olah bangunan ini sebagai simbol kejayaan kolonial Belanda bisa dengan mensosialisasikan sejarahnya bahwa bangunan ini sebenarnya dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I tahun 1756 selesai tahun 1787 sebagai tempat istirahat. Bahwa kemudian ada usul dari Belanda untuk menyempumakan pembangunan benteng ini, hanyalah siasat Belanda untuk lebih ketat mengawasi gerak gerak Hamengku Buwono I yang

dikhawatirkan sewaktu-waktu akan mengadakan perlawanan terhadap kompeni. Setelah disempurnakan Belanda itulah bangunan ini diberi nama *Vredenburg* yang berarti perdamaian. Dan ketika Belanda berkuasa bangunan ini diambil alih dan dijadikan benteng sebagai pusat pertahanan tentara Belanda.

3. Judul Artikel : Pembangunan Yogya Cenderung Mengabaikan Aspek Sejarah  
Penulis : -  
Dimuat Dalam : Harian Kedaulatan Rakyat  
Kota Tertit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 11 Januari 1985  
Halaman : 1, 12

#### **A. Materi yang Diambil:**

Dalam artikel tersebut ditulis bahwa pembangunan tata kota Yogyakarta pada masa Orde Baru kurang memberikan citra yang baik terutama dari aspek sejarah, bahkan aspek ini cenderung diabaikan. Pada hal nilai-nilai sejarah mempunyai arti penting dan tidak lepas dengan predikat kota Yogya. Kota Yogya dengan segala isi yang ada di dalamnya mempunyai kaitan erat dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaannya. Namun peninggalan-peninggalan sejarah yang mampu membangkitkan semangat dan banyak bercerita tentang perjuangan bangsa, hampir musnah. Hal tersebut membuktikan bahwa pembangunan Kota Yogyakarta pada saat itu (masa Orde Baru) mencerminkan sikap mengabaikan aspek sejarah. Gedung Kejaksaan Tinggi di Jalan A. Yani (depan pasar Beringharjo) kini sudah musnah, gedung BKRI juga sudah lenyap, sekarang ditempati pertokoan yang sama sekali tidak mencerminkan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan.

Disamping itu dalam artikel ini juga ditulis persoalan-persoalan yang timbul yang dapat memberi citra tidak nikmat untuk diamati, dirasakan dan dihayati dari pertumbuhan Kota Yogyakarta pada masa itu (Orba). Banyaknya pemusnahan lembah-lembah di Yogyakarta dan disulap menjadi bangunan-bangunan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, bukan merupakan keterpaduan antara bangunan-bangunan dan lembah-lembah dengan serasi, namun justru sebaliknya. Pada hal seharusnya bangunan-bangunan yang didirikan dapat menjadi pelengkap keindahan alam. Artikel ini disamping mengupas tentang pembangunan Kota Yogyakarta baik secara fisik maupun mental, juga mengetengahkan tentang perkembangan tata Kota Yogyakarta dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Yogyakarta pada masa Orde Baru.

## **B. Komentar**

Artikel ini sarat akan data mengenai pembangunan dan perkembangan Kota Yogyakarta. Disamping merupakan hasil kajian pakar di bidang arsitektur, artikel ini juga merupakan hasil pengamatan para praktisi pemerintahan seperti mantan walikota, ketua Bapeda dan sekretarisnya. Oleh karena itu artikel ini cocok dibaca oleh masyarakat umum dan dapat dijadikan sumber, kalau mau meneliti masalah sejarah perkotaan pada masa Orde Baru di Yogyakarta.

- |                  |   |                                                  |
|------------------|---|--------------------------------------------------|
| 4. Judul Artikel | : | Kerukunan Antar Umat Beragama di DIY Baik Sekali |
| Penulis          | : | Wagub DIY Paku Alam VIII                         |
| Dimuat Dalam     | : | Harian Bemas                                     |
| Kota Terbit      | : | Yogyakarta                                       |
| Tahun Terbit     | : | 7 April 1987                                     |
| Halaman          | : | 2                                                |

## **A. Materi yang Diambil:**

Artikel ini berisi tentang kebijaksanaan Pemda DIY tentang kehidupan beragama. Dalam artikel ini Wagub DIY Paku Alam VIII mengemukakan bahwa perkembangan kehidupan beragama untuk mengembangkan dialog antar pemuka agama di DIY berhasil dengan baik. Prestasi besar yang harus dapat dicapai oleh Depag dengan segenap jajarannya di daerah, terutama sekali memajukan perikehidupan beragama yang selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sesudah itu hendaknya dibina kerukunan agama. Dengan terbinanya hidup rukun dan saling menghormati antara sesama umat beragama, antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal membangun masyarakat. Dalam artikel ini juga dikemukakan tentang pola umum Pembangunan DIY jangka panjang, diantaranya dalam rangka memperkuat peranan Yogya sebagai pusat kebudayaan dan pembangunan pendidikan.

## **B. Komentar**

Artikel yang merupakan pernyataan dari Wagub DIY Paku Alam VIII ini patut dibaca oleh masyarakat Yogyakarta khususnya dan dapat digunakan sebagai data kalau mau menulis tentang kerukunan beragama pada masa Orde Baru di DIY.

5. Judul Artikel : Kotamadya Yogyakarta 40 Tahun  
Penulis : Soegiyono  
Dimuat Dalam : Harian Kedaulatan Rakyat  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : 6 Juni 1987  
Halaman : 6

### **A. Materi yang Diambil:**

Artikel ini membahas tentang pemerintahan di DIY setelah berjalan selama 40 tahun, yaitu sejak kemerdekaan sampai tanggal 7 Juni 1987. Pada usianya yang genap 40 tahun, Kotamadya Yogyakarta dianggap cukup dewasa untuk ukuran pemerintah daerah, dan selama itu pula telah dicapai pelbagai macam perkembangan. Hingga tanggal 7 Juni 1987 Kotamadya Yogyakarta telah berganti walikota enam kali dengan wali kota yang terpendek menduduki jabatan Ir. Enach dan terpanjang Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. Dalam usianya yang ke 40 tahun ini walikota Yogyakarta di jabat oleh Jatmiko D. Suatu masalah yang rumit yang harus ditangani adalah rencana pengembangan kota Yogyakarta dari seluas 33,5 kilometer persegi menjadi 100,5 kilometer persegi. Rencana perluasan kota ini memang telah dirintis oleh walikota Soedjono AY dan diteruskan oleh walikota Ahmad dan walikota Soegiarto. Masalah perluasan kota Yogyakarta merupakan masalah yang rumit, karena menyangkut dua daerah kabupaten yang terlibat di dalamnya yaitu Kabupaten Bantul dan Sleman. Artikel ini disamping memuat tentang sedikit pemerintahan, juga berisi tentang rencana pengembangan tata kota Yogyakarta pada masa Orde Baru dan berbagai permasalahannya yang kurang memperhatikan lingkungan dan sebagainya.

### **B. Komentar**

Artikel yang ditulis oleh pengamat tiga zaman tentang Yogyakarta ini sangat baik untuk dibaca terutama oleh generasi muda dan para pecinta kota Yogyakarta. Artikel ini saya kira dapat untuk menambah data apabila kita mau menulis tentang sejarah perkotaan pada masa Orde Baru di DIY.

6. Judul Artikel : Perubahan Sifat Istimewa Yogyakarta  
Penulis : P.J. Suwarno  
Dimuat Dalam : Harian Kedaulatan Rakyat  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Rabu, 11 Januari 1989

#### **A. Materi yang Diambil:**

Tanggal 19 Desember 1988 terjadi peristiwa besar di Yogyakarta dan perundang-undangan Indonesia berkaitan dengan dilantiknya Wakil Gubernur KDH Prop. DIY Sri Paku Alam VIII sebagai pejabat Gubernur/KDH Prop. DIY serta penegasan Pemerintah Pusat cq Mendagri tentang sifat-sifat istimewa Yogyakarta yang berbeda dengan yang diamanatkan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Mendagri menegaskan bahwa keistimewaan Yogyakarta terletak pada menjadinya Yogyakarta sebagai pusat kedudukan perjuangan bangsa mempertahankan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keistimewaan Yogyakarta seperti yang ditegaskan Mendagri tersebut dasar hukumnya tidak dapat ditemukan baik pada UU No. 5 Tahun 1974 maupun pada UUD 1945. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang menyebabkan Yogyakarta istimewa dan berbeda dengan daerah lain justru menyangkut kepala daerahnya seperti yang diatur oleh pasal 91 b yang berbunyi: "Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya". Sementara itu pasal 18 UUD 1945 menyatakan: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa ...". Dalam penjelasan pasal 18 angka II disebutkan bahwa dalam teritoris Negara Indonesia terdapat 250 *zelfbesturend landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang istimewa.

Dalam peristiwa pelantikan Wagub KDH Prop. DIY Sri Paku Alam VIII sebagai Pejabat Gubernur KDH Prop. DIY tersebut Pemerintah cq Mendagri menegaskan bahwa keistimewaan Yogyakarta tidak dianalogikan dengan

kesultanan dan Paku Alaman. Karena itu dianggap menyimpang dari jiwa pasal 18 UUD 1945.

## **B. Komentar**

Kalau Pemerintah RI masih melestarikan sifat istimewa maka sesuai dengan UUD 1945 harus mengakui susunan asli dari daerah tersebut. Dalam hal Yogyakarta harus tetap diakui sebagai gabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Lagi pula peraturan mengenai daerah Yogyakarta harus mengingat hak asal usulnya kesultanan yang diperintah oleh seorang Sultan. Ini berarti undang-undang harus mengukuhkan Sultan sebagai Kepala Daerah. Tentu saja dengan persyaratan-persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang.

7. Judul Artikel : Kapankah Kita Berhenti Memusuhi Pemuda Kita Sendiri.  
Penulis : Arief Budiman  
Dimuat Dalam : Harian Kompas  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : 18 September 1989  
Halaman : 4

## **A. Materi yang Diambil:**

Dalam artikel ini disebutkan penangkapan terhadap beberapa mahasiswa UGM Yogyakarta seperti Bambang Subono, Isti Nugroho dan beberapa mahasiswa yang lain. Para mahasiswa tersebut adalah para aktivis yang sering melakukan kegiatan diskusi. Oleh pengadilan beberapa mahasiswa tersebut diputus pidana penjara antara 7-8 tahun. Menurut pertimbangan hakim yang memberi vonis, pada dasarnya mereka dianggap telah mengkritik keberhasilan pembangunan pemerintah Orde Baru, menyebarkan ideologi lain, yang kesemuanya dianggap membahayakan kelestarian Pancasila dan kemantapan generasi penerus. Sebagai reaksi atas putusan pengadilan tersebut rekan-rekan mahasiswa dari beberapa kota kemudian mengadakan aksi solidaritas di Yogya. Yang menarik adalah reaksi Rektor UGM. Berbeda dengan di ITB, rektor UGM menyatakan tidak akan memecat mahasiswa dan pegawai yang telah divonis tersebut dengan alasan proses peradilannya belum selesai (mereka naik banding) Sikap ini tentunya sangat simpatik bagi para mahasiswa.

Dalam artikel ini arief Budiman juga memberikan penilaian terhadap para mahasiswa tersebut "mereka adalah orang-orang yang tinggi integritas kepribadiannya dan kepekaannya terhadap nasib orang kecil yang ada di bawah.



Mereka sangat mendambakan terciptanya masyarakat Indonesia yang berkeadilan, demokratis, makmur dan sejahtera. Mereka adalah minoritas di kalangan teman-teman mahasiswa mereka, karena kebanyakan mahasiswa lain sibuk dengan proyek dirinya, yakni bagaimana meraih ilmu untuk bisa sukses. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan apa yang mereka anggap benar, dengan segala risikonya. Pada hal, kebanyakan mahasiswa lain, meski mengakui kebenaran perjuangan temannya, tidak berani bicara, apalagi berdemonstrasi. Para aktifis mahasiswa tersebut sebenarnya memiliki kepekaan dan sangat cerdas. Akan tetapi kecerdasannya mereka pakai untuk memperluas pengetahuan mereka (antara lain mempelajari alternatif pembangunan yang lebih baik bagi Indonesia), supaya mereka, pada suatu saat, menciptakan sebuah bangsa yang kuat, makmur, dan adil.. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan mereka adalah kaum muda idealis yang patriotik.

Artikel ini juga berisi tentang bagaimana seharusnya pemerintah memperlakukan para aktifis mahasiswa tersebut secara bijaksana. Selain itu juga berisi tentang himbauan kepada ABRI agar bertindak lebih positif, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kepemimpinan ABRI di bidang politik. Lebih lanjut dijelaskan salah satu kelemahan adalah kurang luwesnya banyak perwira ABRI yang menduduki jabatan kepemimpinan sipil dalam mentransformasikan manajemen militer ke manajemen sipil.

## **B. Komentar**

Artikel yang ditulis seorang pengamat politik dan pakar di bidangnya ini diakhiri dengan rasa kekuatiran penulis akan hilangnya benih-benih kreatif dan dinamis bangsa ini. Oleh karena itu artikel ini sangat baik untuk dibaca terutama bagi para pengambil kebijakan dan mahasiswa. Artikel ini saya kira dapat dijadikan sumber kalau kita mau menulis tentang sejarah politik Orde Baru di DIY

- |    |               |   |                                                    |
|----|---------------|---|----------------------------------------------------|
| 8. | Judul Artikel | : | Deklarasi Yogya Kiat Atasi Bunuh Diri Arsitektural |
|    | Penulis       | : | -                                                  |
|    | Dimuat Dalam  | : | Harian Kedaulatan Rakyat                           |
|    | Kota Terbit   | : | Yogyakarta                                         |
|    | Tahun Terbit  | : | Senin, 3 Pebruari 1992                             |

## **A. Materi yang Diambil:**

Ketika pemerintah menyelenggarakan pembangunan, maka akibat adanya perencanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek warisan

budaya dan arsitektural telah terjadi bunuh diri arsitektural dan tergusurnya bangunan-bangunan kuno yang punya nilai sejarah dan estetika tinggi. Masalah itu terungkap ketika berlangsungnya pertemuan informal dan dialog tentang Pelestarian Budaya Bangsa di Hotel Santika tanggal 31 Agustus sampai 1 Februari 1992 di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut telah dikeluarkan “Deklarasi Tentang Persoalan Warisan Budaya Bangsa”.

Kalau bunuh diri arsitektural tersebut terus dibiarkan maka akan banyak lagi bangunan-bangunan bersejarah yang tergusur. Padahal bangunan-bangunan itu sangat penting bagi generasi muda sebagai sumber ilmu dan pengetahuan sejarah. Gedung-gedung baru memang perlu demi pembangunan. Akan tetapi dalam pembangunan itu jangan mengenyampingkan atau menggusur bangunan tertentu yang punya nilai penting. Diakui memang sebagian warisan berasal dari kolonial tapi justru itulah pentingnya diketahui bahwa kita punya sejarah yang sangat panjang dan kemerdekaan yang dilalui dengan perjuangan yang sangat hebat.

Ketika itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap sebagai yang masih banyak mempertahankan bangunan-bangunan kuno. Hal itu karena pemerintah DIY masih sangat memperhatikan suara masyarakatnya. Karena itulah antara lain sehingga pertemuan informal tersebut diselenggarakan di Yogyakarta.

Isi deklarasi yang disepakati para pakar ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh LSM tersebut adalah (1) Telah tiba saatnya untuk menggalang kekuatan-kekuatan pelestarian di Indonesia sebagai langkah awal menuju terciptanya kesinambungan nilai-nilai budaya masa lalu, kini dan esok; (2) Atas kesadaran bersama bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang tersebar di segenap pelosok tanah air dan pada saat ini menghadapi berbagai tekanan pembangunan yang destruktif, maka kami sepakat untuk merintis usaha-usaha pelestarian lingkungan bangunan bersejarah dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh; (3) Guna mewujudkan kesepakatan tersebut kami memutuskan untuk membentuk/ mengkonsolidasikan organisasi pelestarian baik dalam skala nasional, regional dan lokal yang didukung oleh jaringan informasi dan kerja sama terpadu; (4) Untuk menjamin keberhasilan usaha pelestarian budaya yang merupakan kepentingan masyarakat, dinilai perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat; (5) Memutuskan segera melakukan tindakan-tindakan nyata dalam bentuk pertemuan-pertemuan penerbitan, kegiatan-kegiatan aktual di masyarakat dan kegiatan lain yang terkait.

## B. Komentar

Pada masa Orde Baru sebagai kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang juga banyak diperlukan lahan strategis dan luas untuk bangunan-bangunan instansi pemerintah seperti kantor Gubernur, kantor DPRD, Gedung Pertemuan, rumah dinas Gubernur dan pejabat lainnya bahkan untuk bangunan pusat perbelanjaan. Terbukti hanya untuk kepentingan tersebut telah terjadi penggusuran-penggusuran bangunan bersejarah yang kaya nilai budaya dan arsitekturnya. Karena kepentingan pembangunan dan ketidakmengertian para penguasa telah banyak bangunan bersejarah yang tidak berhasil dipertahankan oleh rakyat dan masyarakat sadar budaya. Hasilnya memang di lokasi-lokasi strategis di berbagai kota muncul bangunan-bangunan baru modern dan megah sementara bangunan-bangunan yang mewariskan nilai sejarah dan budaya telah terkubur.

Melihat gejala yang memprihatinkan itulah di Yogyakarta pada tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 1992 para pakar dan tokoh LSM bertemu dan telah menghasilkan suatu keputusan yang bernama "Deklarasi Yogyakarta Tentang Persoalan warisan Budaya Bangsa" tersebut di atas.

9.    Judul Artikel       :    Imam Masjid Ikut Demonstrasi  
      Penulis            :    -  
      Dimuat dalam     :    BERNAS  
      Kota Terbit       :    Yogyakarta  
      Tahun Terbit     :    Sabtu, 2 Mei 1998  
      Halaman          :    1

## A. Materi yang Diambil:

Aksi unjuk rasa masyarakat Yogya Jumat (1/5) berlangsung di halaman Masjid Besar Kauman, Alun-alun Utara. Sekitar 1.000 orang terdiri jamaah salat Jumat, mahasiswa, pelajar termasuk anak-anak dan warga sekitar Kauman, Yogya, usia salat Jumat hingga pukul 14.50 WIB berkumpul dalam aksi menuntut reformasi politik dan ekonomi di halaman Masjid itu. Pada aksi itu Imam Masjid Kauman KH. Haiban tampil di mimbar mendukung aksi.

Sementara puluhan mahasiswa Universitas Widy Mataram Yogyakarta (UWMY) yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) kemarin gagal berarak menuju Keraton Yogyakarta. Blokade petugas keamanan di gerbang kampus menyebabkan mereka tak bisa melanjutkan niatnya menemui Sri Sultan HB X sebagai Ketua Yayasan UWMY.

SMKR juga mengkoordinasikan unjuk rasa di Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta (UMY) di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto, sebagaimana aksi yang digelar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) di depan kampus Jalan Tamansiswa 158 Yogyakarta.

Demonstrasi juga meletus di IKIP Jakarta dan kampus-kampus di Bandung. Sedangkan di Sumatera, Universitas Lampung (Unila) kembali marak. Malah aksi berlangsung dalam dua gelombang yakni sebelum dan setelah salat Jumat.

Kekerasan meletus lagi di Medan, ketika para mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) bentrok dengan petugas keamanan. Para mahasiswa melempari petugas dengan batu sebagai balasan atas semburan gas air mata. Sedangkan di Padang, para mahasiswa menumpahkan unek-uneknya di Taman

Makam Pahlawan karena mereka menganggap wakil-wakil rakyat masa kini sudah tak lagi menyuarkan aspirasi.

Unjuk rasa di kauman terus berlangsung meski sempat diguyur gerimis selama sekitar 1 jam. Di sini para ibu warga Kauman menyediakan 1.000 kantung plastik air minum berupa sirup dan teh.

Pada aksi yang dimotori Angkatan Muda Muhammadiyah Kauman ini, berbicara di mimbar Imam Masjid Kauman KH. Haiban Hadjid. Selain Haiban, berpidato seorang ibu warga Kauman, Mardiyem alias Momoye (mantan *Jugun Ianfu* - wanita yang dijadikan budak nafsu seks oleh tentara Jepang) dan Ketua SM UGM Ridaya La Ode Ngkowe, dokter Faisal AR Fachruddin (anak almarhum AR Fachruddin, Ketua PP Muhammadiyah) dan Ketua SM UII Ridwan Baswedan dan dosen UII Busyro Muqoddas SH, M.Hum. Mereka mendukung apa yang selama ini diteriakkan mahasiswa melalui aksi-aksinya yang telah berlangsung terus-menerus selama lebih dari dua bulan di berbagai tempat.

Dalam pidatonya, Imam Masjid Kauman antara lain mendukung aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa menyerukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apa yang dilakukan mahasiswa, katanya termasuk dalam *amar ma'ruf nahi munkar* karena di dalamnya menuntut dihapuskannya keburukan-keburukan dan penyelewengan. "Jangan takut untuk berjuang menegakkan kebenaran. Tempat ini dulu merupakan saksi para pejuang menyiapkan perjuangannya melawan Jepang!" tegas Haiban Hadjib disambut pekik "Allahu Akbar".

Di Solo, aksi unjuk rasa yang digalang oleh Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (SMPR) berlangsung di boulevard Universitas Sebelas Maret (UNS) Jumat (1/5). Aksi yang melibatkan eksponen pelajar, buruh dan pengamen itu semakin keras dan tegas bersama-sama menyerukan tuntutan reformasi politik dan ekonomi. Hadir dalam acara itu Ketua DPC PPP Solo, Moedrick Sm Sangidoe.

Sementara Tim Pencari Fakta DPP Ikadi yang dikoordinasikan Sudjono, SH memantau aksi. Berlangsung di bawah guyuran air hujan, aksi itu juga disemarakkan oleh dua buah spanduk yang dibentangkan di seberang jalan, terpampang ke arah peserta unjuk rasa. Spanduk dari DPC PPP Solo yang berbunyi: *Dukung aksi mahasiswa menuntut reformasi ekonomi dan politik*. Dan sebuah spanduk sederhana berbunyi: *Rakyat Sudah Punya Sembako (Semangat Melibas Koruptor)* yang dibuat oleh warga masyarakat. Dalam kesempatan itu tampil memberikan orasi dari kalangan pelajar yang tergabung dalam Aksi Pelajar Indonesia (API), pengamen, buruh wanita dan Moedrick Sangidoe. Di Semarang, kemarin 50 pemuda dan pemudi yang menamakan diri dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia Semarang (gabungan dari GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, Pemuda Katolik) melakukan unjuk rasa di DPRD Jawa Tengah. Setelah berorasi di halaman kemudian berdialog dengan beberapa anggota dewan di ruang serba guna.

Aksi juga berlangsung di Purwokerto, Jumat kemarin di depan gedung rektorat kampus Universitas Jenderal Soedirman. Aksi damai yang dikoordinasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini diikuti sekitar 500 orang.

## **B. Komentar**

Aksi unjuk rasa menuntut reformasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi di berbagai daerah. Di Yogyakarta, aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa. Kalangan pemuka agama sudah terlibat dalam aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa tidak mengenal gender, laki-laki dan perempuan bersama-sama melakukan unjuk rasa. Tulisan ini bisa digunakan untuk sumber informasi tentang situasi tuntutan reformasi.

10. Judul Artikel : Tertib Di Yogya, Beringas Di Semarang
- Penulis : -
- Dimuat dalam : BERNAS
- Kota Terbit : Yogyakarta
- Tahun Terbit : Rabu, 13 Mei 1998
- Halaman : 1

## **A. Materi yang Diambil:**

Selasa, 12 Mei 1998 aksi unjuk rasa menuntut reformasi oleh para mahasiswa Yogyakarta tetap marak. Secara serentak ratusan mahasiswa dari sekitar sembilan perguruan tinggi yaitu Universitas Ahmad Dahlan, Universitas

Sarjanawiyata Tamansiswa, STPMD APMD, STIE Widy Wiwaha, Akindo, ABA YIPK, Universitas Wangsa Manggala dan Akubank menggelar aksi di kampus mereka masing-masing. Demo di Yogyakarta berlangsung santun dan tertib.

Aksi mahasiswa IAIN Walisanga Semarang berubah beringas setelah terjadi adu fisik antara mahasiswa dan aparat keamanan. Satu mobil patroli dirusak dan digulingkan serta nyaris dibakar. Seorang mahasiswa mengalami luka robek terkena senjata tajam di lambung kiri dan tiga lainnya luka di kepala dan patah jari tangannya. Sedangkan aksi di kampus Unisula berlangsung tertib.

Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin informal masyarakat Yogyakarta tetap enggan berkomentar tentang maraknya aksi mahasiswa dan keinginan mereka untuk *sowan* kepadanya. “Yang penting selama ini saya *nglakoni*” katanya. Berbicara di hadapan sejumlah wartawan usai dialog pengurus KONI dengan lingkungan olah raga terkait se DIY di Keraton Kilen Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan sikapnya bahwa ia tidak akan berkomentar tentang situasi sekarang ini “Saya tidak mau berkomentar karena memang bukan komentarnya itu yang menjadi format. Dalam hal ini pekerjaan saya bukan berkomentar tetapi *nglakoni* apa yang harus saya *lakoni*. Itulah tanggung jawab saya”, kata Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga selaku Ketua Umum KONI DIY.

Menurut Sri Sultan HB X, keengganannya berkomentar tidak berarti tidak punya komentar. “Namun apakah komentar saya akan menguntungkan pada situasi seperti ini. Apalagi jika komentar itu disebarakan lewat pers? Jelas itu akan menjadi public opinion. Kalau menjadi jembatan, saya bisa menjalaninya”, katanya.

Kemudian secara lugas Sultan mencontohkan lelakunya sebagai jembatan. Misalnya ada seorang petani yang gagal menuai panennya. lantas ia ingin bertemu bupati untuk mengadukan nasibnya dan minta saya menjadi jembatan pertemuan itu. Dalam hal ini saya bisa, jelasnya.

Menanggapi keinginan para mahasiswa untuk *sowan* kepadanya, Sultan mengatakan pada dasarnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tetap terbuka bagi mahasiswa yang mau datang. Masalahnya apakah perjalanan mereka dari kampus ke keraton itu dilarang atau tidak, katanya seraya memberi alternatif mahasiswa bisa menghubunginya lewat telepon. Tentang karangan bunga yang ia kirim pada pemakaman Mozes, Sri Sultan HB X juga enggan berkomentar. “Silahkan menafsirkan sendiri”, katanya.

Ratusan mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa kemarin berhasil menduduki ruas jalan Kusumanegara hingga membuat ruas jalan itu ditutup total beberapa saat. Sementara di ruas

jalan Lowanu Sorosutan, gabungan mahasiswa STIE Widya Wiwaha, Akindo, Akubank dan ABA YIPK kembali membuat macet arus lalu lintas.

Aksi di kampus Universitas Ahmad Dahlan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dengan mendengarkan orasi Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Prof.Dr. Noeng Muhajir. Ia menyatakan dukungan terbuka atas unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Ia juga berpesan agar para mahasiswanya tidak melakukan tindakan merusak dalam aksi yang justru meresahkan masyarakat.

## **B. Komentar**

Yogyakarta marak dengan demonstrasi tuntutan reformasi total. Sultan selaku pemimpin informal masyarakat Yogyakarta sangat diharapkan tindakan yang nyata menanggapi situasi seperti ini. Adanya keinginan mahasiswa untuk sowan hanya ditanggapi bahwa kraton Yogyakarta terbuka bagi mahasiswa. Sebenarnya ini merupakan suatu isyarat bahwa Sultan memberi lampu hijau terhadap perjuangan mahasiswa. Tulisan ini bisa digunakan untuk sumber informasi bahwa Yogyakarta sebagai kota pelajar dan budaya tetap berjuang pada relnya. Sultan menjadi panutan dalam gerak perjuangan reformasi. Adanya tokoh panutan membuat unjuk rasa di Yogyakarta tertib dan aman.

- |                   |   |                                |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 11. Judul Artikel | : | Jakarta Mencekam, Yogya Tegang |
| Penulis           | : | -                              |
| Dimuat Dalam      | : | BERNAS                         |
| Kota Terbit       | : | Yogyakarta                     |
| Tahun Terbit      | : | Kamis, 14 Mei 1998             |
| Halaman           | : | 1                              |

## **A. Materi yang Diambil:**

### *- Mahasiswa Ditangkap*

Aksi unjuk rasa menuntut reformasi total yang digalang Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) di ruas Jalan Kaliurang, Rabu 13 Mei berakhir dengan penangkapan ratusan mahasiswa dan masyarakat umum. Puluhan diantaranya luka-luka dan beberapa diantaranya akibat tembakan yang dilepaskan petugas.

Aksi puluhan ribu massa yang diikuti pendudukan ruas Jalan Kaliurang dari pertigaan Mirota Kampus hingga perempatan Selokan Mataram di sebelah utara ini juga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Sampai tadi malam belum ada konfirmasi jatuhnya korban di pihak aparat keamanan dan kerugian materiil.



Aksi ini juga mengakibatkan kegiatan perekonomian di sekitar kawasan itu lumpuh sampai semalam. Supermarket Mirota Kampus dan toko-toko di sekitar kawasan itu tutup sejak tengah hari. Bahkan dari petang hingga malam hari tindak perusakan dan kekacauan meluas hingga ruas Jalan Kaliurang di utara Selokan Mataram.

Sementara di kawasan sekitar kampus Atmajaya Babarsari, aksi yang semula digalang oleh Fampera juga berakhir dengan kekacauan. Aksi ini sebenarnya dinyatakan bubar sekitar pukul 11.30 WIB tetapi massa ternyata tidak mau bubar dan mulai melakukan tindakan anarkis di sepanjang ruas Jalan Babarsari.

Aksi bakar ban dan perusakan sejumlah fasilitas pemerintah seperti boks telepon umum dilakukan sejak sekitar pukul 13.00 WIB hingga petang hari. Gedung BHS Bank di depan kampus Atmajaya dirusak massa. Satu unit AC sentral di bangunan itu dikeluarkan dan dibakar di tengah jalan.

Pembubaran paksa aksi mahasiswa di Jalan Kaliurang berlangsung secara bergelombang diawali sekitar pukul 14.00 WIB hingga penyerbuan terakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Satu unit pasukan Gegana Korps Brimob lengkap dengan sepeda motor trailnya diterjunkan dan pasukan inilah yang berkali-kali melepaskan tembakan ke udara dan ke arah massa.

Sebelumnya dari pesawat helikopter polisi yang berada dalam posisi stasi di udara, kapolres Sleman, Letkol Pol Bambang PH berkali-kali memperingatkan agar para mahasiswa tidak melanjutkan aksi *long march*. Ia meminta agar aksi yang terlanjur keluar kampus diteruskan di ruas Jalan Kaliurang. Setelah itu massa agar membubarkan diri dengan tertib.

Sementara itu sampai pukul 21.30 WIB semalam, ratusan petugas keamanan gabungan masih melakukan pembersihan massa di dalam kampus UGM. Gedung kuliah Fakultas Kedokteran hewan dan Fakultas Pertanian disisir aparat keamanan hingga lantai atas. Sejumlah mahasiswa yang masih melakukan kegiatan non kuliah di kompleks ini diangkut petugas tanpa alasan jelas.

Saat penyerbuan kampus petang harinya, sejumlah saksi mata di Pos Satpam UGM sempat melihat ada dua orang yang belum teridentifikasi ditembak personil pasukan Gegana di sebelah barat bekas bong Sagan atau di sekitar kompleks perumahan dosen UGM blok E. Kedua korban itu langsung dibawa ambulan militer.

Dua belas mahasiswa yang diamankan petugas di pos polisi depan Mirota Kampus mendapat perlakuan yang sangat menyedihkan. Empat wanita berjilbab diantaranya berkali-kali menerima kata-kata kotor dan sangat melecehkan mereka sebagai umat beragama.

Sementara perlakuan kurang manusiawi juga diperlakukan terhadap puluhan orang yang diamankan petugas. Selain menerima pukulan, pentungan dan tendangan, mereka diangkut berjejal-jejal seperti ikan dalam tiga truk militer ke Mapolda DIY. Kesemuanya yang dibawa dalam kondisi luka-luka.

Dari RSUP Dr. Sarjito dilaporkan terdapat tiga belas korban yang dirawat. Tiga luka parah dibagian paha dan dengkul akibat tembakan petugas, dua orang luka-luka ringan. Delapan korban lain pulang setelah mendapat perawatan ringan di Unit Gawat Darurat.

Dari UGD RS Panti Rapih pada pukul 18.00 WIB menerima delapan korban akibat kerusuhan. Lima diantaranya luka parah serta puluhan lainnya luka ringan. Satu orang korban bernama Taryono asal Kroya terluka tembakan di kaki. Deky, mahasiswa Teknik Arsitektur UGM angkatan 92 dihajar hingga terluka dan terkena gas air mata. Sementara kompleks P3PK UGM di sisi timur boulevard UGM juga dipenuhi oleh petugas keamanan yang mengejar massa di sekitar boulevard UGM.

#### *- Pembantu Rektor III Ditodong*

Dalam pengejaran oleh pasukan yang masuk ke kampus, Pembantu Rektor III Ir. Bambang Kartika diteror seorang aparat keamanan dengan todongan senjata laras panjang di Pos Satpam UGM. Bambang Kartika pada malam harinya mengadakan koordinasi dengan Satpam UGM untuk mengamankan situasi dalam kampus UGM.

"Kamu yang lari tadi ya" gertak aparat berseragam sambil menodongkan senjata laras panjang jenis FNC. "Bukan, saya ini Rektor", jawab Bambang Kartika tidak kalah kerasnya. Saat itu masuk seorang aparat keamanan dari belakang "Awat kalau kamu melindungi orang lari, saya tembak", ancam aparat berompi merah hitam. Kedua aparat itu yang memakai Suzuki trail lalu ngeloyor pergi melanjutkan pengejarannya.

Pembantu Rektor III UGM, Ir. Bambang Kartika juga menyatakan penyesalan atas tindakan aparat keamanan yang masuk kampus UGM, perumahan dosen dan bahkan masuk ke Gedung Pusat yang disertai dengan pemukulan terhadap karyawan UGM maupun mahasiswa.

Siapa saja yang ada di kampus termasuk yang tidak ikut aksi ikut digebuk. Itu sudah tindakan tidak benar, tegasnya. Disesalkannya pula aparat keamanan yang sudah menggunakan senjata api dalam membubarkan aksi mahasiswa. Saya baru saja dapat kabar seorang Satpam Gedung Pasca Sarjana di Barek ditembak kakinya, tuturnya sambil mengaku belum memperoleh nama Satpam itu.

Ir. Bambang Kartika juga menceritakan sejumlah mahasiswa yang sedang belajar di Balairung yang terpaksa diselamatkan Pembantu Rektor I Prof.Dr.Ir. Boma Wikan Tyoso, yang saat itu sedang memimpin rapat PBAD (Penjaringan Bibit Atlet Daerah) di ruang rektorat lantai II sisi Utara Gedung Pusat.

Ada sekitar 50 mahasiswa yang dibawa masuk pak Boma di ruang Pak Rektor dan dikunci dari luar. Sementara aparat keamanan terus mencari mahasiswa sampai di lantai III, jelasnya. Disebutkan juga pihaknya sudah menghubungi Kapolres Sleman Letkol Bambang PH agar aparat segera menarik pasukan dari dalam kampus UGM.

Ir. Bambang Kartika juga menjelaskan Rektor UGM, Prof.Dr. Ichlasul Amal semalam menemui Kapolda DIY, Kolonel Bani Siswono. Selesai pertemuan, Pak Amal bisa membawa pulang seorang mahasiswi yang ikut ditahan di Mapolda, jelasnya.

Kapolda DIY, Kolonel Polisi Drs. Bani Siswono disela-sela pengamanan unjuk rasa kemarin sore mengatakan sebenarnya dirinya sangat bangga para mahasiswa melakukan unjuk keprihatinan. Ia menyatakan bisa mengerti karena mahasiswa betul-betul menyuarkan hati nurani rakyat. Tetapi kalau sampai mereka turun jalan dan merusak, maka mereka berarti sudah melanggar tabu saya. Saya betul-betul tidak bisa mengerti apakah mereka itu orang Yogya atau bukan. Kalau orang Yogya mereka pasti akan cinta kotanya, bukan malah merusak, kata Bani Siswono.

## **B. Komentar**

Semakin maraknya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta membuat suasana di Yogyakarta tegang. Aksi unjuk rasa di ruas jalan di sekitar kampus UGM disertai perusakan dan kekacauan. Aparat keamanan dalam menangani unjuk rasa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mahasiswa. Aparat keamanan masuk kampus UGM untuk mengejar para demonstran. Dalam melakukan aksinya, aparat keamanan berlaku kasar, baik sikap, perkataan maupun tindakannya. Kalangan pendidik di UGM mendukung adanya reformasi dalam batas-batas yang benar. Mereka juga menyayangkan sikap arogan aparat keamanan yang kasar dan main tangkap sembarangan.

Tulisan ini bisa dipakai sebagai sumber informasi bagaimana kampus pada masa itu menjadi tempat yang tidak bebas lagi untuk mengemukakan pendapat. Aparat keamanan dalam hal ini polisi tidak lagi menjadi pengayom rakyat.

12. Judul Artikel : Sultan Turun Ke Jalan, Yogya Tenang  
Penulis : -  
Dimuat dalam : BERNAS  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Sabtu, 16 Mei 1998  
Halaman : 1

#### **A. Materi yang Diambil:**

Jalan Urip Sumoharjo (dikenal sebagai salah satu pusat pertokoan di Yogya) mulai pertigaan Gejayan hingga perempatan Galeria Mal, sejak Jumat siang hingga sore dikuasai puluhan ribu massa. Massa di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo sempat merusak dealer mobil Timor dan melempari kaca Bank Tamara dan pos polisi. Selain itu massa membakari ban di tengah jalan.

Peluang terjadinya kerusuhan di kawasan pertokoan Jalan Urip Sumoharjo bisa diredam setelah Ketua DPC PPP Kodya Yogyakarta Syukri Fadholi menenangkan massa, disusul kehadiran Sri Sultan HB X pukul 16.25 WIB.

Sri Sultan berdiri di mobil Nissan Land Cruiser B 10 AM warna hitam di depan kantor Jamsostek. Sri Sultan berbicara di hadapan puluhan ribu massa yang memenuhi Jalan Urip Sumoharjo. Dalam pidato sekitar 20 menit itu, Sri Sultan antara lain meminta massa menjaga agar tidak melakukan perusakan. Tolong, saya pesan, sebagai warga Yogya saudara-saudara saya minta menjaga agar tidak merusak apa yang telah dibangun. Saya juga minta agar saudara-saudara menjaga jangan sampai ada orang dari luar yang akan membuat kerusuhan di Yogya. Apakah saudara-saudara sanggup? kata Sultan yang disambut teriakan "sanggup .." dan tepuk tangan. Selanjutnya Sultan pun berpesan, "Saya hargai perjuangan saudara-saudara untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik tetapi harus dengan tertib. Jika saudara-saudara tertib saya selalu berada di tengah-tengah saudara...". Mendengar kesediaan Sultan tersebut, massa pun bertepuk tangan dan meneriakan yel-yel, "Hidup Sultan! Hidup Sultan!".

Usai berpidato di Jalan Urip Sumoharjo, Sultan masih dengan posisi berdiri di bumper belakang mobil bergerak ke boulevard UGM. Massa tidak bubar tetapi mengiringi kendaraan Sultan sambil meneriakan yel-yel "Hidup Sultan!".

Di *boulevard* UGM, Sultan meminta agar massa membubarkan diri dan pulang. "Ini sudah saatnya menunaikan shalat Maghrib, silahkan saudara-saudara kembali dengan tenang dan tertib", ujamya yang lagi-lagi disambut tepuk tangan dan massa meringsek mendekati mobil Sultan untuk menjabat tangan. Sultan pulang, massa pun bubar.

Kegiatan ekonomi di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, sepanjang Jalan Mangkubumi - Jalan Malioboro - Jalan Ahmad Yani, Jalan P. Diponegoro, Jalan Mataram, Jalan Suryotomo, Jalan Sudirman dan Jalan Gejayan, sejak siang hingga Jumat (15 Mei) malam kemarin nyaris lumpuh. Toko-toko di sepanjang jalan tersebut, termasuk Pasar Beringharjo tutup. Di pintu toko-toko termasuk di depan kantor-kantor pemerintah dan swasta serta bank yang ada di sepanjang jalan tersebut terlihat poster atau spanduk yang berisi tulisan yang intinya mendukung reformasi. Selain itu bendera Merah Putih setengah tiang dikibarkan di sepanjang jalan-jalan tersebut.

Selain aksi demonstrasi yang masih merebak di berbagai kampus di Yogya dan Masjid Besar Kauman, untuk pertama kalinya terjadi konvoi ribuan kendaraan bermotor keliling kota yang dilakukan ribuan massa. Mereka membawa bendera setengah tiang dan sepanjang jalan meneriakkan yel-yel reformasi dan tuntutan SI MPR. Danrem 072/Pamungkas, Kol. Inf. Joko Santoso saat ditemui di depan Museum AD Wiratama di Jalan Jenderal Sudirman, di tengah-tengah upaya pengendalian aparat yang melakukan pengamanan, mengakui peran besar Sultan HB X dalam menenangkan massa. "Kami berterima kasih kepada beliau", ujarnya.

Meski suasana Yogya sempat tegang dan mencekam, Danrem menegaskan masih dalam batas pengendalian. Danrem mengatakan pihak aparat keamanan melakukan pendekatan persuasive dengan massa untuk tidak menimbulkan benturan. Danrem juga menegaskan, aparat keamanan akan berjuang maksimal agar kerusakan dan perusakan tidak terjadi di Yogya. Danrem menyebut kawasan Malioboro dan sekitarnya harus bebas dari aksi kerusakan dan perusakan karena merupakan simbol budaya.

#### *- Agenda 20 Mei*

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA saat ditemui di Kraton Yogyakarta seusai melakukan pembicaraan dengan Sultan HB X menyatakan, Sultan HB X sengaja mengundang unsur perguruan tinggi untuk mencari solusi agar aksi mahasiswa tidak berkembang menjadi kerusakan. Kami semua sepakat untuk melakukan aksi secara tertib untuk menghindari kerusakan dan jatuhnya korban, kata Ichlasul Amal.

Rektor UGM ini juga membenarkan salah satu agenda pembicaraan adalah rencana aksi besar-besaran yang akan digelar mahasiswa Yogya 20 Mei mendatang. Menurut rencana bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu mahasiswa Yogya akan menggelar aksi besar-besaran dengan acara long march dari berbagai kampus menuju Alun-alun Selatan Kraton Yogyakarta.

Melihat perkembangan terakhir di berbagai kota, akhirnya disepakati aksi akan dilakukan di dalam kampus UGM. Sultan HB X sudah menyatakan kesediannya untuk hadir sebagai salah satu pembicara dalam aksi tersebut unkap Ichlasul Amal.

#### *- Demosntrasi Berlanjut*

Segecap civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mulai dari rektor, pembantu rektor I, II, III, para dekan dan pembantu dekan I, II, III, dosen, karyawan dan mahasiswa Jumat kemarin menggelar aksi damai menuntut reformasi total dengan menduduki ruas Jalan Cik Di Tiro sejak pukul 09.00 WIB - 11.30 WIB. kegiatan perkuliahan dan karyawan dari pagi hingga siang diliburkan.

Aksi yang diisi dengan orasi mulai dari rektor dan para dosen, karyawan serta mahasiswa bertambah marak dengan adanya iringan gendering dari Marching Band UII. Selain itu juga tampil seorang sopir taksi, pelajar SMU, beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi Akindo, UKDW, STIE Widya Wiwaha yang bergabung dalam aksi tersebut.

Ratusan mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, Jumat (15 Mei) juga menduduki Jalan Dr. Wahidin dan sebagian jalan Jenderal Sudirman selama hampir tiga jam. Aksi damai yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berakhir pukul 11.05 WIB setelah Pembantu Rektor III UKDW, Edy Kristanto melalui pengeras suara mengumumkan bahwa delegasi yang dipimpinnya sudah bertemu Pimpinan DPRD DIY menyerahkan konsep tuntutan reformasi.

Universitas Islam Indonesia memberi dukungan kepada aksi tuntutan reformasi total di seluruh Indonesia. Untuk intern UII menyatakan memberikan perlindungan dan mengambil alih segala tanggung jawab atas tuntutan reformasi yang dilaksanakan di kampus UII dan menyumbangkanm gaji pokok para pejabat struktural selama dua bulan untuk kelancaran ajsi gerakan reformasi.

Aksi keprihatinan yang digelar di berbagai kampus-kampus di Yogyakarta pada hari Jumat memasuki babak baru. Seorang dosen muda di hadapan ratusan mahasiswa STIE YKPN secara eksplisit mengusulkan nama Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai presiden baru RI.

#### *- Dukung MAR (Majelis Amanat Rakyat)*

Sementara berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan massa di Yogyakarta pada hari Jumat juga diwarnai dukungan terhadap lembaga baru, Majelis Amanat Rakyat (MAR) yang dipimpin oleh Ketua PP Muhammadiyah Dr. Amien Rais. Aksi dukungan merebak di STIE YO, diikuti ratusan mahasiswa

dari STTNAS, UAD, UJB, UMY dan Universitas Sarjana Wiyata. Dukungan terhadap Amien Rais juga diberikan sekitar 5000 orang yang mengikuti aksi unjuk rasa yang diselenggarakan Komisi Nasional Angkatan Muda Muhammadiyah (Komnas AMM) Yogyakarta yang digelar di halaman kompleks Masjid Agung Kauman usai shalat Jumat. Aksi diikuti Hj. Alfiah Muhadi tokoh Masyumi dan penasehat PP Aisyiah, Wagiman Jenggot (ayah alm Udin), Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), wakil petani, buruh, ibu rumah tangga dan seniman.

Sebelum menutup aksi, atas nama Sri Sultan HB X, Gusti Joyokusumo menghimbau masyarakat Yogyakarta tetap menahan emosi sehingga tidak ada kerusuhan di Yogyakarta. Beliau (Sri Sultan HB X) senantiasa memihak anda, asal anda sekalian bisa menjaga ketertiban, tidak membuat kerusuhan serta jangan mengotori perjuangan suci yang dilakukan saat ini, katanya.

## **B. Komentar**

Aksi unjuk rasa yang terjadi di Yogyakarta membuat kegiatan perekonomian dan pemerintahan terganggu. Pedagang dan pegawai ketakutan untuk melakukan aktivitasnya. Namun, ketegangan berkurang dengan kesediaan Sultan untuk turun langsung beraudensi dengan mahasiswa. Tulisan ini bisa digunakan untuk sumber informasi bahwa peranan pemimpin informal sangatlah penting di setiap perjuangan.

13. Judul Artikel : Sultan HB X Ajak Rakyat Dukung Reformasi  
Penulis : -  
Dimuat dalam : KOMPAS  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : Kamis, 21 Mei 1998  
Halaman : 1

## **A. Materi yang Diambil:**

Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII hari Rabu (20 Mei) mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama mendukung Gerakan Reformasi. Seruan itu dinyatakan dalam suatu maklumat yang dibacakan Sri Sultan HB X di hadapan hampir sejuta penduduk Yogyakarta dan sekitarnya di Pagelaran Kraton Yogyakarta.

Pembacaan Maklumat Sultan Yogyakarta dan Gubernur DIY itu merupakan puncak acara yang diselenggarakan Aksi Gerakan Rakyat Yogyakarta



dan sekitarnya. Seluruh acara dari pagi hingga petang berlangsung tertib, damai dan mengharukan. Acara pertama di kampus UGM kemudian diteruskan di Pagelaran dan Alun-alun Utara depan Kraton Yogyakarta. Hadir saat itu sekitar satu juta orang.

Dalam amanat sambutannya, Sultan HB X mengingatkan kalau merenungkan sejarah perjuangan bangsa, maka maknanya yang sekarang pantas dipetik adalah kembali pada semangat kejujuran Yogyakarta yang dijiwai asas kerakyatan dan *laku prasaja* (berlaku sederhana) agar dengan demikian generasi muda calon pemimpin bangsa tetap setia pada semangat kerakyatan dan kesederhanaan yang merupakan akar budaya bangsa yang sebenar-benarnya. Banyak penguasa yang senantiasa mencari makna simbolik dibalik setiap peristiwa. Apalagi jika simbolisasi itu dimaknakan justru dengan tafsir yang salah kaprah, yang seakan tak terbantah karena keluar dari fatwa sang penguasa, kata Sultan HB X.

Sultan HB X kemudian memberikan beberapa contoh. *Ora ilok* (tidak pantas) diartikan tidak boleh mengkritik penguasa. *Mbeguguk ngutha waton* (keras kepala) dan *mbalelo* (membangkang) hanya disandangkan bagi rakyat yang menuntut haknya sehingga pantas *digebug* (dihantam dengan pemukul) dan dilibas dan bukannya bagi penguasa yang sudah tidak bisa menangkap aspirasi rakyat karena terlalu asyik dengan permainan kekuasaan saja. Lalu *aja dumeh* (jangan mentang-mentang) malah hanya dialamatkan hanya bagi rakyat yang tergusur, bukan yang bagi mereka yang menggusur dan makmur di atas pundak rakyat banyak. *Ungguh-ungguh trapsila* (tata krama) yaitu *tepa slira* dan *ewuh-pekewuh* (tenggang rasa) hanya boleh dikenal oleh rakyat, bukan bagi pejabat yang korup maupun kolusi dan lain sebagainya. Semua itu menurut Sultan HB X adalah krisis moral yang berlanjut pada krisis kepercayaan rakyat pada penguasa. Kita sudah lama menaruh kekhawatiran besar. Ketakutan struktural, maka makna yang salah kaprah itulah yang dibenarkan penguasa di level (tingkat) bawahan yang semakin ke bawah semakin melenceng dari makna yang sejati. Sedihnya bahkan sering bertolak belakang dengan makna yang diajarkan oleh para leluhur, ujarnya kemudian.

Memang sungguh kita sedang berada di ujung jalan atau di permulaan ujung jalan baru yang mungkin saja masih panjang, dimana dituntut peran segenap rakyat guna mengantar bangsa ini ke gerbang cita-cita, kata Sultan HB X. Sultan HB X menegaskan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 maka kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dengan maklumat 5 September 1945 maka rakyat Yogyakarta mendukung Proklamasi dan berpihak kepada Republik. Maklumat itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang antara

lain menyatakan wilayah Kesultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa dalam Republik Indonesia.

Maka adalah panggilan sejarah, jika sekarang segenap komponen rakyat Yogyakarta tampil mendukung gerakan Reformasi Nasional bersama kekuatan reformasi yang lain, kata Sultan HB X. Untuk itu saudara-saudaraku rakyat Yogyakarta saya bersama Sri Paduka Paku Alam VIII menyampaikan maklumat bagi bangsa dan rakyat Yogyakarta.

#### *Yang Salah, Seleh*

Sikap saya ini sesuai dengan amanat almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahwa yang salah akan *seleh* (yang salah harus mengaku dan meletakkan jabatannya). Perjuangan yang lurus akan diridhoi Tuhan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pilihan lain kecuali memihak kepada rakyat. Rakyat jangan hanya menjadi obyek ketidakadilan terus-menerus. Semuanya itu telah tamat. Ujar Sultan HB X kepada pers kemudian sambil menambahkan harapannya bahwa Yogyakarta agar menjadi kota pelopor gerakan reformasi secara damai.

Teriakan dan sambutan *Hidup Sultan! Hidup Sultan!* segera membahana di UGM. Hal serupa terulang kembali dalam suasana gegap gempita di Alun-alun Utara Yogyakarta, usai Sultan membacakan maklumat tentang reformasi. Tentang ajakan untuk mendukung gerakan reformasi, Sri Sultan menegaskan apakah reformasi akan berjalan dengan cepat atau lambat, yang penting Sultan telah melaksanakan kewajibannya menyampaikan aspirasi rakyat dengan tanpa prasangka, tanpa ambisi, tanpa menyebut nama orang. Saya kan bukan politisi yang harus bernegosiasi, kapasitas saya hanya sekedar sebagai kekuatan moral. Maka terserah bagaimana maklumat itu ditafsirkan oleh penguasa. *Yo mung kuwi terserah le nafsirke* (ya cuma itu, terserah penafsirannya).

Sebelum itu dalam suatu orasi kampus UGM dihadapan sekitar 40.000 mahasiswa, Sultan HB X juga sudah menyatakan dukungan pada gerakan reformasi. Saya siap memimpin perjuangan yang panjang untuk reformasi ini bersama saudara-saudara di garda depan, katanya tegas. Sebab menurut Sultan HB X apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan rencana membentuk Komite Reformasi, bagi pemerintah dan sekelompok orang memang dianggap cukup, tapi tidak cukup bagi rakyat.

#### *Massa Sejuta, Tak Ada Korban*

Ketika membacakan maklumat itu, Sultan HB X didampingi Gubernur DIY Paku Alam VIII. Hadir dalam kesempatan ini permaisuri Sultan HB X, GKR Hemas bersama beberapa putrinya, Rektor UGM Prof.Dr. Ichlasul Amal,

rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Drs. Kusumadmo, MM, mantan Dirjen Kebudayaan Drs. KGPH Poeger, keluarga Kraton dan Pakualaman Yogyakarta GBPH Juyokusumo, KPH Wijoyokusumo serta Mayor (Pol) Suyono mewakili Kapolda DIY, sejumlah besar seniman Yogyakarta dan sejumlah tokoh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Senat Mahasiswa Yogyakarta.

Massa rakyat yang hadir dan mengikuti acara ini berjumlah sekitar satu juta orang, duduk berhimpitan dan berdiri berdesakan hening menyimak. Mereka ini bukan hanya pemuda atau mahasiswa tetapi juga orang-orang yang tua dan sederhana, dari yang dengan tabah menempuh jalan yang padat dan sabar menantikan pernyataan Sultan HB X.

Pagelaran dan Alun-alun Utara depan Keraton Yogyakarta penuh massa. Sebagian lagi karena tak bisa masuk ke kedua tempat itu berdesak-desakan di Jalan Trikora, disambung Jalan A. Yani, Malioboro hingga P. Mangkubumi sepanjang empat kilometer. Juga dipadati Jalan KH. Ahmad Dahlan, P. Senopati, Brigjen Katamso, Mayor Suryotomo dan jalan-jalan kecil di sekitar Keraton Yogyakarta.

Mereka berdatangan sejak pagi hari ke Pagelaran Keraton dari 11 titik pemberangkatan yang sudah ditetapkan dan kembali sore hari pulang dengan sama tertibnya di titik-titik itu pula. Kantor Pemerintah, hotel, toko dan pusat pertokoan, pedagang kakilima, penduduk kampung, gabungan pengusaha Pamitira Yogyakarta, berbagai organisasi kemasyarakatan serta lembaga media massa, ikut mendukung acara ini dengan menyediakan makanan dan minuman untuk massa yang berjalan kaki ke arah satu titik, Keraton.

Widi Hasto W Putro, Ketua Panitia Penyelenggara Aksi Gerakan Rakyat Yogyakarta mengatakan suksesnya aksi reformasi damai di Yogyakarta, dibuktikan dengan tidak adanya kerusuhan dan mahasiswa yang terluka, setelah pihaknya mencek ke seluruh Tim Kesehatan dan berbagai rumah sakit yang mendukung aksi rakyat Yogyakarta ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ngarso Dalem (Sultan HB X) karena selama ini setiap kami akan menghadap Sultan HB X selalu terhambat oleh aparat keamanan. Tapi kali ini justru Ngarso Dalem membuka diri menyediakan pagelaran dan alun-alun untuk melaksanakan aksi ini, katanya.

Hingga sekitar pukul 18.00 massa peserta aksi gerakan reformasi masih terus mengalir di beberapa penggal jalan untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Selain diwamai dengan teriakan dan yel-yel perjuangan, sebagian massa mahasiswa dan masyarakat mempertunjukkan kepandaian mereka bermain musik dan menyanyi lagu-lagu perjuangan serta performance di sepanjang jalan.

## B. Komentor

Butir-butir budaya Jawa merupakan *pituduh* maupun *wewaler* menjadikan manusia Indonesia memiliki sifat *berbudi bawa leksana* ialah manusia Indonesia yang bersifat *becik sajatining becik* adalah *becik* yang tidak hanya untuk dirinya sendiri saja tetapi juga *becik* untuk sesama manusia. *Pituduh* maupun *wewaler* bisa berupa ungkapan ataupun simbol.

Pisowanan Ageng di Pagelaran Kraton Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan moment (kejadian) yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh semua warga Yogyakarta. Sultan HB X dalam Pisowanan Ageng memberikan amanat yang dalam maknanya bagi massa pada waktu itu. Sultan menegaskan bahwa kata-kata ataupun simbol yang terdapat dalam budaya Jawa telah disalahtafsirkan untuk kepentingan penguasa pribadi.

Pisowanan Ageng merupakan bukti nyata bahwa Sultan HB X mendukung sepenuhnya reformasi secara damai. Sultan HB X juga membuktikan bahwa beliau betul-betul memihak rakyat. Tulisan ini bisa menjadi sumber informasi bahwa bangsa Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta menginginkan pemimpin bangsa yang sederhana dan merakyat dan tetap berpegang teguh pada tujuan perjuangan yang sebenarnya.

- |                   |   |                                     |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 14. Judul Artikel | : | Aktivitas Ekonomi Kota Yogya Mandek |
| Penulis           | : | -                                   |
| Dimuat dalam      | : | BERNAS                              |
| Kota Terbit       | : | Yogyakarta                          |
| Tahun Terbit      | : | Kamis, 21 Mei 1998                  |
| Halaman           | : | 2                                   |

## A. Materi yang Diambil:

Gegap gempita aksi damai, Rabu Kliwon 20 Mei yang berpusat di Alun-alun Utara dan diikuti lebih dari setengah juta massa temyata menyisakan suasana sepi di sudut-sudut lain kota Yogyakarta. Bahkan bisa dikatakan aktivitas ekonomi warga kota Yogya mandek (berhenti) siang sampai sore hari kemarin. Pasar Beringharjo, pasar terbesar dan tertua yang tidak pernah sepi dari kegiatan jual beli, hari itu kosong melompong. Seluruh pintu ditutup, barang dagangan tersimpan rapi atau bahkan diamankan. Terminal Umbulharjo, Terban dan Jombor nyaris tanpa kegiatan. Sementara ruas jalan seperti Jalan Magelang, Jalan Kaliurang tampak lengang.

Pusat kegiatan perekonomian di Yogyakarta terutama di ruas jalan yang dilalui massa lumpuh dan tidak ada aktivitas apapun. Hal itu terlihat di sepanjang jalan Solo ke barat, jalan Kusumanegara, jalan P. Mangkubumi - Malioboro,

jalan KHA. Dahlan maupun jalan Brigjen Katamso. Jalan-jalan itu dikuasai oleh massa. Arus lalu lintas mulai normal sekitar pukul 19.00 WIB.

Berkaitan dengan tutupnya pasar, Kepala Dinas Pasar Kodya Yogya Ndarusalam, SH mengatakan sebetulnya tidak ada kebijakan untuk menutup aktivitas pasar. Keramaian pedagang dan pembeli di pasar Beringharjo hanya berlangsung sekitar tiga jam, pukul 05.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Setelah itu pedagang yang ada di dalam pasar tersebut serentak menutup dagangan dan kiosnya walaupun tidak ada yang mengkomando. Dua warung makan tampak tersisa di dalam Pasar Beringharjo dan dua orang pedagang daging ayam di pojok belakang luar Pasar Beringharjo.

Saya tetap membuka warung makan karena harus meladeni 50-an karyawan Pasar Beringharjo. Pedagang lainnya memilih menutup dagangannya karena sebagian ikut *pisowanan ageng* ke Alun-alun Utara dan sebagian lainnya takut tidak memperoleh angkutan umum untuk pulang ke rumah, tutur mBak Ning pemilik warung makan di dalam Pasar Beringharjo. Hal yang sama juga dikemukakan oleh pemilik warung makan lainnya, diantaranya Susilo.

Dua orang pedagang daging ayam, Ny. Surip dan Ny. Suryatni menuturkan, mereka nekad menggelar dagangannya di luar Pasar Beringharjo karena yakin dan percaya tidak akan ada apa-apa dengan aksi reformasi di Alun-alun Utara. Pasar sepi pembeli, hanya ada satu dua orang yang sempat berbelanja. Saya percaya aksi tetap akan berlangsung aman karena Ngarso Dalem kerso mandhap, ujar dua pedagang asal Bantul.

Selain pasar, Stasiun Pengisi Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) seperti di Terban, Jalan Kaliurang, Mulungan dan Monjali. SPBU tutup sejak pagi hari karena takut adanya kerusakan atau pembakaran. Namun setelah pukul 15.00 WIB beberapa SPBU seperti SPBU Monjali dan Kutu Jalan Magelang sudah melayani masyarakat.

Sedangkan beberapa kendaraan umum AKAP (antar kota antar propinsi) berbagai jurusan dan AKDP (antar kota dalam propinsi) di Terminal Umbulharjo maupun Sub Terminal Terban dan Jombor tidak beroperasi sama sekali. Kendaraan umum jurusan Yogya - Kaliurang dan Yogya - Prambanan banyak yang dikandangkan atau diparkir di garasi. Beberapa bus hanya beroperasi pagi hari dan sekitar pukul 08.00 WIB sudah menghilang dari jalan raya.

Demikian pula terjadi di Terminal Jombor Sleman juga tampak sepi tidak ada penumpang dan hanya ada dua bus AKAP saja yang mengangkut jurusan Magelang maupun Semarang. Bus dari jurusan luar kota langsung parkir di terminal tersebut dan tidak berani melanjutkan perjalanannya menuju terminal Umbulharjo. Sedangkan bus yang menuju luar kota secepat mungkin langsung

meninggalkan terminal walaupun penumpang belum penuh.

Selepas aksi damai sekaligus *pisowanan ageng* bubar, muncul arak-arakan puluhan sepeda motor mengelilingi kota, persis saat berlangsungnya Pemilu 1997 lalu. Aparat keamanan sekitar pukul 16.00 WIB bersikap tegas membubarkan arak-arakan puluhan kendaraan bermotor yang berusaha menerobos masuk ke Jalan Malioboro. Sedikitnya 17 pengendara sepeda motor luka-luka akibat jatuh dari kendaraannya ketika berusaha memaksakan diri menerjang blokade aparat keamanan. Namun tidak ada satu pun peserta aksi arak-arakan yang ditahan.

## **B. Komentar**

Peristiwa *pisowanan ageng* menimbulkan aktivitas ekonomi di Yogyakarta khususnya di ruas-ruas jalan yang dilalui konvoi macet total. Sarana transportasi umum juga macet. Kondisi seperti ini merupakan bukti betapa pentingnya peristiwa ini bagi masyarakat Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta dari berbagai lapisan menghadiri *pisowanan ageng*. Pengerahan massa pada *pisowanan ageng* merupakan yang terbesar di Yogyakarta. Sekitar satu juta warga masyarakat menghadiri *pisowanan ageng*. Tulisan ini bisa menjadi sumber tertulis bagi generasi muda yang ingin mengetahui bagaimana warga Yogyakarta menginginkan suatu perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

15. Judul Artikel : Pelajar Duduki Monumen SO 1 Maret:  
Masyarakat Antusias Sambut Long March  
Mahasiswa
- Penulis : -
- Dimuat dalam : BERNAS
- Kota Terbit : Yogyakarta
- Tahun Terbit : Kamis, 21 Mei 1998
- Halaman : 2

## **A. Materi yang Diambil:**

Ratusan ribu mahasiswa Yogyakarta yang berbaur dengan masyarakat Rabu (20 Mei) praktis sejak pagi hingga sore menguasai jalan-jalan utama di kota Yogya dalam prosesi perjalanan mereka menuju *Pisowanan Ageng* di Alun-alun Utara maupun saat kepulangan ke kampus masing-masing. Massa long march terbesar berangkat dari kampus UGM.

Mahasiswa dan warga masyarakat setidaknya berangkat dari 11 titik. Sedikitnya 10 ribuan mahasiswa gabungan dari Universitas Janabadra (UJB), Akademi Manajemen Putra Jaya (AMPJ), Akademi Sekretaris dan Manajemen Informatika (ASMI) dan STIE YKP memenuhi jalan raya menuju Alun-alun

Utara. barisan mahasiswa sepanjang kira-kira satu kilometer ini menempuh rute sekitar 4 km melalui Jalan Kyai Mojo, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jalan Jlagran Lor, Jalan Pasar Kembang dan Jalan Malioboro.

Aksi *pisowanan ageng* juga diikuti sedikitnya 200 pelajar. Mereka tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) setelah ikut long march bahkan sempat menduduki Monumen SO 1 Maret sejak pukul 11.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Peserta aksi ini antara lain pelajar SMU 8, 10, Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 3, Gajah Mada serta SMU 1 Sedayu, SMU 1 Tirtonirmolo, SMU 1 Gamping dan Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR).

Saat pendudukan oleh para pelajar, tiba-tiba muncul pusaran angin lesus sekitar sepuluh menit di pelataran Monumen SO 1 Maret yang menerbangkan puluhan poster dan kertas koran hingga mencapai ketinggian lima puluh meter lebih. Anehnya angin lesus itu hanya terjadi di pelataran Monumen SO 1 Maret saja. Massa kontan meneriakkan Allahu Akbar... Allahu Akbar. Itu bukti aksi kita diridhoi Allah, ucap seorang pelajar. Sedikitnya 10 ribu massa terdiri dari dosen dan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Instiper, AMPTA, STPMD APMD serta masyarakat umum di sepanjang Jalan Laksda Adisucipto berarak secara tertib teratur dari titik awal di halaman timur kampus IAIN Sunan Kalijaga menuju Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. Sementara barisan ribuan mahasiswa dari titik Babarsari terdiri dari mahasiswa Universitas Atma Jaya, UPN Veteran, STTNAS dan Universitas Proklamasi 45 berangkat tertib agak jauh di belakang rombongan massa dari IAIN Sunan Kalijaga.

Sebelum berangkat hampir seluruh peserta IAIN Sunan Kalijaga mendapatkan paket nasi bungkus untuk sarapan pagi. Paket sarapan itu dibuat secara gotong royong oleh pengurus Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga dengan dukungan penuh Dharma Wanita Unit IAIN Sunan Kalijaga. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Dr. HM. Atho Mudzar untuk pertama kali atas nama Keluarga Besar IAIN Sunan Kalijaga menyatakan sikap dan dukungan penuh terhadap tuntutan reformasi yang awalnya diserukan mahasiswa.

Sementara itu dari titik pemberangkatan sektor selatan diikuti sekitar 10 ribu mahasiswa, karyawan dan dosen STIE Kerjasama, Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta dan masyarakat sekitar. Tepat pukul 09.55 WIB rombongan yang jumlahnya semakin banyak bertambah menjadi sekitar 15.000 ini sampai di Pojok Beteng Wetan dan berhenti sambil menunggu rombongan dari sektor timur (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Widya Wiwaha, UII Tamansiswa, Peternakan Brahmputra, Akindo, AKK, ABA YIPK dan Stisipol Kartika Bangsa).

Dari titik sektor barat, ribuan mahasiswa dan pelajar yang bergabung dengan masyarakat, tumpah ruah di ruas-ruas jalan yang menghubungkan



perempatan Wirobrajan, sejak Rabu (20 Mei) pagi. Diawali dengan gelar orasi di kampus masing-masing, ribuan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Wirobrajan, Institut Seni Indonesia (ISI) Gampingan, IKIP PGRI, Universitas Wangsa Manggala (Unwama) kemudian berangsur-angsur menguasai perempatan Wirobrajan. Aksi makin marak karena para pelajar dan massa masyarakat bergabung lengkap dengan simbol-simbol mereka.

Dari sektor timur, di Jalan Kusumanegara barisan mahasiswa mencapai sepanjang sekitar dua kilometer. Mereka adalah mahasiswa STTL, STIE YO, siswa-siswi Taman Madya (SMU), mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST), Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Sementara itu ribuan mahasiswa UII beserta para dosen dan karyawan ditambah ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah berangkat long march ke Alun-alun dari kampus pusat UII di Jalan Cik Di Tiro pukul 09.30 WIB menyusuri Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mangkubumi, Malioboro hingga Alun-alun Utara.

Dari titik pemberangkatan Mrican, massa mahasiswa dari UAJY, USD, IKIP dan UII sejak pukul 09.00 WIB sudah berkumpul. Sebelum berangkat ke Alun-alun mereka terlebih dahulu melakukan orasi untuk menggalang massa. Melalui Jalan Colombo, Gejayan, Jalan Sudirman, Kridosono, Jembatan Kewek, Jalan Mayor Suryotomo kemudian menuju Alun-alun Utara.

## **B. Komentar**

Aksi *pisowanan ageng* juga diikuti oleh para pelajar. Hal ini menjadi bukti bahwa pelajar sudah mulai tanggap terhadap situasi sekitarnya. Pelajar membuktikan bahwa mereka juga generasi muda yang peduli terhadap nasib bangsanya. Mereka juga ingin membuktikan bahwa tidak semua generasi muda malas-malasan dan hanya bersenang-senang. Para pelajar menyadari bahwa Monumen Serangan Umum 1 Maret merupakan tonggak peringatan perjuangan kemerdekaan masyarakat Yogyakarta. Dengan menduduki monumen tersebut merupakan salah satu wujud untuk mengingatkan kepada masyarakat Yogyakarta betapa kemerdekaan Indonesia yang dicapai dengan taruhan nyawa perlu terus tetap dibela dari kesewenangan penguasa.

Aksi pelajar dari sepuluh sekolah ini bisa menjadi teladan bagi generasi muda bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab terhadap nasib bangsa Indonesia di masa mendatang. Generasi muda bisa ikut berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran bagi bangsa dan negara. Patut untuk diberi acungan jempol atas kepedulian para pelajar dalam ikut memikirkan bangsa Indonesia.

16. Judul Artikel : Aksi 20 Mei, Kemanunggalan Rakyat dan Mahasiswa: Lapar, Haus, Tinggal Makan, Minum Gratis
- Penulis : -
- Dimuat Dalam : BERNAS
- Kota Terbit : Yogyakarta
- Tahun Terbit : Kamis, 21 Mei 1998
- Halaman : 2

### **A. Materi yang Diambil:**

Kemanunggalan rakyat dan mahasiswa. Apa itu? Menyatu dan bersatunya warga masyarakat, rakyat kebanyakan dari berbagai lapisan dan mahasiswa dalam aksi menuntut reformasi yang serentak dilakukan secara damai, Rabu (20 Mei) di Yogyakarta. Rakyat tidak hanya berbaur ikut dalam aksi namun juga sebagian berpartisipasi dengan menyediakan ubo rampe berupa minuman dan makanan kecil yang diperlukan para peserta aksi long march. Hal itu sesuai imbauan Sri Sultan Hamengku Buwono X lewat GBPH H. Joyokusumo sebelumnya meminta masyarakat mendukung aksi reformasi damai. Dua hari sebelum hari H pelaksanaan aksi, Gusti Joyokusumo menghimbau warga masyarakat Yogya agar tidak perlu khawatir, takut ataupun resah dengan aksi itu. Masyarakat justru diminta memberikan dukungan dengan menyediakan makan dan minum sekedarnya.

Dukungan warga masyarakat seperti itu terlihat jelas hampir di sepanjang jalan-jalan utama yang dilalui arak-arakan aksi reformasi damai. Makanan kecil dan minuman disajikan di atas meja yang diletakkan di sepanjang Jalan A. Yani, Jalan Malioboro, Jalan Mangkubumi, Jalan P. Senopati, Jalan KH Ahmad Dahlan dan di semua ruas-ruas jalan yang dilalui peserta aksi dari 11 titik pemberangkatan long march menuju Alun-alun Utara.

Ibu-ibu rumah tangga di beberapa gang Jalan Mataram terlihat *cancut taliwondo* menyingsingkan jarit dan baju untuk melayani banyaknya permintaan makanan kecil atau minuman. Para ibu mengaku beberapa hari sebelumnya bapak-bapak (suami mereka) mengadakan rapat membicarakan bersama perihal imbauan *Ngarso Dalem*. Danapun dikumpulkan dengan urunan (iuran) dan ibu-ibu diberi jatah tugas menyediakannya.

Selamat berjuang, tutur seorang ibu sambil menyodorkan plastik minuman air putih matang kepada peserta. Setiap kali menyodorkan plastik air tidak lupa berkata Selamat berjuang. Selamat berjuang.

Pemandangan perjuangan bersama seluruh rakyat seperti itu dominan

mewarnai aksi reformasi damai di Yogyakarta pada hari Rabu (20 Mei). Para pemilik toko dan pimpinan kantor yang memutuskan untuk menutup toko dan kantornya sementara waktu memilih ikut berjuang bersama rakyat dan mahasiswa. Dengan memakai atribut seragam karyawan toko atau kantornya, sebagian besar karyawan ikut menyingsingkan lengan melayani permintaan makanan kecil dan minuman.

Tolong diisi air putih saja pinta dua mahasiswi berseragam almamater UGM memelas sambil menyodorkan botol air mineral kosong kepada beberapa orang staf toko besar di Malioboro. Toko swalayan tersebut hanya membuka satu pintu untuk menyalurkan, memberikan puluhan dos air mineral. Tidak usah, ini saja balas seorang staf toko sambil memberikan dua botol besar air mineral kepada dua mahasiswi yang tampak pucat kehausan.

Pelayanan depot-depot logistik semacam itu tidak hanya saat keberangkatan aksi menuju Alun-alun Utara tetapi juga saat kepulangan. Perbedaannya jika berangkat masih tersedia minuman dan makanan kecil, mulai dari snack, roti, arem-arem hingga nasi bungkus, namun sewaktu pulang hanya tersedia minuman air putih.

Seluruh persediaan logistik berupa makanan ringan dan air minum habis dinikmati massa, maka tidak begitu kejadiannya di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto (utara kampus UMY) karena tidak melewati rute aksi massa menuju Pagelaran Kraton Yogyakarta. Logistik yang telah dipersiapkan di sepanjang jalan utara kampus UMY masih tampak utuh.

## **B. Komentar**

Mengamati di sepanjang jalan yang dilalui peserta yang mengikuti *pisowanan ageng* teringat kembali situasi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Rakyat dari berbagai lapisan tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, agama, suku dan ras ikut berpartisipasi dengan menyediakan makanan dan minuman. Situasi ini mirip dengan dapur umum pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Rakyat secara sukarela menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya bagi peserta *pisowanan ageng*. Hal ini merupakan bukti bahwa semua bisa berjuang sesuai dengan porsinya masing-masing. Ibu-ibu ikut berjuang dengan memasak dan menyediakan makanan dan minuman. Tulisan ini bisa menjadi gambaran bagi generasi muda bahwa perjuangan tidak musti ada di garis depan. Mereka berjuang bisa dengan sumbangan pemikiran, tenaga dan materi (bahan makanan).

17. Judul Artikel : Ada Skenario Makro Hapus Eksistensi DIY  
Penulis : -  
Dimuat Dalam : Harian Bernas  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Minggu, 9 Agustus 1998

#### **A. Materi yang Diambil:**

Wakil Ketua DPRD DIY Drs. H. Khairuddin menilai, melihat adanya anggota Dewan yang berpegang teguh kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dalam menentukan Gubernur DIY tampaknya ada skenario makro yang berniat menghapus eksistensi DIY. Dan skenario besar itu datang dari Departemen Dalam Negeri. Padahal menurutnya untuk menentukan apakah status Daerah Istimewa bagi Yogyakarta dipertahankan atau tidak, sangat tergantung kepada keinginan rakyat Yogya. Dan untuk mengetahui kehendak rakyat itu harus dilakukan

melalui referendum, bukan keputusan sepihak pemerintah pusat.

Khairuddin juga mengatakan, pada tahun 1980 melalui Keputusan Dewan No.4 para wakil rakyat telah bertekad untuk mempertahankan status istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara sekarang di tahun 1998 langkah yang ditempuh Dewan jelas-jelas bertentangan dengan keputusan terdahulu tanpa melakukan langkah hukum dengan mencabut Keputusan Dewan No.4 Tahun 1980. Sehubungan dengan itu menurut Khairuddin, anggota Dewan harus bisa mempertanggungjawabkan resiko sejarah yang dia tempuh. Bukan saja kepada generasi mendatang tetapi juga kepada pendiri Republik Indonesia, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini sama artinya kita meniadakan jasa-jasa sejarah.

Sehubungan dengan hal di atas sampai dengan tanggal 8 Agustus 1998 tersebut proses penentuan siapa yang bakal menjadi Gubernur DIY masih menghadapi jalan buntu (deadlock) padahal Presiden B.J. Habibie menginginkan pelantikan Gubernur DIY dilakukansebelum tanggal 17 Agustus 1998.

Sementara itu Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD DIY HM. Chamdani menjelaskan bahwa penggunaan UU No.5 Tahun 1974 tersebut sebagai dasar pemilihan Gubernur DIY tidak berarti ingin menghapuskan status istimewa. Penggunaan UU ini hanya menyangkut mekanisme pemilihan, sedangkan kriteria figur calon gubernur menggunakan UU No.3/1950. Sedangkan FPP DPRD DIY Hudoro Soebani mengakui bahwa landasan yang digunakan dalam proses pemilihan Gubernur DIY memang sudah salah dari awal.

Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah (PUOD) Ryaas Rasid

ketika datang ke DPRD lalu, memang sudah menyarankan untuk menggunakan UU No.5 Tahun 1974 sehingga Dewan tidak mengantisipasi dampak kemungkinan yang berkembang kemudian (saat itu).

## **B. Komentar**

Para anggota DPRD DIY memang seharusnya jauh sebelum masalah penentuan Gubernur DIY ini masuk dalam agenda pembahasan di DPRD, mereka harus lebih dahulu menjangkau aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Yogyakarta. Bahwa kebijakan Pemerintah Pusat tidak pasti selalu dapat diterima oleh masyarakat Yogyakarta yang sejak dulu sangat menjunjung tinggi keberadaan kasultanan serta kultur masyarakatnya.

18. Judul Artikel : Penghapusan “Istimewa” Bertentangan Dengan UUD 1945  
Penulis :  
Dimuat Dalam : Harian Bemas  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Senin, 10 Agustus 1998

## **A. Materi yang Diambil:**

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof.Dr. Sudikno Mirtokusumo, SH menentang keras jika benar ada upaya-upaya untuk menghapuskan status istimewa terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab status istimewa untuk Yogyakarta memiliki landasan-landasan konstitusional yang kuat dan jelas, selain landasan-landasan seperti kebudayaan dan sosial.

Upaya penghapusan itu jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18. Pasal inilah yang menjadi dasar konstitusional terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi jika ada pihak yang ingin menghapus status istimewa bagi DIY maka rakyat harus menghapus atau mencabut Pasal 18 UUD 1945.

Berbeda dengan mahaguru Fakultas Hukum UGM Prof.Dr. Sugeng Istanto yang berpendapat bahwa status istimewa DIY hanya terletak pada kepala daerah dan wakilnya. Dan ini hanya melekat pada Sri Sultan HB IX serta Paku Alam VIII. Di luar kedua tokoh itu berlaku ketentuan yang sama dengan daerah lain.

Tetapi menurut Sudikno, bunyi pasal 18 UUD 1945 serta penjelasannya memberi pengertian negara pada waktu itu dengan UU No.3/1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan hak istimewa kepada Yogyakarta. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap Yogyakarta yang dalam

kenyataannya ada Kesultanan Yogyakarta dan Pura Paku Alaman. Atas penghargaan dan penghormatan Pemerintah RI itulah maka diberikan status Daerah Istimewa kepada kota Yogyakarta. Karena itu jika ada upaya-upaya yang berniat menghapus status daerah istimewa terhadap Yogyakarta, itu sama saja berniat menghapus jasa-jasa Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII dari ingatan bangsa Indonesia. Menurut Yogyakarta itu harus dihormati karena sudah ada semenjak sebelum Indonesia merdeka dan Sri Sultan HB IX adalah pelaku sejarah yang memiliki andil sangat besar untuk terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh dan tidak mungkin dilupakan bangsa Indonesia. Menurut juga pencalonan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY prosesnya harus tidak lepas dari status daerah istimewa untuk Yogyakarta, mulai dari pasal 18 UUD 45 tentang pemerintahan di daerah dan penjelasannya.

Sebaliknya Sugeng berpendapat, baik UU No.3/1950, UU No.22/1948 dan UU No.5/1974 sebetulnya isinya sama. Bagi DIY, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksudkan adalah yang pada waktu ketentuan itu dibuat sedang menjabat yakni Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Jadi untuk gubernur yang sekarang harus dipilih itu ketentuan yuridisnya.

Sementara itu Dr. P.J.Suwarno dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menegaskan bahwa UU No.22/1948 yang menjadi konsideran UU No.3/1950 yang masih berlaku, jelas-jelas menyebutkan bahwa Gubernur DIY harus dari keluarga Kesultanan. Sesuai UU No.2/1948 Pasal 18 Ayat 5 yang berbunyi "Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat oleh Presiden dari keluarga keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, di zaman sebelum RI dan menguasai daerah dengan syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan menguatkan adat istiadat daerah itu".

## **B. Komentar**

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ahli hukum ketatanegaraan dan pakar lainnya, berbagai ormas yang ada di Yogyakarta serta masyarakat Yogyakarta umumnya mendukung dan menghendaki Sri Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur DIY. Menurut pendapat masyarakat yang berkembang, terlepas dari masalah keistimewaan Yogyakarta, seandainya dilakukan pemilihan secara langsung maka rakyat Yogyakarta 99% lebih memilih Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menduduki jabatan Gubernur Yogyakarta.

19. Judul Artikel : Sengketa Keistimewaan Yogyakarta  
 Penulis : P.J. Soewarno  
 Dimuat Dalam : Harian Bemas  
 Kota Terbit : Yogyakarta  
 Tahun Terbit : Selasa, 11 Agustus 1998

#### **A. Materi yang Diambil:**

Hingga tanggal 8 Agustus 1998 Perumusan Tata Tertib Penetapan Gubernur Kepala Daerah DIY menemui jalan buntu menyusul pengajuan nama Alfian Darmawan oleh FPP sebagai bakal calon. Sementara FKP dan FPD mengajukan bakal calon Sri Sultan HB X. Jalan buntu ini disebabkan FPP berpegang pada Pasal 15 UU No.5 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati antara pimpinan Dewan (DPRD), pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri.

Sebaliknya FKP, FABRI dan FPD berpegang pada keistimewaan Yogyakarta yang diatur dalam UU No.3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diundangkan oleh Pemerintah RI tanggal 4 Maret 1950. Arti keistimewaan seperti dirumuskan oleh Pasal 18 UU No.2 Tahun 1948 sebagai UU umumnya berbunyi: (5) Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat daerah itu. Dengan demikian dalam pemilihan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut seharusnya DPRD tinggal meneliti Sri Sultan HB X (keturunan keluarga kerajaan), apakah memenuhi syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu.

Sehubungan dengan hal di atas, tampak adanya perbedaan acuan yang dijadikan landasan hukum untuk menetapkan calon Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, mendasarkan pada UU No.5 Tahun 1974 yang berlaku umum untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kedua, mendasarkan pada UU No.3 Tahun 1950 yang khusus mengatur tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari segi hukum sebenarnya sudah tidak ada masalah sebab dalam ilmu hukum ada adagium: *Lex specialis derogat lex generalis*, artinya undang-undang yang khusus meniadakan (mengusir) undang-undang yang umum. Dalam hal ini UU No.5 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang umum.

Jadi secara yuridis sebenarnya sengketa itu tak perlu terjadi. Apalagi



kalau disimak UU No.5 Tahun 1974 sendiri dimana pada pasal 91-b dan 91-c sendiri juga ada mengatur tentang lembaga Kepala Daerah Yogyakarta. Pasal 91-b tersebut berbunyi: "Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sekarang adalah Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yogyakarta, tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya.

Pasal 91-c berbunyi: "Segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau dinyatakan berlaku berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sebelum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini.

Maka masalahnya ditinjau dari segi hukum, pencalonan personil dari luar keturunan Kesultanan Yogyakarta, hal itu menjadi melanggar UU No.3 Tahun 1950 yang menetapkan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diakui UU No.5 Tahun 1974. Oleh sebab itu kalau usul mencalonkan orang dari luar keturunan Kesultanan masih ditolerir, maka hal tersebut sudah menjadi masalah politik. Akan tetapi apakah berpolitik di Indonesia boleh dengan melanggar Undang-undang? Itupun masalah lagi sama seperti yang dilakukan Orde Baru hampir selama 32 tahun dengan semboyan melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tetapi kenyataannya penuh tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang seharusnya berdasarkan UUD 1945.

Secara politis penghapusan keistimewaan DIY sesungguhnya sudah diusahakan oleh Orde Baru sejak UU No.5 Tahun 1974 dirumuskan. Pada waktu itu dua fraksi di DPR mengusulkan agar pasal 91-b diberi klausul agar sesudah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII wafat, keistimewaan Yogyakarta diakhiri, tetapi diprotes oleh dua fraksi lainnya sehingga klausul tersebut dihapus dan DIY tetap merupakan Daerah Istimewa dan lahirlah Pasal 91-c itu.

Usaha penghapusan keistimewaan DIY itu semakin gencar diupayakan ketika terjadi konflik antara mantan Presiden Soeharto dan Almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pada tahun 1980-an Mendagri mencoba untuk menghapuskan keistimewaan Yogyakarta secara yuridis dan mengalihkan perhatian pada keistimewaan dalam artian historis. Gagasannya ini pernah dipidatoken di Yogyakarta, tetapi kemudian mendapat tanggapan dari para pakar yang pada intinya hal itu tidak melanggar UU No.3 Tahun 1950 tetapi juga melanggar Pasal 18 UUD 1945 sehingga akhirnya mundur.

## B. Komentor

Dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini masalah keistimewaan Yogyakarta kembali akan dirumuskan dalam UU Keistimewaan dan Otonomi Khusus DIY. Saat ini berbagai pendapat dan usulan kembali bermunculan. Di satu pihak cenderung menerapkan UU No.5 Tahun 1974 dan dipihak lain bersikukuh ingin mempertahankan tetap berlakunya UU No.3 Tahun 1950. Para pakar dan tokoh masyarakat umumnya berpendapat agar masalah ini kesepakatan difinalkan dulu di daerah, sebelum usulannya disampaikan ke Pemerintah Pusat cq. Mendagri.

20. Judul Artikel : Soeharto Selalu Berupaya Hapus Istimewa  
DIY  
Penulis : -  
Dimuat Dalam : Harian Kedaulatan Rakyat  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Kamis, 20 Agustus 1998

## A. Materi yang Diambil:

Konflik antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Suharto telah menyebabkan adanya upaya menghapuskan status keistimewaan DIY. Karena itu dalam RUU No.5/1974 terdapat klausul yang berbunyi setelah Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY dipilih seperti daerah lain. Meskipun akhirnya klausul itu dihapus karena dinilai bertentangan dengan pasal 18 UUD 1945.

Penegasan itu terungkap dalam diskusi bertema Daerah istimewa dan Kehidupan Politik Yang Demokratis, yang digelar oleh Pengurus PMII Cabang Yogyakarta dengan pembicara Dr. P.J. Soewarno dan Dr. M. Mahfudz di Pendopo Wisma Cipta Karya Yogyakarta tanggal 19 Agustus 1998.

Ketika itu dalam pembahasan tentang klausul Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY dipilih seperti daerah lainnya di DPR RI, Fraksi ABRI mendukung dengan alasan wawasan Nusantara, FKP tidak menanggapi, sedangkan FPP dan FPDI menanggapi kalau hal itu tidak sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 sehingga klausul itu kemudian dihapus.

Menurut Suwarno, upaya menghapus keistimewaan DIY yang dilakukan oleh Suharto tidak hanya sekali itu saja. Pada masa Mendagri Rudini pernah dicoba dengan cara mengubah status istimewa menjadi kota perjuangan. Bahkan melalui Gubernur Jawa Tengah Suwandi, upaya itu dilontarkan lewat *guyonan* DIY perlu digabung dengan Jawa Tengah. Kemudian juga Mendagri Syarwan

Hamid mencoba kembali menghapus status istimewa Yogyakarta melalui momentum pemilihan Gubernur DIY.

Konflik antara Sultan HB IX dengan Suharto sebenarnya mulai terjadi pada awal Orde Baru yakni saat berdirinya Sekber Golkar. Karena peran Sri Sultan HB IX dan Jenderal AH Nasution begitu besar dalam perjuangan, maka dunia luar banyak menyebut Sultan dan Nasution akan menjadi presiden. Tapi saat itu Jenderal Suharto juga sangat berkeinginan menjadi presiden karena merasa paling berjasa dalam menumpas PKI.

Bibit terjadinya konflik antara Sri Sultan dengan Suharto telah tumbuh berkaitan dengan sejarah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949. Fakta sejarah membuktikan bahwa peperangan yang menentukan terhadap eksistensi RI itu dirancang oleh Jenderal Sudirman bersama Sri Sultan HB IX. Letkol Suharto yang memimpin pasukan di sektor selatan bergerak menyerang Yogyakarta atas perintah Sultan. Namun Suharto telah memanipulasi sejarah yang seolah-olah pada SO 1 Maret dialah yang memimpin pasukan, hal itu terbukti karena pendirian Monumen Yogya Kembali, sosok Sultan tidak boleh diumumkan.

Berkaitan dengan pemberian status istimewa kepada Yogyakarta karena secara historis peran Yogya terhadap eksistensi negara RI cukup besar. Saat RI masih belum menjadi negara yang berdaulat, negara Yogyakarta yang telah berdaulat kemudian menyatakan bergabung dengan RI sehingga keistimewaan Yogyakarta sebenarnya bukan karena pemberian RI namun Sultan telah memberikan negara ini kepada RI.

Bahkan pada masa RIS, Yogya merupakan satu-satunya daerah yang melaksanakan UUD 1945. Selain itu Yogya juga telah menjadi pusat nasionalisme dan mengobarkan semangat persatuan dan persatuan. Karena peran Yogya yang demikian besar itu maka status keistimewaan dituangkan dalam UU No.3/1950 dan tetap dipertahankan pada pasal 91-b UU No.5/1974.

## **B. Komentar**

Usaha untuk menghilangkan status keistimewaan Yogyakarta tidak akan terjadi kalau pemerintah yang berkuasa mengerti sejarah tentang perkembangan daerah tersebut. Bagaimana juapun daerah Yogyakarta mempunyai keistimewaan yang tergambar dalam perannya yang besar sebagai ibukota Negara RI dari tahun 1946 sampai 1949. Yogyakarta menyandang nama ibukota RI pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945. Karena adanya kekhususan bagi daerah Yogyakarta itulah maka penyeragaman dalam menerapkan UU No.5/1974 untuk seluruh daerah di Indonesia kiranya tidak bisa diberlakukan untuk daerah Yogyakarta.

21. Judul Artikel : Depdagri Tolak Usul DPRD DIY  
Penulis : -  
Dimuat Dalam : Harian Kedaulatan Rakyat  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Rabu, 26 Agustus 1998

### **A. Materi yang Diambil:**

Permintaan DPRD Tingkat I DIY agar Sri Sultan Hamengku Buwono X langsung dilantik karena semua wakil rakyat sudah menetapkan sebagai calon tunggal, ternyata ditolak Sekjen Depdagri H. Faisal Tamin dengan dalih mekanisme pemilihan Gubernur DIY harus sesuai dengan UU No.5 Tahun 1974.

Sekjen Depdagri menegaskan hal itu ketika menerima rombongan wakil rakyat DIY yang dipimpin Ketua DPRD Subagio Waryadi di Depdagri Jakarta, Selasa 28 Agustus 1998. Subagio didampingi antara lain Marfuah, Khairuddin, Sudarno, H. Hudoro, H. Ginto Bagianto, Surachmanadi, HM Fakhrih, Herman Abdurrahman, HM Chamdani, Munawir, H. Soegiantoro, Sudomo Sunaryo (As I Sekwilda), Soebekti Soenarto (Plh Sekwilda) DIY).

Kepada wakil rakyat DIY tersebut Faisal Tamin meminta agar masyarakat DIY memikirkan segala sesuatu mengenai proses pencalonan Gubernur KDH Tkt I DIY tetap dalam kerangka kepentingan nasional. Kalau DIY memaksakan kehendak untuk mem-by-pass UU No.5 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua daerah Indonesia, dikhawatirkan daerah lainnya juga melakukan tuntutan serupa. Katanya, UU No.5 Tahun 1974 tersebut sama sekali tidak menyinggung soal-soal keistimewaan Yogyakarta. Yang menjelaskan soal keistimewaan pembentukan DIY terdapat dalam UU No.3 Tahun 1950. Pemilihan seorang gubernur untuk DIY sama sekali tidak dijelaskan dalam UU No.3 Tahun 1950 tersebut. Undang-undang itu hanya mengatur pembentukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, bukan soal pemilihan seorang gubernur. Menanggapi permintaan agar kasus ini bisa berlaku hanya di Yogyakarta, Faisal Tamin mengatakan Indonesia ini besar dan bukan ada hanya Yogyakarta atau dua daerah lainnya. Dia juga khawatir kalau Yogyakarta meminta tidak menggunakan UU No.5 Tahun 1974, malah akan diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Faisal Tamin lantas minta maaf akan kata-katanya, maksudnya hanya ingin mengingatkan bahwa Indonesia Negara Kesatuan yang pemerintahannya dilakukan secara nasional.

Faisal Tamin juga mengatakan bahwa kalau Yogya bisa lepas dari UU No.5 Tahun 1974 besok atau lusa akan diikuti oleh sultan-sultan lainnya. Mereka juga memiliki andil besar bagi kemerdekaannya bangsa ini. Dia menyampaikan keyakinannya bahwa meskipun menggunakan UU No.5 Tahun 1974, Sri Sultan

HB X dipastikan akan menduduki jabatan Gubernur DIY. Masyarakat Yogyakarta tak perlu khawatir karakteristik keistimewaan Yogyakarta akan hilang hanya karena proses pemilihan Sri Sultan menggunakan UU No.5 Tahun 1974.

Rombongan wakil rakyat kembali ke Yogyakarta dengan hasil yang tidak memuaskan, dimana sesuai permintaan Sekjen Depdagri agar pemilihan Gubernur DIY dikembalikan ke proses pemilihan awal. Padahal maksud kedatangan mereka ke Jakarta adalah menyerahkan surat kesepakatan dan keputusan pimpinan serta persyaratan administrasi Calon Gubernur DIY dan meminta kepada Presiden melalui Mendagri agar calon tersebut ditetapkan/dikukuhkan.

## **B. Komentar**

Dalam pertemuan wakil rakyat Yogyakarta dengan Sekjen Depdagri ini tampaknya Sekjen Depdagri ingin memisahkan masalah pemilihan gubernur dengan status keistimewaan Yogyakarta. Sekjen Depdagri menghendaki pemilihan gubernur tetap menggunakan UU No.5 Tahun 1974 seperti yang berlaku di propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Sementara keistimewaan Yogyakarta tetap dipertahankan berdasarkan UU No.3 Tahun 1950. Sekjen Depdagri yakin dengan menerapkan UU No.5 Tahun 1974 tersebut Sri Sultan HB X tetap akan terpilih sebagai Gubernur DIY.

22. Judul Artikel : Hari Ini Warga Yogyakarta Sampaikan Maklumat Rakyat  
Penulis : -  
Dimuat Dalam : Harian Kompas  
Kota Terbit : Jakarta  
Tahun Terbit : Rabu, 26 Agustus 1998

## **A. Materi yang Diambil:**

Setelah 5 hari menduduki halaman DPRD DIY untuk meminta DPRD DIY menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur/Kepala Daerah DIY, Selasa (25 Agustus 1998) pagi secara spontan warga Yogyakarta mendirikan panggung dan tenda untuk melaksanakan sidang Maklumat Rakyat, Rabu pukul 08.00 WIB. Sidang akan dihadiri warga Yogyakarta mulai tukang becak, tukang parkir, pedagang kakilima, gelandangan, mahasiswa, guru, pedagang pasar dan berbagai ormas kepemudaan, sepenuhnya merupakan inisiatif warga. Selain menyampaikan maklumat, mereka juga akan mengukuhkan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY sesuai keinginan sebagian warga setempat.

Menurut pengamatan, peserta sidang sejak Selasa malam sudah membanjiri ke depan gedung Dewan. Mereka akan menunggu hingga pelaksanaan sidang yang diperkirakan hingga siang hari. Ketua Panitia Pelaksana dan Tim Perumus, Totok Hariyanto dan Eko Prastowo, mengharap seluruh warga hadir di halaman Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro untuk mengikuti jalannya sidang rakyat. Menurut keduanya gelar sidang tersebut dilaksanakan karena DPRD DIY, pemerintah pusat

khususnya Mendagri dinilai tidak melaksanakan amanat dan aspirasi rakyat.

Menurut mereka, sekarang saatnya rakyat mengambil sikap untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta dan mengukuhkan HB X sebagai Gubernur DIY. Juga tidak ada yang menyuruh untuk melaksanakan kegiatan ini. Mereka semua hanya ingin menyampaikan aspirasi dan hanya ingin menyampaikan aspirasi dan menyatakan maksud rakyat Yogyakarta. Sementara Eko Prastowo mengemukakan, mimbar hari pagi ini tidak akan menghadirkan pembicara mahasiswa maupun para intelektual, melainkan rakyat jelata Yogyakarta. Mereka mengharap Sultan HB X hadir. Tentang acara ini beliau mengatakan terserah rakyat.

Maklumat Rakyat Yogyakarta yang mereka bacakan pagi ini berisi empat butir, antara lain rakyat Yogyakarta mempertahankan UU No.3 Tahun 1950 sebagai dasar hukum keberadaan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, mengangkat dan mengukuhkan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY, menolak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1974 di DIY khususnya berkaitan dengan proses penetapan kepala daerah karena merupakan produk Orde Baru. Apabila ketiga tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka rakyat DIY menuntut Pemerintah untuk melaksanakan referendum.

Sementara warga Yogyakarta sibuk mempersiapkan tempat persidangan, unsur pimpinan dan fraksi DPRD DIY terdiri atas 12 orang, Selasa siang menemui Mendagri di Yogyakarta. Mereka menyampaikan nama calon tunggal HB X sebagai Gubernur DIY. Rombongan dipimpin Ketua DPRD DIY Kolonel Subagio Waryadi.

## **B. Komentar**

Adanya kesamaan keinginan antara wakil rakyat di DPRD DIY dengan masyarakat yang secara langsung menyampaikan keinginan mereka dengan cara melakukan orasi langsung serta menduduki halaman Kantor DPRD DIY ini, maka usulan pengangkatan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta sulit untuk tidak dipenuhi oleh Depdagri.

23. Judul Artikel : DIY Dipermainkan Anak Durhaka  
Penulis : -  
Dimuat Dalam : Harian Bemas  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun Terbit : Sabtu, 26 September 1998

#### **A. Materi yang Diambil:**

Belum adanya keputusan pengukuhan Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur DIY dari Pemerintah RI, dianggap oleh mantan Menpen Mashuri, SH sebagai anak (Pemerintah Pusat) yang bertindak durhaka pada orang tuanya (Propinsi DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang sejarah tak pernah merepotkan Pemerintah Pusat tetapi sebaliknya Pemerintah RI pernah membuat repot Yogyakarta. Ini fakta sejarah yang tercatat di hati rakyat Yogyakarta sampai sekarang. Di samping itu pula dengan didukung masyarakat Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Pj. Gubernur Sri Paku Alam VIII juga telah membuat Maklumat 20 Mei 1998 mendukung berlangsungnya Reformasi Damai.

Belum adanya gubernur sejak meninggalnya Sri Paku Alam VIII (Pj. Gubernur DIY) tanggal 11 September 1998, menyebabkan terlambatnya urusan administrasi dan birokrasi Pemda DIY. Bahkan sampai saat berita ini ada 5 Peraturan Daerah (Perda) DIY yang sudah ditetapkan DPRD kini masih terkatung-katung, sudah diajukan kepada Pemerintah tanpa tanda tangan Gubernur.

Sementara itu insan pariwisata Yogyakarta DIY juga telah mendesak Presiden BJ Habibi untuk segera mengeluarkan Kepres pengukuhan Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur DIY. Sebab DIY tanpa gubernur juga mengganggu pariwisata di DIY.

Lima Perda yang terkatung tersebut adalah retribusi penjualan usaha daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, organisasi dan tata kerja pengelolaan waduk Sermo pada DPU DIY, pajak bahan kendaraan bermotor, pencabutan Perda DIY yang mengatur retribusi daerah.

#### **B. Komentar**

Meninggalnya Sri Paku Alam VIII sebagai Pj. Gubernur DIY berarti habislah tokoh dwi tunggal Yogyakarta setelah lebih dahulu wafatnya Sri Sultan HB IX penguasa Keraton Yogyakarta. Seperti diketahui puncak perjuangan kedua tokoh itu adalah ketika mereka berdua yakni Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 menyatakan tekadnya bahwa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Paku Alaman masuk dalam wilayah Negara



Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa inilah yang menjadi awal Yogyakarta menjadi daerah istimewa.

Oleh karena itulah masyarakat Yogyakarta terus tetap memperjuangkan status keistimewaan Yogyakarta termasuk Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai pewaris kepemimpinan kedua tokoh penguasa Yogyakarta sebelumnya. Karena itu sudah selayaknyalah apabila Pemerintah Pusat memahaminya dan menempatkan Yogyakarta tetap sebagai suatu daerah istimewa.

24. Judul Artikel : Sultan HB X Kekuatan Populisnya  
Penulis : -  
Dimuat Dalam : Harian Bernas  
Kota Terbit : Yogyakarta  
Tahun terbit : Sabtu, 3 Oktober 1998

#### **A. Materi yang Diambil:**

Sabtu Legi 11 Jumadilakhir 1331 (3 Oktober 1998) sejarah mencatat peristiwa penting “pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur DIY”. Dilihat dari segi perjuangan reformasi yang menghendaki pemerintahan demokratis, Sultan Hamengku Buwono X adalah gubernur pertama yang pemunculan dan dukungannya paling menonjol. Dipandang dari sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta paska 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan tokoh ketiga yang memegang pemerintahan DIY setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diteruskan Sri Paku Alam VIII sebagai pejabat gubernur.

Dukungan rakyat kecil sejak beberapa tahun silam merupakan penyangga pilar kejuangan rakyat setempat dan juga merupakan potensi dasar sebagai kekuatan dan ketaatan suci dari rakyat yang bersatu.

Sementara itu dalam pernyataannya Sri Sultan Hamengku Buwono X bertekad akan melestarikan spirit reformasi di berbagai bidang kehidupan seperti yang telah dilontarkannya sejak dua tahun terakhir. Sesuai pula dengan yang diucapkannya dalam pidato 20 Mei 1998 dalam *pisowanan ageng* di Alun-alun Utara Yogyakarta yang intinya akan mengarahkan segala daya demi kesejahteraan rakyatnya.

Acara yang berlangsung di Bangsal Kepatihan pukul 10.00 pagi tersebut, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid atas nama Presiden BJ Habibie melantik dan mengambil sumpah Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa bakti 1998 - 2003.

## **B. Komentar**

Bahwa telah dilantiknya Sri Sultan HB X pada 3 Oktober 1998 tersebut memang kemudian meredakan desakan-desakan agar usulan calon tunggal dari DPRD yakni Sri Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur DIY. Namun ketika kemudian berlangsung kegiatan pengisian jabatan Wakil Gubernur, masalah keistimewaan Yogyakarta kaitannya dengan jabatan gubernur dan wakil gubernur di daerah ini muncul lagi polemik dan pernyataan dukungan dari rakyat Yogyakarta. Karena itulah kemudian dibentuk satu panitia yang akan membuat rumusan tentang bentuk dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta tersebut. Juga sehubungan dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah, maka rumusan tentang keistimewaan Yogyakarta tersebut sekaligus berkaitan dengan masalah Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini masukan-masukan pendapat khususnya tentang kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang telah muncul banyak ulasan, pendapat dan usulan-usulan. Kapan rancangan itu menjadi suatu keputusan, sejarah menunggu dan akan mencatatnya.

### **BAB III**

## **INVENTARISASI SUMBER LISAN DARI MASA ORDE BARU SAMPAI REFORMASI (TAHUN 1966 - 1998)**

Pengalaman para tokoh Orde Baru sampai Reformasi merupakan pengalaman pribadi. Pada saat sekarang banyak keterangan penting masih diingat oleh sejumlah tokoh Orde Baru sampai Reformasi. Mereka itu sebagai narasumber yang bisa menceritakan pengalamannya kepada pewawancara. Pengalaman mereka bisa menjadi sumber bahan keterangan yang sangat berharga bagi masa Orde Baru sampai Reformasi, bila dipindahkan dari ingatan para narasumber dalam bentuk yang tidak terikat pada masa hidup orang itu sendiri.

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk merekam ingatan para tokoh Orde Baru sampai Reformasi melalui rekaman wawancara yang dapat disimpan untuk kepentingan masa depan penelitian dan penulisan sejarah. Dengan demikian sumber bahan keterangan di dalam pita rekaman itu tidak lagi terikat/terbatas pada masa hidup seseorang yang telah menuangkan ingatannya melalui pemberitaan lisan tetapi melalui wawancara di kaset dan telah diawetkan dalam rekaman.

Hasil rekaman tersebut kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan sehingga dapat disajikan sebagai bacaan sejarah pribadi pelaku dan berguna untuk penelitian dan penulisan sejarah Orde Baru sampai Reformasi. Pengalaman masing-masing narasumber atau pelaku dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu keterangan yang diberikan oleh pelaku bervariasi. Hal ini sangat menguntungkan karena dapat saling mengisi dan melengkapi.

Berikut ini hasil wawancara dengan para tokoh Orde Baru sampai Reformasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditranskrip dalam bentuk tulisan.

- |                                |   |                                                           |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 1. Nama                        | : | Felix Yoseph Basuki                                       |
| Tempat/tanggal lahir           | : | Yogyakarta, 12 Desember 1928                              |
| Jenis Kelamin                  | : | Laki-laki                                                 |
| Tugas/jabatan dalam perjuangan | : | - Ketua Partai Katolik<br>- Anggota DPRD Tkt I Fraksi PDI |
| Jabatan sekarang               | : | Anggota Dewan Pertimbangan Partai Katolik Demokrat DIY    |
| Alamat                         | : | Jalan Gajah 50 Tahunan Yogyakarta                         |

Wawancara dilaksanakan : Selasa, 23 Juli 2002  
Tempat wawancara : Jalan Gajah 50 Tahunan Yogyakarta

## **A. MATERI**

T : Nama bapak.

J : Felix Yoseph Basuki

T : Tempat dan tanggal lahir.

J : Yogyakarta, 12 Desember 1928

T : Jenis kelamin.

J : Laki-laki.

T : Jabatan dahulu.

J : Ketua Partai Katholik dan Anggota DPR Fraksi PDI.

T : Jabatan sekarang.

J : Anggota Dewan Pertimbangan Partai Katholik Demokrasi DIY

T : Bagaimana perubahan politik di daerah dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret.

J : Kalau perubahan politik ya begitu jelas. 11 Maret itu kan urusan orang pusat. Jadi di daerah belum terasa dampaknya. Nah dampaknya kelihatan itu setelah ada kecurangan dengan 11 Maret. Jadi pada waktu itu kami pimpinan-pimpinan parpol termasuk Rektor GAMA apa itu mengadakan semacam paguyuban Jum'at Kliwonan untuk setiap kali berkumpul membahas evaluasi independente dikirimkan pada Pak Harto. Jadi misalnya kami dari partai Katolik pernah menerima itu juga ditempatnya Pak Rektor di dekatnya Pak Harto (Kemusuk) itu juga pernah kesana bahwa pada waktu itu kita percaya 100 persen dan merasa perlu membantu sehingga dampak yang negatif itu betul-betul belum terangkat karena yang katakanlah saja kami orang Jawa orang bodoh nggih tentang kejahatan PKI, kita ya mendengar artinya tidak begitu kritis, Orde Baru juga mendengar itu adanya kalau kita jujur ya mendukung Orde Baru sehingga mengadakan kelompok itu semua partai disitu.

T : Waktu Surat Perintah 11 Maret keluar tidak memberi tanggapan pak?

J : Tidak, lha saya ndak tahu kalau ada kelompok-kelompok yang memang diluar itu jalur formal, kan ada to misalnya kelompok-kelompok jalur formal tahu tetapi karena masyarakat itu tidak begitu tanggap lha mereka lalu menyendiri itu saya ndak tahu. Itu yang umum memang begitu.

T : Kemudian ini pak sebelum Surat Perintah 11 Maret ini keluar, kondisi sosial politik, ekonomi bagaimana pak.

J : Sebelum ada Surat Perintah 11 Maret itu begini bahwa pada waktu itu

kami orang-orang partai lebih mendapat perhatian dari aparat pemerintah. Aparat pemerintah sering menanyakan pada kami berita-berita bagaimana dan seterusnya. Ha itu alasannya apa kalau menurut saya hirarki begitu. Kalau birokrat itu kan wali jenjang-jenjang Bupati, Gubernur dan sebagainya.

T : Inggih.

J : Sedangkan kami dari parpol langsung dipimpin terus bergerak sehingga aparat kecamatan apa itu justru dari kita orang parpol itu. Jadi pemerintah itu kalah dengan parpol meskipun dalam hal ini partai Katolik kecil ya tetapi ya itu lincah.

T : Jadi sebelum Surat Perintah itu ada gejolak misalnya kondisi perekonomian, ada inflasi.

J : Kalau itu terus terang saja boleh dikatakan suatu nuansa yang pada waktu itu itu gejolaknya itu tidak persis pada 11 Maret, jadi gejolaknya kan tidak Malari atau apa itu lalu kabinet 100 Menteri, gejolaknya saat itu. Sedangkan nuansa itu dari Orde Baru ini dengungunya sudah agak reda karena sudah barang biasa. Nah kalau dikatakan itu dalam keadaan kacau ya boleh saja tetapi ya sudah rekoso semacam iki.

T : Terus ini pak sebelum Surat Perintah itu dikeluarkan apakah penentang-penentang Orde Baru juga banyak pada waktu itu.

J : Ada.

T : Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang perekonomian.

J : Maaf ya yang sedang pada saat itu secara formal ditulis diketahui itu kan PNI Ali Surahman. Lalu pada waktu itu yang mau membahaskan menghancurkan PNI keseluruhan dari parpol itu artinya mengancurkan itu bukan mematikan tetapi mengurangi peranan itu dianggap pendukung Orde Baru. Saat itu memang terjadi front Pancasila. Nah front Pancasila itu bergantian tempatnya karena takut diketahui oleh oknum yang anti Orde Baru. Lalu saat itu perebutan kekuasaan itu juga sudah ada antar partai tetapi masih halus misalnya dari NU dan Parmusi apa itu juga terjadi perebutan tapi NU ngalah. Lha NU mengatakan kalau saya itu mau mengikuti anda tetapi kalau nanti tembak menembak apa anda sanggup menjamin msetinya saya tidak kena peluru. Ya dari itu ya ndak bisa menjauh, saya tidak tanggung jawab. Lalu saya di rumah kedatangan IPKI itu mencari GPA, ha kami yang biasa secara politik itu pokoknya ndak mau, ha itu sudah terang-terangan rebutan. Itu suasananya.

T : Kemudian anu pak khususnya organisasi kebudayaan juga apakah mereka kan akhirnya membawakan debu PKI pak seperti LKN.

J : Jadi begini soal apa ya pengaruh PKI itu saja pada lembaga-lembaga yang

jadi misalnya saya ambil contoh ya rekan dari Katolik sendiri atau yang didakwa ikut krosing (kurang jelas) bukan begitu ya. Itu kalau kita renungkan itu pak Kasimo sendiri diatas ya ikut rombongan disitu belum jelas bahwa PKI itu mau begitu, ha saya sendiri ya ikut uyak-uyuk karena forumnya belum mendakwa PKI itu mau begitu. Lha ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik setelah Orde Baru itu tumbuh lalu ada gagasan yang terpegang oleh dia, akhirnya dia anggota Parkindo itu disikat. Padahal pada waktu itu fraksinya itu sesungguhnya belum masuk pengaruh PKI. Nah baru di tengah jalan terpengaruh oleh PKI tapi yang tahu kan yang diatas sana, yang bawah ndak tahu itu politik banyak yang jadi korban. Artinya itu saya tidak menjahatkan orang PKI semua. Tetapi orang yang masuknya lembaga-lembaga yang dipengaruhi oleh PKI yang sesungguhnya mumi tidak tahu apa-apa menjadi korban di PHK itu banyak sekali. Nuwun sewu kita harus minta maaf sama almarhum yang mati jiwanya, ekonominya.

T : Kemudian pak menurut Pak Basuki sendiri sebetulnya pengertian Orde Baru itu apa pak.

J : Jadi begini saya sendiri pernah diserang, saya digagalkan oleh anak saya yang aktif dalam saya jadi ketua partai yang orde baru itu sudah mulai berkembang lalu orang-orang partai Katolik sendiri yang belum menguasai itu saya diserang dialog. Pada waktu itu saya belum bisa menjawab tetapi kita nanti saja dalam perjalanan ini akan kelihatan siapa yang orde baru dan siapa yang orde lama. Pada waktu itu belum ada devinisi, saya ambil contoh pada waktu saya di halaman Masjid Agung itu IPKI dan partai-partai semua yang ada itu mengatakan pada kami mbok partai Katolik itu dalam mendukung orde baru itu menyesuaikan sama partai lain. Tentang orde baru itu organisasi yang sekarang dicap orde baru itu di dalam organisasi yang seperti orang-orang orde lama masih ada, demikian juga orang PNI yang saat itu terang-terangan anti itu. Orang PNI itu kan sekarang secara formal dicap Orde Lama tetapi saya tahu bahwa orang-orang PNI itu banyak yang orde baru tapi saat itu belum secara devinisi. Jadi sekarang kalau kita mau melangkah ya jangan hanya formal organisasinya saja. Keadaan itu masih berjalan belum jelas kok. Nah sekarang mengenai orde baru itu menurut yang saya dengar dari orang-orangnya di pusat tetapi dulu dia memberi kuliah diancam atau apa, jadi orde baru itu menurut dikeputusan apalah itu peningkatan solidaritas sosial, peningkatan solidaritas nasional lalu percaya kepada diri sendiri lalu percaya kepada kemampuan sendiri tetapi ini istilah politis yang bahasa Inggris ini saya sudah ndak ingat persis. Tetapi saat itu tidak diumumkan oleh AD keputusan itu tetapi sekali lagi teks ini saya

omongkan secara bebas. Pada waktu itu diumumkan karena katanya anggaran dasar sendiri intropeksi lalu kalau ini diumumkan kita sendiri kena sebab AD sendiri solidaritas sosialnya belum banyak. Lalu pak Yusuf itu memperbaiki asrama-asrama apa itu sebetulnya sudah ada devinisi.

T : Jadi perbaikan barang-barang itu masuk aktif. Aktif dari...

J : Orde baru

T : Mungkin ada massa dibalik itu pak atau misi dan visi orde baru.

J : Kalau yang kerap kali terungkap dalam pembicaraan-pembicaraan politik dari segala macam partai politik itu orde baru itu aturan baru untuk kembali ke UUD 45 dan Pancasila. Ini sebelum diluar yang saya ceritakan tadi AD umumnya.

T : Ya .... ya .....

J : Untuk membuat devinisi, jadi fungsinya itu adalah mengembalikan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

T : Apakah Orde Baru itu memaafkan jaman Orde Lama tidak melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen pak. Juga apakah ini alat pemukul Orde Baru terhadap Orde Lama pak.

J : Kalau ini dulu itu kan ada semacam yarden politik ya, ada bahaya kotkrin empat hijau (kurang jelas) itu. Yang pertama harus waspada dengan baju hijau, kedua dengan bendera hijau (*green flage*), ketiga dengan spanduk hijau (*green horn*), keempat *marcel green*, dulu duta besarnya Mr. Green, ini bahaya yang disinyalir. Jadi termasuk itu ABRI sendiri kan sudah dicurigai sebelum orde baru itu karena mungkin sudah ada ini yang membuat rumusan umumnya orang pinter, saya hanya tinggal menerima saja. Itu suasananya begitu lalu kemudian meletus G30S/PKI itu lalu ya setengahnya semacam terkejut karena dulu kan keadaannya susah sehingga jalan pikiran PKI itu kan ada skenario rakyat berpikir bisa kesitu, nyatanya kita sendiri tahu ya begitulah. Lalu marcel green diganti green horn itu soal Malari, lalu green flage yang Islam itu malah dulu belum terasa kan masih lemah sekali lalu green costum.

T : Itu lontaran dari mana pak isu itu.

J : Ya saya sendiri kok sampai tahu itu ya apa ya jadi secara fenomenal kan partai-partai itu sering kompernas, kongres dan seterusnya. Lha di dalam kompernas, kongres kan tukar pikiran, tukar informasi mencatat semacam itu dan kebetulan kok ya ingat. Dan jangan lupa pada saat itu apa Katolik dicurigai oleh khususnya Bandrio itu sehingga Katolik disudut-sudutkan. Karena Katolik disudut-sudutkan maka dalam orde baru ternyata Katolik bisa dipegang, begitu ceritanya.



- T : Kemudian pak .... Surat Perintah Sebelas Maret merupakan tanggal lahirnya Orde Baru, bagaimana?
- J : Jadi kalau menurut saya itu peristiwa sejarah itu permulaannya itu .... artinya siapa yang memulai dan seterusnya lalu akhirnya mesti ada semacam panitia kecil yang mengambil kebijakan dari pemerintah tentunya itu kan mesti mikir-mikir. Lha yang paling menonjol itu kan kekuasaan presiden Suharto. Lha pejabat presiden dianggap ganti era pemerintahan, hal itu dimulai kapan ya dimulai adanya surat itu meskipun akhirnya ada orang yang mendakwa surat itu, surat sudah dipalsu. Jadi menurut hemat saya belum jadi sesungguhnya tentang hari-hari besar bagi saya sudah tidak ambil pusing, lho yang setua ini kebetulan kamu jadi pemimpin, kami berkuasa yang menentukan hari yang seenaknya saja. Misalnya sekarang hari pendidikan (anunya Ki Hajar) ha kebetulan saya masih ada kaitannya dengan Ki Hajar tetapi kalau dirasakan dengan Kristen, Katolik, Muhammadiyah itu lha kok ya diam saja. Ha itu kan hanya semacam konsensus saja.
- T : Kemudian pak apakah Surat Perintah Sebelas Maret itu bisa dikatakan merupakan perebutan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto?
- J : Jadi kalau menurut yang saya ketahui jauh sebelum orang mendakwa itu mendengar dari rekan-rekan dan rekan-rekan itu sumbernya katanya dari *Voice of America*, Sebelas Maret itu sesungguhnya perebutan kekuasaan karena begini yang disebut perebutan kekuasaan itu kalau pelimpahan kekuasaan secara ikhlas dari pihak yang menyerahkan, lha dari pihak Amerika sendiri rupa-rupanya mentalnya lebih kritis bahwa itu tidak secara ikhlas diserahkan dari Bung Karno. Itu kami sudah mendengar lama sekali tetapi lebih baik kami diam, bukan begitu karena ya pada saat itu jiwa nasionalis itu masih terbawa di Amerika, bukan begitu.
- T : Tetapi sebetulnya bukan begitu.
- J : Nah kalau menurut sejarah ternyata ada kebenarannya meskipun belum terungkap, ha masak hilang begitu saja.
- T : Kemudian pak pada tanggal 14 Maret 1966 itu lahirnya ... atau pembubaran PKI. Ini kan diadakan pawai mohon dijelaskan.
- J : Jadi begini di Yogya ini juga ada pembubaran PKI. Nah termasuk yang pidato dalam pembubaran PKI itu saudara Y. Suhirjo dari Partai Katolik Kodya. Pada malam sebelum apel di Alun-alun itu kita kan berkumpul, ini secara akademis atau secara konfistetera mestinya ada dua pihak pertimbangan itu apel umum atau tidak, kalau ikut apel umum apa peranannya. Itu kan ada pro dan kontra, saya ambil contoh saja kalau nanti Partai Katolik ikut memisahkan PKI kasihan yang di Gunungkidul dan

macam-macam dimana PKI masih kuat sekali tetapi kalau tidak ikut nanti dalam perkembangan juga terseok-seok. Itu dijadikan diskusi malam sebelum pembubaran PKI. Nah akhirnya lalu itu diputuskan lalu sesudah ikut begini dulu itu ada perpihakan berkumpulnya itu di Shopping Centre tetapi belum isi masih berupa lapangan sepak bola. Lalu kita berpikir pokoknya ikut nanti kalau ada apa-apa lari ke Gereja Kidul Loji tetapi ternyata di Alun-alun Utara itu saudara Y. Suhirjo ikut pidato bubarkan PKI.

T : Jadi dari Partai Katolik itu mendukung pembubaran PKI.

J : Ya jelas karena apa ya, saya tidak mau bicara banyak nanti ya orang lain itu bisa menyatakan itu munafik. Kalau kita memperhatikan setiap situasi itu mesti ada pertimbangan-pertimbangan kalau begini-begitu tapi toh akhirnya diambil kesepakatan. Jadi untuk mengatakan apakah itu konseptual sejak awal saya tidak berani mengatakan. Ada perubahan-perubahan itu kami dari partai sudah merasa tapi tidak jelas ini masuk kemana, bukan begitu. Hanya sekarang dengan pandangan pengurus-pengurus partai itu ya sudah kalau begitu.

T : Tetapi sebelum mendukung, partai politik itu apakah mengikuti bahkan itu ada perdebatan pak.

J : Ya perdebatan itu pada saat kita diundang apel umum itu. Sebelum apel umum itu kan kita ndak tahu perkembangannya.

T : Kemudian pak, sekarang itu kan ada gejala pemberontakan itu tidak sampai eks PKI .....

J : Sekarang begini teman saya itu pernah menceritakan di Gunungkidul itu terjadi dialog antara eks CGNI. Nah kebetulan ada anggota CGNI lalu yang satu ini bukan CGNI yang menjadi Sekwilda Gunungkidul (saya sudah lupa karena sudah lama) lalu yang eks CGNI itu tanya kepada Sekwilda karena dia orang yang tersisih tetapi teman lama ya dialog itu biasa, sekarang apa sebabnya orde baru itu tidak itu ya? sekwildanya yang tanya, PKI itu tidak memikirkan akan timbul lagi, ha dalam jaman orde baru itu katanya begitu karena keadaan sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PKI. Apa pemerintahan sentralistik, apa-apa dinasionalkan meskipun itu namanya demokrasi tapi tidak tahu gerakannya itu pindah apa top down. PKI itu yang dituju bukan semacam itu, lha sekarang sudah berjalan kok.

T : Kemudian ini sebelum Orde Baru muncul atau menjelang Orde Baru muncul itu banyak laskar-laskar ya di Yogya kemudian laskar itu menurut Pak Basuki bentuk apa ya?

J : Kalau menurut dugaan saya fenomena sosial yang umum. Jadi selama

orang itu merasa dirinya mendapat musuh maka dia mencari kelompok, bukan begitu. Secara garis besar sudah bisa digambarkan apa itu kelompok agamis, apa itu nasionalis dan seterusnya itu kelompok itu otomatis karena ini bahaya PKI dan PKI anti agama, maka kelompok yang agamis itu dan begitu kelompok terbentuk begitu intensif mencari informasi itu cepat sekali.

T : Sebelum orde baru itu kondisi ekonomi sosial terpuruk, setelah orde baru muncul itu bagaimana.

J : Kondisinya kalau menurut saya membaik karena apa karena pinternya Orde Baru.

T : Setelah lewat ya?

J : Nah setelah itu tidak bisa mengatakan begitu. Sekarang ini berpaling dari partai itu sudah meramalkan bahwa pemerintahan ini akan kuat karena militer dan teknokrat bersatu. Militer itu "otote" dan teknokrat itu "otake" ha sudah rakyat suruh apa dienguk-engkuk artinya itu tidak merasa kalau ini sekarang lho dulu ndak tahu "apa-apa wis percaya to" wong pinter, wong kuat dan seterusnya itu merasa dirampas Golkar di Korem yang lama itu (sekarang museum) pada waktu itu saya sebagai pimpinan katib yang ketuanya pak Saparjo. Pada waktu itu pak Saparjo itu ketua (lupa saya) persis ..... sebelum saya cerita ini lebih dahulu apa yang ada dalam pikiran saya kemukakan artinya yang berkembang dalam partai Katolik. Keadaan orde lama itu kacau karena sistem pemilihan wakil rakyat ndak benar. Setelah dia menjadi wakil rakyat itu dia tidak mewakili rakyat tetapi mewakili partai sehingga partai-partai yang berkuasa kaya, bukan begitu. Nah oleh karena itu diusahakan supaya ada institusi baru untuk menghilangkan itu sebab pada waktu itu dikatakan wakil rakyat itu punya "*gendero loro*" partai dan rakyat. Dan rakyat yang dikalahkan yang diunggulkan partai. Supaya wakil rakyat itu tidak punya "*gendero loro*" lalu menggunakan sistem seperti Amerika istilahnya bagaimana yaitu sebelum pemilihan umum diadakan suatu lembaga yang menyiapkan calon-calon. Calon-calon itu oleh lembaga tadi kalau sudah terpilih lembaga ini bubar sehingga calon ini punya induk formal "*ora mesti golek gegana dienggo sing nggolekke dalan*" lha lalu berpikir kepada rakyat saja. Itulah Golkar sejak Sekber Golkar, setelah pemilihan umum bubar.

T : Sebetulnya Sekber Golkar itu terdiri dari partai-partai politik?

J : Tidak, lembaga. Ini partai, ini partai, ini ada Sekber Golkar "njupuki" orang-orang yang mau. Saya sendiri itu ditawarkan menjadi anggota DPR Pusat seperti Ki Suratman itu, datang ke rumah saya. Ha saya tolak karena saya itu sebetulnya bukan Partai Katolik. Saya tanya pada Ki Suratman katanya

caranya juga begitu lalu kebetulan Ki Suratman bukan orang partai jadi ya lolos artinya bisa ha saya orang partai ya berat pada partai saya. Setelah Sekber Golkar menguat itu saya dengar pidatonya Pak Saparjo itu setelah Sekber Golkar menang, kemenangan ini harus dipertahankan karena itu Sekbernya hilang hanya menjadi Golkar. Sekber Golkar ini tidak hilang blas hanya menjadi Golkar. Dan dewan dalam Golkar itu baik ABRI maupun non ABRI (sipil) itu masuk didalamnya. Pada saat itu begini ya saya spontan pada tak tulis *"partai-partai liyo ora ana hasile, ini ABRI masuk Golkar ya menang"*. Itu sudah bagi pikiran saya mengarah kesana. Lalu begini saat itu saya bukannya meramal ya hanya semacam analisa saja "lha iki wis ora beres", bukan begitu to. Lalu pada suatu saat ya mesti nuntut. Pada waktu pemilihan itu kan kampanyenya Sekber Golkar-Sekber Golkar, ning bareng wis dadi ha sudah kita semua merasakan meskipun saya juga pegawai negeri.

T : Jadi begini pak Sekber Golkar itu mengambil dari partai-partai atau tokoh-tokoh.

J : Tidak

T : Tokoh-tokoh itu direkrut dan ditawari.

J : Ya ditawari.

T : Jadi ini apakah bentuk pembinaan partai.

J : Nah begini ide yang semula itu kan gratis, orang yang jadi DPR mewakili partai tidak efektif karena itu Sekber Golkar mengusahakan wakil rakyat tidak semacam itu. Itu ide pertama semacam itu. Jadi ndak punya pikiran wis jadi seperti arep mateni partai itu tidak, arep nggoleki supaya efektif. Nah tapi di tengah jalan seperti itu, sekber.

T : Misinya berubah ya.

J : Iya

T : Kemudian ini pak dalam menjelang Orde Baru apa kondisi politik, ekonomi, sosial itu sudah tertata rapi tetapi tahun 1987 itu dikatakan sudah banyak penyimpangan-penyimpangan.

J : Ya sudah, contohnya saja ya karena ini sudah merupakan yang lewat dalam suatu pertemuan ada yang menanyakan mengapa Pak Harto itu "sugih", itu sudah bukan rahasia lagi. Nah yang mangsuli itu wakil rakyat. Ada tiga kemungkinan Pak Harto sugih semacam itu. Yang pertama itu karena dia pemimpin yang fair yaitu ingin mencari dana sebanyak-banyaknya berjaga-jaga andaikata ada kesenjangan-kesenjangan karena itu berusaha mengumpulkan uang itu. Lalu uang itu dikumpulkan supaya dengan pengertian setiap saat itu ada bahaya itu mengambilnya cepat sebab kalau

punya kekayaan ditanam-tanamkan itu punya proses lama, sedangkan kejadian politis cepat, bukan begitu. Yang kedua memang Pak Harto itu serakah. Nah diantara yang kedua itu benar kan Pak Harto sendiri yang tahu, paling-paling kita hanya meraba-raba. Ini tahun 1987 sudah ada peristiwa ini pembicaraan di masyarakat ning kelompok politik.

- T : Kalau bukti-bukti penyimpangan sebetulnya sudah tahu ya.
- J : Sudah. Nah sekarang terbukti Buloggate, disamping Buloggate katanya juga masih ada dana lain yang bukan semacam dipakai Buloggate itu tetapi ini diluar APBN. Jadi diluar dana yang dimanfaatkan Buloggate itu masak ada semacam dana yang juga diluar APBN. Ha ini sesuai denga teori tadi memang Pak Harto ingin supaya kalau ada apa-apa cepat itu bisa diatasi atau ditanggulangi dan seterusnya. Tetapi ternyata uang yang ditentukan tidak masuk APBN itu kan istilahnya formal itu dipinjam sebagai modal tetapi yang pinjam sebagai modal siapa. Dan nanti akhirnya disaur atau tidak ya tidak tahu. Lhaitu begitu sesungguhnya kalau orang partai sudah tahu seperti keadaan sekarang ini. Surat kabar semacam itu ya saya kira surat kabar ya mung seperti itu, ada berita ini, ada berita itu.
- T : Surat kabar itu saling mengkounter ya.
- J : Ya karena surat kabar pada saat itu kan masih dikuasai partai.
- T : Terus begini pak, jadi sesuai disinyalir juga bahwa penggogrokan ekonomi itu sebetulnya gerakan mahasiswa juga, itu bagaimana.
- J : Jadi begini kalau menurut pendapat saya itu mahasiswa-mahasiswa saat lahirnya Orde Baru, mahasiswa yang “rekasa uripe” karena itu jalan pikirannya “mlethik” kan begitu sehingga lalu ya itu bisa jadi pemimpin sedangkan mahasiswa menjelang reformasi mahasiswa yang “penak uripe”.
- T : Jadi Pak Basuki setuju dengan gerakan Malari, berupa kebijakan ekonomi Pak Harto.
- J : Jadi begini ya konsep saya berpikir itu begini saya setuju atau tidak itu yang penting kan begini saya nggak ikut mengemukakan kebenaran tetapi tidak semua kebenaran saya kemukakan termasuk itu tadi semacam analisis yang masih “medeni”, lebih baik saya ndak bicara. Nah soal malari itu kalau menurut konsepnya itu ya baik tetapi apakah itu muncul pada saat ini dan tepat. Itu yang menjadi problem kan begitu, misal anak saya minta ini dan itu, kebetulan saya punya uang langsung saya beri tetapi kalau anak saya minta ini dan itu jumlahnya banyak kebetulan saya ndak punya uang saya tolak tetapi hati kecil sebetulnya membenarkan. Sekarang peristiwa politik sama saja, jadi dalam sejarah itu lawan pemerintah selalu tiga macam.

Pertama mahasiswa dan pemuda, kedua itu mahasiswa lalu pemuda dan ketiga kaum ulama tidak hanya Islam ya. Nah masalahnya bagaimana pemuda itu mempunyai sifat masih alami itu dengan keadilan dan kebenaran masih peka. Mahasiswa dengan pengetahuannya itu keadilan lebih peka daripada yang bukan mahasiswa dan orang tua yang sudah pegawai, kalau alim ulama yaitu referensi hidupnya adalah disana di surga sehingga untuk peraturan-peraturan dunia itu sifatnya sementara sehingga dengan pendiriannya kalau jalannya menyimpang dari ajaran moral mesti berani menentang meskipun saya dibunuh saya ndak apa-apa. Nah itu musti tidak pemuda, mahasiswa, ulama itu sudah selalu disuruh apa-apa mesti itu sekarang hanya masalahnya yang banyak bermunculan itu kan dari mahasiswa bukan pemuda. Nah mahasiswa atau pemuda itu saya ingat istilahnya lupa bahwa dia itu libewer (kurang jelas), jadi dia mesti serentak hanya ngebroke tapi setelah itu dia tidak bisa memikirkan, kan begitu, saya tahu itu saya mengunjungi asramanya sendiri yang penting ngobok dulu. Nah ini sama dengan gerakan yang termuda, jadi dunia ini bergerak kan tahun 1905 pada waktu Turki itu terkenal denga yang “ter” itu. Pokoknya kalau ada pemikiran supaya generasi muda diikuti sertakan tapi pada saat itu generasi muda tidak ikut memerintah hanya membatasi diri, jadi menyadari itu. Nah setelah Turki jelas semacam itu sekarang yang namanya gerakan Turki muda itu berjalan sebagai istilah dimana-mana. Lha itu gerakan malari dan lain-lainnya.

- T : Nah jadi begini Sekeber Golkar .... kalau tiga komponen itu disebut gerakan pemuda, mahasiswa dan lain-lain itu apakah bisa dikatakan atau sebagai indikator bahwa pemerintahan dulu .....
- J : Dengan buruh.
- T : Nah kalau itu buruh. Kalau tiga komponen itu sudah jelas berarti kalau pemerintahan itu buruk pak bisa dikatakan begitu.
- J : Lha iya. Kalau di Malaysia sendiri itu indikator buruh itu tergantung dari upah, jadi kalau tukang becak sudah murah, tukang cukur rambut sudah murah, WTS sudah murah begitu pemerintahan saling kacau itu. Jadi tukang becak lalu tukang cukur dan WTS itu kalau murah itu pemerintah sudah buruk, itu kalau di Malaysia. Sekarang jual kepribadian wis murah banget, tukang becak wis nyambut gawe rekasa. Nah sekarang disini apalagi orang-orang gitu itu lebih meyakinkan hanya masalahnya sekarang saya itu juga merenungkan soal batas itu sudah berubah atau tidak, sulit ditentukan secara matematis. Soalnya sekarang begini hidup saya sekarang sudah repot, sudah pensiunan masih anak itu mau sambi buka bengkel di pinggir jalan apalagi

semua naik juga repot tetapi kalau saya mengingat pada waktu ..... itu jauh lebih sengsara. Sekarang itu *luwih penak senjata* saya repot masih dari sana hutang arisan sini tetapi toh masih bisa menikmati radio, televisi sehingga sekarang itu dianggap rekasa atau tidak, nah sekarang saya hanya melihat saja. Kalau saya melihat kiri kanan saya itu kebangetan kalau saya mesti sambat, ha nanti lalu tetangga-tetangga saya lebih rendah dari saya, saya lebih banyak punya pensiun. Nah tetapi sebetulnya kalau norma itu saya tarik pada waktu dulu masih *penak*. Kita ndak bisa untuk menarik batasan dulu. Nah gagasan sekarang menurut pendapat saya sudah repot itu apalagi listrik berani naik, LPG naik wah ya sudah. Ah soal gagasan itu tergantung visi dan misi orang. Kalau anggota DPR sekarang mungkin wis *penak* ha dia ngeruki sak senenge dewe artinya tanpa norma ha itu sudah *penak*. Tetapi kalau seperti saya ya beginilah tapi itu tadi bahwa saya ndak perlu mengatakan itu karena relatif.

- T : Kemudian pak bagaimana kalau dualisme kepemimpinan nasional di DIY. Yang dimaksud disini disatu sisi itu merupakan niat ..... bagaimana pak.
- J : Saya kebetulan masih ada kaitannya dengan DIY. Jadi kalau dilihat secara akademis itu sebetulnya di DIY sudah tidak pada tempatnya kalau secara akademis ditarik dari demokrasi sebab bagaimanapun juga negara yang disuarai keduanya. Jadi ada yang karena keturunan *wis penak uripe* itu kalau diekstrimkan tetapi kalau menurut keadaan secara umum sekarang ditari saja penduduk anda itu masih menginginkan keadaan sekarang atau tidak. Nah kalau masih menginginkan ya sudah teruskan saja tapi kalau tidak menginginkan ha Sri Sultan itu saja ada permulaannya artinya Sultan I itu *entuk suara seka ngendi ya to*. Lha sekarang kita harus fair, jadi diuji dari semua sudut dan alat pengujinya itu ya betul-betul harus fair. Ha kalau dilihat dari unsur pengabdian DIY itu memang boleh dikatakan yang lebih banyak pengabdiannya pada RI dan dengan keberanian tetapi yang namanya keberanian itu tergantung pemimpinnya to, kebetulan HB IX. Lha sekarang kalau itu mau diteruskan ya supaya seperti HB IX sehingga rakyat itu masih *penak*. Kalau jaman saya jadi DPR mengapa DIY itu dipertahankan karena dengan DIY dipertahankan itu rakyat DIY lebih enak hidupnya karena yang minimum, padahal luas daerahnya dan seterusnya lha semacam ini. Jadi dengan pengucuran ini DIY itu makmur, maka seluas DIY ini diperlakukan seperti Kabupaten atau Karesidenan di Jawa Tengah itu. Lha itulah yang menjadi kunci DIY dipertahankan. Jadi demi rakyat, sekarang soalnya dalihnya secara formal UUD 45. Lalu secara historis yang lain pernah menjadi ibukota perjuangan. Ini istilah menjadi ibukota



perjuangan ndak bisa diremehke sama daerah lain. Kalau pusat kebudayaan, pusat pendidikan itu daerah lain bisa mengklaim tetapi DIY sebagai pemerintahan RI ndak bisa.

T : Dari pembicaraan ini bisa saya simpulkan bahwa dualisme kepemimpinan di DIY itu ada faedahnya ya.

J : O ya ada manfaatnya sebab yang dicari orang hidup itu segi praktisnya, nah sekarang apa untungnya “strukturnya *elek ning pimpinane apik*”. Yang perlu itu bisa nguberi struktur daripada strukture *apik ning* yang punya itu pelit. Seperti amandemen ini lalu saya ditanya amandemen itu gimana, Kalau menurut hemat saya amandemen itu sebetulnya ndak begitu perlu selama yang penting itu pelakunya. Pelakunya itu kok sudah menindaki begitu ya sudah sekarang ndak usah melihat UUD dibuat Tap MPR atau UU.

T : Atau Peraturan Pemerintah ya pak ya.

J : Ya. ha nanti seterusnya begitu, ini kalau secara ilmiah itu juga ada kaitannya mau memperbaiki keadaan pertama kali itu orangnya atau pelakunya dulu. Kalau ini kacau yang menyebabkan pelakunya itu dipecat. Jadi komposisi daripada personil lalu diusahakan ya ora apik-apik, sekarang yang dirubah tata kerja. Coba kalau tata kerjanya dirubah sudah baik ya sudah tidak merubah struktur. Nah baru kalau semua sudah dicoba ndak bisa baru melihat struktur, ini terakhir kalau perlu ojo diowah-owah ini untuk senjata terakhir. Nah kemudian UUD itu juga kalau perlu nanti.

T : Jadi yang penting itu pelakunya.

J : Ya pelakunya.

T : Kemudian pak dampak diangkatnya Pak Harto sebagai pejabat presiden terhadap kehidupan sosial politik, ekonomi khususnya di DIY itu bagaimana.

J : Menurut kesan saya dampaknya itu positif (secara umum). Nah kalau ini dikomentari oleh orang-orang tersisih, terpojok dia bisa saja mencari dalih. Adapun sekarang kebijaksanaan atas mencari hutangan banyak sekali, kita percaya pada pimpinan, lha pimpinan pada saat itu juga membeberkan rencana jangka panjang. Sekarang yang menyebabkan kacau KKN itu. Kalau ini katanya seorang pedagang menginginkan hutang itu malah “ora payu” artinya likuiditas itu berputar. Jadi kalau saya membedakan begini yang baik ya kita katakan baik, lalu dampak negatif itu disebabkan apa yaitu yang jelek. Jadi menurut hemat saya yang sudah ya sudah tapi ini cara berpikir baru semua pimpinan parpol itu “saiyek”.

T : Sekarang yang saya tanyakan katakanlah Pak Harto itu sebagai produk Orde Baru ya tapi harus diakui ya bahwa Orde Baru itu tidak mewarnai

perjalanan politik Indonesia. Lha ini plus minusnya apa pak.

J : Menurut saya, pertama kali ABRI itu seberapa jauh terlibatnya dalam pemerintahan. Itu ada empat. Yang pertama tentara itu sama sekali tidak duduk dalam pemerintahan sipil. Kedua tentara duduk dalam pemerintahan sipil tapi duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ketiga tentara duduk dalam pemerintahan sipil dominan. Keempat tentara menguasai seluruh pemerintahan sipil. Ini baik yangmana, ini sudah saya lemparkan 10 atau 15 tahun yang lalu. Lalu kalau yang pertama menurut pengalaman tentara sama sekali tidak ikut dalam pemilihan sipil itu biasanya tentara negara saja, negara yang menjajah jadi Belanda disini. Itu tentara Belanda sama sekali tidak ikut dalam pemerintahan. Lalu yang kedua duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ketiga dominan ini baik yang mana atau yang keempat ini diktator militer. Dari yang satu sampai empat itu Indonesia bukan semua. Sekarang Indonesia ini yang mana, kedua atau ketiga. Nah biasanya semua mahasiswa itu ya tahu persis tentara ikut pemerintahan sipil dan dominan. Nah kalau menurut pendapat saudara baik yang mana, dominan atau duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Lha bagaimana keadaan sekarang kan begitu lalu berkembang. Itu biasanya ada mahasiswa yang setelah ceramah itu kan ada pendapat jangan menggunakan perumpamaan ABRI. Hubungannya sekarang begini saat itu adakah pemerintahan militer itu dominan terhadap sipil itu baik atau buruk. Secara ideal itu jelek yang baik adalah duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Tetapi tuntutan kehidupan praktis tentara dominan terhadap pemerintahan sipil memang ada baiknya karena partai-partai dan golongan-golongan yang serakah itu dapat ditekan. Nah sekarang keempat ini kita lempar ke jaman reformasi itu gimana, kan ada baiknya tentara itu dominan tapi yang penting supaya rambu-rambunya itu konstitusional kalau dulu kan tidak. Jaman reformasi ini rambu-rambunya ndak ada sama sekali, ya sudah kacau. Ha itu peranan tentara sekarang baru terasa.

T : Jadi apakah bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa pemerintah orde baru dulu pemerintahan militer kalau itu dikaitkan dengan bupati militer, walikota militer itu apakah bisa disimpulkan.

J : Bisa itu kan hanya permainan nama. Ha kalau dulu ada pertemuan antara Belanda dan Indonesia tapi bahasa Belanda. Kalau jaman Belanda dulu yang namanya Gubernur Jenderal itu hanya satu, tapi jaman Indonesia merdeka ini semua Gubernur Jenderal. Itu kan sebetulnya sudah dirasakan tetapi dibalut oleh pakaian-pakaian yang itu.

T : Itu begini pak katakan bahwa akibat ketamakan Orde Baru itu merdeka

masih dirasakan, jaman reformasi itu tidak ada.

J : Nah kalau menurut pendapat saya semua itu selama masih embrio dan bayi maksimum kanak-kanak itu mesti masih baik tapi selama atau sesudah meninggalkan masa kanak-kanak sudah tahu rasanya duit itu mesti jelek dan ini sesuai dengan fakta sejarah. Jadi fakta sejarah itu begini yang dinamakan perodesasi, misalnya yaitu sudah saya kemukakan dahulu, pemerintahan itu usianya hanya antara 20 - 25 tahun. Saya ambil contoh sekarang Indonesia kita mulai tahun 1908 Budi Utomo tambahlah 20 tahun menjadi 28 tahun itu sudah periode baru. Pada tahun 1908 itu kan orang masih material idealis bahwa bangsa Indonesia itu menurut pengalaman tidak bisa merdeka dengan jalan perang atau pemberontakan karena itu rakyat harus pandai dulu. Dengan demikian harus dimulai dengan pendidikan lalu sekolah partikelir, ada Budi Utomo, Taman Siswa dan sebagainya itu cara berpikirnya baru kesitu, tambah 20 tahun lagi sudah sumpah Indonesia itu sudah periode yang lain lagi. 28 tahun tambah 20 menjadi 48 tahun, lha sebelum 48 tahun saja sudah 45 tahun itu sudah merdeka lha sudah lain lagi to, lha 48 tahun puncaknya Madiun. Lalu tambah 20 tahun lagi menjadi 68 tahun itu Orde Baru yang dahulunya PKI berkuasa menjadi jatuh. Ada semacam analisa kalau PKI tidak hancur pada tahun 1966 itu peristiwa berikutnya entah nanti lebih berbahaya, lha yang dimaksud 68 tahun ditambah 20 menjadi 88 tahun. Tahun 1985 itu kan sudah ada pemboman di bus Malang - Bali, usaha pemboman Borobudur, Tanjung Priok, lha itu ada yang mengatakan kalau dulu ( tahun 1966) PKI itu tidak meletus, tahun 1985 lebih parah lagi. Jadi untung itu sudah terselesaikan. Tahun 1985 itu ciri-cirinya semua serba di Pancasilakan atau diseragamkan, lha pada periode berikutnya sudah lain lagi. Jadi periode sejarah itu antara 20 - 25 tahun. Mengapa angka 20 - 25 itu ada rangkaiannya dengan pendidikan tetapi ini analisa saja. Orang atau anak baru berkembang mendalam pada hati itu kira-kira sudah SMP. Anak-anak pada jaman G30S/ PKI usianya itu balita meskipun bapaknya dibunuh itu tidak berkesan. Tapi kalau anak saat itu sudah SMP merasa bahwa bapaknya dibunuh, lha ini berkesan dan yang nantinya akan menimbulkan balas dendam. Nah sekarang dilihat saja 15 tahun itu lalu berusaha mulai bergerak dalam massa. Sekarang tentang reformasi ya gimana kita pikirkan bersama.

T : Itu menurut bapak tidak akan lebih baik reformasi itu ya pak.

J : Ha itu kan hanya nama saja, sebetulnya reformasi itu setiap kali ada kok. Jadi dari penjajahan sampai merdeka itu kan reformasi. Dari tahun 1945 lalu dikuasai PKI dan PKI dihancurkan oleh Orde Baru itu ya reformasi.

- Seperti yang saya katakan tadi soal istilah itu kan hanya kesepakatan saja.
- T : Sekarang ini pak, orang PKI di pusat (Jakarta) ada ndak artinya begini di pemerintahan kita itu mesti demokrasi dipimpin, demokrasi Pancasila dan seterusnya. Masalah demokrasi di Jakarta pada masa Orde Baru itu bagaimana pak.
- J : Begini ya, ini subyektif ya artinya itu tergantung hidup saya kalau nanti orang lain yang menjawab itu lain lagi. Sebetulnya itu kan tonggaknya itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Jadi jaman Jepang itu kan Sri Sultan sudah memikirkan supaya otonomi itu sampai tingkat Kelurahan. Kelurahan yang kecil-kecil itu disatukan misalnya caturtunggal dari empat desa menjadi satu desa, ha itu sebabnya apa kalau desa yang kecil itu turut berdiri sendiri itu tidak bisa mengurus diri sendiri tapi dengan empat desa disatukan dia mulai riel, kan begitu. Itu sudah bagus sebelum Hamengku Buwono IX sudah melakukan. Ini menjadi berkesan. Nah setelah Orde Baru itu DPRK dibubarkan, ha itu yang kita sayangkan meskipun dulu yang memimpin pak Ciptosumitro mestinya pemerintah pusat sendiri menyayangkan. sebenarnya tidak perlu dibubarkan, dirubah saja.
- T : Itu sebetulnya demokrasi di Yogya sudah berjalan baik.
- J : Sudah dan administrasi pertanahan di DIY itu paling bagus se Indonesia tetapi menjadi rusak karena harus mengikuti agraria. Saya ingat persis dulu Sri Sultan IX di Kepatihan sebelum pertemuan dimulai maju ngadek-ngadekan gitu (sambil tertawa) saya mendapat kedudukan baru menjadi gubernur, itu pada waktu istilah kepala daerah diganti. Dulu kepala daerah tidak otomatis gubernur lalu demi praktisnya itu lalu digabungkan. Jadi kesan saya Sri Sultan IX ini "*le ngoyak sajake rekasa*".
- T : Tapi sebetulnya di DIY dulu sebelum orde baru demokrasi sudah berjalan baik ya?
- J : Sudah, contohnya RT, RW itu sudah berjalan baik.
- T : Terus peranan Orde Baru itu malah menjadi rusak ya pak.
- J : Rusak karena RK dijadikan RW.
- T : Mengikuti pembicaraan tadi, jadi kondisi sosial perekonomian jaman orde baru maupun reformasi itu tidak beda jauh ya pak.
- J : Tidak.
- T : Alasannya apa pak.
- J : Jadi ini oportunis ya artinya secara biologis ini mengikuti yang dinamakan mobilika vertikal. Ha jelasnya mobilika itu gerak, mobilika horisontal dan vertikal. Kalau mobilika horisontal perubahan atau perpindahan domisili, sedang mobilika vertikal perpindahan derajat atau pangkat. Sekarang ciri-

cirinya perubahan horisontal itu pada prinsipnya mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama yang ditinggalkan. Lalu mobilitas vertikal itu cirinya ingin melupakan apa yang sudah dialami, ingin memasuki tempat yang baru misalnya anak sekolah dari SMU pindah ke universitas. Nah ini bahayanya seperti orang naik tangga ini, kaki kiri sudah di atas kaki kanan kan dilepas tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kaki kiri belum menginjak ini sudah dilepas. Ini perubahan masyarakat dari transisi reformasi ini juga mobilitas vertikal. Orang yang duduk di DPR ini semua orang-orang baru, yang lama dilepas. Nanti kalau ada pengadilan semut dan apa yang dinamakan pengadilan semut adalah kalau anda berdiri di halaman disitu ada semut yang merambat di kaki, apa yang dia lakukan. Ingat terjadinya peristiwa Diponegoro 27 Juli, itu sebabnya apa orang daerah pada muring sama Bu Mega "*wong anak buahe dipateni karo sing kuasa, ning nggapa saiki ngislah entuk duit okeh*".

- T : Apakah munculnya reformasi bukan sebuah kounter terhadap orde baru.
- J : Ha itu kounter tetapi siapa yang menyahut seperti tadi saya katakan pemuda itu terutama mahasiswa.
- T : Faktor-faktor apa yang mendorong timbulnya reformasi baik dari dalam maupun dari luar.
- J : Jadi yang pertama itu kejenuhan yang monoton. Lalu biasanya orang tidak memikirkan nanti bagaimana, tetapi sekarang tahunya diduduki dulu seperti pemilihan Bu Mega ini. PDI-P menang itu kan hanya "*sapa mbiyen sing disengiti karo Orde Baru*", Iha sudah semua byuk sama Bu Mega.
- T : Artinya itu politik balas dendam ya pak.
- J : Ya tetapi yang ..... itu tidak sabar.
- T : Jadi bisa dikatakan bahwa yang muncul itu orang-orang yang tersingkir.
- J : Ya tersingkir tapi punya otak. Ha itu kalau dari dalam, kalau dari luar itu negara-negara tetangga khawatir kalau Indonesia kuat.
- T : Mengapa Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1998 kemarin dipakai sebagai aksi damai atau *pisowanan ageng* menuntut reformasi total di alu-alun. Dulu kan di Alun-alun juga Orde Lama diganti Orde Baru. Mengapa sekarang juga di Alun-alun
- J : Jadi begini sejak awal itu kan dikenal poros Yogya - Jakarta, kalau usaha-usaha dilakukan di Jakarta gagal lalu diusahakan di Yogya. Nah Yogya dikenal sebagai pembuat bahan peledak yang bersumbu pendek. Adapun itu rumusan *pisowanan ageng* sebetulnya kan mistis, kalau saya sudah ndak tertarik. Dan itu mestinya dari budayawan kita harus *minggatke* sebab kalau itu terus dipertahankan itu ya seperti Bali mau dipertahankan supaya tetap

menarik, sudah jenuh ya kasihan rakyat Bali artinya dipertahankan tetap terbelakang supaya ciri khas tetap ada. Seperti di Yogya ini untuk konsumsi rakyat yang bodoh itu Nyi Roro Kidul tetap jalan, itu bisa dikaitkan. Tapi bagi orang yang maju ya sudah hanya istilah saja.

- T : Bisa maju itu apakah bukan suatu momen yang tepat. Fakta-fakta historis itu ternyata mampu memobilisir massa ya.
- J : Lha ya tetapi nanti massa itu bisa meluas sampai Indonesia keseluruhan atau hanya DIY saja. Kalau temanya itu terlalu sempit pengertian agung itu kaitannya dengan alun-alun yang lain tidak tertarik.
- T : Sekarang begini pak, Yogya itu terkenal *alon-alon waton kelakon* tetapi kenapa kalau momen-momen penting kita itu mesti mendahului misalnya reformasi itu belum ada, Yogya sudah berhimpun.
- J : Menurut pesan saya itu pakai istilah lawas merasa *awunya luwih tuwa tinimbang daerah lain*. Dan yang kedua faktor kepala daerah tidak 100% tergantung pada pusat. Ini juga berperan to, rakyatnya itu historis merasa *awunya luwih tuwa*. Yang ketiga lebih kritis karena tempat pendidikan, yang ketiga karena mempunyai kepala daerah yang istimewa. Keistimewaan bisa juga dipertahankan.

2. Nama : dr. Sutomo Parastho
- Tempat/tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1943
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Jabatan dalam perjuangan : 1. Pengurus HMI Komisariat FK UGM 1964  
2. Pengurus SEMI 1965  
3. Pengurus KAMI Konsulat Yogyakarta 1965
- Jabatan sekarang : 1. Direktur Utama/Komisaris PT. Radio Arma Sebelas (1966 sampai sekarang)  
2. Pemimpin Yayasan Tunas Bangsa
- Alamat : Jalan Gondosuli, Gang Lembayung GK.IV/173 Yogyakarta
- Wawancara dilaksanakan : 27 Juli 2002
- Tempat Wawancara : Kantor Yayasan Tunas Bangsa Jl.Gondosuli Gang Lembayung, GK.IV/173, Yogyakarta

**Materi:**

- T : Mengenai kondisi sosial politik ekonomi menjelang keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret itu bagaimana pak di DIY.
- J : Memang ini ada beberapa *back ground*. Saya memang *back ground* bukan orang politik artinya itu historis hidup saya itu tidak di gelanggang politik.
- T : Tapi paling tidak bisa memberi gambaran.
- J : Kalau itu memang suasana waktu itu. Jadi saya bergerak itu mulai dari perlakuan terhadap diri saya itu di jaman mahasiswa itu saya dicalonkan jadi anggota Dewan Mahasiswa terus saya ditolak. Nah situasi waktu itu memang pangan dan lain-lain cukup sulit. Jadi kira-kira banyak kesulitan disitu dari segi ekonomi.
- T : Kemudian dari segi politik sebelum Orde Baru.
- J : Dari segi politik yang saya alami tekanan pada pihak tertentu terutama masalah agama. Dan itu didominasi oleh PKI sama Islam itu mungkin konfrontasinya jelas dan masalahnya si nasionalis ini arahnya kemana kan nggak punya pegangan itu.
- T : Kemudian setiap perubahan itu dipolitisir seperti budaya misalnya timbul adanya LEKRA, LKN itu berdasarkan apa pak. Mungkin organisasi massa Islam ada sendiri, itu seolah-olah lembaga ini digunakan untuk aksi persatuan lewat budaya. Ini bagaimana pak.
- J : Semua sektor itu diadakan untuk menghimpun kekuatan karena sebetulnya mereka itu semua untuk mengatur republik ini kan diperlukan kekuatan. Nah filosofi Pancasila sendiri itu kan belum berdiri masih sebagai alat pemersatu sebagai sarana untuk berjalan bersatu. Jadi masih sesuatu yang tergantung siapa yang mampu menggelindingkan. Jadi semua mencaplok Pancasila lalu keluar Nasakom. Nah perebutan kekuatan masing-masing pihak itu lalu membuat struktur sendiri-sendiri seperti LEKRA dengan kemampuannya kemudian kontranya ada muslim. Jadi mereka itu selalu di jalan konfrontasi terus dan itu mungkin kesalahan Bung Karno jaman dulu. Dia itu kayak membuat politik dalam *save power*. Kalau jaman Pak Harto kekuatan itu tidak nampak dimainkan didalam.
- T : Tetapi Bung Karno itu kan keluar.
- J : Sebab konsumsi konfliknya menjadi keras itu.
- T : Dulu itu kan ada konsepnya Bung Karno untuk menyatukan konflik lewat Nasakom. Itu bagaimana.
- J : Ya karena mereka hanya mempersatukan kekuatan itu saja. Kekuatan itu terbagi-bagi bisa komunisnya, Islamnya kemudian nasionalisnya, secara kesemuanya itu tidak ada dan mereka berhimpun sudah kekuatan namanya.



- Prosesnya sejarah republik dimana ada negara Islam dan lain-lainnya itu dibuat seimbang terus. Nah Bung Karno kira-kira mainnya di Dwikora itu.
- T : Pengertian Orde Baru artinya Orde Baru dalam pengertian politik atau apa. Ini ada wacana baru sebetulnya apa to Orde Baru itu.
- J : Kalau saya Orde Baru itu untuk memisahkan sama Orde Lama. Sebenarnya idealis merupakan tantangan menurut Bung Karno. Setiap pergerakan itu mesti membuat garis. Jadi itu sebagai proses untuk menghantam. Jadi prosentase yang jelas Bung Karno kan membuat permusuhan-permusuhan diatas konflik sehingga dengan demikian maka Orde Baru sebagai batasan untuk menghancurkan kekuatan lain, praktisnya menjadi begitu meskipun teorinya secara hukum.
- T : Kemudian power dari munculnya Orde Baru apakah Orde Lama itu dianggap ....
- J : Itu kan sebetulnya situasi yang menghendaki. Jadi kalau menyimpang dari Undang-undang dan lain-lain itu memang sedang trend karena itu tidak back ground dari politik. Jadi itu hanya kemungkinan reaksi yang memperkuat situasi. Karena sebetulnya UUD 45 itu memang fleksibel karena disitu kan hukumnya mengatakan tergantung pelaksanaannya. Dan Orde Baru itu bisa kuat jamannya Pak Harto itu karena musuhnya kan PKI. Nah PKI itu terus diklaim anti Pancasila dan dipakai sebagai sarana untuk nggebuk pihak lain, itu terus dilakukan. Nah prosesnya Pak Harto menggunakan pola itu. Ini lama-lama PKI secara demokrasi memang habis, pada saat-saat tertentu nggak bisa akan terjadi proses yang lain. Nah apakah penyiapan disini cukup kuat, ha ini yang menjadi problem lagi. Ternyata memang Pak Harto sudah status Orde Baru dan terangkat di P4. Saya ndak tahu nggarapnya karena pelajaran P4 itu pandangan hidup (kurang jelas) jadi ndak pernah nggarap gitu. Kedua beberapa pengajarnya itu memang di tempat lama dibuang, jadi nggak bisa orang menjadi seperti itu. Mungkin mereka nggak ngerti agama, itu kira-kira yang menjadi problem sehingga pelajarannya selalu kalau ditanya pandangan hidup lalu Pancasila berarti ngambang terus.
- T : Apakah bisa dikatakan Orde Baru itu menggunakan teori konflik ketika mereka bersatu lewat Orde Barunya terhadap Orde Lama tapi ketika masyarakat menuntut reformasi itu ....
- J : Ya biasa kalau jaman 45 itu bersatu tapi karena tidak ada konsep yang mendasar ada PRRI, ada Islam masih mencari bentuk. Jadi kalau Orde Baru sebagai satu kekuatan untuk melawan PKI dasarnya mungkin hanya melawan tetapi strategi kehidupan bangsa kelihatannya belum nampak sehingga ketika sampai di titik tertentu ...

- T : Tetapi pak apapun alasan dari Orde Baru telah mewarnai perebutan kekuasaan terus timbul gerakan Malari dan suatu gerakan itu apakah sebagai kounter kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru.
- J : Iya adanya proses itu suatu *counter* cuma masalahnya Pak Harto itu kan demikian kuat permainannya di dalam. Jadi kalau perbedaan Bung Karno sama Pak Harto itu kalau Bung Karno counternya keluar sedang pak Harto itu mainnya di dalam sampai titik tertentu dia kewalahan karena ketika di dalam semua orang sudah kapok dipakai maka tidak di dalam pemberontakan dia dalam .... mengundurkan diri. Kalau Bung Karno kan benturannya keras lalu Pak Harto permainannya di dalam keras dan dia pengendali sehingga dia hancurnya dari dalam. Saya terus mempelajari konsep itu lalu saya.....di Qur'an. Memang ada indikasi yang pertama bahwa harta tidak boleh beredar dengan orang-orang tertentu. Terus perlu ada distribusi sosial karena kalau kesenjangan itu terjadi maka tidak bisa dimaafkan. Dan warning sistem sudah diberikan dengan Malari (pemberontakan kecil-kecilan), akhirnya terjadi akumulasi yang membesar.
- T : Kemudian ini pak kok 11 Maret 1966 itu dikatakan sebagai lahirnya Orde Baru, dasarnya itu apa.
- J : Ya memang waktu itu kan proses sebabnya Supersemar. Jadi itu dari Bung Karno ke Pak Harto itu sebagai titik balik situasi. Jadi dari situ mulai senjata Pak Harto Supersemar itu. Ketika terjadi Supersemar harus selalu dibuat setelah dibuat digunakan untuk itu, kira-kira begitu. Saya tidak begitu mengerti karena saya tidak merespek itu tapi kalau dilihat kondisi masyarakat memang memungkinkan. Artinya apa sebetulnya antara kita sama ABRI itu apakah saling menunjang. Kalau saya ya situasi masyarakat itu memungkinkan untuk itu bahwa Pak Harto lalu mengadakan gerakan seperti itu kemungkinan Pak Harto itu mulainya tersia-sia terus. Dan dimungkinkan AD itu ketat disiplinnya, jadi Pak Harto kuat seperti reformasi sekarang kan ndak ada yang peka. Begitu dipegang kepemimpinannya untuk semua sistem bergerak kesitu. Jadi organisasi dia bagus ndak ada yang mengalahkan. Kalau pucuk pimpinan berhasil dipegang kontranya nantinya disingkirkan oleh komandannya. Jadi mungkin semua tidak dikira kudeta, analisisnya kan kita yang dipakai tetapi kita berjalan bukan karena dikendalikan karena kita melihat suasana yang memang keadaannya begitu. Nah sekarang tergantung anda mempunyai sistem apa.
- T : Sekarang dengan saling membutuhkan bagaimana.
- J : Nah cuma sekarang tergantung analisa sebab tanpa itu ndak mungkin tetapi kekuatannya Pak Harto lalu acuh tak acuh. Kita pun Orde Baru, mahasiswa

disini juga, saya pernah dipegangi pistol lalu saya malah bingung untuk apa. Jadi dia tetap memperkuat juga, itu kalau dikatakan permainan bisa juga tetapi waktu itu memang situasinya konflik semua, rakyatnya juga konflik, didalam ABRI-nya mungkin lebih mudah karena secara organisasi pegang kekuatan untuk adakan pembersihan.

- T : Tapi kemudian begini pak bahwa itu merupakan .... karena sampai hari ini Supersemar itu dipertanyakan terus to, hilang tidak dan seterusnya ndak jelas gitu lho.
- J : Ya ada kemungkinan itu kadang-kadang kita punya nawar itu tapi kadang-kadang orang ada gerakan yang sebetulnya nawar itu beda. Tapi karena kebutuhan sama, bersama-sama tapi pada titik tertentu dia mesti pisah. Ketika AD dulunya perang dunia kan kembali anti dwi fungsi. Itu prosesnya karena ketika dia memegang kekuasaan tidak mengembalikan posisi kepada sipil kepada duduk permasalahan tapi apa penaknya ngatur akhirnya timbul dwi fungsi.
- T : Kemudian anu pak tanggapan bahwa Yogya itu menyambut pembubaran PKI itu berupa awal menjadi prosesnya ....
- J : Saya tidak melihat pembubaran PKI itu oleh Danrem (Pak Widodo) banyak dibantu oleh Pogalan (gabungan umat Islam) yang tempatnya di Alun-alun Selatan, saya rapat disitu. Jadi mulai dari situ lalu terjadi gerakan-gerakan. Saya masuknya itu kan sebagai bola liar terus teman-teman masuk HMI sebentar karena kekuatan calon HMI cuma satu maka dipecah masuk ke organisasi massa mana-mana. Jadi representasinya bukan pada jumlah orang tetapi pada representasi eblek (lembaga) ini untuk memperkuat barisan, ini termasuk permainan. Saya disitu tidak masuk format-format gitu karena memang format saya tidak terlalu formatulen. Jadi saya lihat apa yang saya hadapi, apa yang saya cermati.
- T : Tapi ini pak ketika ada menyambut pembubaran masih ada counter ndak.
- J : Ada, tembak-tembak itu lalu di beberapa daerah terjadi kontranya, waktu itu CDM di jalan Magelang juga penghapusan papan-papan nama terus mereka juga membalas lagi.
- T : Itu pas Baperki lalu markas PKI yang di KHA. Dahlan itu apa pagarnya 14 Maret 1966 itu.
- J : Ya.
- T : Itu yang pidato pada waktu tanggal 14 Maret itu siapa pak.
- J : Novi, Pak Malik.
- T : Kemudian menurut pak.... apakah mungkin malah Pak Prastowo itu membidangi munculnya laskar-laskar di Yogyakarta.

- J : Jadi saya ikutnya di KAMI, ketika itu dibuat Klitren terus pindah ke KHA. Dahlan lalu pindah di yang sekarang dipakai Arma Sebelas. Lalu pembentukan laskar itu saya ndak begitu ingat, itu dilantiknya di Kauman ketuanya Pada Mulya Lubis. Nah yang tahu itu Pak Suhut dan Pak Burhan komandannya intel.
- T : Sekarang masalah Orde Baru pak. Setelah Orde Baru muncul kemudian bagaimana menata kondisi politik ekonomi, sosial budaya. Itu apakah lembaga-lembaga itu dibawah pengawasan Orde Baru atau bagaimana.
- J : Jadi saya katakan Orde Baru secara ekonomi itu menggerakkan dua orang yang waktu itu Wijoyo dan Pak ... Jadi antara kerakyatan sama rekodonefek. Ternyata yang dipilih itu rekodonefek yang adalah membuat republik ini dengan bentuk konglomerasi. Orang-orang tertentu yang diberi fasilitas untuk ngangkat itu. Satu lagi yang menjadi pilihan yaitu kerakyatan ada stebelnya. Sistem itu kelihatan memang naik tapi distribusinya yang kacau sehingga ketika terjadi kegoncangan, kacaunya seperti sekarang ini. Nah kalau sosial budaya ya kuncinya ada pada mereka.
- T : Misalnya ya pak lembaga-lembaga kebudayaan dibantu tetapi ditutupi misi Orde Baru ya pak ya.
- J : Ya jelasnya memang begitu, jadi semua ke arah sana (kekuatan). Tapi saya memang mengalami waktu itu ternyata bagaimana kuatnya Orde baru sebetulnya saya ndak percaya tapi itu terjadi misalnya saudara saya kepala proyek di Sumatera Barat. Dia bilang mas mbok Tutut itu dinasehati bahwa proyeknya kacau. Memang pengendalian dari atas cukup kuat.
- T : Tetapi mengapa pak Orde Baru memakai Pancasila untuk memanipulasi kekuasaannya yang terus menimbulkan semacam Sara dimana-mana. Ini apa ada ...
- J : Makanya itu karena konsep Pancasilanya tidak hidup.
- T : Kemudian ini pak pengaruh dualisme kepemimpinan di DIY, ini bagaimana pak. Di satu sisi beliau sebagai Sultan dan di sisi lain sebagai Kepala Daerah.
- J : Waktu itu Sultan ndak mempunyai gerak apa-apa, beliau hanya mempertahankan diri. Jadi situasi di rakyat terutama yang berada di pinggiran itu kalau tidak membunuh ya dibunuh, suasana itu sudah terjadi. Seperti saya itu pernah digrebek terus saya lari di asrama Aceh di Poncowinatan karena ada PKI nya juga..... Disitu orang itu ngomong "ayo bakar saja itu". Saya bilang kamu gila, kamu lari dari Yogya. Jadi situasi didalam rakyat memungkinkan hal itu, jadi tinggal siapa yang dibantu siapa yang membantu makanya lebih ganas.
- T : Tetapi sebagai figur kharismatik bisa ndak mengendalikan warganya yang

begitu.

J : Nggak bisa karena beliau sendiri waktu itu kan komitmennya nggak kesitu. Beliau itu terus apa ya caranya baksil itu ya nylametke aja, momong situasi gitu.

T : Jadi itu nggak ada dampaknya ya.

J : Saya kira nggak ada waktu itu.

T : Kemudian dengan strategi Pak Harto sebagai presiden dampak terhadap kehidupan ekonomi sosial di DIY itu bagaimana.

J : Ya proses ketenangannya kan sudah artinya konfliknya PKI menjadi mereda walaupun masih dalam suasana yang belum tenang betul tetapi sudah kelihatan siapa yang menang sehingga situasi bisa lebih terkendali.

T : Mungkin waktu setelah ketahuan PKI itu termasuk Orde Lama itu kan kemudian di kampung-kampung organisasi massa-organisasi massa PKI membubarkan diri. Apakah setelah membubarkan diri tidak begitu saja, apa dikejar ditawani meskipun ....

J : Mereka cukup kesulitan karena dulu itu kalau orangnya kelihatan, jadi saling tudungnya kan jelas itu PKI karena konfliknya terbuka.

T : Itu apakah bisa untuk ajang juga karena dendam pribadi atau ....

J : Akhirnya konsumsinya menjadi begitu. Itu biasa dinamika masyarakat begitu. Jadi ada kesempatan butuh lalu ngumpun dan dulu memang repotnya PKI itu harta bendanya banyak. Nah itu yang menjadi problem juga.

T : Tetapi mereka masih dikejar-kejar ya pak, apa mereka ditangkap begitu.

J : Masih dan kemudian yang terakhir lalu saya nggak tahu apakah di KTP nya ada tanda khusus. Kalau menurut saya sekarang ikut perjalanan dulu, setelah saya masuk di Orde Baru saya bingung karena di Orde Baru juga nggak tenang karena konflik terus juga karena ada orang kepentingan saya dengan wacana yang mungkin kemajon. Nah seperti terakhir saya juga bingung kok anak-anak padahal mereka itu tidak ada dosa turunan tetapi karena indikasi ya bahwa memang ada niatnya musibah itu akan terkena di lingkungan dimana orang tua berada. Itu ayatnya ada 825 tetapi kalau sebagai anaknya itu tidak logis kalau dimatikan kehidupannya. Kalau dimatikan kehidupannya dia akan dendam. Nah sekarang programnya harus diberikan pelajaran kepada generasi berikutnya bahwa memang terjadi keadaan seperti itu tetapi bukan lalu permusuhan dengan PKI yang terus-menerus sehingga orang kan bertanya. Generasi sekarang dengan kita terjadi gap karena kita tidak memberikan transfer yang benar, keadaan itu sebetulnya terjadi apa. Lha itu kekurangan antar generasi umumnya begitu.

T : Kemudian tentang pelaksanaan demokrasi jaman Orde Baru dulu. Setelah

orde baru itu menuding bahwa pemerintahan otoriter kemudian mengklaim bahwa orde baru itu lebih demokratis tinimbang Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi di DIY bagaimana setelah Orde Baru.

J : Demokrasi itu rakyatnya belum siap, jadi masalahnya kan tetap permainan kekuatan, penekanan ada jadi Pak Harto itu memainkan ABRI lalu ABRI memainkan Golkar tetapi yang lainnya untuk pajangan. Skenarionya kira-kira begitu. Kalau lihat demokrasinya yang karena banyaknya kelompok demokratis tetapi didalamnya bukan demokratis.

T : Sebetulnya demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan ndak.

J : Bisa, saya akan kembali lagi berbicara konsep untuk solusi. Saya tidak akan berbicara dari awal, saya bicara dari peran sejarah. Sebetulnya konsep demokrasi itu Allah membuat kesaksian pribadi kepada manusia di alam rub sehingga pertanggung jawaban bersifat pribadi. Demikianlah pribadi harus diakui sehingga ndak ada kolegia berarti demokrasi kan. Seperti musyawarah mufakat yang dikatakan Pancasila itu harus disepakati. Itu yang menjadi problem sebab yang kalah itu gimana. Sebetulnya didalam tatanan demokrasi konsepnya Tuhan itu kalau kita bermusyawarah tidak bisa karena basiknya pertanggung jawaban pribadi kepada Tuhan. Ketika kita kalah harus mengakui itu sebagai hak kemenangan dia. Nah partisipasi kita apa, kita mengingatkan. Nah gerak mengingatkan itu ada bisa dengan demonstrasi, bisa dengan oposisi. Sekarang oposisi belum terjadi wacana kan. Kemudian tidak boleh makar atau merebut kekuasaan sehingga kalau banyak orang demonstrasi dan terjadi oposisi dan merasa dia tidak kuat alternatifnya kan mundur. Jadi kita belum punya kematangan itu.

T : Jadi kita belum punya kerangka demokrasi ya.

J : Kelihatannya belum.

T : Lha itu solusinya gimana pak.

J : Solusinya buku saya. Jadi saya membuat bagaimana konflik seperti sekarang misalnya konflik etnis Madura sama Kalimantan, solusinya gimana, kalau konsepnya Tuhan itu sederhana lho kendalikan situasi siapa yang melawan tembak. Lokalisir persoalan karena apa manusia itu sebetulnya satu konsepsinya RAS akibat migrasi tetapi esepsinya satu to. Nah ketika satunya ditundukkan lalu membuat perdamaian. Di dalam proses mengatasi konflik ini ada yang terbunuh misalnya tertembak itu dua alternatif yang positif semua. Yang pertama kalau dia jihad masuk surga, kalau dia nakal dosanya kurang tetapi bukan etnisnya ditindak problemnya lain lagi. Nah konsep ini dimengerti atau tidak. Kalau mengikuti proses ndak akan selesai. Itulah yang saya katakan tadi dari toleransi kemudian konflik menjadi kekerasan,

bagaimana solusinya. Itu yang baru saya kerangkakan. Sementara ini saya tidak melihat konsep itu terjadi.

- T : Bagaimana kondisi sosial politik ekonomi budaya menjelang reformasi di DIY.
- J : Jadi begini ya karena konflik itu dibuat didalam sebenarnya ndak nampak hanya menunggu proses sejauh mana ketidakpuasan itu akan belajar mendesakkan jadi butuh suatu letupan. Jadi situasinya sebetulnya ada didalam sekam itu karena orang sudah mulai pengalaman, jadi dia memegang kliningnya Pak Harto, dia kan nuthuki sebanyak orang gitu. Jadi situasinya terkendali total. Reformasi tidak ada kekuatan dominan lain dibandingkan dengan orde baru yang mempunyai kekuatan dominan yang memakai ABRI. ABRI kemarin ndak bisa apa-apa karena sudah dipukuli lebih dulu oleh dwi fungsi.
- T : Dari tahun 1966 - 1998 yang berperanan itu mahasiswa. Setelah itu mahasiswa ndak berperan sama sekali, lha ini gimana apa mahasiswa nggak ada program lebih lanjut.
- J ; Ndak ada, mahasiswa itu momen temporer habis itu ya cari selamat dia.
- T : Apa ini kelemahan dari ini pak.
- J : Bukan kelemahan tapi proses hidup itu begitu sehingga secara kelompok pun tahun 1966 juga sulit.
- T : Karena pada waktu itu tidak permanen.
- J : Tidak permanen tetapi temporer ketia dia melihat keadaan memang eos dan lain-lain gerakannya kenceng, kesamaan menjadi tinggi tetapi kalau statusnya ya cuma sporadis saja yang gampang diredam.
- T : Jadi dia ndak pernah stabil ya.
- J : Ndak pernah dan dia nggak punya konsep.
- T : Pak Mamok itu termasuk orang yang memotori itu lho pedagang beras Lim Hartono itu ada kaitannya dengan ekonomi, bagaimana melihat ini.
- J : Waktu itu beras langka lalu kita bikin taspor beras dibantu dari Perdagangan. Lha lalu waktu itu ada penimbunan beras atau permainan beras yang namanya Lim Hartono. Nah didalam strategi ini ketika saya menjadi taspor beras ini saya berhati-hati artinya apa pedagang itu punya ciri tertentu ketika digrebeg hilang. Nah ketika itu teman saya yang dari KAPPI diluar kendali saya nggrebeg gitu, jadi harganya ndak karuan. Lalu bagaimana pun ya sudah proses berikutnya saya jadi taspor itu kan memprosesnya sesuai dengan hukum dan waktu itu yang kena Wakepda Sri Paduka, ya sudah terserah.
- T : Tapi ini memang kepercayaan Wakepda, Lim Hartono itu distributor beras seluruh DIY.



- J : Ya dia itu dekat dengan Pemda lah, Wakepda itu sering apa ya teken-teken thok demi kebaikan apa gimana saya ndak tahu, ketipu juga akhirnya ngamuk-ngamuk di Kepatihan saya di sel di
- T : Jadi memang situasi ekonominya kacau ya pak.
- J : Kacau,maka sehabis itu lalu dibentuk Bulog.
- T : Berangkat dari Lim Hartono itu.
- J : Tidak, berangkat dari pengendalian pangan itu. Cuma kesalahan ya boleh karena kita baru belajar. Bung Karno itu pernah mengatakan bangsa tempe sehingga terjadi status satu makanan beras sebagai salah satu bentuk standar manusia Indonesia yang tidak sekualitas. Ketika beras menjadi standar makanan sehingga terjadi problem karena faktor-faktor makan jagung dan lain-lain berlari ke beras. Nah setelah terjadi stabilitas jatah beras, tempat Bulog ini menjadi dana macam-macam. Nah kesalahan satu Bung Karno statmen bangsa tempe padahal tiap daerah berbeda biarkan saja tetapi itu kita kan orang merdeka “tunggak jati mati,unggak jarak mrajak”. Jadi kultur kemerdekaan oleh rakyat itu struktur sosial budaya mesti bergerak sehingga nilai-nilai sosial budaya itu menjadi berubah.
- T : Barangkali arah ... kesana pak. Jadi diberdayakan kultur setempat misal Maluku dengan sagunya, tidak diseragamkan
- J : Mungkin tetapi itu kan sudah telat. Tadi saya bilang itu proses, saya ndak bisa menyalahkan yang penting belajar dari kesalahan. Jadi PKI salah, itu jangan dinyunyuk terus, yang penting belajar dari kesalahan, powernya kan kesitu. Kalau menurut konsep saya besuk itu Indonesia dekrasi, otonomi luas.
- T : Pada waktu itu ada *pisowanan ageng* tanggal 20 Mei 1998, sementara di DIY ini pada awal reformasi itu terdiri dari banyak macam suku. Mengapa justru di DIY ini bisa terkendali keadaannya, apa ini kharisma dari Sri Sultan
- J : Sekarang di dalam reformasi itu ada kekuatan yang nyata. Kalau disini kan ada kultur karena Sultan belum banyak berbuat. Di RUU keistimewaan Yogyakarta, Sultan dan Paku Alam dijadikan faktor sentral dengan kharismanya, ketika keos itu ada fetonya sehingga gubernur sama wakil gubernur itu diserahkan rakyat saja. Itu *pisowanan ageng* tetapi di dalam konflik PKI itu memang agak sulit karena memang rakyatnya konflik, di era reformasi ini rakyat ndak ada konflik cuma kebingungan, musuhnya satu Pak Harto itu saja.
- T : Nah begini ada seorang tokoh yang mengatakan kalau menghancurkan itu gampang tapi membuat tatanan baru ini kesulitan.

- J : Ya biasa saja kita belajar dari kesalahan sebetulnya, jadi mengapa kejadian ini berturut-turut muncul tapi waktunya kan lama, kalau lihat prosesnya dari 1908, 1928, 1945, 1966 ini diakui atau tidak kemudian reformasi, ini kan pergolakan. Mengapa terjadi pergolakan karena kita sebagai orang tua tidak mentransfer kepada generasi muda. Dengan kebanggaan kita dulu berhasil tapi kerangka jauhnya kurang. Nah saya belajar dari sini, ini sebenarnya apa yang salah. Sekarang ini bingung, saya mau masuk partai apa. Agama saja prosesnya begitu, jadi saya tidak bisa cerita banyak kejadian tapi saya lebih ke solusi ke depan.
- T : Kembali ke Orde Baru, sebelum menjadi tiga partai bagaimana kehidupan dijamin multi partai.
- J : Ya sebetulnya semua itu di bawah beliau jadi ada yang digedekan, ada yang dibonsai. Kita lihat saja dari proses proyek ngerti. Jadi irama demokrasi ada tapi dibonsai. Seperti reformasi yang memunculkan orang kendel-kendel tapi nggak mikir gitu lho. DPR itu orangnya kendel-kendel tapi nggak punya free (uripku ki piye) begitu.
- T : Itu yang dipersoalkan pak, solusinya apa.
- J : Ya kita berproses untuk maju, lha sekarang konsep bapak apa dari pengalaman itu seperti saya membuat buku untuk dijual dengan konsep demokrasi, konsep hukum, saya juga pernah mikir nasionalisme.
- T : Sekarang jaman orde baru dari multi partai menjadi tiga partai. Itu apakah merupakan proses dari orde baru.
- J : Makanya itu tadi struktur tidak lepas dari itu.
- T : Tapi menurut bapak antara multi partai dengan tiga partai, berangkat dari ini kok malah amburadul begitu semua partai pada ngomong.
- J : Ya ndak apa-apa itu proses saja dan nanti toh akan terjadi kristalisasi lagi, jadi itu dianggap proses ketika kita menang perang dipakai orang. Kedua konstruksi partai di Indonesia ini masih partai rakyat, partai yang masih memelihara kebodohan umat karena dia setia tidak didalam kerangka berpikir tapi pada kelompok nah pemikiran-pemikiran ini buat partai apa laku, ndak mungkin karena gap antara rakyat dengan elite jauh dan mereka berpikir ala Amerika, sedang kita tradisional. Poling saya tentang RUU juga gitu kalau rakyat desa *Ngerso Dalem*, mau nggak mau *Ngerso dalem* berkahipun tapi yang elite itu enggak. Jadi itu situasi kita dan konsep basic kita nggak ada. Itu pengamatan saya lho.
- T : Mekanisme kerja pada awal-awal masa orde baru antara DPRD yudikatif dengan legislatif bagaimana.
- J : Ya akhirnya semua pengendalian banyak amannya.

- T : Kalau seperti sekarang enggak legislatif itu mesti teriak keras.
- J : Ya semua lalu balas-balasan dan yang legislatif itu kapasitas orangnya apa. Jadi secara organisasi itu sebetulnya Golkar itu masih bagus walaupun mainnya ngawur.
- T : Kalau tentang UU no.5/1975 itu apa.
- J : Nggak tahu kalau sampai kesitu bingung saya. Banyak seperti sekarang UU tentang organisasi massa misal organisasi wartawan itu syaratnya jumlah sekian sampai sekian nyatanya nggak cukup jauh dengan pemerintah. Menertibkan gimana pemerintah juga repot.
- T : Kalau dengan Pak Tomo yang di Jakarta itu mendirikan lembaga Sirotolmustaqin.
- J : Enggak cuma latar belakangnya Qur'an itu jelas dengan kebanyakan orang Islam tapi nggak tahu Qur'an, jadi konsep Qur'annya apa. Saya di Medari kemarin juga agak ramai karena mereka bingung itu Kristen apa, tapi saya coba lama-lama mengerti politik segala macam. Jadi dalam analisa saya anggap sebagai pengalaman hidup untuk menemukan konsep-konsep.
- T : Apakah bapak sering mengikuti .... terpilih.
- J : Sudah beberapa kali tapi belum ...
- T : Tapi kami lihat dari sejarah itu mau tidak mau Orde Lama dan Orde Baru pernah mewarnai perjalanan pemerintahan tapi nggak bisa memfonis Ode Baru itu salah.
- J : Saling melengkapi kalau mau belajar tapi kadang-kadang orang kesulitan.
- T : Kalau KKN yang salah itu siapa.
- J : KKN itu dianjurkan cuma masalahnya proporsional nggak artinya kemampuan itu mendukung atau tidak tapi bagaimana kita mengambil orang yang tidak kita kenal untuk membantu.
- T : Itu alami dan manusiawi ya pak.
- J : Iya jadi jaman Bung Karno *nyalahke* Bung Karno, *lingkungane* iki apik tapi memilihnya itu dari mana. Pak Harto juga begitu, lingkungannya juga anak-anaknya. Cuma ketika orang jadi pemimpin itu bersikap positif atau tidak. Jadi KKN itu benar. Kekuatan saya dengan bapak berbeda dan solusi berbeda apa saya menyalahkan, tidak mungkin.

3. Nama : Mohammad Suhud, SH  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 16 Maret 1943  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan dalam perjuangan : - Anggota Seksi I Gemuis  
- Pendiri Gemuis Kampung Ngadisuryan  
Jabatan sekarang : - Ketua Yayasan Korban Keganasan Komunis  
- Sekretaris Yayasan Front Anti PKI  
Alamat : Ngadisuryan KT.I/126 Yk  
Wawancara dilaksanakan : 9 Oktober 2002  
Tempat wawancara : Ngadisuryan KT.I/126 Yk

## Materi

- T : Mengenai kondisi sosial ekonomi, politik, budaya dan hukum menjelang keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, bagaimana.
- J : Saya kira sama bahwa situasi sosial politik seperti itu, hukum juga waktu itu komunis memegang kendali dan suasana memang juga tintrim. Orang serba salah sebagai contoh kita mendengarkan siaran asing tidak boleh, semua langkah seba salah, mengenai ekonomi harga-harga melambung barang tidak ada. Pers saya tahu persis lalu membredel waktu itu sangat kuat dan sama sekali suara-suara yang sifatnya oposisi. Jangankan oposisi yang netral saja tidak pro pemerintah itu langsung ditindak. Jadi suasanaanya memang betul-betul dibuat tintrim.
- T : Itu dalam politik ya, kemudian kalau budaya itu lepas dari politik tapi kan pada saat-saat kondisi kacau itu budaya dipakai sebagai media politik, ini bagaimana.
- J : Sama saja maka dulu ada ..... karena pada saat-saat itu budayawan pun juga sama saja. Budaya itu kan untuk suatu pesan-pesan dan pihak komunis itu memang memanfaatkan semua lembaga dicaploki khususnya orang-orang yang tidak tahu menahu, kelompoknya dicap sebagai organ mereka dan pada saat meletus ya kena.
- T : Kemudian ini apa bisa dikatakan LEKRA, LKN itu sebuah kleuristasi politik lewat budaya.
- J : Ya memang LEKRA itu alatnya PKI untuk menangani budaya. Oleh karena itu kalau tidak sejalan dengan LEKRA mesti dihabisi.
- T : Jadi apakah PKI itu sudah melakukan usaha promosi lewat budaya itu.

- J : Ya, kan disitu banyak kecenderungan pembagian kelas. Jadi bagaimana cara PKI lewat ketopraknya untuk memusuhi orang kaya. Lalu ada istilah setan kota, setan desa itu kan lewat kebudayaan. Jadi begitu meratanya sehingga masyarakat khususnya di pedesaan termakan. Pertentangan kelas sangat diperkacau itu pinternya mereka, dampak mayoritas masyarakat itu orang bawah setelah itu digarap.
- T : Jadi komunis itu muncul pada saat kondisi menurun ya, kemudian tadi Pak Suhud mengatakan bahwa orang harus antri beras, itu bagaimana.
- J : Memang ada ini benar atau tidak, ada semacam pencegahan bahan-bahan masuk untuk negara kita itu dibuat agar disini memang kekurangan. Kondisi seperti ini dimanfaatkan “iki lho gara-garane setan kota”, memang ada blokade yang dilakukan mereka.
- T : Ini pak kalau Pak Suhud sebagai tokoh anti PKI sekarang itu sudah muncul gejala bahwa anak-anak PKI itu ..... bagaimana pak.
- J : Ya itu memang ciri khas mereka. Itu mereka ndak pernah mati, kan mereka punya pedoman untuk melangkah ke depan. Selama ini dia kan melihat situasi sambil tetap mencari peluang pada mereka kira-kira nanti pada saatnya itu akan dijemput, sama juga pada saat seperti itu. Nah sekarang ini memang saya masih tidak anu ya bisa saja seperti dewan konsentrasi karena anak-anak PKI seperti yang digambarkan itu kan kondisinya ditekan. Jangankan yang ditekan, yang tidak ditekan pun sakit hati karena orang tuanya stres atau apa karena banyak hal-hal yang memang kondisinya itu membuat mereka menjadi dendam kesumat. Lha salahnya pada saat pemerintahan Gus Dur lalu Habibie tahanan politik-tahanan politik dibebaskan, paham komunis dibebaskan akhirnya mereka makin berani menampakkan diri. Apa jaman orde baru itu berani, apalagi Gus Dur memberi angin dan saya yakin kalau ini tidak cepat-cepat dihabisi ini akan berat apalagi kondisi TNI sudah parah betul dengan cara HAM. Itu suatu gerakan yang terencana, dengan HAM itu kan ABRI lantas nggak bisa berbuat apa-apa. Tumbuh ketidakpercayaan ABRI terhadap kemampuan sendiri itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sama pada saat G30S dulu itu kan juga begitu ABRI dipecahi/dipreteli hingga pada saat meletusnya itu saya tahu persis. Lha sekarang nggak bisa memecah ABRI nya lalu Polisinya yang digesek-gesek akhirnya ya pecah juga. Jadi memang kondisinya dibuat sedemikian rupa. Kita lihat jaman Pak Harto itu jarang sekali ada pertentangan meskipun mbedegel tapi ya ndak berani keluar. Nah sekarang situasinya dibuat sedemikian rupa ini kalau kita ndak hati-hati meletus lagi.
- T : Dalam era global ini kan biasanya komunis juga muncul.

- J : Sekarang pakai poros begitu, jadi mereka tidak akan minta ke RRC atau ke Rusia tapi mereka sendiri mengaku bahwa dirinya sebagai komunis dan itu tetap muncul mungkin mereka punya sasaran Indonesia dijadikan basis komunis internasional yang baru.
- T : Sekarang masalah religius pak.
- J : Masalah religius itu tidak bisa dipakai sebagai ukuran. Nyatanya dulu yang namanya Sarikat Islam itu wong ya demi Allah tapi ya ngamuk. Sekarang ini orang-orang komunis sudah masuk ke pondok-pondok, kerja di staf negeri itu banyak.
- T : Itu teridentifikasi pak.
- J : Ya makanya pada waktu itu front anti komunis kita mencari semacam itu, kami punya data sehingga satu korban yang sudah bisa diambil yang dari satu dinamika ditekel. Kita lembaga masyarakat tapi ndak punya apa-apa hanya punya suara. Makanya seperti saya mendirikan yayasan korban keganasan komunis.
- T : Apa lihat pak itu kasus lembaga korban Orde Baru ada juga itu.
- J : Ya ini basisnya. Saya memang ingin kalau mereka terus menerus nanti akan bergerak dengan membongkar kuburan-kuburan yang dikatakan ini bukan jenasah Orde Baru, kami pun akan bergerak membongkari jenasah-jenasah kita yang korban komunis. Tapi untuk sementara ini belum bebas.
- T : Begini pak itu komentarnya Pak Salim Said kemudian memicu ... yang dikumpulkan itu hanya dari sudut dinamis itu yang betul tapi dia tidak mempropagandakan komunis tapi judul itu cukup menggelitik itu kan merubah ....
- J : Ya memang komunis itu kan ada yang namanya organisasi OTB itu kan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang tanpa bentuk seakan-akan mereka itu tidak ada pemerintah, ini sebagai contoh saja dan mereka sudah tahu bahwa ajaran komunis dilarang, PKI partai terlarang. Dia melihat reaksi masyarakat bagaimana dan itu akan ibaratnya bunga akan mengundang tawon-tawon yang lain untuk mengerubung. Jadi kalau saya memang meskipun dia ngomong begitu dia jelas nggak akan berani. Komunis itu menang nanti dia seperti saya ini mungkin sudah ditumpas karena saya yang menggerakkan anti komunis untuk generasi muda Islam, saya salah satu pendiri.
- T : Sekarang dari segi hukum itu bagaimana kondisi hukum pada waktu itu.
- J : Ya ini tadi pak sing *kuwasa sing menang*. Kalau dulu kecenderungannya bukan uang untuk menyemangati orang tapi politik karena komunis itu mampu menyusup kemana-mana dan kecenderungannya hukum itu

dimanfaatkan orang yang berkuasa. Begitu kita anti komunis tangkap saja tanpa proses. Persis sama kondisi sekarang ini cuma bedanya yang kebetulan mendukung anti komunis itu cukup banyak dan komunis itu sudah terlalu lama tidurnya sehingga belum mampu ikut .... entah hanya berapa tahun saya kira terutama Gus Dur yang memberi angin dan itu yang membangkitkan mereka dan ternyata merasa yakin. Karena bangkitnya belum lama sangat kecil untuk terlibat.

T : Kemudian apa pengertian Orde Baru secara konseptual.

J : Kalau menurut saya kecenderungannya mau merubah tatanan yang sudah jadi dan memberikan suatu tatanan yang baru. Kecenderungannya hampir sama dengan yang sekarang dipegang reformasi yang akan mereformasi segala hal yang tidak baik karena menurut anggapan kita semasa orde baru semua bidang nggak benar harus direfor. Oleh karena itu saya mempunyai pendapat bahwa reformasi sama dengan orde baru hanya dia malu saja.

T : Tapi itu reformasi mau merubah tatanan Orde Baru, itu bagaimana.

J : Sebab tatanan Orde Baru itu mana sih yang salah. Kalau dulu kenyataan ya pak ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya itu apa ndak karu-karuan, sekarang itu apa yang ndak karu-karuan. Justru adanya reformasi ini malah ndak karu-karuan.

T : Apa ini baru sebuah proses.

J : Tidak begitu yakin, begini reformis-reformis sekarang ini ndak punya visi, misi dan ndak punya program. Programnya itu hanya bongkar total sehingga pengalaman Pak Harto semasa Orde Baru yang dijalani selama 32 tahun ini diabaikan tanpa memperhatikan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah kalau yang Orde Baru dulu yang baik yang dipakai yang jelek tidak dipakai (diganti). Sekarang tidak pokoknya Orde Baru itu semua jelek sedangkan 32 tahun ini mengalami hal-hal yang terbentur- bentur. Orde Baru selama dipegang Pak Harto itu korupsi rangking terburuk nomor sebelas, sekarang nomor satu.

T : Ada komentar ketika ngobrol-ngobrol itu kenapa terjadi hal itu. Jadi kalau sekarang itu semua merasakan suap-suap itu tapi kalau dulu hanya pada satu tempat.

J : Ya ini kan jauh lebih baik makanya saya katakan pada saat penataran bahwa sekarang ini.. kalau jaman orde baru dulu yang jadi rampok itu hanya eksekutif, legislatif sedikit. Sekarang semua rampok karena hukumnya tidak jelas. Nah ini kesempatan, kondisi belum tertata dan yang jadi rampok itu partai-partai politik. Saya sangat yakin bahwa kesempatan ini dimanfaatkan oleh partai-partai yang besar untuk mengumpulkan dana.



Jadi sekarang ini rampoknya itu semua ya eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lha penegak hukum kok dihukum, kalau dulu apa pernah ada. Lalu legislatif itu mestinya membuat peraturan tetapi peraturan yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri. Itu ya memang betul-betul ndak mampu reformis-reformis sekarang ini memang merusak betul.

- T : Tapi ada komentar begini pak, reformis itu sendiri tidak muncul sedangkan yang sekarang muncul itu adalah tokoh-tokoh yang semasa Orde Baru itu tersingkirkan. Ini bagaimana.
- J : Bisa seperti itu tapi kelihatannya sekarang itu siapa reformis-reformis yang ndak muncul. Amin Rais itu tokohnya reformasi tetapi apakah betul, kenyataannya apa yang dia lakukan. Contoh kecil saja dia anggota DPR, gajinya setiap bulan diambil tapi ndak pernah datang, ini kan merampok namanya. Terus sekarang Megawati, memang dia nggak berbuat apa-apa tapi orang kiri kanannya lantas kondisinya bagaimana, kita ndak jelas. Yang tidak itu cuma Sultan, tokoh reformasi yang belum cacat. Kalau Amin Rais itu yang membuat terjadinya otonomi daerah yang salah arah, federal, itu yang mengusulkan Amin Rais. Nah itu memancing macan tidur, orang yang tidak puas berdasarkan otonomi itu. Sebenarnya otonomi dibuat oleh Ryas Rasyid seorang konseptor yang bagus tetapi belum begitu jadi dia disingkirkan dan yang melanjutkan tidak tahu, tidak mau tanya akhirnya seperti itu, pemahamannya keliru. Mereka menimbulkan raja-raja kecil di daerah. Apa dulu pernah ada itu urusan laut untuk diperebutkan. Menurut UUD 45 pasal 33 "Semua kekayaan itu untuk kesejahteraan rakyat". Itu hasil pemahaman otonomi, aku berhak mengelola hasil ditempatku, kan begitu.
- T : Seharusnya kemarin sebetulnya sadar bahwa Balai Kajian pernah mengundang pakar-pakar tentang otonomi, integrasi kemudian yang kita undang itu dari Kelurahan, LSM yang mengulas tentang otonomi itu.
- J : Rata-rata pengertiannya begini apalagi orang yang pintar mau memanfaatkan momentum untuk menipu, seperti sekarang ini pakar-pakar, pengamat dan sebagainya itu rampok-rampok kecil.
- T : Itu dari sisi negatifnya ya pak tapi dari sisi positif masyarakat bisa berpikir walaupun mengalami kejenuhan tapi kita jadi tahu walau lewat TV.
- J : Sepanjang proporsional kita harus memahami bahwa basis pendidikan itu kan ... pemahaman orang atas omongan orang makanya sangat berbahaya para pakar-pakar ini kalau ngomong semaunya sendiri. Dia buat seminar dan lain-lain itu saya istilahkan rampok itu. Sekarang mana para pakar-pakar yang betul-betul kepakarannya berbicara melalui nuraninya. Kalau nurani yang berbicara ndak ada perbedaan antar pakar-pakar sesama disiplin

ilmunya. Kemudian antar sesama pakar hukum saja bermusuhan terus antar ekonom juga bermusuhan terus turun ke pribadinya. Sudah jelas hukum itu sudah ada aturannya lalu hukum diterjemahkan untuk kepentingan masing-masing.

T : Apa sebab 11 Maret 1966 itu merupakan tanggal lahirnya Orde Baru.

J : Saya kira hubungannya kan sejak saat itu. Tatanan yang ada di Orde Lama itu mulai disingkirkan, berangkatnya dari situ. Jadi momentum Pak Harto memberikan surat perintah untuk mengambil sikap dari Bung Karno itu dianggap sebagai momentum paling tepat karena Bung Karno itu dianggap sebagai simbol Orde Lama.

T : Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu bentuk perebutan kekuasaan secara halus, itu bagaimana.

J : Memang versi itu kan macam-macam tinggal ditinjau dari sudut mana kalau saya netral karena orang sudah tidak mengharapkan lagi Bung Karno meneruskan hanya sifat kita kan tidak langsung ... pakai cara. Kita belum tahu karena bukti otentik 11 Maret itu ada ndak, itu belum terbukti, siapa itu belum jelas bahwa itu yang ndelekke Orde Lama ya bisa, pendukung Orde Baru juga bisa supaya ngambang.

T : Tapi begini orang yang tahu kok tidak mau bicara ya seperti Pak Yusuf itu sebelum mati ....

J : Ya ini kepentingan kalau alasan yang selalu mereka pakai itu demi kesatuan negara dan bangsa karena kalau saya cetuskan bisa saja perang saudara terjadi misalnya waktu itu jelas-jelas bahwa kita dengan kasar mungkin kita perang saudara, sama juga dengan pemerintahan Orde Baru tindakannya tidak seperti sekarang.

T : Ini strategi pak.

J : Mungkin strategi jadi tidak perebutan kekuasaan tetapi menyingkirkan secara halus.

T : Kemudian pada tanggal 14 Maret 1966 rakyat Yogyakarta menyambut gembira pembubaran PKI dengan mengadakan apel akbar, mohon dijelaskan.

J : Memang saya dengar pada saat Bung Karno pidato itu sempat *nggoyahke*. Pada saat itu dengan jelas menurut pandangan orang arus bawah bahwa PKI yang membuat segala sesuatu sehingga pembubaran PKI itu mutlak harus, sedangkan pemerintah masih belum berani langsung membubarkan begitu, mungkin efeknya itu. Contoh sekarang Yogyakarta, pada masa reformasi raja siapa atau gubernur siapa yang berani secara jelas mendukung reformasi. Tidak mustahil itu hasil ulah para orang ... yang menjadikan

momentum untuk disumbangkan seperti Trikora. Trikora itu kan di Yogya kenapa karena Yogya lain dari yang lain, dia yakin betul Yogya ini jaman RIS tetap berpihak pada RI ada satu-satunya di Indonesia dan yang lain tetap berjalan fanatisme Yogya sebagai bagian Indonesia itu sudah teruji.

T : Itu mendukung kemerdekaan yang diproklamasikan lalu kedua raja mengirim surat ucapan selamat.

J : Ya itu kan satu-satunya, raja di seluruh Indonesia banyak sekali, hanya satu otonomi Yogya thok, Orde Baru juga di Yogya, reformasi apalagi Trikora juga.

T : Kemudian pak tentang munculnya laskar di Yogyakarta seperti laskar Ampera Aris-Margono, itu bagaimana.

J : Pada waktu itu saya kira hanya untuk sekedar menyatukan potensi di masyarakat yang ingin membersihkan khususnya komunis. Saya tahu persis begitu pembubaran PKI di Alun-alun khususnya antara itu hanya penyambutan saja potensi potensi yang ada di KAMI/KAPI waktu itu terus kesatuan-kesatuan disatukan disitu. Nah laskar itu kan mempunyai prosedur. Prosedurnya kami dan untuk Bergeraknya laskar.

T : Jadi boleh dikatakan KAMI/KAPI itu belum laskar ya.

J : Ya.

T : Kemudian jaman sebelum Orde Baru itu keterpurukan kondisi sosial politik, ekonomi dan budaya itu kemudian setelah munculnya Orde Baru itu apakah bisa dikatakan kondisi itu baik.

J : Sudah hilang karena seolah-olah Orde Lama yang mempunyai ijin kerja, awalnya seperti itu karena memang program-program dari Bung Kamo sendiri kan ndak jelas waktu itu sehingga setelah mengalami beberapa pergantian makanya seperti pembangunan sudah ... setelah itu tidak.

T : Apakah itu ada unsur-unsur pemaksaan misalnya di jaman mendagrinya itu Pak Amir Mahmud itu katakanlah pembongkaran itu ada pemaksaan/ penekanan.

J : Ya secara idealnya seperti itu karena menganggap bahwa ini yang tidak tertutup kemungkinan mumpung nanti yang kedua kecenderungannya ke stabilitas. Stabilitas itu diperlukan adanya satu kekuatan yang dominan karena waktu itu Orde Lama juga masih kuat dan sebagainya perlu adanya tindakan yang pasti. Makanya Golkar itu besar tidak bisa dipungkiri karena didukung Orde Lama juga. Dulu pegawai negeri itu mayoritas kan orang-orang PNI yang namanya gerakan ... itu kan seperti itu. Saya salah satu korban pada saat itu saya masuk RRI itu karena buta huruf ya saya disikat.

Tahun 1965 itu pun ndak bisa, yang masung orang-orang Orde Lama (anak-anak GMNI). Dia masuk ke laskar untuk KAMI sudah terlambat dan mereka beruntung ada HMI, yang lain menyusul belakangan. GMNI itu sudah sampai ke jaman Orde Baru berjalan lama konkritnya tidak mau mendukung Gemuis, terus terang saja GMNI itu ya Orde Lama. Saya tahu persis karena saya bertempur dengan mereka secara fisik, jadi saya membawa anak-anak Gemuis. Jadi kalau orang-orang PNI mengatakan bahwa mereka Orde Baru itu nggak benar.

- T : Kemudian begini dalam .....Orde Baru itu.....ada yang mengatakan bahwa dalam bidang politik itu mengalami kemajuan dari multi partai menjadi tiga partai, ini bagaimana komentar bapak.
- J : Jaman orde reformasi ini "*pokoke sing Orde Baru itu elek kabeh*". Jaman Orde Baru itu mengapa dari multipartai dijadikan tiga partai. Temyata pakai multi partai itu kesandung-sandung, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kelompok terpaksa dijadikan tiga partai, itu pengalaman. Lha karena itu dibubarkan ya otomatis mengalami lagi seperti dulu. Kalau tidak disadari bahwa apa yang dilakukan Orde Baru merupakan pengalaman bukan suatu karangan saja. Akhirnya disatukan juga. Pokoknya harus tegas saja tidak usah banyak-banyak yang diisyaratkan bisa mengurangi jumlah.
- T : Tapi ini pak kalau mereka punya pikiran mau memberdayakan PNI, ibaratnya punya kepala tapi tidak punya badan, ini gimana.
- J : Bisa saja seperti itu tapi kalau PNInya itu disatukan.
- T : Tapi mereka sebetulnya orang-orang yang kecewa seperti.....tidak lewat GMNI harus lewat PDI.
- J : Ya itu makanya pendiriannya tidak berdasarkan hati nurani, membiasakan diri ke kecewa.
- T : Itu yang jadi korban kita-kita ini ya.
- J : Sama jaman Orde Lama dengan Orde Baru juga seperti itu orang-orangnya yang kecewa. Itu diluar .... solusinya.
- T : Tapi kelihatannya apa ini berhasil.
- J : Makanya ini tinggal kecepatan pikiran dan kesediaan anggota DPR ini. Paling cepat itu baru mau berangkat .... ini sampai 2004 ya begini.
- T : Kelihatannya rakyat itu sudah tidak percaya lagi.
- J : Tidak.
- T : Mengenai kepemimpinan di Yogyakarta ini boleh dikatakan dualisme yaitu kepala daerah sekaligus gubernur, itu bagaimana pengaruhnya baik di masa orde lama maupun orde baru.
- J : Kalau saya itu tidak masalah. Ratu sendiri itu kan ada, dia punya basis

pengikut orang-orang yang sudah berjasa/bekerja Sedangkan gubernur itu kan konstitusi artinya gubernur dwi fungsi tapi pada hakekatnya disini kan raja dan kalau gubernur itu kan hanya satu di daerah cuma raja itu khusus hanya untuk *abdi dalem* tapi kalau gubernur itu tidak, semua aliran masuk kesitu. Tapi keuntungan untuk sultan karena dia sultan sedangkan gubernur ini beruntung sebab dia punya basis.

T : Tapi begini pak apakah kharismanya itu berpengaruh ndak pada pemimpin-pemimpin adat yang dengan kharismanya dia mampu mengumpulkan massa seperti di reformasi kemarin rakyat banyak mendukung beliau, mungkin kalau beliau bukan sultan akan lain lagi.

J : Saya kira lain makanya saya katakan sultan punya basis dulu. Sekarang kalau kita mau lihat kemampuan sultan seberapa kan kita belum bisa melihat.

T : Apa komentar beliau tentang adanya isu yang mengatakan bahwa beliau mau menghancurkan Akbar Tanjung.

J : Kita menjawab begini memang dalam anggaran dasarnya masih mudah untuk ditempuh dan direncanakan tapi Golkar itu tidak mengenal anggota-anggota yang keluar. Gubernur DIY itu lain dengan gubernur daerah lain, yang ngangkat bukan pemerintah.

4. Nama : Bambang Subagyo, S.Th  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Juli 1949  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tugas/jabatan dalam perjuangan : Pengurus Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB)  
Pekerjaan sekarang : Pendeta Gereja Kristen Jawa Ambarukmo  
Alamat : Gang Kamboja 96, Karangbendo, Banguntapan Bantul  
Wawancara dilaksanakan : 28 Agustus 2002  
Tempat wawancara : Gang Pandega 96 Karangbendo Banguntapan, Bantul

## Materi

T : Ingin menanyakan masalah Reformasi, faktor-faktor apa yang mendorong reformasi baik dari dalam maupun dari luar.

J : Yang kami amati khususnya dari kelompok kami Forum Persaudaraan Umat Beriman nampaknya ada totaliter di dalam pemerintahan bangsa ini hingga

memang nampak banyak hal-hal dimana kebebasan demokrasi kurang dapat dilaksanakan. Disisi lain kami juga lalu prihatin banyak upaya-upaya melakukan politisasi atau semacam pemanfaatan konflik untuk memanfaatkan status quo sehingga memang kami pada waktu itu ya merasa prihatin pada situasi itu dan itu dipicu oleh krisis yang multi dimensi yang makin lama makin nampak. Sehingga tahun 1997-1998 sehingga memang kami waktu itu sebagai Persaudaraan Umat Beriman memulai dengan semacam persekutuan doa bersama yang pertama kali kita lakukan pada tanggal 23 Pebruari 1998. Semacam kalau orang Jawa bilang ya kita itu nggugatnya, sambatnya pada Tuhan karena pada waktu itu sang penguasa merasa paling berkuasa yang totaliter. Kita menyerahkan semua pergumulan itu kepada Tuhan, memang para sesepuh kita juga sering ngomong "*ya iki sing bisa ngelengke penguasa Orde Baru itu mung Gusti Allah*". Lalu kita adakan doa bersama di Sasana Hinggil 23 Pebruari 1998 pada waktu itu memang juga serentak para mahasiswa mengadakan gerakan-gerakan protes terhadap Orde Baru. Lalu kita melakukan doa bersama di Sasana Hinggil dari Kejawen, Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Kong Hu Cu, Penghayat Kepercayaan dari Sapto Dharmo dan itu cukup lama serta sempat pula kami paginya dipanggil ke Poltabes dan kami semua datang kesana. Kami ini hanya sebagian kecil dari gerakan-gerakan selalu memberi dorongan spiritual pada gerakan mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan protes, demo dan sebagainya itu lalu biasanya malam harinya kita adakan doa bersama sekaligus kita mengingatkan betapapun anda marah terhadap pemerintah ini hindari dari bentuk-bentuk hujatan, hal-hal yang kurang sopan dan sebagainya. Ada beberapa poster yang lalu saya ingatkan agar itu tidak dipakai. Itu kami lakukan untuk memberikan dorongan spiritual supaya gerakan semacam gerakan baru sekarang kita ngomong itu gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tetap santun, tetapi betul-betul berakar dari spiritualitas itu. Memang kami intens melakukan pemantauan-pemantauan bahkan kami sempat juga melakukan berbagai protes-protes di tahun 1998 itu lewat media massa. Sempat dulu kalau ada mahasiswa demo yang terluka langsung dibawa ke DKT, itu seringkali orang lalu mengkhawatirkan. Pernah juga ketika Bethesda, Panti Rapih, Sarjito mau masukkan ambulannya dilarang lalu kita buat release yang dimuat di KR, Bemas dan akhirnya kita bisa mengamati. Kami melakukan pendampingan supaya jangan terjadi tindakan-tindakan.

T : Kemudian ini pak pada waktuitu sekitar tahun 1998 atau sebelum menjelang reformasi ini kan di pusat terjadi ramai-ramai pak, mungkin dari pengamatan

bapak pada waktu itu seperti demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari Sanata Dharma sampai kemudian ada korban Moses Gatotkaca itu.

- J : Justru itu kami selalu melakukan pendampingan-pendampingan dan advokasi-advokasi lewat rilis dan pendekatan termasuk ada beberapa yang ditembak oleh penembak gelap yang kita selamatkan. Oleh penembak seorang mahasiswa yang dicurigai dan itu ditembak di depan toko Hero sempat oleh teman-teman mahasiswa disembunyikan, lalu ada yang korban penembakan yang dibawa ke Panti Rapih saya lupa namanya tapi teman-teman kami lalu sempat memblokir ndak boleh karena saking ketakutannya. Tetapi kami para pemuka agama ini juga aktifis dengan berbagai pakaian keagamaannya tetap mendoakan dan salah satu kenangan saya dengan mas Kyai dan romo Yatno tanggal 5 Mei kasus Gejayan itu cukup ramai itu kan sempat sampai tengah malam. Waktu itu kami sedang membuat sebuah seruan dari umat beriman untuk bangsa tentang pentingnya Indonesia baru. Lalu kami dengar konflik di Gejayan ini kok berkepanjangan yang semula hanya dibatasi sampai jam 15.00 lalu mahasiswa terus tetap tarik menarik sampai malam. Nah kami bertiga itu sempat menikmati gas air mata karena waktu itu mereka sembarang masuk ke kampung-kampung lalu ada asrama mahasiswa dicurigai, ya arogansi aparat waktu itu sangat memprihatinkan. Waktu itu kami sedang melerai anak-anak mahasiswa yang ada di asrama Samirono itu dengan kunci mereka melontar gas air mata, mahasiswa pada lari dan saya yang di tengah, lha untungnya beberapa teman yang dari Polda yang sempat tahu kalau saya sering tinggal disana. Mereka lalu tidak jadi masuk ke asrama.
- T : Mengenai Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1998 dipakai sebagai aksi damai untuk mendukung reformasi dalam *pisowanan ageng*, mungkin bapak tahu bahkan merupakan salah satu tokoh agama yang ikut terlibat langsung.
- J : Kami dalam FPUB lalu koordinasi dengan komunitas-komunitas mahasiswa yang prihatin dengan bangsa ini. Memang ingin mengadakan suatu gerakan damai dan kita mohon waktu itu Sri Sultan dan Sri Paku Alam untuk menyampaikan presentasinya. Jadi intinya kami mau mengajak bangsa ini untuk ikut dalam peristiwa kebangkitan untuk suatu pembaharuan bangsa ini sesuai dengan gerakannya, tentu itu tidak mungkin hanya oleh teman-teman FPUB saja tetapi banyak pihak sebenarnya. Lalu ada gerakan di kampus-kampus dan sebagainya dan kami dari segi aspek spiritualitas sekaligus kami juga menggerakkan sekitar 200 mahasiswa relawan lintas



iman dari berbagai agama untuk menjadi tim investigasi dan tim PPPK pada waktu itu. Karena pada waktu itu kita memang masih melihat kalau ada aparatnya seringkali keras. Di samping itu lalu beberapa teman yang punya kedekatan dengan teman-teman aparat minta supaya sekarang jangan ada tindakan apa-apa. Kami akan adakan gerakan aksi damai dan lalu kita menghubungi teman-teman panitya sehingga memang ada gerakan di Malioboro. Memang puncaknya yang pada waktu malam tanggal 19 Mei sampai tengah malam kami menyiapkan karena masih ada beberapa kelompok ingin pakai strategi supaya perhatian aparat terpecah itu ada yang ingin di Alun-alun dan ada yang ingin tetap di Gejayan dan ada yang ingin di Bunderan karena itu nanti dikuatirkan akan mengkonsultasikan ke tokoh. Tetapi akhirnya ada kesepakatan ketemu di Alun-alun dan nanti kalau nersakke dokumentasi kaset ada mungkin di Romo Yatno sudah direvisi itu sejak kami doa di Sasono Hinggil sampai peristiwa 20 Mei.

- T : Apa yang mendorong rakyat Yogyakarta untuk datang ke Alun-alun Utara pada tanggal 20 Mei dari rakyat bawah sampai pejabat tinggi bahkan *Ngerso Dalem* sendiri *kerso rawuh*. Ini sebenarnya apa yang mendorong mereka itu bisa *tumplek blek* di Alun-alun Utara.
- J : Yang mendorong memang yang pertama merasa penat bangsa ini dalam situasi yang memprihatinkan tapi yang saya selalu tangkap masyarakat Yogyakarta ternyata masyarakat yang memang sangat senang dengan hal-hal yang damai dan yang agak berbeda dengan kota-kota lainnya misal di kota yang berdekatan ada hal-hal yang sampai muncul kebakaran dan sebagainya. Itu terus terang memang kami secara intensif masuk ke dalam kelompok-kelompok itu, tadi seperti saya matur ya ada suatu kelompok mau demo sementara dari Sanata Dharma atau UGM mau demo di Boulevard dan sebagainya. Malam harinya ada doa bersama tetapi yang kita bangun motivasi. Di jalan Dr. Wahidin misalnya juga beberapa kali kami selalu sampai orang yang sinis menganggap wah ini jadi tukang doa sebagai provokatornya tapi kami selalu pesan janganlah melakukan tindakan kekerasan janganlah melakukan hal-hal yang tidak sopan. Kalau toh ada yang mencuat-cuat itu ya semacam spontanitas tapi memang betul-betul untuk Yogyakarta kami wanti-wanti jangan ada gerakan-gerakan dalam arti kita sama-sama menjaga. Meskipun di sisi lain kami juga punya relawan yang masuk ke masyarakat supaya masyarakat juga jangan terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan.
- T : Sultan di Yogyakarta ini masih mempunyai peranan artinya bahwa Yogyakarta aman karena berkat *Ngerso Dalem*. Ini bagaimana pak.

- J : Sri Sultan dan Sri Paku Alam ada kesediaan untuk mau tampil membuat sebuah maklumat itu juga memang masing-masing menjadi panutan tapi kan sebagai orang beriman kami melihat peranannya, peranan masyarakat dalam situasi masyarakat yang paternalis. Jadi bukan karena beliau sakti tetapi budaya-budaya Jawa yang masih paternalis itu mampu menggerakkan banyak orang bahkan kalau kita masih ingat ada poster besar di monumen itu "Yogya Siap Menjadi Ibukota Indonesia". Kebetulan dulu juga diawali dengan tarik menarik pengangkatan gubernur pada waktu itu.
- T : Peran Gereja dalam proses horizontal yang berkaitan dengan kemasyarakatan di era reformasi ini bagaimana.
- J : Ya kalau kita lihat memang saya kira tidak hanya Gereja saja, agama lain secara institusional memang tidak menampilkan peran yang jelas. Maksud saya bukan Gereja-gereja formal entah itu PGI, MUI itu kan seringkali tidak tegas secara institusional tetapi pribadi-pribadi orang beriman itu yang muncul berperan khususnya kalau gerakan 20 Mei itu saya kira pribadi-pribadi mereka banyak yang hadir teman-teman dari UKDW tetapi untuk gerakan 20 Mei itu, tetapi kami sendiri di FPUB sebenarnya sesudah itu masih intens terus diskusi tentang Indonesia baru bersama H. Imam Sutrisno, Romo Mangun dan sebagainya terus menerus. Memang kami tidak berhenti 20 Mei itu terus sampai ada pembaharuan termasuk masih ada gerakan doa lagi tetapi kami tanggalnya tidak tahu persis juga di Alun-alun doa kebangsaan itu menjelang pemilihan akhir itu juga kita lakukan. Jadi kalau Gereja secara langsung institusional memang nggak nampak.
- T : Kenapa pak.
- J : Ada satu sisi memang sebagai institusi agama sebaiknya tidak berpolitik praktis tapi pribadi-pribadi penganut agama seharusnya dibangun dulu lalu kalau kita jujur hampir sebagian juga orang beragama tidak hanya Kristen saja sehingga ini yang menjadi keprihatinan konsen terhadap negara juga masih sedikit hanya sekedar. Saya memenuhi kewajiban agamawi itu saja, kurang berani mengambil resiko atau peranan terhadap kehidupan masyarakat konkret khususnya memberi kritik sosial.
- T : Kalau ini pak dengan munculnya FPUB sebetulnya latar belakang munculnya itu apa.
- J : Latar belakang munculnya FPUB itu kan tahun 1997 muncul ada konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Ada pembakaran Gereja kemudian langgar dicoba mau dibakar semacam kayak ada upaya mengadukan bangsa ini dengan agama. Lalu kami waktu itu Kelompok Inter Video berinisiatif mencoba mengumpulkan komponen-komponen umat beragama. Lalu kami

kumpul yang ternyata sebenarnya kami menyadari ndak ada ajaran agama mengajarkan tindakan anarkis. Lalu bulan Pebruari waktu itu kelompok kepingin mendirikan suatu forum persaudaraan tapi tidak hanya umat beragama tapi umat beriman karena lingkupnya tidak hanya agama formal. Itu ternyata bulan Pebruari 1998 waktu doa bersama itu betul-betul pertama kali kita menikmati kembali doa dalam berbagai agama. Dulu kan Pak Karno pernah mengadakan setiap mau perayaan itu doa menjelang 17 Agustus, semua agama bisa berdoa berbarengan tidak hanya satu agama yang mayor saja tetapi dari semua agama berdoa bersama. Nah ini waktu itu ternyata kita bisa menghargai ketika orang lain berdoa. Ini kan ada getaran religius yang sebenarnya harus dipupuk dan itu kami dikembangkan.

T : Waktu itu tokoh-tokohnya siapa saja.

J : Sebenarnya saya malah termasuk orang kedua, sebetulnya ya KH. Abdul Muhaimin, Romo Yatno memang konfokatornya dari Inter Videi ada Pak Martono lalu Pak Jonoworo, Biku Kanavaro lalu Pak Toto Baroto itu dari Sapto Dharmo. Lalu saya kemudian awal 1998 baru terangkat. Dari Kristen dulu Pak Hampry.

T : Kemudian sekarang ini apa ada kepengurusan tetap.

J : Kami sebenarnya bentuknya itu forum ya tetapi secara legal itu ndak ada yang ketua, sekretaris Tetapi misalnya ada masalah-masalah yang sangat urgen khususnya misal beberapa bulan atau tahun terakhir ada krisis itu, kami kerjasama dengan Komite Kemanusiaan Yogyakarta semuanya ini memang kita ada bangunan dengan komunitas-komunitas yang lain ada Lapera. Komite Kemanusiaan itu Pak H. Maksurn, Pak Susetawan itu kerjasama kami. Jadi kami hanya kalau ada masalah-masalah penting ia telpon-telponan. Jadi memang beberapa waktu terakhir ini karena memang ingin membangun relasi formal dengan cenel-cenel diluar negeri ya lalu ada ketuanya Pak Muhaimin, istilahnya korp. Korpnnya ya Muhaimin, Romo Yatno, saya, Pak Jonoworo lalu pak Efendi dari Budha, dari Hindu itu Wayan, ini istilahnya ya semacam pemimpin kolektif lalu ada sekretariat dan sekjennya Pak Kus Martono dari Katolik. Pemimpinnya ya pemimpin kolektif.

T : Hasil yang sudah dicapai, yang sudah dirasakan apa pak.

J : Saya nggak pernah memantau, secara rasional hasil itu perilaku karena ini membangun perilaku. Kami lakukan berbagai upaya misalnya kalau kita amati menjelang pemilu yang lalu berbagai isu ingin mencoba menggoncang Yogyakarta. Saya mengatakan ini bukan hanya prestasi FPUB saja tetapi itu prestasi masyarakat, tetapi itu kami kerja bareng. Menjelang pemilu di

Yogyakarta ada gerakan spanduk perdamaian di berbagai tempat itu kami minta beberapa catatan dari Gubernur, kita lalu hubungi beberapa orang, lalu orang itu spontan mengeluarkan, ya aku sekian dan sebagainya. Kami selalu membangun jaringan hingga ketika masyarakat Yogya mau diobok-obok termasuk ada berbagai pembacokan, kami punya krisis centre yang sewaktu-waktu minta pertolongan kami siap membantu. Waktu jaman krisis ekonomi ya kami tetap lakukan penyaluran beras di beberapa daerah yang memang betul-betul krisis. Lalu ada beberapa daerah mulai terbentuk semacam FPUB, misalnya di Magelang terbentuk FUBM, di Purworejo lalu di Jakarta itu Gus Dur membentuk (kurang jelas) kemudian di Tegal, Malang. Ketika diantara kami sering diundang juga wacana kerukunan ini kita coba sebar. Lalu di lingkungan Gereja Kristen akhirnya kami diundang di Sinode GKI itu juga kita coba menyebarkan wacana pluralisme. Di Yogyakarta disekitar klasis berbagai sarasehan pluralisme saya, Romo Yatno, Pak Kyai, saya tidak melihat itu sebagai prestasi FPUB. Itu sebuah harapan yang berlangsung terus menerus bahkan beberapa teman kami di Kedung Ombo juga melakukan, masyarakat Kedung Ombo yang didampingi Romo Mangun juga masyarakat dari Islam, mereka butuh guru ngaji ya kita kirimkan. Mereka sangat merasakan.

T : Sampai seberapa jauh penghayatan keagamaan pada individu dalam masa reformasi, mengingat sekarang ini kan timbul gejolak yang dilatarbelakangi masalah agama.

J : Yang dimaksud.

T : Seberapa jauh penghayatan keagamaan pada individu pada masa sekarang ini pak mengingat sering terjadi gejolak yang disebabkan dengan latar belakang agama.

J : Saya ingin ungkapkan justru itu yang menjadi komitmen FPUB ini ingin mencoba membangun kesadaran bersama umat beriman dalam latar belakang agama pun supaya dia jangan terprovokasi semacam itu justru diantisipasi supaya betul-betul dia itu sadar menghayati kehidupan beragama itu tanpa saling mengganggu. Bahkan ambisinya FPUB atau wacana yang hendak disebarkan bukan hanya sekedar tidak konflik. Selama ini kan hanya sekedar tidak konflik. Kita ingin mencoba menyedulur. Wacana ini yang masih sulit. Meskipun dalam dialog komunitas basic itu sudah ada dalam peta harian tetapi ketika lalu institusional orang sudah ... meskipun akhir-akhir ini sudah cukup encer. Beberapa kali saya ditimbal di kantor panjenengan Natalan, Syawalan bareng.

T : Menurut bapak tentang pengertian agama yang selalu dikaitkan dengan

politik itu bagaimana.

J : Jadi begini agama harusnya memberi landasan spiritual moralitas orang berpolitik sehingga orang berpolitik itu takut. Tapi kenyataannya agama seringkali justru dikendarai oleh politik sehingga agama dipolitisir menjembatani pemicu sebuah konflik untuk memenangkan sebuah golongan politik tertentu. Ini yang menjadi keprihatinan FPUB, ini yang memang seharusnya tidak dilakukan. Saya selalu mengatakan dimana-mana kalau anda ingin menjadi politikus ya jadilah politikus yang punya spiritualitas yang baik meskipun ini dianggap angel. Politik itu menghalalkan berbagai cara tapi kalau politikus itu punya spiritualitas yang sungguh-sungguh otentik tentu dia dalam rangka berpolitik akan jujur, santun tidak akan menggunakan jalan yang bisa merusak kebersamaan bangsa. Terus terang memang dalam pengamatan kami terakhir di Indonesia banyak politikus tapi negarawannya makin sedikit. Mikirnya lalu ke golongan. Agama harusnya bisa memberi landasan motivasi, membangun politik yang baik, santun, saleh tapi prakteknya dibalik agama dipakai, dipolitisir untuk memenangkan ide politik tertentu. Ini memang sangat strategis karena agama itu berkaitan dengan emosi, berkaitan soal-soal yang batiniah. Kalau yang memolitisir itu tokoh yang kebetulan sangat dikagumi atau diyakini, itu bahayanya, teks Kitab Suci lalu diplintir untuk kepentingan berpolitik. Kalau umatnya sendiri dalam konteks kedewasaan imannya belum kuat kan gampang diwamai oleh tokoh itu. Itu sebetulnya sebuah harapan, seruan kami “mbok yao tokoh-tokoh agama atau orang beriman ini sadar untuk tidak diperalat oleh politik.

T : Mengenai Pasal 29 UUD 1945 pak beberapa waktu yang lalu kan ramai dibicarakan akan diamandemen kenyataannya tidak jadi menurut bapak mengenai pasal 29 ini bagaimana.

J : Ya kami syukuri karena bangsa ini masih ingin mencoba konsekuen dengan proklamasi. Rupanya komitmen untuk menjadi negara republik yang bhineka tunggal ika itu masih berlangsung. Kemarin sore kami adakan sebuah doa bersama dan kesenian religius di Pendopo Sewokoprojo Gunungkidul juga dalam tema “Bhinneka Dalam Kedamaian dan Kedamaian Dalam Kebhinnekaan”. Jadi orang betul-betul masih bisa saling menghargai. Kami syukuri tidak jadi mundur lagi masa pra proklamasi ini.

T : Mengenai pelaksanaan demokrasi sekarang ini bagaimana pak.

J : Pengamatan situasi terus terang masih sangat memprihatinkan. Salah satu dampak sikap otoriter masa yang cukup panjang itu memang orang tidak sempat membangun kader bangsa yang cukup baik. Semangat demokrasiya betul-betul masih belum dewasa. Mulai dari penekanan demokrasi terpimpin,

demokrasi Pancasila yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya bukan sebuah demokrasi. Jadi kesadaran demokrasi menurut saya masih memprihatinkan.

T : Padahal sekarang ini jaman reformasi ya.

J : Ya tapi orang masih belum punya kedewasaan berdemokrasi. Orang selalu melihat siapa yang berbeda malah menjadi musuh atau belum mampu melihat yang berbeda itu bisa melengkapi saling mengoreksi. Dan kalau orang punya kedewasaan berdemokrasi, saya dan Pak Hatno juga bisa berbeda berargumen kalau perlu sudah anda berjalan sesuai dengan jalan anda tapi yang terjadi nggak bagaimana saya tetap bisa menggagalkan terus menerus. Itu kan gambaran demokrasi, lebih-lebih kalau kita melihat pengertian *demoscratos* itu kekuasaan di tangan rakyat tapi prakteknya kan bukan rakyat yang berkuasa. Orang-orang yang kebetulan duduk mewakili rakyat tapi apa benar-benar dia beroperasi untuk rakyat karena banyak juga kader-kader yang jamping tahu-tahu mungkin karena relasi mungkin karena dia bisa cukup mendanai partainya, dia bisa melambung dengan baik. Apalagi mereka punya komitmen terhadap rakyat. Kita juga bersyukur bahwa pers sekarang makin berani ketika mereka *greneng-greneng* berembuk soal pesangon aja sudah terbuka. Itu kan sangat memprihatinkan. Jaman DPRGR dulu itu malah tombok wakil rakyat itu. Sekarang orang berpikir dimana saya lima tahun ini kalau rampung saya masih bisa jadi, ini terus terang masih memprihatinkan. Jadi aspirasi rakyat itu masih terpaksa harus dilontarkan lewat demo-demo, itupun apakah perbuatan betul jadi kepekaan para wakil rakyat terhadap penderitaan rakyat masih dipertanyakan.

T : Jadi menguntungkan kelompoknya sendiri atau pribadinya sendiri ya.

J : Ya itu saya *matur* memang sekarang banyak politikus meskipun politikus yang jamping-jamping juga tapi masih sangat langka negarawan. Ya kalau kita kemarin merayakan Pak Hatta semangat kenegarawannya sangat tinggi.

T : Kalau mengenai pendidikan agama terutama di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Kristen maupun Katolik, ini bagaimana.

J : Saya sendiri secara umum berpikir kalau kita memang mau mengembalikan pada tanggung jawab yang paling mendasar, sebaiknya seperti model kita dulu kecil pendidikan agama itu, jadi tanggung jawab orang tua di rumah dan institusi keagamaan, sekolah biar pada aspek pendidikan ilmunya. Sebab prakteknya sekarang pendidikan agama di sekolah kan hanya sekedar pengenalan sebuah keilmuan sehingga aspek kognitif saja sampai paling spikomotorik, bagaimana pengamatan aspek-aspek lainnya, nilai agama 8-9 tetapi moralnya nggak benar. Kalau itu dikembalikan pada institusi keagamaan dan orang tua, sekolah itu lalu ya murni ilmu bahkan orang

lalu tidak akan terkotak-kotak ketika dia berada dalam komunitas basis. Ketika saya mencari ilmu saya lalu ndak berpikir “beda sama saya”. Kami adalah sama-sama menimba ilmu disini tetapi kita seringkali sekarang kan begini “o ini pelajaran agama” apalagi kalau materi pendidikan agama tidak ditanamkan semangat solidaritas, semangat toleransi cenderungnya malah eksklusif. Lha ini kan orang lalu sulit. Baik kalau memang tidak terjadi permasalahan ya itu dikembalikan saja kepada lembaga-lembaga keagamaan. Entah kalau di teman-teman muslim itu ya para Kyai, takmir masjid yang mengurus itu, orang tua karena prakteknya akhinya orang tua ya masa bodoh terhadap sekolah, pendidikan anak soal keagamaan kan tidak makin terdidik.

T : Kalau ndak salah Gus Dur pernah mengatakan departemen agama itu tidak usah diurus negara.

J : Itu kan sebenarnya urusan negara juga sempat menjadi wacana bareng ketika FPUB kumpul kok bisa-bisanya negara menentukan ini agama resmi, ini belum agama. Agama itu kan soal pribadinya dengan Tuhan. Kembali ke persoalan, ini menjadi sulit karena sudah terlanjur lama. Kalau konsep Gus Dur itu justru muncul ketika negara ini awal-awal ya ndak terlalu dan akhinya permasalahannya kembali bukan ke masalah prinsip tetapi ke masalah teknis, tenaganya terus ditempatkan kemana sampai pegawai yang sudah sekian juta ini mau dikemanakan. Meskipun nanti ditutupi dengan soal-soal yang kelihatan argumen prinsip tetapi sebetulnya ndak begitu. Kalau kita jujur masalah prinsip ya itu kan tanggung jawab pribadi. Contoh negara-negara lain yang sudah maju ndak ada menteri agama.

T : Terima kasih pak.

5. Nama : Drs. Markus Sumantri Msc
- Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 27 April 1938
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tugas/jabatan dalam perjuangan : - Guru SMA BOPKRI II Yogyakarta  
- Sekretaris DPC Parkindo Kodya Yogyakarta (1966-1971)  
- Pengurus DPD PDI Propinsi DIY (1971-1998)  
- Anggota DPRDGR Tingkat II Yogyakarta (1967-1971) wakil dari Parkindo  
- Anggota DPRD Tingkat I Propinsi DIY (1992-1997) mewakili PDI
- Jabatan sekarang : - Pensiunan



- Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen  
Marturia

Alamat : Sapen GK.I/360 Yogyakarta  
Wawancara :  
dilaksanakan : Kamis, 27 Juni 2002  
Tempat wawancara : Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia,  
Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

### **Materi**

T : Nama lengkap bapak.

J : Markus Sumantri Msc.

T : Tempat tanggal lahir.

J : Bandar Lampung, 27 April 1938.

T : Jenis kelamin.

J : Laki-laki.

T : Tugas jabatan pada tahun 1966.

J : Saya sebagai guru SMA BOPKRI II Yogyakarta dalam bidang *guiden and conseling*. Kemudian kalau di partai itu waktu 1966 saya sebagai sekretaris DPC Parkindo Kodya Yogyakarta, kemudian pada tahun 1971-1998 saya sebagai pengurus DPD PDI DIY dan sesudah itu pernah ditawarkan untuk duduk di Partai Kristen Nasional Indonesia sesudah Kongres Medan. Itu keadaan saya yang tempo hari.

T : Sebagai anggota DPRD itu pernah.

J : O ya. Jadi akhir tahun 1967-1971 saya duduk di DPRDGR kota Yogyakarta. Kemudian pada periode 1992-1997 sebagai anggota DPRD DIY mewakili PDI, sedangkan yang sebelumnya pada DPRDGR Tingkat II tahun sebelumnya saya duduk mewakili Parkindo.

T : Mungkin dalam organisasi kemahasiswaan bapak juga pernah mengelola atau sebagai pengurus.

J : Dalam organisasi kemahasiswaan saya malah tidak pernah ikut. Kalau dulu-dulu memang pada waktu saya masih bertugas di Lampung itu ikut ngurusi GMNI. Di Lampung itu saya juga pengurus cabang maupun pengurus daerah PNI sampai akhirnya pindah ke Yogyakarta.

T : Kalau jabatan sekarang.

J : Jabatan sekarang sebetulnya saya sudah pensiun tetapi oleh pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Marturia sejak dari tahun 1983 sampai sekarang saya dijadikan salah satu pembantu ketua di STAK Marturia sekarang ini.

- T : Alamat lengkap bapak.
- J : Sapean GK.I/360 Yogyakarta
- T : Kemudian alamat kantor disini.
- J : Nologaten jalan Kedawung, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- T : Kami ingin menanyakan pak, bapak sebagai tokoh Orde Baru atau sebagai orang yang pernah terlibat di dalam perjuangan Orde Baru, mungkin bapak bisa menjelaskan keadaan sosial politik, ekonomi dan sebagainya.
- J : Jadi kondisi sosial politik, ekonomi sebelum 11 Maret di DIY ini saya kira berjalan dengan baik, aman dan tenteram. Jadi tidak ada tampak gejolak yang muncul di permukaan, kalau di sebelah dalam atau di bawah saya tidak begitu mengerti karena tahu-tahu terus ada pemberontakan PKI.
- T : Setelah terjadi peristiwa G30S/PKI ini seperti di Yogyakarta Pak Mulyono muncul dengan 1 Oktober dengan Dewan Revolusi. Kemudian gerakan Mayor Mulyono ini dapat digagalkan setelah itu muncul gerakan-gerakan mahasiswa seperti KAMI, KAPPI dan sebagainya. Mungkin bapak bisa menceritakan hal ini.
- J : Jadi pada waktu gerakannya Mulyono itu dari Kodim atau Korem itu kebetulan saya sedang melanjutkan kuliah di IKIP Sanata Dharma dan pada waktu itu saya dipercaya menjadi ketua perpeloncoan. Saya sedang pidato-pidato berdiri di atas meja di depan mahasiswa baru. Nah setelah itu saya disuruh turun diberitahu bahwa sudah ada gerakan baru yang dibawah Pak Mulyono itu yang kebetulan saya memang sama sekali tidak tahu apa itu gerakan tetapi akhirnya memang diberitahu bahwa ada pemberontakan yang dipimpin oleh G30S kemudian diusahakan akan adanya pemerintahan baru, hanya itu yang saya ketahui.
- T : Kemudian bapak tahu gerakan KAMI itu.
- J : Gerakan itu memang akhirnya saya ketahui, KAMI dan KAPPI. KAPPI pada waktu itu menurut pikiran saya ada dua macam yakni ada KAPI dan KAPPI. Kalau KAPI itu hanya Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, kemudian ada Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Dan di DIY dan Yogyakarta pada khususnya gerakan itu dalam rangka tuntutan ingin sekali melahirkan suatu kegiatan kebulatan mewujudkan Indonesia lepas dari cengkeraman begitu. Ya artinya karena pada waktu itu diketahui bahwa pada akhirnya PKI memberontak lalu kesatuan aksi itu berusaha mewujudkan bebas dari pemberontakan yang akhirnya muncul Orde Baru itu.
- T : Mungkin bapak bisa menceritakan setelah itu muncul KAMI, KAPPI, demonstrasi yang antara lain menuntut adanya pembersihan di eksekutif/pemerintahan, di lembaga legislatif maupun di perguruan tinggi.

- J : Ya saya tidak begitu jelas mengerti tetapi yang saya pahami kalau gerakan-gerakan mahasiswa itu menghendaki adanya pembersihan di segala macam bentuk birokrasi baik di pemerintahan, legislatif, perguruan tinggi bahkan di masyarakat juga tetapi saya tidak bisa begitu menjelaskan secara detilnya.
- T : Mungkin di legislatif bapak bisa menceritakan.
- J : Kalau di legislatif karena kebetulan tidak melalui proses pemilihan hanya penunjukan saja. Jadi pada saat itu saya bersama teman yang lain dari Parkindo kebetulan ada 3 orang, kemudian pada saat itu sudah dibagi dua atau anggota DPR yang berasal dari partai. Kemudian ada lagi anggota DPR yang dari Golkar tetapi Golkar yang terakhir itu dalam pengertian sekretariat bersama Golkar bukan dari partai-partai. Mungkin juga dia pernah kebetulan di partai atau orang partai jadi diklasifikasikan menjadi Golkar bukan partai seperti sekarang ini. Dan itu waktu memang anggota dewan anti PKI itu memang luar biasa artinya memang sadar benar bahwa PKI itu selama kurun waktu kemerdekaan memang berusaha menjerumuskan dan mencari kekuasaan ingin sekali menguasai pemerintahan di Indonesia ini. Pada waktu itu saya menganggap Bung Karno sebagai Presiden itu berusaha merangkul sehingga melahirkan konsep golongan agama, nasionalis, satu lagi komunis yang kemudian dinamakan Nasakom tetapi akhirnya dipersatukan lagi menjadi "gotong royong" itu.
- T : Jadi bapak sebagai anggota DPRDGR Tingkat II Kotamadya sebelum munculnya G30S/PKI.
- J : Bukan, pada akhir 1967.
- T : Jadi sesudah diadakan pembersihan.
- J : Ya sesudah pembersihan.
- T : Bapak sebagai anggota DPRDGR Tingkat II, mungkin bapak bisa menceritakan hasil-hasil dari kerja DPRDGR seperti undang-undang atau peraturan-peraturan pak.
- J : Jadi yang jelas peraturan daerah yang waktu itu juga menjadi polemik itu adalah munculnya peraturan daerah mengenai struktur organisasi seperti RT/RK. Pada waktu yang itu menjadi polemik adalah mengenai syarat-syarat untuk menjadi pengurus disyaratkan bertakwa itu konotasinya adalah konotasi Islam pada waktu itu. Lalu produk-produk yang lain dari DPRDGR pada waktu itu adalah bahwa pemerintahan Kotamadya Yogyakarta kantornya ini tersebar di banyak tempat. Ada yang di Kepatihan, Ngabean, jalan KHA. Dahlan dan sebagainya lagi. Lalu secara berani DPRD Kotamadya Yogyakarta bersama Pak Walikota Sujono AY berusaha membuat satu pusat pemerintahan lalu yang sekarang berada di Balaikota Timoho.

Itu adalah sebetulnya hasil perjudian yang pada waktu itu dilaksanakan oleh DPRDGR dengan cukong-cukong dari luar, yang dari dalam itu hanya Onggohartono, ada Sutikno segala macam itu. Dan itu ternyata bisa diwujudkan dalam banyak hal misalnya pembangunan SD, pengerasan jalan, pembuatan Shopping Centre yang ada sekarang dan beberapa buah ... (kurang jelas) ... kemudian yang paling besar membuat gedung DPRD di Timoho dan Balaikota secara umum. Dan kemudian Balaikota itu yang tidak seluruhnya dari hasil perjudian tetapi sebagian terbesar adalah dari hasil perjudian itu. Ini merupakan prestasi besar karena pada saat itu pemerintah kota bersatu menjadi satu tempat di Balaikota Timoho itu. Lalu saat-saat terakhir memang bahwa perjudian itu akhirnya dihapus, tetapi saya ingat persis pada saat itu ada pro dan kontra mengenai usulan pembangunan dalam artian karena dananya diambil secara inkonvensional dari perjudian sampai pada saat itu ada gerakan mahasiswa, gerakan ini dan gerakan itu yang menentang. Namun demikian pak Walikota Sujono AY itu berhasil memasukkan ada yang dari laskar, mahasiswa, golongan keras dalam tindakan dan omongannya itu untuk bisa diikutsertakan menjadi petugas keamanan disana sehingga bisa berjalan dengan mulus. Itu sesuatu yang sangat terkesan di hati saya. Lalu perjudian itu sendiri diurus oleh Bupenda (Badan Usaha Pembeayaan dan Pembangunan Daerah). Saya kira itu pak yang paling berkesan.

- T : Yang dimaksud golongan keras tadi mungkin dari partai.
- J : Kalau dari partai malah saya kira tidak karena itu sudah diputuskan oleh DPR. Memang golongan keras itu ada salah satu anggota partai itu waktu saya lupa namanya yang mengadakan gerakan di Senisono tetapi saya lupa itu.
- T : Tadi saya lupa pak mengenai partai-partai yang ada di DPRDGR Kotamadya itu.
- J : Itu waktu adalah PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, NU, PSII pokoknya ada 10 partai itu. Muhammadiyah ada sendiri waktu itu. Golkar tidak ada.
- T : Kalau sekber Golkar.
- J : Kalau Sekber Golkar itu ada sendiri.
- T : Tidak masuk di DPRD.
- J : Sekber Golkar itu dia mengatur diri sedemikian rupa sehingga ada wakil dari mana-mana misalnya dari Kespekri ada yang dari Kepolisian, dari tentara biasa, dari organisasi mahasiswa.
- T : Tetapi punya wakil ya pak.
- J : Ada wakilnya.

- T : Namanya tetap sekber Golkar.
- J : Ya, jadi Golkar itupun tempat duduknya dipisah. Kami duduk berhadapan-hadapan karena waktu itu masih di jalan Diponegoro di sebelah barat Jefferson yang kantor itu hanya kecil saja sudah diatur sedemikian rupa berhadapan-hadapan. Di sebelah barat partai-partai, di sebelah timur adalah dari Golkar. Sudah menyatakan Golkar waktu itu tetapi sebenarnya Sekber Golkar.
- T : Mungkin bapak bisa menceritakan mengenai UU No.5/1974.
- J : Mengenai apa itu ya.
- T : Mengenai Pokok-pokok Pemerintahan daerah.
- J : Saya tidak begitu menguasai.
- T : Sebenarnya yang dimaksud Orde Baru itu apa pak.
- J : Jadi Orde Baru itu sebetulnya suatu tatanan baru yang berbeda dengan tatanan yang lama. Yang lama disebut Orde Lama kemudian yang baru disebut Orde Baru. Ini supaya semangatnya itu merupakan semangat baru, tatanan baru, iklim dan suasana yang baru. Ya pokoknya berbeda dengan yang lama. Pada saat itu orde ini sudah mulai kelihatan bahwa merupakan orde pembangunan. Jadi membangun di banyak tempat, di bidang sosial, politik, budaya maupun fisik. Infrastruktur dalam banyak hal.
- T : Setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret pak ini kemudian oleh Pak Harto artinya pemegang Surat Perintah Sebelas Maret, kemudian pak Harto melakukan beberapa tindakan antara lain pembubaran PKI ya pak ya, mungkin bapak bisa menceritakan keadaan di Yogyakarta setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret.
- J : Sesudah Perintah 11 Maret dengan pembubaran PKI memang pengurus-pengurusnya melarikan diri tetapi terus saja dikejar karena kekejaman-kekejaman itu maka masyarakat Yogyakarta ada yang mati secara tidak tahu, ada yang hilang, yang jelas tidak kembali lagi ke rumah. Jadi pemerintahan di Yogyakarta pada saat itu memang orang akhirnya kurang berani keluar akan tetapi pada saat itu di Yogyakarta ada satu kegiatan dimana pemuda, pelajar, mahasiswa, masyarakat itu dilatih kemiliteran selama satu bulan lebih oleh tentara yang pada waktu itu dikomandani kalau di DIY oleh Sarwo Edhi.
- T : Kalau dulu namanya Hansip atau apa.
- J : Wah saya agak lupa namanya. Dan mereka yang ikut itu mendapatkan piagam bahkan juga dilatih menggunakan senjata, dilatih penyerangan dan sebagainya ini lalu sampai ke Ketawang. Jadi Kutoarjo ke selatan itu dilepaskan jalan kaki masuk ke Yogyakarta pada saat pembubaran itu.

- T : Mengenai munculnya kelaskaran di Yogyakarta pak waktu itu munculnya Surat Perintah 11 Maret lalu muncul demonstrasi-demonstrasi yang tadi telah diceritakan adanya kelaskaran-kelaskaran setelah gugurnya Aris Margono. Bagaimana pak pendapat bapak setelah munculnya kelaskaran pada waktu itu.
- J : Jadi munculnya kelaskaran untuk sementara memang dianggap positif karena dia ikut serta dalam apa namanya maksud lebih suksesnya Orde Baru meskipun pada awalnya itu kelihatannya memang masih merupakan kelompok minat, kalau mengatakan “kelompok minat” ini tidak hanya untuk kepentingan sementara pada saat itu tetapi dengan maksud secara nasional bisa ikut ambil bagian dalam perjuangan negara Indonesia dalam hal ini di DIY, itu pak.
- T : Apakah atau mungkin bapak tahu waktu terjadi demonstrasi yang mengakibatkan gugurnya Aris Margono.
- J : Nah itu saya yang tidak begitu jelas karena tahu-tahu hal ini sudah terjadi begitu.
- T : Bapak mungkin bisa menceritakan juga mengenai keadaan sosial politik, ekonomi sesudah masa Orde Baru artinya mungkin dari pengalaman bapak sebagai wakil rakyat baik itu di tingkat II maupun I sejak lahirnya Orde Baru sampai menjelang reformasi.
- J : Ya, jadi untuk sementara saya mengatakan bahwa secara sosial, ekonomi itu sudah bisa tertata berlangsung dengan baik begitu. Tapi apa yang kelihatan itu adalah yang kelihatan di permukaan karena bagian bawah ini saya tidak tahu, kesejahteraan saya kira juga tidak begitu mengecewakan tetapi karena ini merupakan orde pembangunan maka disana-sini terjadi kesenjangan-kesenjangan sampai pada akhir menjelang reformasi itu dicanangkan itu ada 25% rakyat Indonesia yang menderita kemiskinan. Tapi ternyata kemiskinan yang sekarang mencapai  $\pm$  30%. Secara sosial ekonomi memang baik dari sisi hukum penguasa birokrat itu nampak sekali berambisi untuk bersungguh-sungguh berkuasa dan itu yang bisa dilihat adalah dari kalangan ABRI yang kalau ada kesalahan sedikit dari masyarakat atau dari rakyat atau dari pers atau dari siapapun maka birokrat itu akan segera mengambil tindakan. Oleh karena itu pada saat-saat itu kebebasan pers, kebebasan bicara memang berkurang tetapi secara umum saya merasakan sebagai sesuatu yang baik. Kalau saya mengatakan sesuatu sebagai yang baik itu artinya pada saat itu belum ada pembandingnya. Kalau dibandingkan dengan keadaan sekarang maka sekarang ini

kebebasannya sangat bebas malah kadang-kadang kebebasan itu tidak terkendali. Jadi kebebasan itu bukan merupakan kebebasan yang bertanggung jawab karena ada pertikaian antar suku, antar kampung dan sebagainya. Meskipun pada saat jaman Orde Baru itu juga sudah muncul SARA. Itu mungkin yang bisa saya ketahui.

- T : Kembali lagi ke belakang pak, bagaimana pengaruh dualisme kepemimpinan nasional di DIY. Maksud saya dualisme kepemimpinan waktu itu ada yang menyatakan Tap MPRS IV/1966 ini Presiden Sukarno juga masih sebagai Presiden tetapi Pak Harto sebagai pemegang Surat Perintah 11 Maret itu juga punya kekuasaan, beliau bisa membentuk kabinet. Ada dua kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto di Yogyakarta bagaimana pak.
- J : Saya tidak begitu mengerti karena tidak begitu terasa apalagi kalau rakyat biasa "*mbuh ra weruh*".
- T : Bagaimana pelaksanaan demokrasi di DIY pada masa Orde Baru.
- J : Saya rasa berlangsung dengan baik terhadap pelaksanaan demokrasi bahkan tidak menimbulkan gejolak yang berarti dan hal ini sangat terpengaruh karena Yogyakarta sebagai daerah istimewa itu panutannya dalam hal ini adalah Sri Sultan dan pada waktu itu masih Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai pengaruh yang kuat dan besar. Jadi Sultan itu mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat DIY termasuk pemerintahan di daerah.
- T : Mengenai fusi partai-partai politik di Yogyakarta pak.
- J : Fusi.
- T : Ya kalau di Yogyakarta memang ada beberapa partai kemudian menjadi satu.
- J : Jadi kalau fusi partai itu waktu dari 10 partai menjadi 3 partai.
- T : 10 partai ini mulai tahun berapa pak.
- J : 10 partai itu waktu DPRDGR itu mulai kemudian menjadi 3 partai itu tahun 1971. Tahun 1971 itu muncul menjadi PDI, PPP lalu Golkar. Dan Golkar itu ternyata merupakan kelanjutan Golkar yang di jaman DPR itu kelanjutan dari Sekber Golkar. Partai-partai yang ada di PDI itu adalah PNI, Parkindo, Katolik, IPKI terus satunya lagi adalah Murba. Kemudian yang partai-partai Islam ada Muhammadiyah, NU ada ini ada itu ke PPP. Golkar itu sendiri.
- T : Jadi 1972 partai-partai itu sudah fusi.
- J : Sudah menjadi 3 partai.
- T : Tadi saya agak lupa pak mengenai susunan DPRD Tingkat II ketuanya.
- J : Ketuanya adalah Pak Hertoq. Pak Hertoq itu dari Golkar, kemudian dari PNI itu Pak Sukarno, dari Parkindo itu pak David Sulistianto, dari Partai



Katolik siapa itu saya agak lupa, kemudian dari NU itu Sudaryono, bukan tetapi anu Drs. Nourzaman dari IAIN. Ini saya ingat itu, dari PSII Yaas Wijayakusuma.

- T : Kemudian untuk Tingkat I mungkin bapak tahu.
- J : Tingkat I yang pertama itu dari Golkar namanya siapa ya rumahnya di Baciro sini (sambil tertawa) ingatan saya agak jelek.
- T : Ya Pak Gerson itu.
- J : Anu ini yang waktu DPRDGR kurang begitu tahu saya, pak Gerson itu yang dari Parkindo.
- T : Ini pak mengenai pendapat artinya ini muncul setelah terjadi masa reformasi ini bahwa Supersemar itu merupakan perebutan kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno, ini bagaimana menurut bapak.
- J : Saya merasa memang begitukarena saya pernah mendengar siaran radio waktu itu kalau tidak dari Amerika itu dari BBC London bahwa sebetulnya ada skenario dari Pak Harto ingin merebut kekuasaan. Dan saya kira merupakan Supersemar kalau murni surat perintah tentunya Bung Karno juga akan berusaha untuk menyelamatkan keluarganya tetapi hal ini tidak terjadi justru keluarganya itu makin lama makin terpojok dan dibatasi dalam banyak hal, baik dalam kegiatan politik maupun dalam perjalanan ke luar negeri. Jadi itu merupakan suatu rekayasa betul menurut hemat saya karena yang saya dengar sebetulnya pada waktu siaran saya lupa (tidak jelas) atau BBC itu waktu sebetulnya malah Pak Harto itu ngomplot sama PKI. Itu yang saya dengar.
- T : Ya jadi pada waktu itu memang belum berani ya pak.
- J : Ya belum berani dan saya mendengar juga ada desertasi orang mau mengambil doktor menyebutkan seperti apa yang saya katakan akhirnya tidak berhasil mengambil untuk memenangkan desertasinya sehingga tidak bisa menjadi doktor.
- T : Dan pendapat bapak tentang pengertian bahwa agama yang dikaitkan dengan politik.
- J : Nah sebetulnya itu salah karena agama itu mestinya lepas dari politik. Jadi kalau agama dan politik itu menjadi satu maka ada benturan-benturan sudah barang tentu antar agama karena tuannya itu adalah politik. Jadi agama itu selalu di bawah politik atau agama menjadi dipolitisir dan hal ini menjadi tidak benar apalagi sekarang ini muncul gerakan-gerakan yang selalu dilabeli agama tertentu dalam hal ini saya mengatakan terus terang Islam.
- T : Bagaimana pendapat bapak tentang agama sebagai simbol.
- J : Ya ... Jadi simbol-simbol agama itu sebaiknya ada perdamaian begitulah

jangan sampai misalnya bendera ada gambarnya bintang bulan terus di bawahnya dikasih pedang karena lambang-lambang yang demikian akan menimbulkan kekerasan. Jadi simbol-simbol itu hendaknya merupakan simbol-simbol yang menyejukkan masyarakat bukan merupakan simbol yang memancing masyarakat seolah-olah ada konotasi ingin perang. Kita kan bisa melihat terutama di jaman kampanye itu ada bendera-bendera yang lambangnya itu kan kekerasan entah palu, pedang, lha ini ndak benar.

- T : Jadi ini kita kembali ke masalah demokrasi terutama mengenai pemilu, setiap kali diadakan pemilu terutama pada masa-masa kampanye seperti yang bapak katakan tadi itu selalu terjadi bentrokan-bentrokan bahkan ada yang jadi korban. menurut bapak bagaimana cara supaya semacam ini tidak terjadi.
- J : Jadi itu sebetulnya dalam hal ini Kepolisian. Itu harus bersikap netral tidak memihak lalu harus berdiri di atas kaki-kaki sendiri supaya kalau ada kejadian-kejadian itu ditindak dengan benar. Kalau jaman dulu waktu Orde Baru memang aparat itu hanya memenangkan satu golongan pokoknya golongan tertentu. Aparat harus benar-benar bersih dalam tindakannya, nah oleh karena itu ABRI maupun Polisi sebetulnya tidak perlu memilih.
- T : Kemudian pada masa Orde Baru setiap kali menjelang pemilu ini para menteri pejabat negara ini langsung terjun sebagai tokoh politik dan ikut kampanye, ini bagaimana pak.
- J : Ya itu sebetulnya tidak benar kalau dia sudah menjadi menteri seharusnya melepaskan baju kepartaiannya pada saat kampanye dan dia harus berdiri sebagai menteri seutuhnya atau untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk pemilu yang akan datang seharusnya juga demikian. Sayang sekali bahwa sekarang ini masih ada menteri maupun pejabat Presiden yang tetap menjadi ketua partai.
- T : Meskipun waktu terjun ke politik, berkampanye itu sudah cuti. Kalau cuti bukan lagi tugas menteri maupun pejabat negara.
- J : Sebetulnya kalau ikut cuti itu hanya istilah saja tetapi orang lain masyarakat awam terutama masih tetap tidak bisa membedakan antara cuti maupun dia berfungsi benar karena nanti pada masa kampanye kan cuma sebentar. Jadi cuti itu itu cuma cuti bohong sebetulnya, itu tidak benar jadi harus betul-betul bebas. Sekarang kalau sudah jadi menteri, jadi presiden lepaskan itu kepartaian. Jadi tidak lagi bersuara sebagai partai tertentu demikian betul-betul netral.
- T : Bapak bisa menceritakan faktor-faktor munculnya reformasi di DIY.
- J : Ya, faktor-faktor munculnya reformasi ini sulit untuk saya bisa mengatakan,

munculnya itu secara nasional sehingga apa yang terjadi di daerah lain itu akan juga terjadi di Indonesia apalagi di era komunikasi seperti sekarang ini baru yang terjadi diluar negeri sudah terjadi juga di DIY dan reformasi yang ada di DIY bisa berlangsung dengan tertib dan baik. Sekali lagi karena kita di DIY mempunyai panutan baik Sri Sultan maupun dari Puro Paku Alaman itu dimana masyarakat yang biasa juga mengatakan golongan bawah ya tapi masyarakat ... itu bahwa orang-orang Kraton memang sungguh-sungguh orang yang dianut (diikuti).

T : Bapak bisa menceritakan ini peristiwa 20 Mei 1998 *pisowanan agung* di Alun-alun Utara.

J : *Pisowanan Agung* itu merupakan *pisowanan* yang sungguh-sungguh luar biasa dimana masyarakat DIY itu bisa tumplek bek di Alun-alun itu waktu. Bahkan sudah ada satu titik yang memang diatur oleh masyarakat berangkatnya dari mana, lewat mana dan masyarakat di sepanjang jalan yang menuju ke Alun-alun itu sudah menyiapkan makanan dengan sukarela, tidak ada perintah, tidak ada dana yang mereka terima. Tetapi saat itu masyarakat di Malioboro misalnya hampir ditiap toko-toko itu menyediakan minuman dan makanan lalu orang yang jalan pada waktu menuju ke Alun-alun maupun pulang tidak kehausan, tidak kelaparan. Ini merupakan sesuatu yang istimewa yang cirinya tersendiri yang tidak bisa dilihat barangkali oleh masyarakat di luar DIY dan pengaruh dari Sri Sultan sendiri apa yang dikatakan meskipun tidak banyak tetapi justru menyejukkan gitu lho.

T : Kenapa pak kok rakyat Yogyakarta masih patuh pada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam VIII pada waktu itu padahal sekarang itu jamannya sudah berbeda dengan dahulu, apa beliau itu punya kharisma atau punya sesuatu.

J : Ini menyangkut budaya yang dalam hal ini budaya Jawa, jadi sifat Sri Sultan dari dulu yang I sampai X sifat kebapakannya itu sangat kuat dan masyarakat Jawa rupa-rupanya sejak dari jaman dahulu sudah merasa bahwa ini memang merupakan suatu yang harus ditanamkan untuk menjaga apa ya supaya tidak terjadi gejala. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara jelas tetapi ini merupakan budaya Jawa yang sifatnya apa ya begitulah saya tidak bisa menjelaskan.

6. Nama : Y. Sugito Suwartono, SE  
Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 10 Agustus 1944  
Jenis kelamin : Laki-laki

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tugas/jabatan dalam perjuangan | : - Pengurus Partai Kristen Indonesia Yogyakarta<br>- Pengurus PDI Sleman<br>- Anggota DPRD Tingkat II Kab. Sleman (Tahun 1987- 1997)                                                      |
| Jabatan sekarang               | : - Pensiunan Pegawai Lembaga Dan Pengaderan Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa Dan Gereja Kristen Indonesia DIY dan Jawa Tengah<br>- Lurah Desa Giri Asih, Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul |
| Alamat                         | : - Jalan Puntodewa 150, Karangjati, Banguntapan Kab. Bantul<br>- Giri Asih, Kecamatan Purwosari, Kab. Gunungkidul                                                                         |
| Wawancara dilaksanakan pada    | : Minggu, 21 Juli 2002                                                                                                                                                                     |
| Tempat wawancara               | : Jalan Puntodewa 150, Karangjati, Banguntapan, Kabupaten Bantul                                                                                                                           |

### **Materi**

Pada hari Minggu, 21 Juli 2002 mengadakan wawancara dengan Bapak Sugito Suwartono dirumahnya.

T : Nama lengkap bapak

J : Y. Sugito Suwartono

T : Tempat tanggal lahir

J : Gunungkidul, 10 Agustus 1944

T : Jenis kelamin

J : Laki-laki

T : Jabatan bapak sebelum pensiun

J : Sebelum pensiun

T : Ya, sebelum pensiun

J : Pertama kali menjadi pegawai pada Lembaga Pembinaan dan Pengaderan Sinode (LPPS) Gereja-Gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, dari tahun 1966-1999. Selama saya bekerja di LPPS tadi saya aktif di partai politik di PDI pada waktu itu belum PDI-P. Sejak tahun 1973. Tahun 1973 karena fusi partai-partai ada 6 partai, PNI, IPKI, Partai Katolik, Partai Kristen dan lain-lain, maka kami sebagai anggota Parkindo (Partai Kristen Indonesia) ikut ke dalam fusi. Pada tahun 1987 saya

mendapat kesempatan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman sampai tahun 1997.

T : Sekarang jabatannya

J : Setelah pensiun saya sebetulnya sudah apa menikmati masa tua ya untuk 55 tahun saya pensiun, tetapi oleh masyarakat desa di Gunungkidul, saya dijagokan untuk menjadi kepala desa yang sekarang namanya lurah desa dan ternyata oleh masyarakat saya dipilih. Kira-kira 76% masyarakat memilih saya. Sekarang saya menjadi Lurah Desa Giri Asih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sudah 3 tahun. Sejak tahun 1999.

T : Alamat di desa

J : Giri Asih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.

T : Kalau alamat di sini

J : Jalan Puntodewa 150, Karangjati, Banguntapan, Bantul.

T : Kami ingin menanyakan mengenai tadi bapak menceritakan tentang fusi. Bapak aslinya dari Parkindo, mungkin bisa menceritakan mengenai fusi itu mulai kapan proses fusi itu di DIY.

J : Fusi itu terlaksana secara historis *de yure* dimulai 10 Januari 1973 tetapi proses itu beberapa tahun sebelumnya kelompok-kelompok di DPR itu kan masih 10 partai pada waktu itu. Nah ternyata dalam kenyataan pada waktu itu ada kemiripan partai-partai yang berlabel agama atau partai-partai yang memperjuangkan agama. Ada partai-partai yang memperjuangkan negara kebangsaan. Nah Parkindo sendiri meskipun partai Kristen tidak pernah memperjuangkan agama Kristen seperti partai agama Islam, jelasnya begitu. Sehingga di Indonesia yang masih ada 10 partai diseyogyakan istilahnya masih ada unsur-unsur paksaan menjadi 3 partai. Golkar sendiri itu gabungan dari kelompok-kelompok karya yang disitu juga ternyata lebih nasionalisme dan kebangsaan. Lalu PPP yang fusi dari partai-partai Islam. PDI yang tadi di depan saya mengatakan itu fusi dari beberapa partai yang lebih pada nasionalisme. Nah tadi dipertanyakan mengenai latar belakang ya ini untuk jaman politik antara partai-partai yang bemuansa keagamaan dan partai-partai yang berkehendak bahwa nasionalisme kebangsaan itu tetap ada di Indonesia. Sejarahanya ya Orde Lama itu ada partai-partai agama, ada partai-partai nasional dan pada waktu itu TNI/ABRI belum masuk. Tetapi dengan hadirnya Golkar ada kesempatan dari teman-teman TNI/ABRI yang sudah pensiun itu bisa masuk disana karena Sekretaris Bersama Golkar sendirilah yang mendirikan dari kalangan TNI. Nah itulah pak yang menjadi latar belakang fusi itu.

T : Kemudian untuk lahirnya PDI itu sendiri pak, mungkin bapak bisa

menyebutkan tokoh-tokohnya.

- J : O ya PDI yang gabungan dari beberapa partai tadi, saya antara lain melihat ada Pak Kusnaeni dari PNI, Pak Abdul Majid lalu Pak Sunawar Sukowati, ada Pak Harjanto yang selanjutnya yang muda-muda ada Pak Suryadi, Bu Mega, Pak Taufik. Itu sebelum menjadi PDI-P mereka adalah orang-orang PDI semua. Lalu yang dari Kristen kami lihat ada Pak Sabam Sirait, Pak Simorangkir, Pak Panggunan dan itu sebelum Pak Sindu ada Pak Yohanes Wemena dan sebagainya. Yang Katolik itu Pak Dakosta, Pak Niko Daryanto. Di Yogya itu Pak Binu, Pak Basuki lalu yang Murba itu Pak Jon Paka, Maransi atau siapa itu saya kurang tahu. Lalu yang IPKI tidak begitu tahu. Di Yogya ini ada Pak Vikson, Pak Hasan (alm), Pak Notosukarjo, Pak Sutarjo Suryoguritno. Yogya yang Parkindo itu ada Pak David Sulistianto (alm), Pak Gerson, Pak Kemi lalu ada Pak Drs. Suharjo (alm), Pak Suparmadi dari Sleman, dari Kulonprogo itu Pak Harjo Waluyo, dari Gunungkidul itu Pak Mukarto lalu Pak Sugaib (alm), ada beberapa nama saya agak lupa.
- T : Kemudian dari PNI
- J : Dari PNI yang Yogya itu Pak Notosukarjo (alm), Pak Sukarno (alm), Pak Sutarjo Suryoguritno yang sekarang masih ada lalu Pak Drs. Suharto lalu dari Bantul itu Pak Pujo Martono, dari Kulonprogo ada Santosa, dari Sleman ada Pak Suharto, Pak Sawabi Siswodiyono, yang dari Gunungkidul Harjono, Pak Sumitro.
- T : Dari IPKI
- J : IPKI-nya tidak banyak dikenal hanya satu orang tetapi lupa saya itu orang Kraton. Di Yogya itu hanya dikenal tiga partai.
- T : Dari Murba
- J : Dari Murba tidak ada
- T : Setelah dari lima partai itu berfusi menjadi PDI lalu apa pak yang menjadi tujuan.
- J : O ya itu hanya klasik saja ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jadi memang tidak dibatasi rakyat yang mana tetapi tujuan umumnya adalah dalam rangka membuat kesejahteraan rakyat dan ini klasik pak banyak sekali panjang sekali tetapi idenya begitu. Jadi cita-cita proklamasi seperti masyarakat yang adil dan makmur itu ikut didalamnya. Saya kira kok sama dengan cita-cita negara.
- T : Kemudian kepengurusannya pak
- J : Kepengurusannya terdiri dari PNI yang di DIY paling banyak, kedua dari Katolik, yang ketiga Parkindo dan yang terakhir itu IPKI. Nah kalau kepengurusan itu 15 orang yang sembilan itu biasanya dari PNI lalu Katolik

dan Parkindo itu hampir sama tiga lalu yang IPKI itu satu. Itu perbandingannya. Jadi pada waktu itu ada semacam *gentlemen agreement* yang tidak ditulis. Di Indonesia itu dari kelima partai yang berfusi itu yang besar dari PNI, Parkindo, Katolik lalu IPKI dan Murba. Ini hasil pemilu tahun 1971 itu di Indonesia begitu diantara 5 partai itu urutannya PNI, Kristen (Parkindo), Katolik, IPKI dan Murba. Nah itu dicerminkan di daerah-daerah tetapi tidak di DIY karena di DIY antara Katolik dan Kristen banyak Katolik sehingga kalau ketua dan sekretaris itu diambil oleh PNI, bendaharanya Katolik lalu Parkindo dan Murba itu anggota saja yang tidak begitu menentukan.

T : Ketuanya waktu itu.

J : Ketuanya Pak Notosukarjo itu beberapa periode. Periode dalam arti lima tahunan mungkin dua sampai tiga periode, lalu Pak Sutarjo Suryoguritno lalu yang terakhir itu dari PDI sebelum PDI-P itu Drs. Suharto.

T : Mungkin bapak bisa menceritakan susunan pengurus periode yang pertama dari PDI.

J : Tidak begitu ingat.

T : Bapak bisa menceritakan pemilu sesudah partai-partai berfusi.

J : Pemilu setelah partai-partai berfusi itu kalau orang sekarang mengatakan itu sandiwaranya. Jadi sudah jelas bahwa rakyat ini kebebasan memilih itu tidak bebas meskipun dikatakan pemilu disini itu pemilu *luber* tetapi toh itu amat mahal. Yang namanya bebas rahasia itu hanya dalam formulasi peraturan saja pak, tetapi kenyataannya pertama kali hari pemilu tidak pernah mengambil hari libur. Nah kenapa tidak hari libur karena pegawai dapat memilih di kantornya. Pegawai-pegawai pada waktu itu kalau tidak Golkar pasti akan mendapat ancaman, bagi yang memang tidak berani betul-betul memang itu semacam tanda bahaya. Pemilu-pemilu yang setelah fusi sampai dengan pemilu yang terakhir sebelum reformasi itu selalu saja kita berjuang artinya saya yang dari PDI itu selalu berjuang agar pemilu itu diselenggarakan pada hari libur dan tidak di kantor. Jadi di tengah-tengah masyarakat dekat kantor itu bisa saja. Tetapi tidak bisa gol dan kenyataannya yaitu bapak tahu sendiri bahwa Golkar itu lebih dari 60% itu baik di pusat maupun di DIY mungkin bapak bisa mengenali ada tekanan-tekanan kepada teman-teman pegawai negeri, keluarga ABRI atau keluarga TNI yang diarahkan kesana. Bahkan saya mendengar di perusahaan di Sumatera yang adik saya bekerja disana, pegawai pabrik itu tidak ada pemilu disana. Jadi pegawai atau pekerja pabrik dikumpulkan ditanya siapa yang memilih atau yang partainya nomor satu itu PPP tidak ada yang *ngacung*, siapa



yang partainya PDI juga tidak ada yang *ngacung* lalu panitia mengatakan “O kalau begitu semua ini Golkar” lalu itu dicoblosi dan itu adik saya mengatakan demikian yang di Sumatera, lalu kalau di Yogya. Kalau di Yogya atau di pulau Jawa mungkin hal yang demikian tidak terjadi tetapi tetap ada tekanan-tekanan. Misalnya orang-orang di desa itu kalau pemilu kan mestinya memilih di desa. Nah itu kalau sampai di desa itu ada rasa kalau ditakut-takuti nanti kamu tidak saya beri KTP, urusan surat-menyurat di desa kamu akan mendapat kesukaran, pada garis besarnya begitu. Saya mengatakan karena saya orang bukan Golkar tetapi kenyataan yang menjadi awal dan pembusukan Golkar orang lama-lama menjadi jenuh tidak senang bahkan saya di Sleman itu sudah *guyon* dengan teman-teman Golkar itu nanti pada suatu saat akan ada bebas Golkar. Jadi orang yang mendapat surat bebas Golkar.

- T : Ini pemilu khususnya di DIY ya pak pada umumnya di Indonesia itu “*luber*” tidak bisa dilaksanakan.
- J : Tidak pak itu hanya semboyan dalam undang-undang aturan.
- T : Kemudian ini pak pelaksanaan demokrasi di DIY pada masa Orde Baru, ini bagaimana.
- J : Demokrasi yang mana. Sekarang ini kita juga mengalami demokrasi apakah demokrasi yang paling kuat atau tidak, sekarang kita masih belajar. Kalau demokrasi pada masa Orde Baru itu saya katakan demokrasi semu karena demokrasi yang sudah diatur sebelumnya tidak ada kebebasan orang untuk menyuarakan isi hatinya. Yang saya alami di DPRD Kabupaten Sleman itu suara fraksi, fraksi itu kan terdiri dari partai-partai yang kadang-kadang sudah distel dulu karena itu kamu hanya boleh ngomong sekitar sekian menit. Jadi antar person anggota itu harus sudah kompak dalam fraksinya “tidak boleh tidak” orang tidak boleh ngotak-atik pendapat orang lain. Jadi semua ikut pimpinan, bisa pimpinan dewan, ketua dan wakil ketua, ketuanya biasanya diambil dari ABRI meskipun ABRI itu tidak ikut pemilu, ABRI itu suaranya kecil mesti menjadi ketua karena apa ini permainannya dengan Golkar. Golkar harus berterima kasih kepada TNI/ ABRI karena yang menggedekan Golkar itu TNI/ABRI. Oleh karena itu *kalenggahan* yang empuk itu mesti diberikan kepada TNI/ABRI. Nah sebenarnya sumber-sumber demokrasi itu disana, seolah-olah demokrasi tetapi sudah diatur. Kami yang pembesar-pembesar partai kadang-kadang ya sudah maunya bagaimana misalnya dalam hal pemilihan Bupati itu jagonya tiga pak tetapi kan tidak pernah lebih dari tiga. Nah dari ketiga itu yang satu pasti akan jadi. Yang dua itu bunga-bunga demokrasi. Itu sejarahnya sehingga semua tahu siapa

yang akan menjadi jago pilihan tetapi kadang-kadang jago yang tidak akan menentang itu mbok tolonglah saya jangan diberi satu suara, berilah dua atau tiga paling tidak empat fraksi yang mencalonkan saya. Misalnya di Sleman itu 45 suara karena 45 anggota. Jago pilihan tadi paling tidak 4 fraksi TNI/ABRI, Golkar, PPP, PDI memberi satu-satu sehingga paling tidak jago pilihan itu mendapat 45 suara. Itu mereka tidak malu tetapi kalau dia sudah dicalonkan hanya dapat satu suara, itu malu. Permainan begitu sehingga masuk di dalam pemilihan bapak nanti harus memilih itu. Kalau ini salah artinya nyimpang misalnya saya mempunyai pilihan yang lain tidak ditentukan itu nanti dicari kira-kira siapa yang membangkang. Ini yang saya alami pemilihan Bupati yang terakhir disitu. Saya oleh ketua fraksi sudah distel. Saya harus memilih itu yang lain harus milih itu sehingga dari 45 itu yang milih jago *belehan* itu 8, yang milih calon jadi itu 37. Itu sudah distel begitu. Apa artinya itu demokrasi kita ukur dengan itu kebebasan orang per orang menyuarakan suara itu. Jadi sama saja bahwa suara hati itu tidak ada artinya, itu demokrasi di jaman Orde Baru.

- T : Apa tidak ada usaha untuk anu pak, misalnya dari PDI sendiri itu dari anggota-anggota fraksi tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menentang.
- J : Ya suasananya belum memungkinkan pada waktu itu. Jadi kalau kita menentang ya di *geguyu*. Meskipun konsekuensinya orang kalau sudah disitu digeguyu ya biasa saja. Pernah saya tentang dan itu berhasil tetapi saya betul-betul diciri oleh teman-teman fraksi TNI/Polri. Di DPR itu kan ada panitia-panitia. Nah kebetulan ada panitia yang harusnya diduduki dari Golkar jadi katakanlah ada panitia 15 yang satunya itu Golkar karena anggota Golkar paling banyak dia mendapatkan kursi dalam jumlah besar. Nah pada suatu saat Golkar itu tambah dua tetapi yang satu diminta TNI, saya pada waktu itu mulai menentang juga. Cara ini kalau dilestarikan akan membuat preseden atau permulaan dari suatu rangkaian yang tidak baik dan itu saya pertahankan, teman-teman saya di fraksi PDI yang mereka diam. Dengan berhasilnya itu saya diberi ucapan selamat oleh pak Bupati. Saya mulai berani karena ya lama-lama kami tidak bisa berdiam diri dengan kamufase kebohongan. Itu yang kami lakukan sudah adaupaya tetapi memang itu belum memungkinkan.
- T : Pak Gito dua periode ya menjadi anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Sleman. Selama dua periode itu produk-produk dari DPRD Tingkat II yang sangat menonjol dirasakan oleh rakyat itu apa.
- J : Produk dari DPRD Tingkat II selama saya menjabat dua periode itu nampaknya tidak begitu ada yang menonjol. Justru ada penonjolan itu

yang betul-betul rekayasa yaitu pada saat otonomi daerah. Sleman kan dipilih menjadi percontohan otonomi daerah. Kami satu hari itu mengesahkan 23 Perda. Itu pekerjaan yang mainan saja karena dalam waktu yang pendek orang harus mempelajari Rakerda itu. Nah itu tidak mungkin menurut saya itu bukan membahagiakan masyarakat Sleman tetapi kerugian pada masyarakat Sleman yang tidak siap melaksanakan otonomi daerah. Pada waktu itu sudah ada percontohan yang akhirnya juga tidak bisa dipakai sebagai contoh untuk daerah Yogya saja karena yang terjadi adalah pekerjaan itu memang diberikan dari atas tetapi *ubarampenya* itu tidak diserahkan, dananya tidak diserahkan sehingga istilahnya itu "*ngeculke sirahe ning nggondeli buntute*". Itu terjadi, itu produk DPRD Tingkat II Sleman yang saya rasakan membohongi rakyat, sehari saya mengesahkan 23 Rakerda menjadi Perda. Yang lain-lain biasa saja karena Perda itu kan biasanya berangkat dari pembaharuan atau revisi dari Perda yang sudah ada. Dikatakan sudah tidak ketinggalan jaman dan sebagainya. Pajak itu hampir setiap 3 tahun diperbaharui dan itu tidak ada yang membahagiakan masyarakat. Lalu yang lain-lain itu apa yang terjadi di pusat diturunkan ke daerah dalam bentuk Perda itu. Jadi kalau pertanyaannya apa yang membahagiakan untuk saya hampir tidak tahu. Justru yangtadi saya katakan 23 Perda yang dibuat dalam sehari.

- T : Ini pak setiap ada pemilu ini mesti ada kampanye tetapi sebenarnya kampanye untuk menarik massa. Kenyataannya dalam kampanye mesti terjadi bentrokan antar partai peserta pemilu. Apa yang menyebabkan terjadinya bentrokan itu.
- J : Menurut saya masyarakat kita perlu belajar yang namanya demokrasi. Kalau terjadi bentrokan itu berarti rakyat belum tahu arti demokrasi. Dalam demokrasi itu dari buku yang saya baca beda pendapat, ada konflik boleh, yang tidak boleh *kerengan*. Namanya *kerengan* itu bukan demokrasi itu otoriter "*poko*". Padahal dalam demokrasi orang harus berpikir adu pemikiran bukan adu fisik. Kalau yang ditanyakan kenapa selalu terjadi bentrokan baik fungsionaris partai atau masyarakat itu karena belum dewasa dalam berdemokrasi.
- T : Menjelang reformasi bapak masih anggota DPRD. Bagaimana menurut bapak keadaan sosial politik, ekonomi maupun budaya di DIY khususnya di Kabupaten Sleman.
- J : Jadi begini pak tadi di depan saya mengatakan bahwa suatu rezim itu suatu saat pasti akan mengalami pembusukan. Nah pada menjelang tahun 1997 itu suasana di Indonesia ini semakin tidak jelas perekonomian kita

yang dikatakan dulu digembar-gemborkan Indonesia akan menjadi salah satu negara NEX apa artinya ekonominya akan lebih baik begitu di Asia termasuk di Indonesia dan sebagainya itu sudah mengalami hal-hal yang tidak wajar. Karena apa Karena terlalu banyak bidang yang dipakai untuk penanaman modal serbaguna itu dipakai untuk memperkaya diri dalam arti tidak membuat investasi, itu yang saya rasakan. Jadi yang diharapkan konsep pertumbuhan ekonomi dari atas ke bawah itu tidak nampak gitu ya karena yaitu apa tidak untuk investasi benar-beneran tetapi lebih banyak uang itu dimainkan ada yang dilarikan keluar negeri. Nah itulah yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi tidak wajar karena hutangnya lebih banyak tidak dipakai untuk membangun kesejahteraan bangsa. Karena perekonomian masyarakat tidak berkembang baik maka kegelisahan itu nampak. Sebab kegelisahan itu berkembang dan ini pasti mempengaruhi politikus, bekerja penuh dengan kegelisahan maka itu betul-betul berpengaruh pada pemikiran politik orang-orang pada waktu itu sehingga kita sudah mulai berpikir orang-orang yang tadinya di dalam juga sudah mulai berpikir lebih-lebih orang-orang diluar sistem sudah siap untuk kapan ini harus berganti. Nah sebetulnya pada pemilu 1997 itu sudah diharapkan tetapi Golkar masih memfosir diri untuk meraih suara. Akibatnya bagaimana pak. Akibatnya kan banyak orang menjadi golput terutama di PDI sudah timbul goncangan-goncangan. PDI 1996 ada kongres Medan menghasilkan kepemimpinan Suryadi, Bu Mega tidak mendapatkan kekuasaan sehingga PDI saja menjadi terbelah itu sangat dirasakan terutama dalam pemilu 1997 dimana massa di bawah Bu Mega itu besar, PDI digemboskan. Padahal yang diharapkan untuk mengimbangi Golkar adalah PDI bukan PPP tetapi PDI sendiri dimainkan oleh eksekutif. Oleh pemerintah dipecah sehingga ada PDI Suryadi dan PDI Mega. Pada waktu pemilu PDI Mega tidak ikut. Nah suara PDI menjadi kecil sekali karena PDI kecil berarti Golkar luar biasa tingginya disamping itu juga PPP mengalami mendapat rejeki pada waktu itu. Nah ini adalah hal-hal yang tidak wajar. Jadi dalam pemilu masyarakat merasa kali ini pemilu tidak menguntungkan saya. Oleh karena saya tidak ikut pemilu lha ini kan tidak wajar. Dalam pemilu harusnya semua orang berlomba-lomba untuk ikut memenangkan partainya. Ini ada sebagian rakyat yang tidak ikut karena kekecewaan permainan dari pada pemerintah. Nah saya kira kalau dilihat dari ekonomi dan politik tentang kebudayaan sama pak. Kebudayaan adalah produk-produk yang dibuat oleh orang maka kelesuan-kelesuan baik perekonomian maupun politik pasti akan mempengaruhi

kehidupan keseharian yang akhirnya akan mempengaruhi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Yogyakarta. Nah Yogyakarta meskipun propinsi yang dipegang oleh Sri Sultan pada waktu itu masih Paku Alam. Paku Alam panjenengan *pirsa* orangnya sudah tua, yang muda-muda di Yogya tidak punya kehendak/kemampuan. Itu yang kami ketahui kalau kami di Kepatihan meskipun pegawai-pegawai nyegat ndak ada yang berani. Sultan X pada waktu itu belum menjadi Gubernur sehingga tadi saya katakan memang masyarakat di Yogya masih menghormati Sultan dan Paku Alam ini tidak bisa tinggal diam manut budaya Yogya saja tetapi terimbas oleh teman-teman yang ada di kota-kota lain di Jakarta, Semarang, Bandung dan sebagainya. Penentangan-penentangan terhadap golongan tua dimulai disana-sini ada demo. Hal yang sangat tidak biasa di dalam budaya Yogya itu kan kalau sudah manut orang tua ya begitulah tetapi disini mahasiswa sudah tidak ambil pusing sehingga disana-sini banyak demo. Tahun 1997 itu puncaknya yang terakhir itu memang demo besar-besaran tanggal 20 Mei 1998 itu saya hadir di tengah-tengah masyarakat di Alun-alun yang dihadiri 9 juta orang dan hari berikutnya Pak Harto lengser. Itu menurut saya suatu wujud daripada frustasinya masyarakat terhadap tatanan yang sudah mapan dalam era yang tertindas. Saya melihat ada perubahan budaya dalam hal ini keberanian masyarakat yang tadinya di Yogya adem ayem menurut pada waktu itu tidak.

T : Lalu bapak bisa menceritakan mengenai peristiwa 20 Mei yang dilaksanakan di Alun-alun karena bapak ikut didalamnya.

J : Saya tidak masuk di dalam Alun-alun, saya hanya di Ngejaman di posnya teman-teman PDI-P disana. Proses sebelumnya atau pagi-pagi sebelumnya itu kita tahu betul bahwa Yogya ini betul-betul digerakkan ada usaha *pisowanan*. Teman-teman yang mengatur itu. Tahun 1998 saya sudah tidak di DPR sehingga keterlibatan saya menjadi kecil. Saya sudah menjadi masyarakat biasa dan juga pada waktu itu pemilu 1997 saya tidak ikut berperan. Saya tidak menjadi anggota DPRD sehingga saya sangat mudah untuk berbaur dengan masyarakat.

Pada hari itu 20 Mei 1998 suasananya kacau tidak ada orang yang masuk dalam barisan terutama golongan muda itu yang masih respek pada Pak Harto. Pak Harto juga dihujat habis-habisan, betul-betul hari itu Pak Harto jatuh di mata masyarakat. Kenapa itu terjadi tadi saya mengatakan bahwa pembusukan itu sudah terjadi lama sehingga kepercayaan itu sudah tidak ada sama sekali. Kita bisa bayangkan Pak Harto itu diangkat menjadi presiden baru kira-kira tanggal 11 Maret 1998 lalu dalam Sidang Umum yang Pak

Harmoko pimpin itu Mei sudah rontok. Ini kalau memang rakyat kita itu masih ya katakanlah separuh tunduk atau sebagian dari pemilih Golkar yang besar itu tunduk saya kira tidak akan runtuh padahal Golkar pada waktu itu mendapat suara yang banyak. Kalau suara banyak itu diceminkan dari kehendak rakyat pasti tidak akan terjadi. Pada Sidang Raya PGI tahun 1994 saya di Irian Jaya ketemu teman dari Nias. Pada pemilu 1992 jelas memilih PDI tetapi berita yang terakhir kayaknya PDI itu tidak ada dan juga teman-teman yang tadinya itu menjadi lurah di daerah Indonesia Timur di Sumbawa Timur yang setelah mereka lepas dari keterikatannya dengan Golkar dan masuk PDI dia cerita bahwa pekerjaan untuk diajak coblosan PDI atau PPP dijadikan Golkar itu biasa. Sehingga saya tadi mengatakan kalau seandainya pemilu 1997 yang Golkar menang besar itu suara riil bukan suara coblosan tadi yang dilakukan oleh beberapa aparat tapi dia tidak terima Pak Harto itu direndahkan sehingga kita tahu pada tanggal 20 Mei 1998 orang tidak antusias lagi dengan Pak Harto. Sri Sultan H.B X dan Paku Alam VIII menegaskan bahwa ia tetap dipihak masyarakat (rakyat) ya semacam tidak menampik jabatan pada waktu itu. Itulah yang membahagiakan masyarakat di Yogya oleh karena itu setelah peristiwa itu sultan serta merta diminta menjadi gubernur yang waktu itu dikukuhkan oleh Presiden Habibie (bukan Pak Harto lagi). Presiden Habibie mengangkat sultan ini menjadi gubernur yang sekarang akan berlanjut dengan usul Undang-Undang Otonomi daerah DIY.

T : Sebenarnya apa pak tujuan dari reformasi itu.

J : Ya tujuan reformasi itu ingin mengembalikan tatanan pemerintahan kita yang berbangsa dan bernegara kepada UUD 1945, sebenarnya ini *njejekke* dalam arti UUD 1945 itu sendiri kan undang-undang sementara yang isinya kalau Pak Harto mempelajari kan menurut saya kok gitu. Kenapa presiden yang itu adalah kepala negara dalam arti pemegang eksekutif pada suatu saat dia memegang yudikatif (pengadilan), memberi ampun, abolisi dan sebagainya. Suatu saat dia berpegang seperti legislatif. Kalau undang-undang disyahkan bersama-sama dengan DPR tapi yang dibawahnya aturan-aturan yang di bawah kadang-kadang DPR sendiri tidak mampu, apakah itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, apa itu Kepres itu kadang-kadang melanggar undang-undang tetapi DPR sendiri tidak mempunyai kemampuan. Nah melihat tatanan yang demikian ini salah menurut UUD 1945 dimulai jamannya Bung Karno. Bung Karno itu sudah mosak-masik ketua MPR kok menjadi menteri itu kan ya .... Itu yang menjadi apa kehendak dari reformasi yang sekarang sudah berjalan tetapi masyarakat itu sedang



belajar demokrasi. Ternyata juga ada yang menghendaki reformasi ini sudah kebablasan artinya apa bahwa kita ini masih mempunyai orang-orang produk lama dan orang-orang produk baru yang belum klop. Jadi kalau ada konflik harus dipecahkan dengan formulasi baru, itu yang belum kita temukan, semua masih model lama.

T : Kalau begitu reformasi sekarang ini yang tadi dikatakan Pak Gito kebablasan ya pak. Jadi ini artinya sudah menyimpang.

J : Bukan kebablasan. Ada orang yang mengatakan kebablasan.

T : Jadi ini sudah menyimpang dari tujuan.

J : Ya artinya betul yang namanya politik kan bukannya menyampaikan ide supaya ide itu mempengaruhi dan orang yang terpengaruh itu ikut. Nah orang yang mengatakan bahwa kebablasan itu dia mungkin masih berpikir lama tetapi belum menemukan yang baru. Lalu ini ada ide baru yang tidak cocok dengan dia itu lalu mengatakan pada senang, memang ini perlu pembelajaran secara langsung. Jadi kadang-kadang orang yang mempunyai ide untuk amandemen UUD itu juga tidak dari hati yang murni. Mereka berangkat dari kehendak orang itu sehingga akan mengembalikan kehendak dari kelompok lain. Ini yang masih yang sekarang saya baca demikian. Jadi misalnya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ada yang mengatakan bahwa kalau ini dilakukan terutama yang mengatakan kebablasan itu lha kok malah kita tidak mengkrengan saja. Ada yang mengatakan tidak akan pernah kita di desa biasa memilih kepala desa, memilih dukuh. Juga ada tempat-tempat yang memilih kepala desa saja krengan itu biasa bahkan ada yang sampai dibunuh. Nah kita bisa bayangkan wakil presiden ini agak lucu sebenarnya mengatakan bahwa ini kebablasan tetapi juga ada orang yang mengatakan ini tidak kebablasan mengadakan amandemen yang keempat ini yang di dalamnya ada pemilihan langsung itu justru kita akan tidak pernah maju. Konflik itu selalu ada, padahal saya tadi sudah mengatakan di depan ada bukti yang menyebutkan bahwa dalam demokrasi konflik itu dilegalkan atau tidak pernah ada. Menurut saya ya saya belum bisa menyampaikan dengan betul. Apa benar kebablasan atau *apa sing ngomong* kebablasan itu takut nanti tidak dapat posisi. Kalau teman saya dari Parkindo sekarang ini mengatakan amandemen itu okelah tetapi jangan sekarang rakyat kita belum belajar demokrasiya belum pas. Ya itu kalau langsung apa tidak *kerengan*, itu pak dokter selalu mengatakan pada saya dan *weling* pada pak Katin itu. Amandemen itu memang kita cita-citakan tetapi mungkin lima, tujuh pemilihan yaitu jangka panjang bagi orang yang mau menanti sekarang ini sudah ndak cukup. Ini yang perlu kita



perhatikan.

T : Pelaksanaan reformasi di Yogyakarta.

J : Pelaksanaan reformasi di Yogyakarta ini yang saya ketahui dalam hal ini saya sudah ikut terlibat di dalam pemerintahan itu kita sudah memulai melaksanakan UU No.22/1999 tentang "Pemerintahan Daerah". Banyak perubahan-perubahan antara lain sekarang di tingkat propinsi itu pelaksanaan pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang itu dan di Kabupaten, di desa sekarang ada hal yang sangat baru ada BPD, DPR-nya desa. Juga sekarang ini suasana hubungan antara eksekutif dan legislatif itu menurut saya legislatif lebih dominan daripada eksekutif. Jaman Orde Baru eksekutif itu tidak memainkan peran penting adapun lebih memainkan teman-teman DPR tetapi sekarang nampaknya menjadikan terbalik, DPR lebih kuatlah. Padahal seharusnya tidak harus satu mengalahkan yang lain baik eksekutif maupun legislatif punya peran masing-masing dan itu dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan aturan punya tugas yang sama tetapi sekarang ini nampaknya eksekutif itu sedikit dibawahnya. Ini pasti pengaruhnya adalah pada tinggal legislatifnya. Kalau legislatifnya betul menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan sebagainya tetapi kalau DPRnya yang orang-orangnya tetap orang lama, aturannya baru mungkin malah orang-orangnya itu yang belum pernah bekerja pada jaman Orde Baru sekarang lebih menggila mungkin ini bisa saja membawa suasana ke depan ini menjadi lebih kacau, itu bisa saja.

Jadi definisi reformasi yang terjadi sama dengan Jakarta, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri karena memang suasana jaman kita itu sedang begitu. Karena jaman kita itu *nek ora nganggo duit kasarane* itu juga tidak bisa berjalan. Suara hati yang muncul di dalam tokoh-tokoh negara kita, maksud saya tokoh-tokoh negarawan kita orang kalau sudah jadi anggota DPR itu haruslah orang itu negarawan pak, bukan wakil dari kelompok saja. Jadi negarawan itu *ora ngoyo nggon duit* tetapi pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Kepuasan yang pada waktu saya lakukan itu kalau saya mempunyai paling tidak ide diterima oleh pemerintah. Semua itu senangnya bukan main karena partai politik akan tetap mempengaruhi eksekutif karena kehendaknya. Memang dampak reformasi di DIY yang saya alami sekarang di desa. Di desa itu sekarang ini hampir sama dengan orang yang di kota. Mereka juga melihat televisi, mendengar radio, radio yang sama didengar orang kota. Pengertian demokrasi atau yang berkaitan dengan tidak demokrasi misalnya KKN dan sebagainya orang ke desa itu juga sama. Kadang-kadang yang tidak pas itu proses terjadinya suatu keputusan itu

yang tidak diikuti seperti pengisian lowongan anggota BPD. Terpilih si B tetapi keluarganya anggota BPD, padahal proses sudah dilakukan dengan benar. Proses pada waktu pengisian adalah sosialisasi, pendaftaran, ujian itu juga dilalui dengan benar. Hasilnya tetap si B ini tadi terpilih atau dipilih karena dari hasil tes itu paling baik tetapi karena disini ada teman BPD dianggap saja itu nepotisme. Nah ini efeknya tetapi saya katakan bahwa perlu pembelajaran demokrasi. Yang dinamakan KKN itu kalau saya menjadi pimpinan, saya nyomot istri saya, keluarga saya terus saya dudukkan tanpa proses itu menurut saya nepotisme. Tetapi kalau itu sudah melalui proses yang demokratis begitu meskipun hasilnya saya dengan si B itu famili lalu diriku berhasil tetapi lewat proses menurut saya tidak nepotisme. Ini yang sekarang dirasakan di desa-desa. Nampak itu terjadi di pemerintahan di desa. Seperti pengangkatan direktur Garuda itu kan akhirnya meskipun kakaknya menteri siapa Laksamana Sukardi itu mengikuti proses yang bersih tetapi toh akhirnya *tinimbang sesuk dilihat KKN luwih apik ora*. Lha ini menurut saya dampak yang kurang benar karena prosesnya sudah benar tetapi hasilnya dilihat menurut saya agak *something wrong*, sesuatu yang perlu kita pelajari bersama lalu diberitahukan kepada masyarakat *piye to sing jenenge kolosi*. Kalau pertanyaannyatadi bagaimana pelaksanaan reformasi di Yogya ya saya melihat begitu. Jadi kita belum jelas tahu tentang demokrasi itu menyebabkan yang sebetulnya demokratis dilihat hasilnya saja dikatakan tidak demokrasi.

T : Berarti demokrasi belum terlaksana dengan baik.

J : Betul, kita sedang belajar demokrasi bukan demokrasi itu hanya sesuai dengan apa yang artinya dari rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat bukan itu saja tetapi apakah di dalam proses juga berlangsung dengan baik. Sebetulnya kita masih sangat kecil pengetahuan kita tentang demokrasi dan itu kita rasakan pemimpin-pemimpin kita saja juga acak-acakan seperti di MPR *pada kerengan*. Itu apakah mencerminkan jiwa demokrasi. Kita selalu diberitahu bahwa di dunia barat yang namanya *padu*, debat itu terjadi di dalam ruang, diluar *rangkulan*. Itu menurut saya perlu kita pelajari juga.

7. Nama : Tuti Lukman Sutrisno
- Tempat/tanggal lahir : Solo/ 28 Desember 1946
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tugas/jabatan dalam : - Ketua Yayasan Hari Ibu dari perjuangan tahun 2000

- Wakil Ketua Dharma Wanita UGM
  - Ketua Persatuan Wanita Gajah Mada
  - Pendiri Yogyakarta Internasional School
  - Aktif di Yayasan Kanker
  - Aktivis tentang Gender dan Pembangunan
  - Aktif di Yayasan Asma
- Alamat : Terbansari, Jl. C. Simanjuntak No.65 V,  
Yogyakarta
- Wawancara  
dilaksanakan pada : 11 Oktober 2002  
Tempat Wawancara : Gedung Mandala Bhakti Wanita Tama,  
Yogyakarta

### **Materi**

- T : Nama lengkap ibu?
- J : Tuti Indarsih Lukman Sutrisno
- T : Mulai kapan memakai nama Lukman Sutrisno?
- J : Sejak menikah, tahun 1966
- T : Tempat dan tanggal lahir Ibu?
- J : saya lahir di Solo, tanggal 28 Desember 1946
- T : Bisa tolong diceritakan latar belakang keluarga dan pendidikan Ibu?
- J : Ayah saya Pak Somo Nitiwijaya, bekerja pada Bank Indonesia di Solo. Ibu saya dulunya guru di sekolah seperti SMK di Aisyiah, kemudian jadi ibu rumah tangga. Putranya lima orang, tapi dua meninggal, tinggal saya dan adik-adik saya. Adik saya dua orang, satu jadi Apoteker di Denpasar, yang satunya jadi dosen Arsitektur di UGM. Saya mulai pindah ke Yogya tahun 1964, saya mulai kuliah, masuk di Fakultas Sastra UGM, Sastra Inggris. Menikah dengan Pak Lukman tahun 1966, sekarang punya dua anak, satu laki-laki Agus Lukman, sekarang bekerja di Asia Foundation, kemudian adiknya perempuan dokter Lupitasari, bekerja di Jakarta, cucu saya lima orang.
- T : Tahun 1964 Ibu sudah di Yogya, tolong diceritakan kondisi dan situasi Yogya sekitar tahun itu.
- J : Ya, kan itu situasi yang kemudian diarani Gestapu, jadi saya ke Yogya itu menjelang Gestapu. Waktu itu saya baru berumur delapan belas tahun, saya belum banyak terlibat di kampus. Situasi di kampus saya belum banyak kenal. untuk kegiatan politik ya hanya untuk ikut-ikutan, tapi sebenarnya saya waktu itu sudah hampir masuk CGMI. Tapi lalu sahabat saya bilang

CGMI itu anaknya nakal-nakal, lakau GMNI anaknya lebih kalem-kalem, anteng gitu, lalu saya masuk ke situ. Sudah diterima tapi saya nggak aktif, karena terus disibukkan oleh kuliah dan lagi saya masih wira-wiri Yogya - Solo. Karena baru pertama kali kost, jadi belum nyaman, tiap Sabtu saya pulang ke Solo. rasanya hanya itu saja, saya belum begitu banyak tahu Yogya dan saya hanya ikut organisasi kecil-kecilan, seperti kelompok koor (paduan suara).

T : Bagaimana kalau kondisi sosial ekonomi di Yogya?

J : Berat, beratnya itu gini, dulu itu saya kost itu suruh bawa beras, kalau perempuan 8 kg, laki-laki 10 kg. Saya sendiri membawa 10 kg, karena kan bapak saya mendapat jatah, tapi biarpun begitu saya tetap tidak bisa makan beras, karena berasnya itu dicampur dengan jagung. Terus pada waktu itu ada antri-antri segala, tapi saya nggak ngalami itu. Temen-temen saya ya seperti itu, jadi saya ya enjoy saja, wong semua juga begitu. Ada juga temen saya yang bawa uang, lalu di Yogya dibelikan beras. Tapi berasnya ya yang murah yang nggak enak itu. Dulu kalau temen-temen ngampiri mau kuliah, seperti Mas Kus Hendratmo itu, dia kakak kelas saya tapi dia di sejarah, pakainya yang sepeda jengki hijau ekrek-ekrek itu, tapi kami rukun. Terus kalau situasi politik, ya kita itu hati-hati, takut, piye gitu lho. Tapi pas Gestapunya itu saya pulang ke Solo, Pak Lukman juga, walaupun kami belum menikah, hanya biar aman saja. Ya karena itu tadi, takut yang sesudah saya menikah jadi setelah Gestapu, saya ingat gajinya Pak Lukman itu hanya cukup untuk 10 hari. Lha saya kan diberi baju dan kain-kain batik sama ibu, itu saya jual untuk menutup biaya. Dulu itu dosen-dosen yang dari luar negeri kan pada punya mobil lalu diomprengkan, kalau Pak Lukman itu jadi makelar karcis kereta api. Dulu orang kan nyari karcis kereta api itu susah, lha kebetulan kepala stasiunnya itu temennya bapak, jadi bapak mendapat kemudahan kalau nyari karcis. Bapak juga bantu di CPM, membantu memeriksa tahanan-tahanan. Saya ingat dulu itu di Bulak Sumur, kami kan tinggal disitu, yang punya televisi baru 2 - 3 orang, lha kalau saya ditinggal pergi sama Bapak saya itu dititipke ke tetangga yang punya TV itu. Saya itu juga ingat karena saya ngalami sendiri, pada waktu itu belanja itu nggak pernah lebih dari 5 kg, belanja beras maksudnya. Paling hanya 1 atau 2 kg. Kalau masak telur bebek itu satu lalu di kasih sayuran ya kobis atau apa biar jadi besar. Ya begitulah waktu itu, jadi ya karena semua juga seperti itu, ya biasa saja.

T : Bagaimana dalam bidang politik, setelah ada peristiwa G30S.

J : Waktu itu dalam perpolitikan, karena belum jelas, jadi semua itu pada hati-

hati. Yaa, PKI nya sih jelas, tapi yang lain-lain belum jelas, jangan-jangan nanti PKI nya masih. Terus situasinya juga belum stabil. Pak Lukman itu kan masih membantu di CPM, lha kemana-mana itu bawa pistol, bahkan nonton bioskop juga bawa. Pistol itu dari pinjaman dari CPM. Waktu itu komandannya Pak Mus Subagya, beliau yang menikahkan kita, karena dulu kita kan ... (tidak jelas). Kami termasuk pengagum Bung Karno, tapi ya gimana pada waktu itu ya jadi takut juga, ya karena belum menentu itu. Kalau saya ada waktu luang juga tidak berani keluar-keluar. Terus waktu itu di Bulaksumur itu ada ronda. Jadi bapak-bapak itu kalau jam sembilan malam sudah keluar rumah, lalu tidur di jalan. Karena kan ada juga dosen UGM yang PKI, seperti Busono Wiwoho, tapi karena kesadaran mereka pergi sendiri, itu lho yang sekarang rumahnya dipakai untuk rumah rektor. Beliau dulu suami istri dosen psikologi.

- T : Apa anggota CGMI, GMNI, HMI dan lainnya itu bisa dilihat dari atribut yang dipakai?
- J : Bukan, bukan atribut, jadi HMI dan GMNI itu itu kebanyakan orangnya anteng-anteng lebih halus. CGMI itu rakyat banget, dulu saya ya pengen masuk kesitu tapi kok orangnya lethek-lethek yo, terus nggak jadi. Kalau anak-anak HMI itu kebanyakan dari Sospol, GMNI dari hukum.
- T : Ibu mengetahui tentang pembentukan dan kiprah laskar-laskar, seperti Aris Margono?
- J : Kok ndak tahu ya.
- T : Bagaimana kondisi Yogya pada masa transisi dan setelah pergantian pimpinan di pusat?
- J : Kayaknya kok nggak ada perubahan yang cukup berarti, dalam bidang ekonomi lho. Sepertinya ya tetep saja, cuma dalam bidang politik rasa ketakutan itu masih ada. Biarpun sudah ada pergantian pimpinan rasa traumatik itu lama sekali hilangnya. Ya waktu itu saya tidak aktif di kampus, cuma yang saya tahu sehabis Gestapu itu, mahasiswa kok terus banyak yang nggak ikut organisasi. Soalnya ya itu tadi, jangan-jangan masih ada PKI nya, dan sebagainya. Waktu itu banyak orang yang di kejar-kejar, jadi mau ikut rezim ini nanti masih ada rezim yang dulu, gitu lho jeng. Di samping itu orang juga sibuk dengan situasi harus cari makan, sehingga organisasi itu kok sepertinya terus agak macet. Jadi aman kalau orang itu nggak ikut organisasi.
- T : Ibu melanjutkan kuliah lagi?
- J : Nggak, saya setelah menikah dua bulan terus hamil, rencananya sehabis *nyapih* (berhenti menyusui) itu mau kuliah lagi. Tapi anak saya baru lima

bulan saya hamil lagi, ya sudah, dan lagi Pak Lukman akan kembali keluar negeri. Akhirnya setelah kembali kesini saya belajar dengan anak-anak saya, yo wis nrimo. Saya kemudian mengambil kursus-kursus prinsipnya saya itu nggak mau nganggur, ya ambil kursus ngetik, sekretaris gitu. Ada untungnnya saya ambil kursus ngetik, jadi sewaktu di luar negeri saya bisa kerja terus akhirnya tulisan bapak itu semua yang ngetik saya. Saya di luar negeri bekerja sebagai sekretaris. Kemudian mengajar, menjadi asisten. Profesor Woof (nggak jelas). Kan gini, murid-murid profesor itu banyak yang mengambil mata pelajaran tari, seni, gitu lho, lha itu literaturnya memakai bahasa Jawa. Jadi saya memberi kursus pada mereka tentang bahasa Jawa. Kebetulan saya masih dapat berbahasa Jawa, dan adik-adik saya ngirim buku-buku Jawa, yang memakai bahasa dan huruf Jawa dari sini. Nah itu jadi saya di Belanda itu ngajar bahasa Jawa. Sewaktu pindah ke Amerika saya juga ngajar. Tapi kemudian saya mencoba mencari pekerjaan yang nggak mikir. Disana itu kalau ngajar berat banget. Contohnya begini, kalau ada murid yang nggak masuk, mereka itu nulis surat pakai bahasa Jawa halus, seperti gini “*nyuwun pangapunten mboten saged dateng amargi...*” dan seterusnya, lalu terakhir itu mesti bilang “*nyuwun pun koreksi*”. Lha yang seperti itu kan ya harus belajar to di rumah karena harus menjawab pertanyaan itu. Kemudian ada lagi, mereka itu kan kritis-kritis dan efisien, pernah jam sebelas malam itu nelpon, bilang gini “*nyuwun ngapunten Bu Tutik, bedanipun dikeplak kaliyan ditabok niku nopo*”? Wah lha ini saya kalau harus menerangkan rak yo lama, terus saya bilang besok saja saya demonstrasikan di kampus. Itu lalu saya demonstrasikan, kemudian tak tambahi *dijenggit, dikethak, dijenggung, ngaten* jeng, lalu komentarnya mereka itu, oo... ternyata Bahasa Jawa itu kaya sekali perbendaharaannya.

T : Ibu mulai aktif di organisasi mulai kapan?

J : Langsung, begitu sampai disini. Tapi sebenarnya saya mulai nya itu malah dari luar negeri. Saya kan mulai dari ngajar itu, terus saya aktif berorganisasi dengan ibu-ibu dari negara lain, seperti Thailand, Filipina, dan lainnya. Kami membikin makanan dari negara-negara *South East Asia*, pokoknya macam-macam. Lha itu sampai terkenal sekali. kami mengadakan seminggu dua kali, mereka ya membayar tapi bisa di makan gitu. Saya juga mengambil kursus. Prinsipnya saya kan tidak mau nganggur. Disini saya juga diminta bekerja di kantor plan ... aduh namanya aku lupa, dulu kantornya di Wirobrajan, itu lho yang ngurusi anak angkat. Jadi penterjemah disitu, tapi pekerjaannya saya bawa pulang, karena saya masih harus dampingi anak-anak sekolah. Anak saya yang perempuan, Pita, itu kan disini kelas enam,

sementara kakanya kelas satu SMP. Itu saya masih harus dampingi di kelas, soalnya bahasa Indonesia belum lancar, masih capert-capet gitu. Saya masih inget terus, Pita itu disuruh ngapalke Pancasila, satu Kehantuan yang Maha Esa. Aduh saya prihatin banget, lha temen-temennya yo ketawa semua to. Lalu saya bilang kamu terbalik, Tuhan bukan hantu, eeh dia belum paham juga, lalu saya bilang *you believe in God and you believe in ghost*. Baru dia tertawa, waah artinya dia sudah tahu. Gitu itu Jeng, jadi saya ikut duduk di kelas itu hampir satu tahun. Setelah bisa saya lepas saya terima terjemahan. Nah saya kembali ke Indonesia kan tahun 1980, 1981 saya aktif di UGM lagi, Di Dharma Wanita, di Persatuan Wanita Gadjah Mada, terus ikut mendirikan *Ladies International Club* semacam WIC, disitu saya jadi ketua selama 11 tahun. Kemudian saya menjadi ketua yayasannya selama dua tahun, saya juga masuk ke yayasan kanker dan yayasan asma, sedangkan di yayasan hari ibu saya diminta menjadi ketua sejak tahun 2000 sepulang dari haji. Di samping itu kegiatan saya adalah mengajar di diklat Depdagri tentang gender dan pembangunan. Itu ceritanya begini, dulu kan ada Meneg UPW, kemudian ada LKW, lha saya ikut disitu, kemudian ada lima orang disuruh ikut TOT (*training of trainee*), jadi *training* untuk mengajar. Mereka itu kemudian diminta menyebarkan itu sampai ke tingkat bawah, disini bekerja sama dengan BKOW. Saya diminta untuk membantu melatih di Depdagri. Di Depdagri itu kan setiap 3 bulan sekali ada pelatihan untuk para camat se Indonesia, nah menjelang diklat selesai, itu istri-istrinya itu didatangkan ke Yogya, lha itu untuk mengikuti pelatihan khusus yang para istri. Saya diminta melatih istri-istri ini.

T : Materinya apa saja Bu?

J : Pertama konsep diri, lalu peran wanita dalam pembangunan; ada juga tentang kesehatan, protokoler bagaimana jika ada tamu dan sebagainya. Juga ada etika dan etiket berbusana itu yang mengajar Pak Slamet Sukabul, kemudian tentang kepemimpinan, dan etiket makan ini dilakukan di hotel.

T : Apakah turun ke lapangan juga Bu, selain materi yang *table manner* tadi?

J : Seharusnya memang begitu, tapi sementara ini belum ada untuk materi yang lain. Saya hanya memberikan contoh praktis gitu. Terus ada juga yang saya ngganjel, sampai sekarang, ini juga sebenarnya didukung oleh peserta diklat, yaitu agar kalau pas materi yang untuk ibu-ibu itu juga dihadiri oleh para laki-laki, jadi biar klop. Sudah saya sampaikan kepada direktumnya, tapi kok nggak ada tanggapan katanya itu sudah instruksi dari pusat. Nggak bisa diubah. Nah kembali ke gender dan pembangunan, itu saya mulai memberi materi itu dari gender itu apa, bagaimana sejarah gender, lalu



pembangunan yang berwawasan gender, nah seperti itu. Ternyata antusias banget lho ibu-ibu itu, saya sering diundang mereka untuk memberi ceramah di daerahnya. Baru-baru ini saya ke Tasikmalaya ya memberi materi itu, tapi biasanya saya sekaligus ngomong kanker dan lainnya. Jadi mengajar itu saya senang.

T : Mengenai gender dan pembangunan, sejak ibu mulai aktif disitu sampai sekarang, bisa dirinci dinamikanya dari waktu ke waktu?

J : Kalau sekarang itu sudah umum dan rata-rata sudah mau menerima, tapi yang dulu-dulu susah. Sebenarnya tantangan itu malah datang dari kelompok seusia saya. mereka itu sering ngomong ah yo wis wong wis kebacut. Mesti lho ngomong gitu, terus bilang juga apa yang mau dicari lagi. Nah yang gitu itu lho yang jadi bikin pasif kaum perempuan. Tapi saya bilang, tidak ada kok istilah terlambat, ya kan semua itu harus ada usaha untuk memulai. Kalau kita memberikan contoh, anak-anak kita itu kan lalu melihat, umpamanya, sekali-kali bapaknya bikin minum di dapur, wong yang ibu-ibu juga masuk kantor kok. Jadi gitu lho harus dimulai dengan kesadaran. Tapi ya itu yang berat justru yang dari angkatan saya, kalau yang muda-muda sudah karena ya kenyataannya sekarang kan harus ada kesetaraan gender. Saya sendiri pernah lho lupa, jadi gini, saya mau bikin undangan, terus saya nyari-nyari anak saya yang laki-laki, mondar-mandir gitu, sementara anak saya yang perempuan itu duduk-duduk nonton TV. Dia itu lalu tanya pada saya, ada apa to kok yang dicari Ninok terus, lalu saya bilang saya mau minta tolong ngetik di komputer. Lhadia itu jawab, *look at me*, ini dokter Pita, sepertinya dokter Pita itu bisa lho kalau cuma ngetik di komputer, apa memang yang bisa ngetik di komputer itu hanya laki-laki. Wah saya itu sampai kaget, lalu saya bilang ke anak saya, *I am sorry*. Kami biasa pakai bahasa Inggris Jeng kalau di rumah. Itu anak saya itu bilang ya minta maaf, kalau dimana-mana ngomong kesetaraan gender, tapi komputer aja masih dianggap teknologi milik laki-laki. Waah sorry, sorry. Sekarang kalau anak saya yang perempuan sibuk di kantor dan nanti kira-kira pulangnyanya tidak bisa berbelanja, dia nelpun suaminya dan minta tolong pada suaminya untuk berbelanja. Ya begitu mereka biasa seperti itu. Terus kalau kami habis makan, saya mau cuci piring, mantu saya bilang, sudah ma biar saya saja, ini kan giliran saya cuci piring. Saya itu ya berpikir, anak saya itu yo sudah bekerja berat, kalau suaminya tidak menghargai saya sebagai ibunya itu yo sedih. Tapi untungnyanya mereka itu fair. Lha anak saya yang laki-laki itu juga biasa begitu dengan istrinya, ya syukurlah. Saya merasa konsep gender yang biasa kami lakukan, itu anak-anak bisa

menirunya. Ini memang diawali dari Pak Lukman, jadi biarpun saya tidak selesai kuliah, papanya anak-anak selalu bilang coba tanya sama mama, lalu kami diskusi tentang berbagai masalah.

Jadi anak-anak itu melihat, biarpun mamanya bukan wanita karier nyatanya papanya itu selalu memperhatikan pendapatnya. Malah semua thesis Pak Lukman itu saya yang ngetik lho Jeng, kadang-kadang saya sampai hafal, saking seringnya. Saya yo seneng aja, wong diberi kepercayaan, dan lagi itu bermanfaat. Saya itu ya bersyukur, untungya dulu itu saya ngambil kursus macam-macam lha kalau tidak saya kan jadi wong goblok. Tapi ini saya hanya untuk membandingkan dengan temen-temen saya, temen-temen saya itu banyak yang sarjana. Saya itu mau kuliah lagi lalu saya bilang sama suami minta pendapatnya, lalu Pak Lukman itu bilang orang itu bisa berprestasi dalam pembangunan itu tidak harus sarjana, yang penting performenmu, siapa dirimu, maka jadilah dirimu sendiri, dan orang lain akan menghargai kamu karena prestasimu, itu aja nduk. Ya, setelah saya renungkan, memang bener juga, dan nyatanya memang begitu. Saya pernah lho Jeng diundang dalam seminar itu yang datang semuanya dokter dan profesor lha yang tidak mempunyai gelar cuma saya sama Bu Ratu. Artinya kan belajar itu tidak harus dalam pendidikan formal, tetapi bagaimana kita mendidik diri agar berhasil.

- T : Selama Ibu berkiprah di gender dan pembangunan apakah ada selentingan atau apa dari pihak laki-laki atau pihak lain?
- J : Kalau dari pihak laki-laki kok malah tidak. Tapi malah dari perempuan sendiri, mereka itu bilang ke saya mbok sudah apa sih yang dicari lagi. Selalu lho bilang gitu, saya itu sampai gimana. Ini pengamatan sekilas, ibu-ibu itu sekarang nggak pernah lihat warta berita, kalau lihat TV yang dilihat itu telenovela, yang nggak ada pelajarannya, yang muda-muda juga. Saya kasih contoh gini, ketika ada pertemuan arisan saya ajak untuk sama-sama peduli dengan sekeliling kita yang kecil-kecil aja, seperti pembuangan sampah dan lainnya, itu kan kita ibu-ibu ini bisa usul dan bahkan terlibat dalam urusan sampah yang ada di sekitar kita. Nah seperti itu, yang kecil-kecil gitu aja, biar urusan yang gedhe-gedhe ditangani orang yang pintar-pintar. Saya itu salut sama ibu-ibu di desa, mereka itu pintar-pintar. Mereka mempelajari sesuatu itu memakai simulasi, jadi merangsang mereka untuk berpikir, jadi ya akhirnya pintar. Itu lho keunggulan PKK dibandingkan dengan Dharma Wanita. PKK itu langsung menyentuh ke masyarakat. Semua program pemerintah yang berhasil itu hampir semua dititipke pada PKK, seperti pendidikan, kesehatan, KB dan lainnya. Lha ini kami mau mencoba

penyuluhan kanker lewat PKK, umpamanya dengan kartu deteksi dini. Sebenarnya Dharma Wanita itu ya bagus, cuma kadang-kadang terus over acting, nah PKK kalau terus over acting juga jadi nggak bagus, padahal kalau untuk pendidikan masyarakat itu bagus sekali.

T : Ketika ramai-ramai reformasi, bagaimana Dharma Wanita UGM bu, terus apakah reformasi yang bergulir di semua daerah ini berdampak pada proses demokrasi yang ada di Dharma Wanita?

J : Sebenarnya organisasinya sih baik, cuma orang-orangnya itu lho yang over acting. Jadi dulu itu umpamanya gini, kalau ada pertemuan ini menjelang waktu-waktu kampanye gitu ya.. semua diundang, dikumpulkan, terus dicatat siapa-siapa yang datang. Nah itu mesti ada ucapan umpamanya gini, Ibu-ibu kan tahu gambar nomer dua, nah ibu-ibu kan sudah tahu gambar itu tho, tapi ibu-ibu tidak harus milih itu, kerena semua sudah mengetahui bahwa kita memang harus milih itu. Waah yang seperti itu lho, saya itu sudah gemes banget, udah ngempet-ngempet. Tapi ya gimana, kita semua juga tahu Dharma Wanita itu plat merah. Karena semua fasilitas dari pemerintah, jadi mempengaruhi policy. Kadang-kadang kalau istrinya nggak aktif di Dharma Wanita, suaminya kena tegur dan sebagainya. Ya... bangsane kayak gitu lah. Tapi bagaimanapun dengan adanya Dharma Wanita ya ada baiknya, karena ada kerukunan. Dulu sebelum ada Dharma Wanita kan setiap kantor punya organisasi sendiri-sendiri, perkumpulan istri-istrinya kan tetep ada. Kalau Wanita Gajah mada, lengkapnya Persatuan Wanita Gajah Mada itu lebih otonom, ini dibentuk setahun setelah UGM berdiri, dan sampai sekarang masih eksis. Induk organisasinya ke Kowani, kalau DharmaWanita kan ke Dharma Wanita propinsi.

T : Bagaimana sistem pemilihannya, karena dulu kan istri rektor itu otomatis jadi ketua Dharma Wanita, lalu kalau yang Wanita Gajah Mada juga bagaimana, dan apakah reformasi membawa perubahan pada tata cara pemilihan ketua?

J : Dulu Wanita Gajah Mada ketuanya ya istri presiden, dulu istilahnya belum rektor, tapi kemudian pemilihan. Kalau Dharma Wanita, yang akhir-akhir ini pemilihan, kelihatannya mulai Bu Amal, Bu Sofyan ini juga pemilihan. Jadi ya ada keterbukaan juga, dengan begitu demokrasi mulai diterapkan. Walaupun akhirnya yang terpilih yang tetep istri rektor, seperti Bu Amal dan Bu Sofyan. Dulu sewaktu Bu Amal jadi istri rektor, malah dia yang bilang kalau untuk ketua Dharma Wanita diadakan pemilihan. Sedangkan Bu Sofyan yang terpilih melalui pemilihan sebagai ketua, namun beliau berterus terang kalau tidak bisa aktif. Dengan begitu kan jadi ban serepnya yang

maju. Tapi ya nggak papa wong saya seneng kok berorganisasi itu.

T : Bagaimana kondisi Yogya menjelang reformasi, kan krisis mulai terjadi itu Bu?

J : Ya, memang pada waktu itu krisis dulu ya, terus memuncak sampai tahun berapa itu, tahun 1998. Nah mula-mula itu di Yogya banyak demo dari mahasiswa. Mereka itu seringkali mengadakan demo di kampus masing-masing, kemudian juga gabungan, dan itu diisi dengan orasi-orasi. Kemudian dosen-dosen juga terlibat. Pada waktu itu ada demo yang cukup besar, pas hari Selasa kedua. Mahasiswa itu berkumpul di gedung graha Sabha, jalan-jalan ke kampus itu penuh sesak oleh mahasiswa. Lha Pak Lukman pada waktu itu ikut ke graha Sabha juga. Kebetulan kami ada acara di UC (unit center) UGM, jadi Dharma Wanita mengadakan peringatan Hari Kartini disitu. Waktu itu saya ditelpon Pak Lukman, dia bilang, nduk kowe melu mreng wae. Lha saya ya bingung wong penuh sesak kayak gitu, nggak bisa jalan, mana pakai kain kebaya lagi. Akhirnya Pak Lukman itu ngirim mahasiswa untuk jemput saya, dia bilang, kono ibumu jemputen neng UC. Bersama mahasiswa akhirnya saya berangkat ke graha Sabha. Saya ngajak sahabat saya, tapi dia tidak mau, terus saya bilang yo wis ra melu yo ra popo. Lha waktu itu Bu Amal malah bilang mau ikut, malah mbisiki saya, Bu manggilnya jangan Bu Amal ya, Bu Eri saja. Kemudian kami berangkat bersama, dengan di kawal oleh mahasiswa. Lha kami diberi spanduk itu, disuruh bawa dipegang kiri kanan gitu. Kita itu sampai nggak bisa lihat kiri kanan, saking penuhnya. Akhirnya sampai jugadi graha Sabha, terus naik. Oh ya, waktu kami jalan bawa spanduk itu sambil nyanyi-nyanyi, lagunya maju tak gentar, cuma syairnya di ubah, tapi saya sekarang kok lupa syairnya gimana. Nah begitu sampai di graha Sabha itu disitu kan juga sudah penuh mahasiswa, sudah pada orasi. Mereka itu pada teriak, Bu orasi, orasi. Wah aku ngomong opo yo, saya tanya gitu sama Pak Lukman, dia itu njawab, yo poko asal bener aja. Saya akhirnya maju juga orasi. Habis saya lalu Bu Kusnadi juga orasi. Waktu itu kan ada wartawan, dia temen saya namanya Neni Yusuf, terus dia bilang wah tadi itu saya kira mBak Mega yang pidato. Wah kamu itu ngawur saja, masak mBak Mega. Nah sementara itu kan krisis makin parah, harga-harga naik. Mahasiswa itu ya kasihan lho. Lalu Pak Lukman mendirikan KKY, tujuannya untuk, ya pokoknya untuk menjalin kerukunan. Lha Pak Lukman itu bilang nduk kowe melu ya saya ya akhirnya terlibat kesitu. Kegiatannya antara lain bikin nasi bungkus itu. Dulu Kagama juga bikin, lah kami bikin di Pedesaan (maksudnya di Kantor Pedesaan UGM). Harganya kami jual Rp. 500,-. Setiap

hari kami bikin 100 - 150 bungkus. Kalau yang di Kagama sekitar jam 10.00 kami agak siang. Mahasiswa itu seneng lho, malah bilang bu, mbok untuk sore atau malam hari itu ada, jadi kami bisa makan nasi. Begitu komentar mereka itu. Dan kegiatan itu berlangsung lama lho Jeng, sampai lebih kurang 2 tahun, pokoknya sampai dananya habis. Kegiatan itu akhirnya tidak hanya kami saja, yang lain juga buat, seperti kelompok Muslimat dari NU, Aisyah juga buka warung itu, Katolik juga di Bintaran, dan Protestan di Code, yang di Code katanya sampai sekarang masih. Dulu itu kok kelihatan rukun gitu, saya kan sempat ikut Pak Lukman keliling melihat aktivitas KKY itu. Selain KKY, itu juga ada kerukunan umat beriman, itu kalau ada pertengkaran umat yang menyelesaikan yang itu. Wah kalau yang jualan nasi bungkus itu dulu kok sepertinya jadi trend ya, dan itu mahasiswa sangat menikmati dan tertolong. Ya itu memang hanya sebagian kecil dari usaha untuk mengurangi kompleksnya krisis yang ada. Ya begitulah.

T : Kerukunan umat itu sudah jalan Bu?

J : Sudah, sudah jalan dan sampai sekarang masih tetap ada, walaupun Pak Lukman sudah meninggal. Kerukunan umat beriman itu sekarang pemimpinnya Kyai Muhaimin, wakilnya Romo Yatno, terus ada lagi yang dari Protestan, kemudian Budha, Hindhu, dan Kong Hu Cu juga ada, Aliran Kepercayaan itu juga masuk. Kegiatan yang seperti itu di Pusat (Jakarta) juga sudah ada. Selain dialog keagamaan, kegiatan sosial juga masuk, seperti mengadakan lomba lukis anak-anak di gereja atau di masjid dan lainnya. Nah yang kegiatan seperti itu tadi yang sosial itu, Yogya belum jalan, tapi Jakarta sudah. Kita di Yogya baru mau mulai. Maksudnya ada kerukunan umat beriman itu ya biar terjadi keterbukaan gitu, jadi kalau ada perselisihan mereka bisa dialogkan disini.

T : Kembali ke demo yang banyak terjadi di awal gerakan reformasi itu tadi Bu, apa yang mendasari atau mendorong itu untuk ikut terlibat disitu?

J : Ya itu sebenarnya murni dari diri sendiri. Ini memang tidak lepas dari kiprah Pak Lukman yang selalu merasa punya komitmen tentang segala sesuatu yang tidak pas dengan aturan-aturan. Lha saya jadi terbiasa, dan memang aslinya saya juga tukang protes. Jadi melihat hal tidak semestinya itu sudah dengan sendirinya muncul keprihatinan. Nah gerakan mahasiswa itu dulu itu rak ya bagus-bagus to, jadi saya ya merasa enjoy saja disitu, berbaur dengan mereka. Nah kalau keprihatinan Pak Lukman terhadap negara ini, saya jadi ingat, suatu ketika saya berkunjung ke rumah anak saya yang di Singapura, lha disana itu ada wartawan siapa namanya saya lupa, itu menemui saya lalu dia bilang, saya waktu mendengar itu sampai nangis,

dia bilang bahwa sebelum ada yang bersuara, sebelum ada Amin Rais, sebelum ada Amal, *your husband is the first one*, suami adalah yang pertama. Maksudnya sebelum Pak Amin dan Pak Amal berbicara tentang reformasi, Pak Lukman sudah terjun kesitu.

Pak Lukman itu dari awal selalu ngomong reformasi, bukan itu, istilah itu waktu itu belum populer, jadi maksudnya selalu mengoreksi, bukan revolusi, *but he has the praid hight*, dia harus membayar mahal. Dia seringkali terlambat naik pangkat, pernah juga dipanggil Irjen, ditanya macam-macam. Seperti kenapa tidak pernah memakai baju korpri, tidak pernah memakai baju safari, kenapa berbicara dan menulis yang dibbilang cukup keras. Lha Pak Lukman bilang apa ukuran kecintaan pada negara itu ukurannya pakaian, karena saya tetap mencintai negara ini, walaupun saya tidak memakai baju itu. Saya mencintai negara ini dengan kritikan saya, mengoreksinya dan lainnya. Ya seperti itu lho Jeng. Padahal saya kan yang ngetik semua naskah dia, jadinya saya sampai hafal, kadang bahasanya saya aluske. Tapi kadang-kadang Pak Lukman ya ngomong, kok pakai dipoles segala, engko malah ra tekan maksudte. Lha saya yo bilang, *mbok wis to mas, kowe ki rak duwe anak bojo, engko nek dikunjoro piye*. Dia pernah juga dipanggil Pak Kaji (maksudnya Sukaji Ranuwiharja), katanya dari menteri. Lha Pak Lukman ditegur, *piye dik tulisanmu itu*. Waktu itu Pak Lukman itu nulis judulnya *Teks section without repretation*, isinya itu tentang bagaimana orang membayar sebuah teks, itu berarti dia harus mendapat imbalan juga. Seperti orang yang membayar pajak, maka dia harus mendapat imbalan juga. Dengan itu Pak Lukman mendapat marah, tetapi di pihak lain, dia mendapat penghargaan dengan tulisan yang sama. Melalui Pak Radius Prawiro, tulisan itu dinyatakan menang sayembara penulisan tentang pajak. Lha mulai saat itu Pak Lukman tambah yakin kalau tulisannya ternyata ada gunanya. Sampai-sampai dia itu *ngomong the nation is thieves*, negara ini maling semua. ya itu lho Jeng, kadang-kadang saya itu sering sedih, *lha wis piye, kene ki le mbengok-mbengok* sampai...sampai gimana, tapi kok yo masih tetep saja negara ini seperti ini. Menurut saya sekarang kok malah tambah *ndadi*. Saya pesimis kondisi ini akan cepat teratasi, *lha piye* yang di atas aja seperti itu. Lha sekarang yang bisa dititipi itu, ya saya tinggal titip sama Mas Amin Rais thok. Saya bilang, *wis mas, aku melu titip negoro iki karo sampeyan. Pokoke sampeyan ojo melu-melu, wis ben liyane dho ngono, nek sampeyan ojo, nek nganti sampeyan melu-melu yo macem-macem, wis pokoke tak dongakke sing elek-elek*. Lha gimana yang kecil-kecil susahnyanya kayak apa, yang anggota DPR sekarang malah seperti itu, sak karepe dhewe,

yang seharusnya ikut mengawasi malah melu-melu. Lha saya itu kadang-kadang sampai berpikir, *apa bisa ta negara iki didandani*. Lha yang di Yogya juga sama aja, anggota DPRD nya seperti itu juga, dho rebutan, terus gimana. Ya berdoa sajalah bareng-bareng menurut agama dan kepercayaan masing-masing (sambil tertawa kecut).

T : Kalau gerakan mahasiswa di Yogya bagaimana Bu, dalam proses reformasi ini?

J : Kalau yang sebelum reformasi itu kok yo kelihatan rukun, jadi unsur kerukunan itu tampak sekali, kompak gitu. Tapi yang sekarang atau yang setelah reformasi itu berbeda. Ya mungkin ya karena yang tua-tua juga gitu, kok sepertinya dho pecah-pecah. Kalau dulu itu musuhnya satu, orde baru. Saya lihat yang sekarang itu beda, ada ngawurnya gitu. Tapi saya yo tidak menyalahkan yang muda-muda saja, wong nyatanya yang tua juga. Lha yang dititipi roda reformasi saja malah *mreteli rodane dhewe*, terus gimana itu. Sepertinya kok malah dho bentrek sendiri, antar agama nanti juga jadi alasan. Wah sepertinya sudah tidak lagi kompak seperti pada waktu tahun-tahun itu, tahun mau jatuhnya Orde Baru. Wah dulu itu semangat banget, tapi aturannya juga dijaga, lha sekarang mahasiswa kelihatannya juga pecah ya. Tapi kalau saya sendiri, saya tetap berpegang pada apa yang saya rasakan, kalau itu baik untuk pembangunan dan sesuai aturan saya ya setuju saja. Mbok yang itu itu kita itu tidak usah cari musuh, kita sudah susah, kok cari musuh, wah malah kacau. Saya setuju dengan AA Gym itu, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.

T : Ibu mengetahui adanya pisowanan ageng pada bulan mei itu?

J : Ya, yang di Alun-alun itu. Tapi saya tidak sampai ikut kesana, saya hanya sampai Malioboro. Itu kan awalnya dari UGM, yang dari arah sana, tapi katanya ada lagi yang dari arah lain. Cuma sepertinya kumpulan massa itu awalnya dari UGM. Itu hampir semua terlibat, mahasiswa, dosen, pak rektor juga, tapi tetap mahasiswa yang paling banyak. Situasinya itu mencekam sekali. Kita kan nunggu-nunggu kepastian dari Ngerso Dalem, kan waktu itu *Ngersa Dalem* itu belum memberi jawaban, belum bersedia, karena beliau itu masih puasa. Nah baru hari terakhir itu *Ngersa Dalem* baru bersedia. Wah di Graha itu penuh sekali, kami nunggu rombongan beliau, kemudian datang. Bu Ratu, *Ngersa Dalem*. Jeng Sari, Gusti Pembayun sekarang, sama gusti Joyo, mereka kan berada di depan, kami di belakangnya. Wah waktu itu tu ada bau serr gitu lho Jeng, wangi sekali. Terus pada bisik-bisik, lha saya itu ya sempet ngomong alah itu paling ratusnya Bu Ratu. Dulu sewaktu masih punya suami saya sehabis keramas itu pasti ya ratusan, tapi sekarang



jarang-jarang. Setelah ada kesempatan, saya itu terus nanya sama Bu Ratu, tapi sebelum itu saya ngomong dulu gini, Bu Ratu saya *nyuwun duka lho*, maaf saya memakai baju seperti ini. Saya ngomong gitu, soalnya Bu Ratu itu kelihatan marah, saya kan memakai celana panjang jins, pakai kaos, topi, terus dipakaiin ikat kepala, lha Bu Ratu itu datang memakai rok, lha saya kan ya nggak enak. Eeeh Bu Ratu itu malah njawab, *ora aku nggak marah*. Terus akhirnya saya nanya, Bu Ratu *ki ngagem ratus apa ta kok wangi banget*. Eeeh malah dijawab, *ratus apa, aku ya mambu wangi, aku malah nganti mrinding*. Bu Ratu itu juga *ngendiko, aku ki malah tegang banget, dadi wis ora isa apa-apa, wong ambegan wae nganti angel, kok mambu wangi banget*. Nah setelah itu baru ke alun-alun, saya nggak sampai kesana. Jadi itu, Pak Amal segala kan ngawal mahasiswa to itu.

T : Kalau maklumat yang dikeluarkan oleh *Ngersa Dalem* atau Sultan HB X dengan KGPA Alun Alun IX, apa makna untuk daerah Yogya.

J : Nomor satu maklumat itu sangat tepat, seandainya tidak keluar maklumat itu bagaimana Yogya. Saya rasa itu tepat sekali, apalagi waktu itu kan Sultan masih dikenal sebagai tokoh Golkar, nah dengan keluarnya maklumat itu berarti kan beliau itu tidak memihak. Malah bisa merangkul semua pihak, menenteramkan. Dan itu berarti menunjukkan kalau beliau itu mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik. Jadi orientasinya lebih banyak kepada kepentingan rakyat Yogya. Makanya kalau jadi ketua Golkar ya malah eman-eman. Sekarang kan ada yang ngusulke atau punya ide agar Sultan jadi ketua Golkar. Soalnya dari Sultan kok terus ke Golkar, kan itu lebih rendah. Tapi lepas dari itu, maklumat itu sangat berarti untuk Yogya dan masyarakat lainnya. Dan buktinya yang di daerah Yogya itu kan tidak hanya orang Yogya to, wong banyak yang berasal dari daerah lain, terutama para mahasiswa yang waktu itu ikut aktif terlibat dalam arus reformasi.

T : Nah, tadi ibu mengatakan kalau sekarang kondisinya malah lebih parah dibanding dulu, maksudnya bagaimana, ini terkait dengan kondisi selama proses reformasi ini kan?

J : Jadi gini lho, transparansi. Kalau sekarang ini maunya kan transparan, semuanya transparan lha jadi nyolong sudah ketahuan pun ya *ora pa-pa* Saya ambil perumpamaan dari Pak Lukman, wah lagi-lagi saya bicara Pak Lukman, lha bagaimanapun dia itu guru saya, jadi gini, ibaratnya kran dulu itu disumbat rapat, lha terus kran itu dibuka. Dibuka saja di beberapa tempat, tidak hanya disitu, jadi di semua tempat, jadinya semua kena. Akibatnya ya jadi tidak terkontrol, out of control. Semua berbicara, tapi

malah ada yang nggak kena, semua ingin transparan, tapi ada juga yang transparan itu kemudian dibungkam atau malah berbalik. Reform, itu sesungguhnya kan memperbaiki yang tidak benar, bukan revolusi. Reformasi itu, jadi gini makanya dalam pidato saya atau orasi itu saya bilang reformasi itu kan meluruskan yang bengkok, dan sebagainya. Eee lha malah mahasiswa-mahasiswa itu bilang waah bengkok, dalam hati saya bilang *wuuuh semprol* tenan. Nah yang itu lalu banyak salah kaprahnya, mengartikan reformasi itu sebagai semuanya boleh. Ya itu berarti kalau reformasi itu semuanya boleh, ya namanya bukan lagi reformasi, tetapi itu malah ngrusak. Lalu ya apa mau direformasi lagi. Kalau dulu orang nyolong itu masih *duwe isin*, lha sekarang sudah enggak lagi, terang-terangan. Jadi kita sekarang itu kalau mau membersihkan ya meskinnya pakai sapu yang bersih. Kalau sapunya sendiri kotor ya *malah rata*, ya itu sekarang kan malah rata. Jadi betul itu kalau memang negara ini, *the nation is thieves*. Saya pernah sampai malu bilang dari Indonesia. Ya betul itu, dan itu terjadi ketika saya ke Thailand, saya naik bis wisata, lha yang di sebelah saya tanya, *are you Phillipinnes*, saya jawab yes. Eeh nggak lama kemudian guidenya itu menerangkan, kita ini di Thailand mayoritas agama Budha, tapi tidak melarang orang untuk memeluk agama lainnya, tidak seperti di Indonesia yang bunuh-bunuhan. Waah untung tadi saya nggak ngomong dari Indonesia, malu lah yaou (sambil tertawa). Kita sekarang malah bunuh-bunuhan, terus *wis dho ra duwe isin*, budaya malu itu kita nggak punya, dan memang harus dibudayakan. Ya begitulah kenyataannya. Oh iya saya ingat itu, beberapa waktu yang lalu dari kantor museum Benteng itu namanya Mas Agus itu nyari saya, minta baju dan atribut yang saya pakai untuk orasi itu. Saya bilang ya nanti tak carinya dulu mas, saya kira itu masih kok. Katanya itu mau disimpan di Museum Benteng.

- T : Ibu kan sangat *concern* ke masalah perempuan, menurut ibu bagaimana peran perempuan Yogyakarta sekarang ini, jika dibandingkan dengan kemarin sewaktu Orde Baru?
- J : Wahh ini, akan rumit karena ada penggolongan, jadi kelompok umur atau kalangan mana asalnya dan sebagainya. Tapi begini saja, ini pengalaman saya saja, jadi waktu itu ada seminar, ada ibu-ibu seusia saya, dia masih sangat semangat dalam pembangunan bangsa ini, tapi ada juga yang seusia saya juga tapi mereka cuek. Namun yang sadar akan pembangunan bangsa dalam arti mereka itu sadar kalau itu juga bagian dari kehidupan mereka para perempuan itu sudah banyak juga. Nah saya yang prihatin itu malah ibu-ibu muda, mereka ini umumnya dari golongan yang mampu, kalau

saya ajak ikut organisasi, ikut kegiatan sosial dan lainnya, mereka itu jawabannya hampir sama, waah saya masih njemput anak, masih anu, masih anu. Sepertinya yang punya anak itu hanya mereka. Tapi saya yo tidak menyalahkan lho Jeng, wong yang peduli juga banyak. Hanya kadang saya prihatin, apa mereka itu tidak seneng kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekarang mencari orang yang mau berbuat dan bermanfaat untuk orang lain tanpa imbalan apapun itu susah. Tapi kalau yang maju, pendidikan segala macam itu perempuan kita sekarang memang jauh lebih terbuka. Saya juga melihat sekarang banyak aktivis perempuan yang kadang-kadang *over acting*. Saya cukup prihatin juga. Contohnya, mereka menuntut setara antara suami istri, nggak mau lagi masak, atau noto tempat tidur, karena dia juga sudah bekerja. Waah lha bagaimana ini, lha ini kan berarti membuka musuh dengan laki-laki, apalagi musuh dalam selimut. Kesetaraan itu kalau menurut saya tidak ada pihak yang ditindas, jadi adil itu bukan sama persis, tapi memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Setiap kali saya mengajar tentang gender dan pembangunan, itu makanya saya tekan saya kenalkan dulu ibu-ibu itu dengan asal atau sejarahnya kemudian konsep-konsepnya, dan kemudian saya ambil contoh-contoh yang ringan, dan ibu-ibu itu bisa menerima. Saya sendiri tidak suka atau tidak pernah sampai ekstrem. Yang penting ibu-ibu itu, para perempuan itu tidak tertekan, saling menghargai, bapak juga menghargai, itu saja sudah cukup. Lalu saya memang tertarik sekali dengan pembangunan bangsa, khususnya keterlibatan para perempuan atau ibu-ibu itu di dalam pembangunan. Makanya saya juga selalu menyisipkan ajakan dan contoh-contoh kepada mereka dalam setiap kesempatan, maksudnya kalau saya pas ngajar atau apa. Lha saya sendiri kan tukang protes, saya tidak suka poligami, makanya saya juga selalu bilang pada ibu-ibu itu agar mereka itu punya waktu dan mau membaca. Sehingga mereka itu tahu kalau ada yang mencari untung di balik kehidupan Nabi, nah contohnya itu. Jadi mereka ya punya kekuatan untuk membela diri. Saya itu yo mesti bilang ibu-ibu mbok tolong, ibu-ibu itu membaca, ya membaca tafsir atau apalah yang berguna.

- T : Bagaimana tentang konsep kepemimpinan perempuan yang tahun-tahun kemarin juga sempat muncul dalam berbagai perbincangan.
- J : Kalau terlalu ekstrem saya tidak cocok. Yang penting itu kemitrasejajaran. Sudah mitra, teman kan itu, sejajar lagi. Pemimpin perempuan itu kalau dia mampu, mengapa tidak. Tapi ya terus jangan nyerang laki-laki terus, wong laki-laki itu kadang-kadang yo tidak apa-apa kok, jadi jangan juga jadi ekstrem, kalau laki-laki itu selalu menindas, ya ndak juga. Pokoknya



menjabat sebagai Ketua Program Studi Kearsipan Yogyakarta tahun 1996 sampai 1997.

T : Kalau sekarang.

J : Sekarang saya jadi Ketua Jurusan lagi karena banyak yang sekolah yang muda-muda dan yang tua mengajar di S2 dan S3 maka saya jaga gawang, Ketua Jurusan.

T : Alamat rumah.

J : Kauman GM I/35.

T : Sehubungan dengan Pak Adaby ada berbagai jabatan waktu jadi dosen di Fakultas ini pada masa Orde Baru mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan Orde Baru ini yang Pak Adaby ketahui. Sebenarnya Orde Baru itu apa menurut Pak Adaby.

J : Orde Baru setahu saya, ketika mulai muncul Orde Baru saya sudah di SMP merangkap di PGA. Itu sebetulnya Orde Baru kan suatu perubahan dari demokrasi terpimpin, demokrasi yang otoriter yang pada waktu itu sangat kejam terhadap rakyat yang menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak, implasi sampai 600% tahun 1966, waktu demokrasi terpimpin itu. Karena struktur kenegaraan juga jungkir balik menyimpang dari UUD 1945. Kemudian ada pemberontakan PKI, G30S/PKI itu jelas PKI. Jadi orang-orang yang mengatakan itu bukan PKI, itu salah karena sesuai bukti-bukti historis itu PKI. Kemudian setelah PKI bisa dikalahkan, konsep demokrasi terpimpin itu ternyata tak mau mengutuk PKI, ternyata kemungkinan ada korelasi juga dan akhirnya tumbang. Setelah tumbang muncul Orde Baru. Orde Baru maksudnya bukan hanya Pak Harto, Pak Harto itu kan salah satu wayangnya saja. Orde Baru memang suatu kehendak rakyat baik para cendekiawan maupun organisasi-organisasi pada waktu itu menginginkan adanya suatu iklim baru, tatanan politik pemerintahan, kenegaraan yang mumi sesuai dengan UUD 1945, itu Orde Baru. Jadi mengembalikan tatanan itu seperti yang dulu demokrasi terpimpin seperti menyusun DPR saja disusun sendiri oleh Presiden. Ketua MPR menjadi menteri dan sebagainya, itu dihilangkan semua lalu diganti dengan tatanan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Nah kemudian Orde Baru berjalan, pada waktu Orde Baru berjalan membuka kembali zaman Orde Lama, demokrasi terpimpin kan menutup bantuan asing dengan Amerika, Inggris, Belanda dan Blok Barat. Pada waktu itu terjadilah sumbangan luar negeri yang masuk ke Indonesia sehingga terjadi penyelamatan, perbaikan dalam bidang ekonomi. Nah itu mulai tampak tapi kemudian timbul godaan lagi. Yang namanya Orde Baru itu semakin lama bisa menjadi Orde Lama juga. Yang dulu itu

memang idenya itu kesejahteraan masyarakat, perbaikan ekonomi dan sebagainya. Akhirnya juga terjadi penyimpangan yang besar ternyata bantuan luar negeri yang banyak itu tidak untuk rakyat semua tetapi justru untuk para jenderal yang pada waktu itu jadi penguasa Orde Baru. Penguasa militer itu dijadikan istilahnya modal yang besar itu dipegang, lisensinya diberikan kepada jenderal-jenderal, HPH-HPH hutan juga dibagi-bagi. Dan kemudian jenderal tak bisa mengadakan membalance ekonomi, yang terkahir diberikan kepada Cina. Jadi sistem ekonomi Ali Baba.

T : Ada yang mengatakan SP 11 Maret itu sebagai suatu coup d'etat, bagaimana.

J : SP 11 Maret 1966 sebagai coup d'etat itu kalau saya tidak sampai begitu. SP 11 Maret itu kan baik entah yang membuat itu Soekarno atau Suharto dan kawan-kawannya, tapi yang tanda tangan Soekarno. Lalu persoalannya tanda tangan itu dipaksa atau tidak, belum tahu sampai sekarang. Yang jelas kemudian SP itu isinya kalau kita lihat Suharto harus bertanggung jawab kepada Presiden Panglima Tertinggi di SP 11 Maret, jadi masih ada hubungan itu dengan Bung Karno. Tapi kemudian disahkan oleh MPRS pada waktu itu lalu berlakulah Ketetapan MPRS.

T : Pak Adaby tahun 1966 masih dimana.

J : Saya masih di SMP kelas II.

T : Ada apel-apel dalam rangka pembubaran PKI di Yogya bagaimana.

J : Saya ikut waktu itu lalu asal ada demo itu sekolah berangkat dikerahkan dan itu permintaan murid bukan dari guru. Murid minta kepada guru, ini ada demo lalu dikerahkan ke Alun-alun. Saya ingat betul ketika demo pembubaran PKI itu. Sebenarnya pembubaran PKI itu dari Yogya, ya bulan Oktober tanggal berapa itu. Awalnya Gemuis mengadakan apel akbar di Alun-alun menuntut PKI dibekukan. Kemudian Pak Widodo itu menyetujui dibekukannya PKI, dia Komandan Korem pengganti Katamsa. Waktu itu Katamsa diculik, waktu ia cartiker. Lalu pembekuan PKI kemudian besoknya kita apel lagi menurunkan papan nama PKI. Kantor PKI dirusak.

T : Kantor PKI di Yogya dimana.

J : Dekat rumah saya di Kauman. Sekarang dekat Monumen Aris Munandar dan Aman Sunardi. Itu monumen yang meninggal ditembak ABRI ketika demo itu. Kebetulan dokumen-dokumennya banyak, saya dapat Harian Rakyat isinya seram itu Bung Karno dan Aidit. Banyak PKI kehilangan waktu itu.

T : Orang-orang PKI nya tidak ada lagi.

J : O lari semua. Orang-orang PKI yang di Cua Cung Hui itu yang sekarang gedung Olah Raga, itu PKI sudah siap dengan bom molotov. Mereka ada

yang tertangkap dimasukkan tentara dalam truk entah dibawa kemana. CGMI itu mahasiswanya PKI lalu kita keliling Yogya dimana ada papan nama PKI diturunkan lalu markas-markas PKI diduduki. Markas-markas Cina juga, Cina juga dulu yang ikut PKI namanya Baperki itu ikut PKI, itu juga diduduki markas-markas itu. Yogya itu juga ada itu di Dagen. *Cua Cung Hui* itu di gedung Koni.

T : Ada laskar Ampera.

J : Ada itu dalam Orde Baru itu kan ada KAMI, KAPPI, saya di KAPPI. Kemudian ada KASI, KAKI, KAWI, ibu saya di KAWI. Safri sairin dulu di KAMI. Lalu mereka yang tak punya laskar masuk dalam Laskar Ampera Aris Margono. Nama korban yang meninggal juga Aris Munandar. Juga ada KAUSI (Kesatuan Aksi Orang Sinting), humoris kalau demo. KAPBI (Kesatuan Aksi Penarik Becak), jembel juga berjuang.

T : Ketika Orde Baru yang menonjol sekali perubahan dari Orde Lama itu apa.

J : Kalau saya lihat itu pertama ada semacam penataan kembali aparatur pemerintahan. Pemerintahan itu ya ada kedisiplinan. Memang kita lihat tentara kan begitu. Kedisiplinan kemudian mulai ekonomi juga ada kecerahan, ada pembaharuan, ada perbaikan ekonomi, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan sebagainya. Kurs meningkat tambah bagus ekonomi tapi ini yang kita rasakan ya, itu semua atau tidak itu urusan di atas. Lalu rakyat mulai ada bayang-bayang kerja, masuknya modal asing itu ada. Ada kain-kain, itu dulu kan waktu Orde Lama itu kain saja terbatas. Kualitas paling baik waktu Orde Baru kan mulai ada kain pakaian yang bervariasi, ya kendaraan Jepang masuk, radio juga. Lalu akhirnya ada sepeda motor, ada Honda, Yamaha. Saya kira itu mulai masa Orde Baru.

T : Sepeda sudah diganti.

J : Sudah ganti, sepeda motor tak ada hanya Suzuki kecil itu. Lalu kemudian berkembang, ekonomi bagus pada awalnya kemudian setelah adanya konglomeratsi itu mulailah ketimpangan sosial kaya miskin itu. Orde Baru kan kelemahannya, disiplinnya bagus tapi kemudian sentralistik betul. Pegawai masuk Korpri, Korpri ya semuanya monoloyalitas kepada pemerintah. Itu kita alami dan saya terus terang ketika saya kerja disini itu saya dipaksa masuk Golkar, saya tak mau, saya dikasih blanko pegawai negeri harus masuk Golkar, saya katakan kalau Korpri okey. Korpri tak keluar dari kepegawaian tapi Golkar itu masa mahasiswanya tak boleh berpolitik, dosennya berpolitik.

T : Apa naik pangkat tidak sulit.

J : Sebenarnya entah dipersulit bagaimana ya saya diancam oleh pimpinan



itu, Dekan katanya mau tidak masuk Golkar? tak tahu saya bilang. Terus terang sampai sekarang tak ada nama saya di Golkar. Mungkin suatu saat ada Surat Bebas Golkar. Waktu itu saya dimarahi betul oleh pimpinan: "Sudah keluar dari ruangan ini", saya keluar. Saya hormat sama pimpinan tapi untuk yang satu itu saya tak akan penuhi. Jadi saya bebas Golkar.

T : Nah sekarang di Yogyakarta, masalah demokrasi pada masa Orde Baru itu bagaimana.

J : Begini, pada awalnya baik lalu partai-partai politik diikuti dalam kenegaraan, dalam pemerintahan, diajak ulama-ulama, organisasi-organisasi. Tapi lama kelamaan mereka itu bukan disingkirkan, didiamkan, tidak diajak. Akhirnya apa yang terjadi yaitu kekuasaan pemerintahan saja, partisipasi rakyat sangat kurang sekali. Kalau dulu orang tak berpikir tetapi setelah itu orang tak simpati apalagi ada skenario terhadap umat Islam. Ada isu Komando Jihad itu skenario Orde Baru dalam rangka menjelekkan nama jihad. Banyak yang ditangkapi, malah ada yang dibunuh dan sebagainya. Teman saya itu imam masjid kampus dibunuh.

T : Penyelesaiannya ada tidak dari segi hukum.

J : Tidak ada tahu-tahu dikeluarkan saja atau dihukum tak ada proses. Ya proses pengadilan tapi tak ada kepastian. Artinya tahu-tahu dikeluarkan. Pak Kunto juga kena. Itu tahun 80-an sampai 90-an. Saya sangat kasihan kepada Prof. Muhlas itu seorang mubalig sampai strok sehingga keseimbangannya hilang. Dia hanya ceramah, kritik pemerintah yang menangkap Kodim, tentara kejam, saya pernah mengalami, saya mewakili UGM ke Boyolali, saya diminta untuk ceramah waktu itu. Setelah ceramah sempat dibawa oleh Kodim katanya tidak mempunyai surat izin sebagai mubalig. Ini ada pengalaman menarik saya pada masa Orde Baru. Waktu itu saya menjabat Koordinator Dewan Senat Mahasiswa UGM. Kita mengundang Jenderal Nasution untuk ceramah. Tidak boleh sama Kopkamtib. Pokoknya Nasution tak boleh ke Yogya. Nasution orang yang dicekal. Tak boleh berhubungan dengan mahasiswa. Nasution itu kan pencetus Orde Baru. Kita ngomong-ngomong di Gajah Mada. Saya dengan Pak Mukhlis, Zainal Asikin, kita diminta bagaimana Pak Nas agar tidak diketahui intel. Kita bikin strategi.

T : Tentang peristiwa Malari di Yogya bagaimana.

J : Malari itu kalau di Yogya hanya dampak dari Jakarta, jadi tak mempunyai suatu strategi. Malari itu sebetulnya kita lihat itu juga semacam skenario untuk menjebloskan bahkan karena spaning politik untuk yang melawan pemerintah, bagaimana bisa dijebluskan dulu dan bisa ditumpas. Kalau

kita baca buku Pak Ali Murtopo tapi apa ditarik kembali saya tak tahu, itu kan juga dipancing dengan kedatangan Tanaka ke Indonesia terjadi demo besar. Yang namanya demo itu kan provokatornya ada dua, provokator murni dan provokator bayaran.

t : Di UGM ada.

J : Ya ada itu tadi yang di Jakarta, akhirnya muncul Malari lalu mudah ditumpas itu Malari. Dan di UGM kena dampaknya, ya di UGM juga ada provokatornya atau demo yang bayaran dan provokator yang murni dalam arti ingin memperjuangkan supaya suatu pemerintahan itu dibersihkan dari aspri presiden, supaya rakyat itu aspirasinya bisa diterima. tetapi juga ternyata ada yang mengompori tapi memang itu orang dalam. Banyak yang kita yang ditangkap disini, dipukuli. Satu informasi kalau ada demo satu orang Rp 45.000,00 - Rp 50.000,00 dulu. Itu dinamikanya orang-orang demo itu. Lalu ada lagi kejadian tahun 1978, waktu itu kita menuntut supaya Kopkamtib dibubarkan kemudian kekuasaan tidak militerisme. Nah waktu reformasi itu sama juga masuk sini, saya disini ada mahasiswa saya masukkan semua ke kamar, disini ada kamar bawah tanah. Yang kuliah diapalkan di Mushala, dibawa ke Polda. Lalu kita ke Polda minta dikeluarkan, yang boleh keluar itu yang perempuan. Lalu besok pagi baru boleh keluar, ini perjuangan Reformasi, itu pas kurang ajar itu aparat, kalau kuasa lagi itu bahaya. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang penguasa Orde Baru akhirnya jadi Orde Lama, desprissif, militeristik.

T : Yang mendorong reformasi itu apa pak.

J : Yang mendorong reformasi itu saya kira ada perasaan yang sama di kalangan rakyat Indonesia, perasaan tertekan, jenuh dengan penguasa yang otoriter memungkinkan suatu bentuk pembaharuan yang segar. Nah tapikan masih takut kemudian cendekiawan-cendekiawan lah yang berani membuka hal itu.

T : Jadi pemikiran-pemikiran yang tertekan tadi sampai ke mahasiswa begitu.

J : Ya sebenarnya rakyat, mahasiswa sama ada kecemburuan-kecemburuan, ketidaksukaan, kegemasan terhadap situasi politik yang represif, yang zalim yang menginjak-injak harkat rakyat banyak dan sebagainya menimbulkan politik yang segar terhadap rakyat. Tapi untuk menyuarkan rakyat tak berani lalu ketika para cendekiawan dalam seminar-seminar pada pidato-pidato berani mengungkapkan dapat dukungan, di kalangan mahasiswa juga demikian, ada gerakan kecil-kecil yang akhirnya terakomodasi menjadi besar. Nah pada waktu itu kan saya Pembantu Dekan III, kebetulan saya sering berkomunikasi dengan para mahasiswa, mahasiswa mengatakan Pak ini

mau demo begini-begini. Anda demo silahkan, anda sesungguhnya target apa, jelas, perjuangan ini Pak. Ya silahkan jalan. Saya sering diminta mengantarkan demo sampai Bunderan jadi pada awalnya juga sampai DPR, kita berjalan bagus ya mereka juga ingin tertib. Jadi pada awalnya tertib bagus, di Yogyakarta saya kira tidak ada bakar-bakaran. Saya kira Reformasi yang di Jakarta itu ada kecemburuan sosial yang tajam antara si miskin dan si kaya yang akhirnya meledak dalam bentuk anarkhis. Di Yogya saya tidak hanya coret-corek tapi tak ada bakar-bakaran. Di Solo juga sedikit lebih tajam. Yang saya alami tenang-tenang saja.

T : Bagaimana dengan aksi damai yang berlangsung tanggal 20 Mei.

J : Aksi damai yang disini itu kan sebelum Pak Harto turun. Nah itu puncaknya, jadi Gadjah Mada memprakarsai untuk gerakan-gerakan yang menginginkan Reformasi. Dulu kan ada dua ingin revolusi dan ingin reformasi. Kita para cendekiawan menghendaki kalau revolusi akibatnya fatal sebab terjadi perang saudara. Kita reformasi mengembalikan ke rel yang benar dengan momentum Pak Rektor, kemudian unsur guru besar. Sultan ikut serta kemudian kesini lalu di Graha Shaba mengadakan orasi. Dari sini kemudian semua dosen, pegawai, mahasiswa itu *long march* ke keraton, lalu Sultan menyediakan keraton sebagai panggung untuk orasi. Lalu Pak Harto kan mengadakan Kabinet Reformasi tapi gagal. Akhirnya kan satu-satunya turunlah. Kita disini mendesak Pak Harto supaya turun.

T : Sekarang ini yang menonjol setelah reformasi, pada awalnya perbedaannya dengan Orde baru.

J : Jadi kita lihat saya kira orang mengerti semua. Pertama, saya melihat reformasi ini artinya begini, arah sudah bisa kita lihat adanya penyegaran, adanya perbaikan demokratis kemudian wakil-wakil rakyat yang dipilih sudah mulai. Tetapi persoalannya selama ini lalu euforia yang belum bisa mengendap, jadi habis ditekan lalu seakan ingin wow, ingin hiper, apa-apa ditunjang, tatanan yang sudah baik maunya ditunjang. Kedua, ini daerah-daerah juga merasa ingin kebebasan karena hukum mulai sentralistik lalu untuk mengembalikan kepada desentralistik itu malah kebablasan, ingin memisahkan diri dan sebagainya. Semuanya mengendap, mengendalikan diri kita harus bijak jangan sampai bermusuhan sebab terus terang ini saya kok ada semacam kecurigaan unsur luar yang ingin mengobok-obok, nah ini yang harus kita sikapi dengan kebersamaan. Unsur luar ini jahat yang menginginkan Indonesia ini tidak kuat tetapi mereka juga tidak menginginkan berantakan sebab kalau berantakan mereka juga tidak punya pasar.

T : Apa kira-kira sesudah kita Pemilu tahun 2004 ini lurus lagi cita-cita reformasi,

itu bagaimana.

J : Kalau itu tergantung dari kedewasaan tokoh-tokoh politik kita. Mereka juga tokoh-tokoh kenegaraan harus bisa mengendalikan tidak hanya untuk golongannya tetapi juga untuk kebangsaan. Saya kira itu.

T : Apakah Pak Adaby melihat arah kedewasaan mereka itu.

J : Ini sedang diuji, ada yang masih bernaafsu, ada yang sudah mulai mengendalikan diri, melihat kebangsaan. Saya kira itu sudah mulai, ya mudah-mudahan begitu.

9. Nama : Prof.Dr. Djoko Soekiman  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 23 September 1931  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tugas/jabatan yang pernah dipangku : - Ketua Jurusan Arkeologi (1967 sampai 1971)  
- Dekan Fak.Sastra dan Kebudayaan UGM (1971-1979)  
- Kepala Museum Sono Budoyo Yogyakarta (1980-1986)  
Jabatan sekarang : Dosen Fak. Budaya UGM Yogyakarta  
Alamat : Jalan Sekip N-31 Yogyakarta  
Wawancara dilaksanakan: Kamis, 10 Oktober 2002  
Tempat wawancara : Jalan Sekip N-31 Yogyakarta

### **Materi**

T : Nama Bapak.

J : Prof.Dr. Djoko Soekiman.

T : Tempat dan tanggal lahir.

J : Jombang Jawa Timur tanggal 23 September 1931. Sekarang sudah jalan 72 tahun.

T : Pada masa Orde Baru, bapak kemarin mendapat jabatan apa.

J : Pada masa Orde Baru berarti mulai tahun 1965, waktu itu saya menjadi dosen Fakultas Sastra UGM lalu menjabat Ketua Jurusan Arkeologi selama 7 tahun yakni mulai tahun 1967 sampai 1971. Tahun 1971 saya menjadi Dekan Fakultas Sastra dan Kebudayaan (sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya) sampai 1979. Disela saya belajar ke Belanda tahun 1974 - 1975. Tahun 1977 menjabat Dekan lagi sampai dengan tahun 1979. Tahun 1980 oleh Bapak Dr. Nugroho Notosoesanto dan Ibu Dr. Haryati Soebadio diminta

memegang Kepala Museum Sono Budoyo Yogyakarta sampai tahun 1986. Tahun 1987 saya pergi ke Belanda lagi. Tahun 1988 tugas belajar menyelesaikan program Doktor. Sekarang karena masih diperlukan saya masih mengajar.

T : Menurut Bapak apa yang dimaksud Orde Baru itu.

J : Gambaran saya, Orde Baru itu adalah sistem pemerintahan, cara berpikir dengan pikiran baru, sistem-sistem yang disesuaikan dengan orde yang baru itu. Dengan demikian hal-hal yang dianggap lama ditinggalkan diganti yang baru.

T : Perubahan-perubahan apa yang nampak waktu itu menurut Pak Djoko.

J : Saya kira sistem cara berpikir itu sendiri terutama dengan pemikiran-pemikiran (kalau saya duga dulu ya sama saja). Saya pernah menjadi Penatar P4, ya tugas saya untuk menegakkan Pancasila dan sebagainya dengan politik baru, mungkin hal-hal yang baru itu masuk, yang baru itu yang macam apa saya sendiri juga kurang perhatikan, yang penting Pancasila tegak lurus. Soal pelaksanaannya baru kembali jadi indoktrinasi dan sebagainya saya tidak berpikir sampai kesitu. Terus yang terpikir saya adalah ajaran-ajaran Pancasila yang dianggap mulia itu menegakkan keluhuran.

T : Lalu ada pula Orde Reformasi, bagaimana menurut Bapak.

J : Tentu saja yang dianggap bertentangan dengan Orde Lama dan Orde Baru yang tidak sesuai dan tidak adanya kebebasan yang penuh. Menurut pandangan saya Reformasi adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan hak-hak azasi manusia, disesuaikan dengan alam demokrasi, demokrasi yang mana, demokrasi yang kita ambil tentu adanya pikiran globalisasi sekarang ini, yang bisa diterima sesuai dengan kepentingan manusia.

T : Dulu ada SP 11 Maret 1966, pengaruhnya di Yogyakarta bagaimana.

J : Suharto dapat tempat, Sukarno dikucilkan. Saya tidak ingat ketika itu saya masih menjadi Ketua Jurusan Arkeologi. Yang saya ingat setelah G30S itu banyak karyawan yang tersangkut, dosen juga ada yang kena. Padahal karyawan-karyawan itu menurut penilaian saya tidak mengerti apa-apa sehingga dalam hal ini saya tak tahu sehingga kemudian terjadi kekurangan karyawan kemudian saya harus menggantikan mereka mengurus pembagian beras para karyawan bersama-sama dengan kawan-kawan lain.

T : Dosen ada yang terlibat.

J : Dosen di Sastra tidak ada tetapi dilain ada dan tidak diaktifkan sehingga banyak kekosongan dosen waktu itu lalu harus merangkap-rangkap apalagi sampai Ketua Jurusan jadi sangat berat.

- T : Mereka itu kemudian mengajar lagi.
- J : Jadi situasi pada waktu ya begitu, mahasiswanya juga. Waktu itu ada papan pengumuman di tempel nama-nama yang proses hukumnya bagaimana saya juga kurang tahu persis.
- T : Mereka ditangkap.
- J : Saya tidak tahu, yang jelas mereka tidak muncul lagi. Saat itu memang situasinya demikian, soal ekonomi juga sangat berat sekali. Sebagai pegawai untuk beli beras dan sebagainya cukup berat tetapi belajar mengajar berjalan terus.
- T : Kemudian mulai normalnya kapan.
- J : Cukup lama. Terasa normal tahun 1970. Antara tahun 1965-1970 itu bagi karyawan berat sekali. Tahun 1970 bisa normal artinya pegawai negeri dengan gajinya itu membaik terus terang saya bisa beli radio, tape recorder kuno dengan radionya.
- T : Dulu ada perubahan nilai uang seribu menjadi satu rupiah, bagaimana itu.
- J : Betul dengan pemotongan uang itu mengurangi jumlah uang, itu menguntungkan bagi pegawai.
- T : Sebelum itu apa ada pegawai di Fakultas yang berhenti lalu mencari kerja lain.
- J : Pada waktu itu ya sama saja, cari kerja sulit tapi betul-betul perjuangan karena untuk membeli selebar baju berat. Saya ya bahkan untuk membeli sepeda saja tidak mampu. Itu berlangsung sampai tahun 1970. Sesudah tahun 1970 itulah gaji agak mujur tapi ya lambat laun kembali lagi. Dan saya masih ingat Prof. Sumadi Sumowidagdo itu sebagai guru besar gajinya Rp 7.000,- dan dengan dikeluarkannya uang Rp 10.000,- gaji seorang guru besar harus tombok tiga ribu rupiah yakni dengan menerima satu lembar nilai Rp 10.000,- harus mengembalikan Rp 3.000,-. Semula memang terasa lumayan tetapi kemudian tendensi menurun lagi.
- T : Tapi masa Orde Baru kemudian ada pembangunan.
- J : Ya isitu memang nampak mungkin karena hubungan dengan luar negeri lancar sehingga pembangunan makin tampak dan ekonomi makin baik. Nah soal ada KKN dan istilah uang negara kemana jalannya saya tidak tahu. Jelas memang ada kemajuan. Sementara itu banyak yang kaya, kekayaan pejabat-pejabat juga melimpah-limpah karena urusan langsung dengan luar negeri tetapi kita pegawai negeri memang lumayan. Seingat saya gaji dosen seperti saya cuma Rp 6.000,- sekitar tahun 1975 dan sebagai Ketua Jurusan gratis tidak dikasih apa-apa.
- T : Mungkin pada tahun 1980-an semakin membaik.

- J : Tahun 1979 saya turun, perekonomian masih bisa bagus. Barometer ekonomi enden semakin membaik. Pegawai waktu itu bisa membeli kendaraan dengan mengangsur tetapi saya belum gunakan gaji saya untuk itu karena untuk biaya anak-anak.
- T : Di Yogya ada perubahan dari sepeda ke sepeda motor, kapan itu.
- J : Ya waktu itu saya diminta untuk mengangsur mobil Daihatsu 140 ribu sebulan dengan gaji antara 300 ribu hingga 400 ribu atau scoter dengan hanya 18 ribu sebulan, itu saja saya tidak berani. Tetapi kehidupan sudah mulai bagus, buku keperluan belajar akademis dari luar negeri melimpah pesat. Sebelumnya sama sekali tidak boleh masuk baik pelajaran apalagi buku tentang politik. Toko-toko buku yang bersifat konsumtif banyak, masyarakat lebih hidup.
- T : Tadi bapak bilang ada perhatian pemerintah membangun monumen-monumen, bagaimana itu, inisiatifnya dari mana.
- J : Sebenamya zaman Sukarno sendiri juga sudah membuat monumen untuk kebesaran bangsa itu sudah dilaksanakan. Sehingga ada Monumen Jakarta, Monas dan sebagainya. Kemudian makin lama kehidupan makin sulit antara masyarakat dengan cita-cita membuat monumen-monumen itu awalnya juga ada reaksi-reaksi.
- T : Kalau di Yogya mulai kapan ada pembangunan monumen-monumen itu.
- J : Seingat saya tahun 1970 ya sudah mulai tahun 1968 pertama kali akan membuat monumen Pangeran Diponegoro, waktu itu saya sendiri ikut berperan.
- T : Inisiatif pusat atau daerah.
- J : Waktu itu masih level pemerintah pusat karena ditangani Kodam, jadi pembangunan dibiayai pusat. Saya kurang paham, saya dapat tugas mencari bagaimana bentuk rumah P. Diponegoro yang saya sendiri tidak ketemu. Tapi bagi orang Jawa itu suatu kebanggaan adalah rumah yang paling besar sebagai seorang bangsawan. Baru tahun 1970-an seperti Monumen Jogja Kembali (Monjali) itu biayanya oleh daerah. Dulu juga ada pembangunan SKI (Kesenian), dalam pertemuan dengan P. Puger saya usulkan agar lokasinya 7 Ha dan dapat reaksi besar. Juga waktu pembangunan Monjali saya dianggap orang mimpi karena ingin seperti Bung Karno sifatnya tidak hanya nasional tapi juga internasional, jadi harus besar betul. Walikota waktu itu memberikan reaksi keras dan menganggap saya pemimpi. Tapi kemudian berhasil seperti Monjali biayanya sampai 10 milyar. Kalau biaya daerah tidak akan mungkin tapi karena itu Pak Harto pegang peranan besar. Dalam hal ini soal uang itu saya tak pernah diajak bicara.



- T : Apa karena Pak Harto terlibat langsung dalam peristiwanya sehingga ada perhatian besar pembuatan monumen itu.
- J : Bisa saja tapi karena peristiwa itu memang ada. Peristiwa Jogja Kembali kan ditariknya tentara Belanda dari Yogya dan Pak Harto berperan juga. Tapi saya dalam bekerja berdasar support Sultan Hamengku Buwono IX. Kebetulan saya diminta pendapat. Saya pergi ke Jakarta khusus didampingi teman-teman dari Fak. Teknik. Apa yang saya sarankan sesuai dengan jiwa serta yang memungkinkan. Ternyata tidak ada satupun yang ditolak seperti mengapa bentuknya kerucut, lancip, ada bulannya, tingginya dan sebagainya.
- T : Dulu yang meresmikan siapa.
- J : Pak Harto tapi kalau untuk peresmian monumen Diponegoro saya tak hadir karena saya hanya bisa naik sepeda. Untuk Monjali justru saya jadi pemandu. Ada rasa takut kalau tak bisa menjawab. Pak Harto mendengarkan saja, beda dengan Sukarno waktu saya memandunya di Borobudur, disitu ada diskusi dengan Bung Karno.
- T : Ada berapa monumen yang bapak ikut menanganinya.
- J : Masih bicara soal Borobudur). Yang saya ikut betul pertama Monumen Sudirman, Monumen Jogja Kembali, Monumen Diponegoro juga ada di Jawa Tengah, Monumen Hari-Hari Jadi Kabupaten.
- T : Dulu seminar sejarah nasional pertama di Yogya kan pak, tahun berapa.
- J : Betul tahun 1957 masih zaman Orde Lama. Tapi saya sudah Sarjana Muda, beberapa teman seperti Pak Ibrahim Alfian, Suryo, Sukanto, 3 orang pertama itu. Saya jadi notulis.
- T : Yang kedua.
- J : Lupa saya tapi saya mengikuti terus, pada zaman Orde Baru berlangsung terus. Tapi yang pertama itu yang penting. Waktu itu pandangan sejarawan kita masih simpang siur dan lucu-lucu. Seperti Sejarah Indonesia supaya mulai tahun nol. Contoh seperti Pak Yamin dengan perasaannya.
- T : Selanjutnya.
- J : Umumnya berlangsung di Jakarta. Di hotel Wisata atau hotel Indonesia. Sejak yang ketiga tahun 1980 selanjutnya berlangsung setiap 4 tahun sekali dan sudah diikuti dengan yang muda-muda. Dulu dengan PDK masih terbatas, setelah kegiatan oleh Proyek berlangsung hebat, di hotel terbesar, saya juga selalu ikut.
- T : Dari segi kegiatan kebudayaan seperti sejarah itu, pada masa Orde Baru kegiatannya apa meluas.meningkat.
- J : Ya betul-betul meluas, saya tak tahu masalah KKN nya. Usaha kegiatan ini

Direktorat sejarah berperan besar di samping LIPI. Banyak yang datang selain yang membawa paper sebagai pemakalah dan dibiayai sepenuhnya dengan uang cukup. Bagi kami yang datang dari daerah pasti aktif dan senang. Tapi kegiatan yang terakhir (Konferensi Sejarah Nasional VII tahun 2001 di Jakarta) peserta malah disuruh bayar. Memang dulu rupa-rupanya agak los. Juga tentang penulisan Sejarah Nasional yang lima jilid itu dibiayai kerjasama dengan Amerika sehingga ketua-ketua bidang itu ke Amerika. Saya sebagai Sekretaris II jaga markas.

T : Dulu juga ada seminar Sejarah Lokal.

J : Ada banyak. Kini sudah tidak ada lagi.

T : Jadi bagaimana perhatian pemerintah pada masa Orde Baru terhadap kebudayaan, apa cukup.

J : Dulu banyak, besar dananya. Soal dananya dari mana .... tapi ada melimpah. Ya juga waktu saya jadi Kepala Museum (Sono Budoyo). Waktu itu juga terasa museum hidup. Saya pernah ke Palu, Banjarmasin membina teman-teman disana. Biaya cukup banyak. Sekarang repot, biaya tak ada lagi.

T : Dulu itu begitu masuk Reformasi (Dikbud menjadi Diknas) kebudayaan itu dimana.

J : Nah ini juga, yang saya perhatikan museum, dulu biaya besarlumayan, sekarang? Karena itu saya pesan mudah-mudahan kekayaan museum tidak semakin habis karena kalau dipegang orang tak bertanggung jawab justru nanti bocor keluar. Kalau Jarahnitra mungkin masih banyak biaya tapi museum kasihan. Mudah-mudahan yang akan datang barang-barang berharga itu jangan sampai habis.

10. Nama : Drs. G. Mudjanto, M.A.  
 Tempat/tanggal lahir : Sleman, 7 Juni 1938  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Tugas/jabatan yang pernah dipegang : Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan  
 Jabatan sekarang : Dosen Universitas Sanata Dharma  
 Alamat : Bausasran DN III/606 Yogyakarta  
 Wawancara dilaksanakan : 12 Oktober 2002  
 Tempat wawancara : Bausasran DN III/606 Yogyakarta

## **Materi**

T : Nama Bapak.

J : Gregorius Mudjanto

T : Tempat/tanggallahir.

J : Sleman, 7 Juni 1938.

T : Jenis kelamin laki-laki ya pak.

J : Ya

T : Dalam masa bekerja ini pernah menjabat apa.

J : Jabatan tertinggi yang pernah saya duduki adalah Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan selama 2 periode.

T : Mulai bekerja tahun berapa.

J : Tahun 1960. Waktu itu karena orang pandai jarang, saya BA langsung disuruh kerja.

T : Kalau sekarang.

J : Sekarang saya sudah mengalami jadi Dekan, PR III ya sudah lumayan banyak pengalaman, saya serahkan kepada orang lain biar diberi kesempatan.

T : Itu tahun berapa.

J : Saya jadi PR III tahun 1977 sampai 1984. Lalu tahun 1985 sampai 1992 Dekan Fak. IPS.

T : Alamat Bapak.

J : Bausasran DN III/606.

T : Nah ini memasuki ke pertanyaan, bapak tadi bekerja mulai tahun 1960, jadi masih pada masa Orde Lama, nah menurut bapak yang dimaksud Orde Baru itu apa.

J : Itu harus pakai orde sebelumnya, orde sebelumnya kan Orde Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin karena tidak membawakan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia, Demokrasi Terpimpin itu digulingkan digantikan dengan orde lain yakni Orde Baru. Orde Baru itu demokrasiya mestinya Demokrasi Pancasila. Tetapi Demokrasi Pancasila itu lebih banyak omongnya daripada bekerjanya karena itu digulingkan juga.

T : Jadi Orde Baru itu sesudah G30S.

J : Ya, jadi Orde Lama itu Orde Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin itu sampai tahun 1966 lalu masih Presiden Sukarno kepala negaranya kemudian Demokrasi Pancasila muncul Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto.

T : Ada orang yang mengatakan SP 11 Maret 1966 itu coup d'etat, menurut

bapak bagaimana.

- J : Sekarang mesti membedakan apa yang dinamakan *exented history* dan *kredebel history*. Menurut *Exented history* ya Surat Perintah 11 Maret itu, surat perintah yang absah dari Presiden Sukarno yang sudah merasa terpojok tidak bisa mengendalikan kehidupan sosial politik tanah air, lalu menyerahkan kekuasaan kepada Suharto membuat kehidupan kenegaraan ini lebih normal. Tapi ini suatu kemungkinan pada suatu saat nanti ditemukan dokumen-dokumen atau ada keberanian dari orang-orang yang tahu untuk mau ceritera apa sesungguhnya yang terjadi tanggal 11 Maret 1966. Sudah mulai muncul misalnya Abdul Latif. Kolonel Kostrad mesti tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia sudah menulis buku lalu ada lagi Subandrio, Subandrio juga kan pasti tahu apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret, dia juga sudah menulis buku, lalu masih ada beberapa orang lain yang menulisnya. Akan muncul pemberitaan atau muncul informasi bahwa sesungguhnya Surat Perintah 11 Maret itu adalah surat yang dibuat oleh Bung Karno karena ia dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Suharto. Sekarang memang belum ada informasi menyangkut apa yang sesungguhnya terjadi itu belum dibuka secara luas. Tetapi tidak mustahil nanti kalau situasi memungkinkan bisa saja terjadi.
- T : Begini pak kalau setelah Pak Harto naik terjadi pembubaran PKI itu bagaimana di Yogyakarta.
- J : Di Yogyakarta itu pembubaran PKI bagus kemudian tanggal 20 Oktober 1966 ada rapat umum di Alun-alun lalu waktu itu yang menjadi penggeraknya Komandan Korem, lalu ada tokoh PKI daerah namanya Haryono beserta dengan kawan-kawannya disuruh membaca pengumuman bahwa PKI bubar. Jadi dari situ dalam dokumen yang membubarkan PKI itu bukan tentara tetapi tokoh pengurus PKI sendiri termasuk salah satunya itu Haryono. Jadi itu tertinggal nanti kalau dilihat dari dokumen saja orang mendapat petunjuk bahwa yang membubarkan PKI itu PKI sendiri.
- T : Jadi itu dalam suatu apel.
- J : Ya lalu pidato tokoh-tokoh PKI, tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh Islam, lalu diberi semacam kesepakatan “kami mengutuk G30S/PKI”.
- T : Kalau kelaskaran-kelaskaran di Yogya itu bagaimana.
- J : Kelaskaran-kelaskaran itu memang ada misalnya kalau PKI punya Pemuda Rakyat, PNI punya Banteng lalu GP Ansor dari NU.
- T : Kalau mahasiswa.
- J : Kalau mahasiswa itu ada, saya lupa tetapi ada kumpulan-kumpulan mahasiswa, ada sejumlah yang dulu sudah ada misalnya HMI kemudian

PMKRI, GMKI itu ada.

- T : Sebenarnya pada masa Orde Baru itu menurut Bapak apa yang menonjol.
- J : Yang menonjol KKN nya itu. Ya kalau kita mau agak fair sebenarnya ada hasilnya ya. Orde Baru itu menghasilkan secara materiil kan banyak pembangunannya, gedung-gedung, pabrik-pabrik besar, perusahaan banyak. Andaikata tidak dilakukan penyelewengan-penyelewengan baik konstitusional maupun yuridis formal itu mungkin baik. Nah coba kita lihat ini tadi yang terakhir hasil dari Orde Baru itu kan pabrik-pabrik dan sebagainya.
- T : Kalau kehidupan masyarakat misalnya pegawai negeri bagaimana.
- J : O ya taraf ekonominya baik itu ya lumayan. Karena kita lihat semua pegawai negeri banyak yang pakai sepeda motor, dulu sebelumnya pakai sepeda, saya saja punya kendaraan setiap anak punya satu.
- T : Kalau dari segi pendidikan bagaimana.
- J : Pendidikan juga saya kira meluas begitu. Jadi Orde Baru itu kehancuran konstitusional ya, maka itu kan senadainya Presiden Suharto itu ya sudah saya jadi presiden dua periode saja atautiga, empat periode karena masih belum stabil, maka itu ia harum namanya. Tetapi karena ia serakah ya semua orang bilang ia itu preman. memang ada plus dan minusnya. Meskipun diktatorial asal tidak menyangkut hak-hak azasi manusia sebenarnya rakyat itu mau menghargai karena rakyat sejahtera itu kan dikuasai militer ya tak apak-apa, asal kesejahteraan terjamin, keamanan terjamin.
- T : Pak Mudjanto juga menjadi Penatar P4 kan, bagaimana pandangan bapak tentang itu.
- J : Ya yang saya ikuti dan saya amati kalau untuk DIY itu lumayan cukup. Penatar-penatarnya itu memang orang yang mempunyai pengetahuan yang bisa diandalkan. Jadi kalau menatar, menatar masyarakat, kalau saya menatar mahasiswa. Penatar-penatar itu menguasai materinya, metodenya, jadi disini kalau dosen yang tak disenangi oleh atasannya lalu dijadikan penatar, guru yang tak bisa diandalkan pengetahuannya dijadikan guru Pendidikan Pancasila. Nah ini pengalaman sebagai pengajar.
- T : Sekarang ada pemikiran untuk dilanjutkan.
- J : Ada karena yang salah itu bukan P4 nya tetapi orang-orangnya. Jadi harus dilihat dari segi orang dan materinya. Kalau tidak lewat P4 jalur untuk menyebarluaskan Pendidikan Pancasila menjadi berkurang. memang ada yang berpikir bahwa yang terjadi itu bukan penataran tetapi indoktrinasi sama seperti dulu. Nah itu memang ada benarnya di daerah tertentu bisa jadi karena penguasaan materi dan metode yang kurang baik lalu bertentangan.

- T : Yang mendorong timbulnya reformasi ini menurut bapak.
- J : Menurut hemat saya itu karena rakyat sudah jeleh, sudah bosan dengan kepemimpinan Suharto yang sudah berjalan 32 tahun dan kelihatannya memang ada tanda-tanda keberhasilan itu sudah sampai pada titik puncak. Karena sudah sampai dipuncak ya tidak bisa lagi naik sudah turun, orang dulu takut pada Suharto sekarang tidak lagi. Ini ada unsur-unsur euforia dan unsur-unsur DPR-nya garang, waktu itu Harmoko Ketua DPR/MPR kirim surat kepada Presiden supaya mengundurkan diri, berani. Lalu menteri-menteri, saya lupa menteri-menteri Kabinet Pembangunan itu 15 atau 16 yang pegang posisi kunci tidak mau lagi duduk dalam kabinet. Lalu kan Sukarno merasa tidak bisa lagi meneruskan sebagai presiden, ia ingin sebenarnya mengundurkan diri dengan cara yang penting. tetapi tidak diterima oleh rakyat banyak, Suharto harus dihukum.
- T : Di Universitas bapak bagaimana mahasiswa waktu itu.
- J : Ya, universitas waktu itu ramai juga tetapi tidak luar biasa. Waktu itu kan namanya IKIP, IKIP itu kan terdiri dari orang-orang yang berpikirnya sedikit dewasa. Tetapi ya memang dalam hal-hal yang menyangkut politik itu Sanata Dharma itu tidak radikal. Mudah diarahkan.
- T : Kata orang waktu itu ada sampai ABRI yang masuk kampus.
- J : Yang ABRI masuk kampus itu di Gadjah Mada.
- T : Itu Pak Mudjanto ada peristiwa tanggal 20 Mei 1998 di Alun-alun.
- J : Saya datang juga, yang masih saya ingat ya karena hari itu kebetulan Hari Kebangkitan Nasional lalu rakyat akan merayakan, direncanakan demo untuk kemunduran Suharto. Lalu saya kira bisa disebut semua universitas mengirimkan wakilnya pergi ke Alun-alun sehingga orang menggelodak, bisa dikatakan sejuta orang lalu disana dengan poster-poster menyampaikan aspirasi lalu Sri Sultan dan Paku Alam sudah menyiapkan teks untuk mencanangkan pembaharuan di negara kita, mengeluarkan Maklumat. Suatu hal yang luar biasa Sri Sultan dan Paku Alam berani, padahal kan ada resiko mengadakan reformasi kok bisa, Suharto masih presiden waktu itu. Karena pamornya sudah turun ya membiarkan saja itu terjadi disini. Lalu tanggal 21 terjadi Suharto lengser.
- T : Sekarang sudah resmi reformasi, bagaimana menurut Bapak.
- J : Menurut saya reformasi itu belum reform. masih banyak ya masih ada KKN lalu yang paling tidak menyenangkan itu orang sekarang mudah berkelahi, membacok, penjarahan, perkosaan semacam itu. Saya pikir-pikir kok orang Indonesia begini ya padahal saya mula-mula mengatakan orang Indonesia itu orang yang suka senyum, ramah tamah, baik-baik.

- T : Demokrasinya bagaimana.
- J : Demokrasinya dalam arti kebebasan itu memang mungkin kebebasan yang diperoleh rakyat tetapi kebebasan bereksis, eksisnya apa kebablasan. Jadi kebebasannya itu kebebasan bacok apa itu, yang jelek, bebas bicara juga.
- T : Akhimya bagaimana pak reformasi kita ini, artinya kapan situasi yang seperti ini berakhir.
- J : Itu pertanyaan yang mudah diucapkan tetapi bagaimana mewujudkannya nah itu susah.
- T : Padahal paling tidak harapan ya pak.
- J : Semua seperti mengukur sarung, maksudnya pangkalnya mana ujungnya mana. Kalau kita mau melihat antara keamanan dan ekonomi itu kan tidak bisa sendiri-sendiri. jadi harus simultan.
- T : Kalau menurut bapak tahun 2004 nanti ada pemilu, setelah pemilu bagaimana.
- J : Saya ya sebagian masih bisa optimis, mungkin ada penggisiran-penggisiran sehingga saya agak tidak yakin kalau masih banyak yang tidak aspiratif.
- T : Terakhir Pak mengenai keistimewaan DIY, bagaimana.
- J : Kalau keistimewaan DIY itu tidak ada masalah, cuma yang tidak setuju itu kan beberapa saja. Usul kami itu sebaiknya jadi raja saja, Kepala Daerah dan tidak bertanggung jawab. Lalu gubernurnya dipilih. Lalu bagaimana mengatur yang jadi kepala daerah itu boleh bukan Sri Sultan atau harus Sri Sultan yang pegang jabatan. Yang jadi masalah itu soal tanah, sekarang tanah itu belum disertifikat oleh Kraton. Banyak yang ditempati rakyat dan rakyat itu bisa memiliki sertifikatnya. Wah itu ruwet. Yang lain-lain sebenarnya hanya situasi sekarang masih beberapa hal yang seperti pariwisata, pertanahan, kebudayaan, pendidikan memang masih merupakan nilai-nilai plus jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sri Sultan juga menyadari pada suatu saat bisa saja terjadi itu keistimewaan juga dimiliki daerah-daerah lain. Kalau daerah lain lebih maju bisa saja sehingga nilai keistimewaan berkurang.
- T : Lalu keistimewaannya begitu nanti sultan yang gubernurnya sekarang apakah sampai seumur hidup atau bagaimana.
- J : Sekarang ada periode tahun 2004 juga. Itu nanti tergantung bagaimana UUD mengatur tetapi saya berharap supaya Pemerintah RI itu tidak memperlakukan dengan sia-sia, jangan memperlakukan DIY secara sewenang-wenang karena dari sejarahnya punya andil lebih dari yang lain. Dulu beberapa daerah belum masuk RI, daerah Yogyakarta masuk, sesepuhnya masuk, pengaturan pertamanya baik kalau daerah lain bisa sama ya dipersamakan lagi.



11. Nama : Herman Joseph Wibowo, Drs  
 Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 19 Nopember 1940  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tugas/Jabatan :  
 Dalam perjuangan : Ketua Pemuda Katolik Cabang Jetis Yogyakarta  
 Jabatan Sekarang : Peneliti Madya, Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta  
 Alamat : Jl. Halmahera F. 163, Perum Nagatirta II, Yogyakarta  
 Wawancara :  
 Dilaksanakan : Pada tanggal 21 Nopember 2002  
 Tempat Wawancara : Balai Kajian dan Nilai Tradisional Yogyakarta

### **Materi :**

- T : Apakah bapak bisa menjelaskan kondisi sodial, politik ekonomi, budaya, hukum menjelang keluarnya Surat perintah 11 Maret di daerah Istimewa Yogyakarta ?
- J : Kondisi Poleksosbud pada waktu itu menjelang supersemar di DIY hampir sama dengan kondisi di seluruh Indonesia, yaitu didominasi oleh nuansa komunis, Karena waktu itu, PKI dan ormas-ormasnya mendominasi kehidupan semua sektor, baik di dalam pemerintah maupun di dalam kehidupan masyarakat. Komunis memang paham yang monolit sehingga bukan komunis kalau tidak menjiwai seluruh sektor kehidupan. Hal seperti ini diperkuat juga oleh jumlah anggota partai yang hampir 60 persen jumlahnya dari seluruh anggota partai-partai yang ada. pada tahun 1965.
- T : Apa arti Orde Baru itu.
- J : Orde Baru merupakan suatu system atau cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang berdasarkan atau berlandaskan :
- Ideologi : Pancasila yang murni dan konsekuen seperti termuat dalam UUD 1945 dan penjelasannya.
  - Ketatanegaraan : UUD 45 dan hukum tak tertulis yang sesuai dengan Pancasila.
  - Mental : Kemurnian pengabdian kepada seluruh rakyat Indonesia.
  - Strategi Dasar : Panca tertib dalam bidang: Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum Pertahanan dan keamanan (Hankam).
- Tujuan Orba : Memperjuangkan dan mendahulukan kepentingan rakyat umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. (*Pro Bono Publico*).
- Prinsip Pelaksanaanya : mendahulukan yang lebih penting (*Ambeg Parama*)

Arta)

T : Apa sebab tanggal 11 Maret 1966 merupakan tanggal lahirnya Orde Baru?

J : Tanggal 11 Maret 1966 merupakan tanggal lahirnya Orba. Tanggal tersebut merupakan lahirnya Supersemar, yang digunakan pertama dalam keputusan No. 1/3/1960. Tanggal 11 Maret 1966 membubarkan PKI termasuk semua organisasi matelnya, dari tingkat pusat sampai daerah.

Sidang Umum ke IV MPRS Juni 1966 meningkatkan Supersemar menjadi Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yang mengandung beberapa hal yang kurang sesuai lagi dengan perkembangan perjuangan terwujudnya ORBA. Oleh karena itu dalam TAP MPRS No. XIV/MPRS/1968 dinyatakan bahwa perjuangan hanya digunakan untuk :

*Come back*-nya PKI

Membersihkan aparaturnegara dari semua bentuk penyelewangan

Mengamankan kebijaksanaan pelaksanaan UUD 45

Memelihara persatuan bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan RI atas landasan Pancasila dan UUD 45.

T : Bagaimana pendapat bapak bahwa ada pendapat yang mengatakan sebenarnya Surat Perintah 11 Maret itu merupakan perebutan kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno?

J : Hal itu bagi saya belum jelas, karena itu hanya suatu spekulasi politik karena dikaitkan jatuhnya rezim Suharto. Seolah-olah selama kepemimpinan Suharto dalam Orba yang gagal dikaitkan dengan suatu spekulasi politik bahwa Suharto mengadakan *Cuop* terhadap Sukarno. Ingat! Bahwa lawan-lawan politik Suharto ingin memberi predikat baru bahwa seolah-olah Sukarno di kup Suharto. Jadi sekali lagi bahwa rumor semacam itu perlu dicermati maknanya. Lebih  $\frac{3}{4}$  dari aspek politik.

T : Pada tanggal 14 Maret 1966 rakyat Yogyakarta menyambut pembubaran PKI dengan mengadakan apel dan pawai, Mohon jelaskan

J : Sekali lagi saya katakan bahwa dengan bubarnya PKI berarti mulai bangkit golongan agama yang saat pra kup semuanya bungkam. Maklum karena pada jamannya Sukarno sebenarnya tidak ada kelompok-kelompok politik yang berani mengoreksi kepemimpinan beliau. Siapa yang berani mengoreksi, apalagi menyalahkan adalah dicap sebagai anti revolusi, sebagai antek Nekolim (neo Kolonialisme). Jadi dengan 14 Maret 1966 berarti bangkitnya kaum agama bukan lagi bungkam tetapi ikut ambil bagian dalam percaturan politik praktis. Tetapi golongan nasionalis yang diwakili oleh PNI dan ormas-ormasnya tidak tampak gembira, karena sibuk membersihkan diri dari pengaruh Ali Surahman, sehingga ada dualisme kepemimpinan PNI, PNI

Osa Usep PNI ASU. Itulah sebabnya dengan jatuhnya Sukarno PNI (golongan nasionalis) tidak menyambut secara eksplosif, bahkan dengan murung.

T : Bagaimana pendapat bapak tentang munculnya kelaskaran di Yogyakarta seperti Laskar Ampora Aris-Margono.

J : Laskar-Laskar antara lain Aris Margono, sekai lagi merupakan perwujudan kesadaran benegara dan bertanah air, terutama oleh kaum mudanya. Semula kekuatan itu tanpa nama (anonim) tetapi karena Aris Margono kebedhil, beliau berdua dijadikan "Santo" oleh kekuatan kaum muda yang di bawah naungan nama laskar.

T : Bagaiman kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum pada masa Orde Baru?

J : Kondisi Polesksosbud pada masa Orde Baru memang berbeda dengan sekarang. Mungkin karena Suharto itu otoriter, maka semua ekspresi keterbukaan belum muncul. Namun ada gejala-gejala mulai ada dependensi dalam poleksosbud, hal itu diperkuat dengan adanya isu-isu politik KKN dalam bidang kehidupan politik dan ekonomi nasional. Hukum menjadi mandul karena semua penyimpangan hukum dibesut menjadi sedemikian rupa sehingga penyelewengan menjadi kebenaran. Apalagi setelah Suharto menempatkan diri dan memposisikan diri sebagai orang terkuat di Indonesia sehingga karismanya mejadi superkuat, dan melibatkan seluruh keluarganya menjadi pemegang kekuasaan di semua sektor kehidupan.

T : Bagaiman pengaruh dualisme kepemimpinan nasional di daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta?

J : Kurang jelas apa yang dimaksud dengan "Dualisme kepemimpinan". (Sultan menjadi Wakil Presiden).

T : Apa dampak diangkatnya Jenderal Suharto sebagai pejabat Presiden RI terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

J : Saya kira sama saja dampaknya pada tingkat nasional, mengingat Suharto sebagai presiden dan DIY sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI. Tetapi boleh dikatakan bahwa karisma sultan tetap dominan. Masyarakat Yogya lebih melihat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai : *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun, Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo, Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX.*

Dari segi orientasi kepemimpinan sultan saya rasakan lebih kuat dari pada kepemimpinan Suharto. Sifat paterlistik masyarakat Yogya dalam hal ini lebih jelas, apalagi dalam sejarah Suharto di jaman revolusi jadi bawahan

sultan.

- T : Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Orde Baru.
- J : Rakyat Yogya menggunakan asas demokrasi model feodalisme. Jadi pemahaman demokrasi berdasarkan pada orientasi sultan sebagai *Ascribed Leader* (pemimpin keturunan) sehingga model demokrasi masyarakat Yogyakarta melihat sultan sebagai figur yang “Tak pernah salah”. Apa kata sultan adalah menjadi kehendak rakyat.
- T : Bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum menjelang reformasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- J : Secara nasional (makro) memang ada bedanya dengan sebelum reformasi tetapi karena kita belum mempunyai konsep reformasi yang matang jadi pelaksanaan reformasi amburadul. Reformasi ada yang mengartikan “semua gue”, bahkan penyelewengan pun dianggap reformasi. Sistem dan prosedur dilanggar. Itu dalam tatanan sosial. Sedang dalam politik, ekonomi dan budaya sedang menghadapi kebingungan apa maunya bergerak di era reformasi ini.
- T : Faktor-faktor apa yang mendorong timbulnya reformasi dari dalam maupun dari luar?
- J : Munculnya reformasi karena adanya ketidak konsekuenan pemerintah melaksanakan amanat penderitaan rakyat, rakyat tidak puas dengan pengelolaan. Sebenarnya pada hakekatnya reformasi lebih berarti ingin membebaskan diri dari lingkungan KKN, ingin dependen dan bebas. Hal ini memuncak pada era otonomi daerah sekarang ini. Bagaimana munculnya keinginan menjadi otonomi di daerah-daerah, ingin menciptakan kabupaten sendiri, propinsi sendiri dan negara sendiri.
- T : Bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum pada masa reformasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- J : Di Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta memang berbeda. Ada kekhususan. yaitu keinginan mempertahankan DIY sebagai terjadi menurut sejarah. Kalau para politisi di DIY menginginkan tidak berlakunya keistimewaan Yogyakarta, katakan sultan sebagai pemimpin daerah, maka rakyat toh tetap menempatkan tokoh Sultan sebagai *Ngerso Dalem*, apa jadinya, maka akan terjadi konflik politik dan pemerintahan. Harus diingat latar belakang histories terjadinya DIY dan Surakarta. Sama-sama Jawa Yogya lebih Jawa, meski Solo sekarang ini ada kemauan untuk menempatkan sunan sebagai pimpinan yang karismatik, *ascribed* dan berwibawa. Ingat saja misalnya pada dihidupkannya kembali Gerebeg Maulud di sana.

- Pemberian gelar tradisional dari Sunan Solo kepada pemimpin terkemuka baik dalam maupun luar negeri.
- T : Apa yang dilakukn oleh masyarakat (pemuda, pelajar, mahasiswa, intelektual dan sebagainya) pada masa menjelang reformasi dan reformasi di Daerah Istimewa Yogyakarta).
- J : Masih terbatas pada konsep saja. Belum ada yang lebih jelas. Karena sekali lagi arti reformasi samar-samar. Apalagi di bidang politik praktis. Gerakan kaum muda dalam mengekspresikan kehendaknya masih didekte oleh partai-partai dan orang-orang pusat.
- T : Apa sebab hari kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1998 dipakai sebagai aksi damai (*pisowanan ageng*) menuntut reformasi total?
- J : Karena hari itu secara historis mempunyai makna kebangkitan pendidikan di Indonesia, bukan di Yogya saja. Meski pusatnya ada di Yogya. Jadi 20 Mei 1998 di jadikan moment untuk menjadi "*pisowanan ageng*" mendapat dukungan nasional (dan internasional) dan sedikit banyak ada gagasan sultan bahwa sultan pun telah mereformasi diri, bahkan lagi sebagai raja di jaman feodal.
- T : Bagaimana pelaksanaan *pisowanan ageng* pada tanggal 20 Mei 1998 di Alun-alun Utara ?
- J : Pelaksanaan *pisowanan* boleh dikatakan sebagai *silent revolution* karena tentara dan polisi tidak menunjukkan pakaian perangnya, semua golongan mendukung bahkan kerjasama dalam menjamin akomodasinya. Dikordinasi sedemikian baik sehingga tidak terjadi semacam "kontra *pisowanan ageng*". Dalam hal ini pengertian reformasi atau mengatur atau mengemas kembali menjadi cita-cita rakyat.
- T : Apa makna Maklumat Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAK Paku Alam VIII pada tanggal 20 Mei 1998 di Alun-alun Utara tersebut ?
- J : Maklumat sultan pada tanggal 20 Mei 1998 sebenarnya merupakan maklumat yang mengarah pada mana : kembali pada jalan yang benar, kembali manusia pada kodratnya, bermoral dan altruistik (bukan egoistik). serta *Sabda Pandhita Ratu*.
- T : Bagaimana kehidupan demokrasi pada masa reformasi di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
- J : Belum jelas. Mengapa, karena kita telah lama selama 32 tahun hidup dalam jaman otoriter, sehingga para bapak-bapak juga belum siap menata demokrasi sebagai yang dikehendaki . Yang arti demokrasi di Yogya (mungkin Indonesia) merupakan demokrasi yang menempatkan partai sebagai wakil rakyat yang representatif, sehingga rakyat tidak secara bulat mengetrapkan

demokrasi yang mumi.

T : Bagaimana proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ?

J : Pemilihan gubernur sementara masih menggunakan peraturan daerah. Dimana otomatis yang menjadi gubernur adalah Sultan Yogya. Tetapi untuk wagub ada perang saudara antara yang berorientasi pada budaya Solo ada yang ke Yogya. Lawan wakil gubernur yang sekarang jadi, adalah yang berorientasi pada budaya Yogya. Sedang lawannya ingin mengembalikan budaya kombinasi Yogya-Solo seperti pada saat Paku Alam ke VIII berkuasa, tentu saja ada interest lainnya yang mungkin mendominasi adanya perang saudara itu. Tetapi rakyat tidak menggubris, karena pengaruh Paku Alam tidak seperti Sultan.

12. Nama : Simon Parjan  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul 31 Maret 1939  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tugas/Jabatan :  
Dalam Perjuangan : Tentara Pelajar  
Anggota DPRD Tingkat II Kodya Yogyakarta  
Jabatan Sekarang : Pensiunan Guru  
Alamat : Wiladeg, Karangmojo, Gunung Kidul  
Wawancara :  
Dilaksanakan Pada : 26 Oktober 2002  
Tempat Wawancara : Rumah Wiladeg, Karangmojo, Gunung Kidul

### **Materi**

T : Rikala permulaan Orde Baru kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya hukum menjelang keluarnya Surat Perintah 11 Maret di DIY kados pundi.

J : Rikala semanten kula dados guru wonten Babarsari lajeng wonten Parkindo kota Yogyakarta rak taksih dereng pun gabung sasampunipun Pak Harto lajeng dados PDI. Kula dados anggota DPR meniko tasi saking unsur Parkindo.

T : Lajeng rikala tahun 66 mbok bilih tasi kemutan keadaan sosial, politik kala semanten kados pundi pak.

J : Bibar 65 kawontenan menika, wangsul malih dateng kapitadosan-kapitadosan, rumiyen rak geser dating partai PKI (Partai ingkang ageng). Sareng wonten peristiwa (G.30S) tiang meniko lajeng sami wangsul dateng kapitadosan, ingkang rumiyen tebih saking keagamaan sami wangsul nah

ingkang radi kirang pas menika bade wangsul dateng pundi, mergi waunipun rak dereng, umpami penduduk mriki Islam abangan, nyatanipun wangsul dateng Islam kok mboten pun tampi lajeng pados ingkang pas, buktinipun gereja-gereja menerima, sekiranya mereka itu di lain tempat tidak sreg ngantos kedadosan mereka itu banyak yang ke gereja kammongko mboten ditakoke, mboten wonten sak wasangka, mboten kados sak menika, tiang masuk di situ mumi. Lajeng sak wetawis wedal wonten ingkang mlebet masuk kapitadosan menika.

T : Lajeng kawontenan ekonomi kados pundi pak.

J : Menika kagabung kaliyan alam, dados 65 menika jawahipun mriki menika ngantos dumugi pertengahan Februari mongko sakmeniko Oktober kemawon sampun ngaten, lajeng ingkang kulo sifati naming sekitar kulo nggih? Gunungkidul menika lajeng banyak busung lapar. (Hongerudin). Wonten balai-balai menika katah dipun kempalaken, menika ngantos setahun lajeng turun jawah. Lajeng wonten tikus ingkang mboten saget dipun nalar, tikus, menika ribuan, namung rikala sementara mboten wonten colong jupuk, boten wonten kok nyolong weduse tangga, dados aneh, terpukul peristiwa 65, mboten wonten tiang menika lajeng warna-warna. Wonten peristiwa aneh, mboten wonten tiang nanem wijen namung tukul wijen. Dos pundi menika ? Panenipun kekintalan ngantos 65 menika saderengipun Orde Baru menika sasampunipun peristiwa menika boten wonten tiang colong jupuk.

T : Lajeng penegakan hukum kala semanten kados pundi pak ?

J : Kala semanten gampilipun rikala Pak Harto pegang kuasa, mboten wontun tiang ingkang wantun awit ing mriki menika tiang ingkang siang pun pendet lajeng pun ceguraken wonten luweng Semanu, ngandapipun wonten toyo lebet. Dos mbonten wonten ingkang dipun pendet lajeng protes, menika mboten wonten. Rumiya rak pemerinath diamankan. Lha menika rekaosipun yen ingkang nuding menika boten remen, dereng tentu lersipun.

T : Yen kala semanten menika kesenian menika kados pundi pak?

J : Kala semanten menika kesenian dipun dominasi kangge Lekra, lajeng ingkang sami temandang kula kemutan malih, nger TK menika mesti gadahipun melati, sareng menika ical kula wonten Ngayogja.

T : Rikala bibaripun PKI, Kesenian menika sampun arang sanget, namung rikala festival seni Gunungkidul masa Orde Baru kok katah sanget pesertanipun menika kados pundi pak ?

J : Menika ngaten, mboten menawi tiang menika menawi sampun tegang, kepingin kesenian menika lho, kado dene gending-gending, lajeng akhir-akhir menika menawi saking gereja Katholik sampun nerusaken gending menika,



lajeng wonten tlatah Ngayogya sampun dipun sinau, Gereja Protestan malah langkung kantung, aneh ta menika ? Mergi ngaten Katholik menika Roma terus ke sini, Protestan menika saking negeri Belanda, negeri Balanda menika mengilen. Wonten misi yen kesenian wayang menika berhalu, mangka menika naming gambar. Milanipun rumiyin dipun awasi saking Gereja Protestan saking GKR negeri Belanda. Ngantos kala tahun 70 menika kemutan gamelan ugi mekaten awit menika pengiring wayang. Saminipun yen Protestan supit menika menawi dasaripun kesehatan boleh ning yen nganggo ewuh janggan, ning pungkasanipun renggang sebab budaya sumbang-sinumbang menika rak Jawi ta ?

- T : Ingkang pun westani Orde Baru menika sapangertosanipun bapak kados pundi ?
- J : Rikala semanten kula taksih sinau Orde Baru menika system yang lebih maju tidak seperti yang dulu, sitem pemerintahan. Ning menawi wonten rakyat mila angel.
- T : Sambetipun kaliyan peristiwa 11 Maret kados pundi pak ?
- J : Menika gampilipun serat ingkang tumuju dateng Pak Harto kangge menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada waktu itu, sebab Pak Kamo piyambak menghadapi PKI boten wantun (maksudipun kados DI, TII penyelesaianipun namung anjuran mertobata mergi menika pun anggep anake dewe) pramila lajeng pun lemparaken dateng Pak Harto, sebab Pak Kamo rumaos yen ngadepi kuwi pada karo ngedepi anak putune dewe sebab jaman penjajahan kelingan ayo pada bangkit....., saenggo wonten beban moral
- T : Lajeng wonten pendapat ingkang nyebutaken yen sakjane Surat 11 Maret hanya sebagai alat perebutan kekuasaan.
- J : Yen ngertos kula gendeng Pak Karno menika mboten saget tegas amargi kados nganten wau mila amana, La isinipun serat menika kula piyambak kurang mangertos. Yen kados jaman DI, TII boten nate kok dioyak sampai ketangkap. Kula mireng dewe menika saking tentara, kok tidak terus dikejar? Perintah komanadn jebul nginggil nggih mekaten. Yen kula mastani Sukarno menika kemutan"rikala merdika kowe ki ya melu memperjuangkan, nek kowe mursal ki ya tak dandani" yektosipun rikala Hamengku Buwono pun kendeli menika mergi RMS lajeng pun sikat, menteri pertahananipun lajeng pun lengser. Mergi waduh aku ora tekan mergo kuwi biyen melu berjuang jaman kemerdekaan janipun samenika Timur, Tengah, Barat menika undrek-undrekan, wontenipun Piagam Jakarta menika sisih Timur", nek ngono aku ki ta madeg dewe: Ha lajeng wiwit, ingkang punya jiwa besar nek ngono

“Ketuhanan Yang Maha Esa wae, yen sak menika sami udrek, ingkang sepuh-sepuh menika nggagas” lawong biyen udrek-udrekan kok, digawe meneh udrek meneh. Lha jiwa besar Islam itu ada masak dari Timur yang diharapkan maju karena potensinya malah mau berdiri sendiri. Kalau GusDur bilang kowe ki berarti mau ngeloki sing wis digawe wong-wong sepuh biyen, jiwa besar lho GusDur menika boten baen-baen, mila boten ngewangi sapa-sapa. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa Kulon ya nganggo wetan ya bisa nganggo. Yen klentu nggih monggo ning jenengan pun pirsane nek anake mursal ya kudu di benerke ora digebuki.

- T : Lajeng menika rikala tanggal 14 Maret Yogyakarta menyambut gembira dengan dibubarkannya PKI kemudian mengadakan apel lan pawai. Mohon dijelaskan.
- J : Raosipun nganten rumiyen menika ekstrim rakyat menika kabeh senang dadi contohipun adi kulo ipe niku meja dijipuki arep dienggo kampanye, mangka meja neng ngomah dijaluki tanda tangan dadi arep jotosan rak ya kebangetan to ya ? berarti tindakannya itu terlalu serba baik sehingga boten ngertos kuwi kepiye ning kok dadi kaya ngono. Menika lho !
- T : Bagaimana pendapat bapak tentang munculnya kelaskaran di Yogyakarta seperti laskar Ampera Aris-Margono
- J : Yang saya ketahui seperti KAMI dan KAPI itu timbulnya dari Jakarta di sini hanya mendengar dan menyetujui. Sedang dari Yogya sendiri saya kurang tahu. Karena waktu itu urusan anak muda, sementara saya sendiri waktu itu sudah memikirkan keluarga. Tahun 66 kula menika rak lahiran 30 dados sampun sepuh.
- T : Kados pundi pengaruh dualisme kepemimpinan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
- J : Rumiyyin Hamengku Buwono IX rak lajeng wonten Jakarta kantoripun, lajeng Paku Alam VIII wonten mriki, pangraos kula boten wonten raos beda ingkang pun raosaken, pangertosan kula lho ning mbok menawi pribadi. Lha saiki pancene Hamengku Buwono IX kantore ana Jakarta ! yen mriki menawi tuwi.
- T : Tidak ada pengaruhnya terhadap rakyat ?
- J : Boten.
- T : Mungkin rakyat merasa tidak dipikirkan atau bagaimana ?
- J : Mboten dumugi semanten, malah naming sareng sampun mengker menika malah wonten raos-raos, Pak Hamengku Buwono IX menika dereng nate ngusulaken daerahipun dipun menapaken gampilipun rak mbok menawi jiwaniipun Hamengku Buwono IX pekewuh yen mikiraken kagunganipun

piyambak menika. Saminipun menawi boten saking mriki (pusat) boten. Lha menika tumusipun sareng boten dados wakil presiden griyanipun lajeng pun pasrahaken boten ngantos gantalan wedal.

T : Lajeng dampakipun Pak Harto diangkat sebagai Pejabat Presiden RI. menika kados pundi

J : Menawi nggih tentrem ngaten ta menika ? kraos rumaos remen mergi ingkang damel usreg sampun diawasi Rakyat menika ngertosipun nggih naming sampun, boten wonten tiang kok kae protes menika boten wonten.

T : Lajeng dampakipun secara ekonomis.

J : Keadaan pada waktu itu pancen sae, pancen nggih menika bedanipun, yen bab sambutan menika rakyat rak boten sami mangertos. Menika blak-blakan inggih la ngertos menika rak samenika. Pokokipun sandang kaliyan tedo mirah.

T : Yen politik kados pundi pak ?

J : Kangge gamabaran nggih dados yen sampun ketua menika ketua DPR bisao angkatan, bupatine utawa walikotane ya angkatan. Menika saget pun otak-atik, pengotak atik kula. Jebul menika dipun sengaja. Yen bupatine ki pangkate duwur tinimbang Ketua DPR, Ketua DPR rak ora wani nladung, ning nak bupatine ki wong sipil ketua DPR wani nladung. Umpamanipun mriki Pak Martana mrika Par Surjono AJ. Lha boten wani nladung wong pada tentaranane. Sedaya sampun di atur.

T : Yen hukum kados pundi pak ?

J : Sedaya bersumber pada Pak Harto, yen Pak Harto ngendika sampun boten wantena ngantos sedaya dados Fameo sudah petunjuk Pak Presiden ha sampun boten wonten ingkang wantun. Menika sedaya rak petunjuk. Rikala sampun ambruk. Meh ambruk menika sampun kraos. Harmoko kemawon dados Fameo, jungkatane kae petunjuk Presiden kok. Bu Harmoko menika rak keponakanipun Bu Tien, engkang nganeh-anehi uger badeipun wawancara menika sampun pun stel tiangipun, rakyat menika mesti kabeh puas, setuju sebab tiangipun pub damel rimiyin ... lain dengan Megawati "saya tidak milih, terserah yang diajukan Bu Mega rak boten kersa iki tak milih, saya tidak ingin sudah saya pilih (menika saking alusipun)

T : Rikala semanten demokrasi itu tidak berjalan tetapi kayaknya berjalan menika kados pundi pak ?

J : Mila dianggep disyahke, jane ora mlaku, ning da kandha wis demokrasi, ingkang kantan piambak ngantos tiang-tiang menika boten ngertos UUD 45 menika ada voting, mergi Pak Harto harus bulat la sampun setuju ? setuju pun mangka niku pun sa bala. Lajeng ingakng ngemutaken wiwit menika

Saban Sirait sesampunipun Pak Harto lengser. “cobo dilihat apa betul tidak ada voting?” Iha sakmenika malah dienggo gaman. Sewaunipun mboten sami madosi sampun percaya. Saban menika kegelong tokoh tua.

T : Rikala bade reformasi penjenengan taksih aktif boten pak ?

J : Kula sampun pensiun

T : Faktor- factor apa yang mendorong timbulnya reformamsi.

J : Kula kok kirang mangertos amargi sampun boten aktif. Kula sampun wonten mriki. Namung sajakipun kok factor ekonomi, nanging kula sampun pun anggap ahli lho. Namung rakyat menika ngertosipun inggih ngaten. Kemutan kula bahasanipu lajeng boten bahasa pemimpin “ora dadi presiden ya ora pateken” bahasa pemimpin kok seperti itu cara witipun sampun doyong. Yang ke dua apa nek sing dadi pemimpin kudu aku apa bakal luwih apik iku dudu bahasane orang tua ?

13. Nama : Wasis Siswanto  
 Tempat Tanggal lahir : Sentolo 15 Maret 1938  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Tugas/Jabatan :  
 Dalam Perjuangan : Dulu Ketua Pengurus Pemuda RK  
 Jabatan Sekarang : Pengurus Koperasi Unit Desa Tegalrejo Yogyakarta  
 Alamat : Karangwaru Lor TL. II 269 Yogyakarta  
 Wawancara :  
 Dilaksanakan Pada : 29 Oktober 2002  
 Tempat Wawancara : Rumah, Karangwaru Lor 269

### **Materi**

T : Bagaimana sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum menjelang Supersemar di Derah Istimewa Yogyakarta ?

J : Pemerintah Sukarno itu kan kondisinya masih sulit ta ? Masalah kondisi sosial pada waktu itu memang cukup rawan ya, apalagi yang menyangkut kebutuhan sehari-hari pada waktu itu kacau betul-betul sebab pada waktu itu saya tinggal di tempat yang mayoritasnya orang-orang PKI, saya tinggal merasa tidak aman. Kalau masalah budaya waktu itu kebudayaan yang kuat dikuasai oleh Lekra itu kebudayaan nasional pada waktu itu dikembangkan menjadi kebudayaan untuk media pembinaan organisasi politik itu jadi tidak ansik budaya yang muncul sebagai budaya mumi, tapi sebagai kebudayaan yang dikembangkan sebagai budaya untuk kepentingan organisasi. Sehingga pada menjelang Super Semar itu kita merasakan tidak

ada jaminan untuk arah yang pasti sehingga ya entah pemerintahan di kampung ? Itu kan terjadi pergeseran yang baru yaitu pemerintahan dulu dikuasai oleh orang-orang PKI dan diganti pada orang-orang entah itu sebagian angkatan, atau orang-orang yang masih tidak terlibat tapi kecil sekali pada waktu itu.

T : Kalau masalah hukumnya ?

J : Posisi pemerintahan yang baru (peralihan) pada waktu itu menyebabkan hukum juga tidak menentu. Lebih-lebih pada posisi pemerintahan yang peralihan itu. Hukum yang nyata tidak dapat menguasai dan tidak dapat dijadikan pedoman dan perlindungan dan harapan dari warga masyarakat. Sebab saya rasakan pada waktu itu (saya kan guru nggih)? Jadi seakan-akan pada waktu peristiwa terjadi tahun 65, 66 itu kegiatan-kegiatan masyarakat yang seakan-akan hanya didasarkan oleh lingkungan setempat, sehingga hukum tidak dapat masuk. Kebijakan-kebijakan hanya dilakukan pemerintahan-pemerintahan setempat. Saya melihat kok waktu itu sebab lingkungan saya pada waktu itu ditempati orang-orang yang mayoritas orang PKI.

T : Apa arti Orde Baru.

J : Orde Baru adalah orde pembangunan yang pada waktu itu kan hanya untuk membedakan keadaan pada waktu itu dari pemerintah Sukarno ke pemerintah Suharto nah pemerintah Sukarno pada waktu itu kan katakanlah mengutamakan pak tani dengan Nasakomnya itu dan itu memang yang oleh pemerintah Sukarno akhir-akhir didengungkan jiwaku Nasakom dan nasakom-nasakom. Kemudian itu yang tidak menjadi pedoman dari Orde Baru, karena komnya itu yang tidak disetujui karena Bung Karno sendiri rasanya dengan lantang ingin membangun poros Jakarta-Peking rak nggih ta rumiyin ? Padahal menurut Suharto pengertian sosial bukan komunis asli, maka Orde Baru adalah orde pembangunan.

T : Apa sebab tanggal 11 Maret 1966 merupakan tanggal lahirnya Orde Baru ?

J : Yaitu peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret. Entah rupanya seperti apa karena sampai sekarang masih dipertanyakan isinya walaupun ada yang melihat dan ada yang tidak seperti Pak Wiljarjo melihat katanya sampai tahun 68 orang seperti DPR kan bertanya-tanya. Saya kira sebagai tonggak saja dari Sukarno ke Suharto tapi disamping itu juga ada nilai tersendiri, bagi perjuangan Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan satu lagi saya lupa dan ini ? Ini kan juga merupakan satu tim yang mempunyai peranan pada peristiwa sejarah yang tidak dapat diabadikan begitu saja. Jadi bukan unsur. Supersemar saja karena yang

dari Jakarta menyusul ke Bogor itu juga mempunyai peranan dan ini merupakan satu hal yang orang belum pernah mempertanyakan pada orang-orang ini. Saya juga menganggap tiga orang ini juga mempunyai strategi untuk mewujudkan itu dan ini perlu dikaji ulang tidak hanya suratnya saja tetapi peranan tiga orang itu. Sebab itu mereka diperintah oleh Pak Harto atau atas inisiatif mereka sendiri.

T : Ada pendapat yang mengatakan Surat Perintah 11 Maret itu merupakan perebutan kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno.

J : Yaa itu, nilainya memang seperti itu tapi apakah itu hanya merupakan satu bagian dari kebesaran Indonesia. Sebab kemarin saya omong-omong kok Indonesia itu sejak raja-raja yang namanya perpindahan kekuasaan itu mesti ada pertumpahan darah, gejolak dan tidak mulus seperti dari jaman siapapun Ken Arok, mesti ada pergeseran yang tidak mulus isinya gejolak itu dan perjuangan-perjuangan sampai turunnya Pak Harto pun terjadi gejolak yang dirasakan oleh masyarakat, hanya satu peristiwa yang tidak mengalami gejolak yaitu penobatan *Ngarso Dalem*. Kenapa peralihan kekuasaan di Indonesia ini sejak jaman raja-raja sampai turunnya Pak Harto selalu ada gejolak dan pengorbanan. Dengan garis besarnya ya memang sebagai tonggak. Pergantian pemerintah dari Sukarno kepada Pak Harto dan semua perpindahan kekuasaan di Indonesia ini kok tidak semut, tidak lancar tidak seperti penobatan yang agung sebagai contoh dari Suharto kepada Habibie. Habibie muncul tidak ada kesannya. Kemudian Gus Dur turun, ini kan tidak ada kesan yang agung ini kan seperti itu.

T : Tanggal 14 Maret 1966 rakyat Yogyakarta menyambut gembira pembubaran PKI dengan mengadakan apel dan pawai. Mohon dijelaskan ?

J : Jadi saya merasakan memang, sepengetahuan saya dengan dibubarkannya PKI kita melakukan pawai saya kebetulan ikut pada waktu itu untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah, kami dari pemuda kampung masih didukung jiwa nasionalisme itu mengadakan pawai besar-besaran pada tanggal itu untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah, pemerintah Suharto, pemerintah yang membubarkan PKI itu. Jadi kita apel besar di Alun-alun dan menyatakan dukungan kepada pemerintah itu. Pemerintah sendiri pada waktu itu bahwa di Yogyakarta Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII kan merupakan tokoh sehingga tidak terjadi gejolak tokoh pemerintahan tetapi rakyat yang menerima informasi bahwa PKI dibubarkan merasa mendukung sekali, karena itu memang tuntutan rakyat yang saya rasakan memang luar biasalah. Rakyat itu merasa seakan-akan permintaan itu dikabulkan dan kemudian orang pesta pora, sehingga sungguh-

benar-benar tidak dapat diukur kegiatannya itu ?

- T : Waktu itu bapak tinggal di perkampungan orang-orang PKI itu tahu bagaimana reaksinya ?
- J : Dia kan sudah ketakutan dan pada waktu itu kebetulan di sebelah utara Margorejo kan untuk kantor P.M sehingga kita merasa aman karena dekat dulu kantor CGMI itu. Jadi persis di Utara Margorejo itu dulu kan disewa kantor CGMI. Sebab pada waktu peristiwa terjadi cukup ramai.
- T : Bagaimana pendapat bapak tentang munculnya kelaskaran di Yogyakarta seperti laskar Ampara Aris-Margono.
- J : Kalau itu saya tidak banyak mengikuti malahan. Tapi dengan munculnya laskar-laskar di Yogyakarta memang merupakan gerakan spontan sporadis yang kemudian mendukung ya itu tadi untuk ikut membantu kesatuan RPKD untuk menumpas PKI. Saya memang tidak terlibat di dalamnya karena memang saya guru, karena untuk meninggalkan pekerjaan guru memang tidak gampang, saya hanya melihat kesatuan-kesatuan laskar dengan cepat pemuda-pemuda membantu pemerintah khususnya RPKD yang menumpas PKI itu sehingga pada waktu itu pemuda-pemuda kampung yang dilatih RPKD selama 20 hari itu. Saya tidak ikut Karena saya tidak dapat meninggalkan pekerjaan bidang guru. Mereka dilatih sebagai tentara itu dengan senjata gelati, karena dulu yang dikagumi pemuda-pemuda kampung itu RPKD kalau main gelati, karena dulu yang dikagumi pemuda itu siang-malam berlatih, di asramakan dan itu betul-betul didorong dan dimotivasi diri sendiri untuk membela negara Indonesia tercinta ini dari lingkungan PKI itu,. Jadi mereka dibakar semangatnya dan dimotivasi untuk mempunyai jiwa patriotik dan mereka bangga sekali merasa dilatih oleh RPKD itu.
- T : Pada waktu itu PKI kan sudah ditumpas kan pak ?
- J : Yang ditumpas kan PKI nya, tapi sampai tahun 67 nguyak-uyak PKI itu masih terus dilakukan, yang pentolan-pentolan kan sampai tahun 67 yang kecekel disik kan Pemuda Rakyat sama Gerwani, tapi pentolan-pentolan itu sampai 67 awal baru kecekel. Seperti ketua CCPKI saya nggak hapal.
- T : Bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum pada masa Orde Baru
- J : Setelah Supersemar dan Pak Harto berkuasa ada siding MPRS itu kan jelas ada yang namanya trilogy pembangunan sehingga ada arahnya sehingga Pak Harto melaksanakan tugas saja.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah masa Orde Baru sampai Reformasi (Tahun 1966 - 1998) merupakan harta karun yang tidak ternilai harganya. Usaha-usaha untuk mengumpulkan, melestarikan dan selanjutnya mewariskan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa tersebut kepada generasi penerus perlu dilakukan baik itu dari sumber tertulis maupun dari sumber lisan. Kesiadaan calon pengkisah dalam rangka inventarisasi sumber lisan akan berguna bagi penelitian dan penulisan sejarah di masa yang akan datang. Dengan demikian para pelaku masa Orde Baru sampai Reformasi telah melaksanakan tugas kebudayaan. Hal ini disebabkan mereka telah mewariskan pengalaman kepada generasi berikutnya.

Sehubungan dengan itu upaya inventarisasi sumber sejarah baik itu sumber tertulis maupun sumber lisan yang menekankan pada kenangan dan pengalaman para tokoh pejuang dalam perjuangannya pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai Reformasi tahun 1998 yang tersebar di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat penting peranannya dalam proses pewarisan nilai luhur kejuangan kepada generasi penerus. Kecuali itu juga bermanfaat untuk keperluan penelitian dan penulisan sejarah masa Orde Baru sampai Reformasi. Oleh sebab itu pengalaman para tokoh Orde Baru maupun Reformasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis akan merupakan tauladan bagi generasi yang akan datang dalam melaksanakan pembangunan sekarang ini. Agar sumber sejarah lisan dan tertulis dapat dimanfaatkan secara maksimal maka perlu :

- 1). Menggalakkan penelitian sejarah lisan selagi pelaku sejarah masih hidup;
- 2). Perlu sosialisasi sumber sejarah lisan maupun tertulis di perpustakaan - perpustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwar Tuti Artha  
2000 *Yogyakarta Tempo Doeloe, Sepanjang Catatan Pariwisata*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Bambang Purwanto, dkk  
1999 *Dari Revolusi Ke Reformasi, 50 Tahun Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Baum, Willa K  
1977 *Oral History for The Local Historical Study*. American Association for State and Local History, Nashville, Tennessee.
- Boedi Dewantoro (Edt)  
2001 *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi, Visi Sosial, Ekonomi dan Budaya Legislatif - Eksekutif DIY*. Philosophy Press, Yogyakarta.
- Budi Susanto, SJ  
1993 *Peristiwa Yogya 1992, Siasat Politik Massa Rakyat Kota*. Kanisius dan Pusat Studi Realino, Yogyakarta.
- 
- 2000 *Imajinasi Penguasa Dan Identitas Postkolonial: Siasat Politik (Kethoprak) Massa Rakyat*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Darto Harnoko, dkk  
1996 *Kebangkitan Orde Baru Di Yogyakarta*. Yayasan Tunas Bangsa, Yogyakarta.

- Djoko Sukiman, dkk  
1986 *Sejarah Kota Yogyakarta*. Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.
- Gardiner Patrick  
1961 *The Nature of Historical Explanation*. Clarendon, Oxford.
- Gatut Murniatmo, dkk  
1993 *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*. Proyek Penelitian Penghayatan Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Yogyakarta.
- Harsadiningrat, KRT, dkk  
1995 *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hiro Tugiman  
1998 *Budaya Jawa dan Mundurnya Presiden Suharto*. Hiro Tugiman, Bandung.
- Ikrar Nusa Bhakti  
1999 *Jatuhnya Suharto*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta.
- Joeniarto, R  
1979 *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Aliansi, Bandung.
- Kuntowijoyo  
1994 *Metodologi Sejarah*. Jurusan Sejarah Fak. Sastra UGM dan PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Maulani, ZA  
2000 *Demokrasi Dan Pembangunan Daerah*. Pustaka Pelajar dan CRDS, Yogyakarta.

- Moeljono, dkk  
1983 *Sejarah Tentang Pengaruh Pelita Di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan DIY. Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.*
- Moesman Wirjosentono  
1982 *60 Tahun Taman Siswa. Taman Siswa, Yogyakarta.*
- Naniek Kasniyah, dkk  
1993 *Dampak Sosial Budaya Akibat Penyempitan Lahan Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek P3NB, Dekdikbud, Jakarta.*
- NN  
2001 *Materi Kursus Kesejarahan di Jakarta Tentang Sumber Sejarah (Tidak diterbitkan).*
- Panitia Peringatan  
2001 *75 Tahun Gereja St. Antonius Kotabaru: Perjalanan Menjadi Gereja Bagi Semua. Panitia Peringatan 75 Tahun Gereja St. Antonius Kotabaru, Yogyakarta.*
- Poliman, dkk  
1976/1977 *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Depdikbud, Jakarta.*
- Riswandha Imawan  
1997 *Membedah Politik Orde Baru. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Suwarno, PJ  
1994 *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 - 1974. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.*

Tashadi, H, dkk  
1995

*Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia Di Yogyakarta, Sebuah Lintasan Sejarah*. Panitia Gabungan Peringatan HUT Ke 50 Kemerdekaan RI, Bhakti Pertiwi, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Tashadi, dkk  
1997/1998

*Dinamika Sosial, Ekonomi Dan Politik Yogyakarta Periode 1957 - 1966*. Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Jakarta.

## B. ARTIKEL

Arief Budiman, "Kapanakah Kita Berhenti Memusuhi Pemuda Kita Sendiri", dalam *Harian Kompas*, 18 September 1989, Jakarta.

NN, "Ada Skenario Makro Hapus Eksistensi DIY", dalam *Harian Bernas*, Minggu 9 Agustus 1998, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, "KAMI Jogjakarta: Bubarkan Dewan Mahasiswa UGM: Pernyataan KAMI Jogjakarta", dalam *Harian Mertju Suar*, Rabu 13 April 1966, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, "Pembangunan Yogya Cenderung Mengabaikan Aspek Sejarah", dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, 11 Januari 1985, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, "Benteng Vredeburg Makin Cantik", dalam *Harian Suara Merdeka*, Minggu 11 Januari 1987, Semarang.

\_\_\_\_\_, "Deklarasi Yogya Kiat Atasi Bunuh Diri Arsitektural", dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, Senin 3 Pebruari 1992, Yogyakarta.

---

"Imam Masjid Ikut Demonstrasi", dalam *Harian Bernas*, Sabtu 2 Mei 1998, Yogyakarta.

---

"Tertib Di Yogya, Beringas Di Semarang", dalam *Harian Bernas*, Rabu 13 Mei 1998, Yogyakarta.

---

"Jakarta Mencekam, Yogya Tegang", dalam *Harian Bernas*, Kamis 14 Mei 1998, Yogyakarta.

---

"Aksi 20 Mei, Kemanunggalan Rakyat dan Mahasiswa: Lapar, Haus, Tinggal Makan, Minum Gratis", dalam *Harian Bernas*, Kamis 21 Mei 1998, Yogyakarta.

---

"Aktivitas Ekonomi Kota Yogya Mandek", dalam *Harian Bernas*, Kamis 21 Mei 1998, Yogyakarta.

---

"Pelajar Duduki Monumen SO 1 Maret: Masyarakat Antusias Sambut Long March Mahasiswa", dalam *Harian Bernas*, Kamis 21 Mei 1998, Yogyakarta.

---

"Sultan HB X Ajak Rakyat Dukung Reformasi", dalam *Harian Kompas*, 21 Mei 1998, Jakarta.

---

"Penghapusan Istimewa Bertentangan Dengan UUD 1945", dalam *Harian Bernas*, Senin 10 Agustus 1998, Yogyakarta.

---

"Seoharto Selalu Berupaya Hapus Istimewa DIY", dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, Kamis 20 Agustus 1998, Yogyakarta.

---

"Depdagri Tolak Usul DPRD DIY", dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, Rabu 26 Agustus 1998, Yogyakarta.

- 
- "Hari Ini Warga Yogyakarta Sampaikan  
Maklumat Rakyat", dalam *Harian Kompas*, Rabu  
26 Agustus 1998, Jakarta.
- 
- "DIY Dipermainkan Anak Durhaka", dalam  
*Harian Bernas*, Sabtu 26 September 1998,  
Yogyakarta.
- 
- "Sultan HB X Kekuatan Populisnya", dalam  
*Harian Bernas*, Sabtu 3 Oktober 1998,  
Yogyakarta.
- Soegijono, "Kotamadya Yogyakarta 40 Tahun", dalam  
*Harian Kedaulatan Rakyat*, 6 Juni 1987,  
Yogyakarta
- Suwarno, PJ, "Sengketa Keistimewaan Yogyakarta", dalam  
*Harian Bernas*, Selasa 11 Agustus 1998,  
Yogyakarta.
- Wagub DIY Paku Alam VIII,  
"Kerukunan Antar Umat Beragama Di DIY Baik  
Sekali", dalam *Harian Bernas*, 1 April 1987,  
Yogyakarta



## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Felix Yoseph Basuki  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Desember 1928  
Jabatan dahulu : - Ketua Partai Katolik Yogyakarta  
- Anggota DPRD Tingkat I, Fraksi PDI  
Jabatan sekarang : Anggota Dewan Pertimbangan Partai Katolik Demokrat DIY  
Alamat : Jalan Gajah 50 Tahunan Yogyakarta
2. Nama : Simon Parjan  
Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 31 Maret 1930  
Jabatan dahulu : - Tentara Pelajar  
- Anggota DPRD Tingkat II Kodya Yogyakarta  
Jabatan sekarang : Pensiunan  
Alamat : Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul
3. Nama : Prof.Dr. Djoko Soekiman  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 23 September 1931  
Jabatan dahulu : - Ketua Jurusan Arkeologi  
- Dekan Fakultas Sastra Dan Kebudayaan UGM  
- Kepala Museum Sono Budoyo Yogyakarta  
Jabatan sekarang : Dosen Fak. Ilmu Budaya UGM  
Alamat : Sekip N 31 Sleman Yogyakarta
4. Nama : Drs. G. Mudjanto, MA  
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 7 Juni 1938  
Jabatan dahulu : Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan  
Jabatan sekarang : Dosen Universitas Sanata Dharma  
Alamat : Buasasran DN III/606 Yogyakarta
5. Nama : Drs. Markus Sumantri, M.Sc  
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 27 April 1938  
Jabatan dahulu : - Guru SMA BOPKRI II Yogyakarta  
- Sekretaris DPC Parkindo Kodya Yogyakarta  
- Pengurus DPD PDI Prop. DIY  
- Anggota DPRDGR Tingkat II Yogyakarta, wakil dari Parkindo

- Jabatan sekarang : - Anggota DPRD Tingkat I Prop. DIY wakil dari PDI  
 : - Pensiunan  
 : - Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia
- Alamat : Sopen GK I/360 Yogyakarta
6. Nama : Wasis Siswanto  
 Tempat/tanggal lahir : Sentolo, 15 Maret 1938  
 Jabatan dahulu : Ketua Pengurus Pemuda RK  
 Jabatan sekarang : Pengurus KUD Tegalrejo Yogyakarta  
 Alamat : Karangwaru Lor TL II/269 Yogya
7. Nama : Drs. Herman Joseph Wibowo  
 Tempat/tanggal lahir : Purwokerto, 19 Nopember 1940  
 Jabatan dahulu : Ketua Pemuda Katolik Anak Cabang Jetis Yogyakarta  
 Jabatan sekarang : Peneliti Madya pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta  
 Alamat : Jalan Halmahera F.163 Perum Nogotirto II Yogyakarta
8. Nama : dr. Sutomo Parastho  
 Tempat/tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1943  
 Jabatan dahulu : - Pengurus HMI Komisariat Fak. Kedokteran UGM  
 : - Pengurus SEMI  
 : - Pengurus KAMI Konsulat Yogya  
 Jabatan sekarang : - Direktur Utama/Komisaris PT. Radio Arma Sebelas  
 : - Pemimpin Yayasan Tunas Bangsa  
 Alamat : Jalan Gondosuli, Gang Lembayung GK.IV/173 Yogyakarta
9. Nama : Mohammad Suhud, SH  
 Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 16 Maret 1945  
 Jabatan dahulu : - Anggota Seksi I Gemuis  
 : - Pendiri Gemuis Kampung Ngadisuryan  
 Jabatan sekarang : - Ketua Yayasan Korban Keganasan Komunis  
 : - Sekretaris Yayasan Front Anti Komunis  
 Alamat : Ngadisuryan Yogyakarta

10. Nama : Y. Sugito Suwartono, SE  
 Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 10 Agustus 1945  
 Jabatan dahulu : - Pengurus Partai Kristen Indonesia Prop. DIY  
 - Pengurus PDI Kabupaten Sleman  
 - Anggota DPRD Tingkat II Kab. Sleman, wakil PDI  
 Jabatan sekarang : - Pensiunan Lembaga Pembinaan dan Pengkaderan  
 Sinode Gereja -Gereja Kristen Indonesia DIY  
 dan Jawa Tengah  
 - Lurah Desa Giri Asih, Kecamatan Purwosari Kab.  
 Gunungkidul  
 Alamat : Jalan Puntodewo 150 Banguntapan Bantul
11. Nama : Ny. Tuti Lukman Sutrisno  
 Tempat/tanggal lahir : Solo, 28 Desember 1946  
 Jabatan dahulu : Mahasiswa  
 Jabatan sekarang : - Ketua Yayasan Hari Ibu  
 - Wakil Ketua Dharma Wanita UGM  
 - Ketua Persatuan Wanita Gadjah Mada  
 - Aktif di Yayasan Kanker  
 - Aktifis Gender dan Pembangunan  
 Alamat : Terbansari, Jl. C.Simanjuntak 65V
12. Nama : Bambang Subagyo, S.Th  
 Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Juli 1949  
 Jabatan dahulu : -  
 Jabatan sekarang : - Pendeta GKJ Ambarukmo  
 - Pengurus Forum Persaudaraan Umat Beriman  
 (FPUB)  
 Alamat : Gang Kamboja 96, Karangbendo Banguntapan  
 Bantul
13. Nama : Drs. H. A Adaby Darban, SU  
 Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 25 Pebruari 1950  
 Jabatan dahulu : - Ketua Jurusan Sejarah  
 - Pembantu Dekan III Fak. Sastra UGM  
 - Ketua Program Kearsipan  
 Jabatan sekarang : Ketua Jurusan Sejarah  
 Alamat : Kauman GM I/35 Yogyakarta

Perpus  
Jend



Dicetak Oleh :  
**CV. FISCA SARI**  
Telp. (0274) 561750